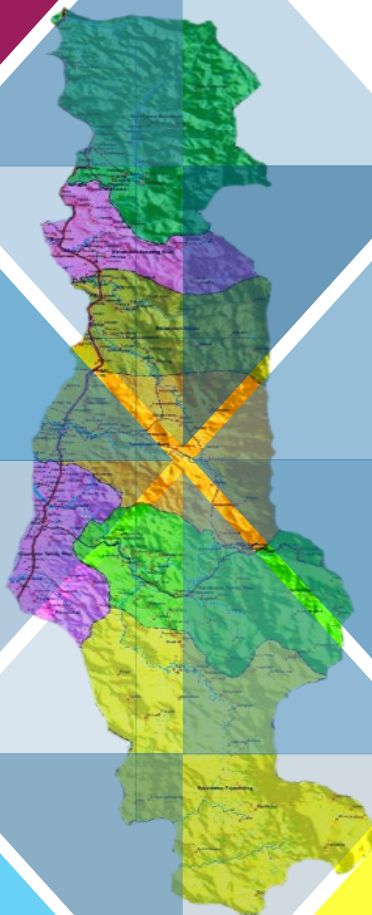




RKPD



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARRU
TAHUN 2022**





BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2000-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standart Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Mutu Pelayanan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 merupakan rencana pembangunan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi acuan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 disusun dengan maksud yakni :
 - a. Sebagai Pedoman/Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);
 - b. sebagai instrument untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - c. sebagai pedoman oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 bertujuan adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Dokumen RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) Dokumen RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Rancangan akhir RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 kepada gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat gubernur melalui kepala Bappeda provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.
- (5) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (6) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 28 Juni 2021

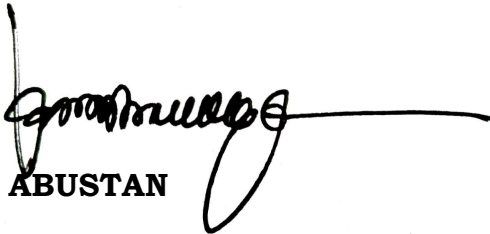
BUPATI BARRU,



Diundangkan di Barru

Pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 22

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERATURAN BUPATI

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xxiv

DAFTAR GRAFIK xxv

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-5

1.4 Maksud dan Tujuan I-6

1.5 Sistematika Dokumen RKPD..... I-6

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... II-1

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-37

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-69

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-165

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-183

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-460

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan
dengan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah II-460

2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah..... II-462

**BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH III-1**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi III-1

3.2 Gambaran Kondisi Ekonomi III-4

3.3 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah III-19

3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-20

3.5 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-49

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 IV-8

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2022	V-1
5.2 Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022	V-2
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
DAERAH	VI-1
BAB VII. PENUTUP	VII-1
7.1 Kaidah Pelaksanaan	VII-1
7.2 Kesimpulan	VII-2

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas wilayah administrative kecamatan dan kelurahan/ desa Kabupaten Barru	II-2
Tabel 2.2	Keadaan wilayah berdasarkan ketinggian di atas Permukaan laut	II-3
Table 2.3	Keadaan wilayah berdasarkan kemiringan	II-4
Tabel 2.4	Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan	II-7
Tabel 2.5	Jenis Tanah Kabupaten Barru	II-8
Tabel 2.6	Sungai mengalir menurut Lokasi Kabupaten Barru	II-9
Tabel 2.7	Ketersediaan dan Kebutuhan air Kabupaten Barru	II-9
Tabel 2.8	Status daya dukung air di Kabupaten Barru	II-11
Tabel 2.9	Jumlah Hari Hujan Dan Curah Hujan Kabupaten Barru	II-11
Tabel 2.10	Jumlah Hari Hujan Dan Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Barru	II-12
Tabel 2.11	Luas Arahkan Kawasan Budidaya Kabupaten Barru	II-12
Tabel 2.12	Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan	II-13
Tabel 2.13	Tingkat Bencana di Kabupaten Barru	II-25
Tabel 2.14	Total Kecenderungan kejadian bencana di Kab. Barru ..	II-25
Tabel 2.15	Lokasi potensi kawasan relokasi bencana Kab. Barru ..	II-26
Tabel 2.16	Distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir	II-28
Tabel 2.17	Distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor	II-30
Tabel 2.18	Distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran	II-33
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Menurut kecamatan	II-33
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Barru	II-34
Tabel 2.21	Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Barru	II-35
Tabel 2.22	Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Barru	II-35
Tabel 2.23	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Barru	II-36
Tabel 2.24	Rasio ketergantungan Kabupaten Barru	II-36

Tabel 2.25	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Barru	II-37
Tabel 2.26	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru	II-38
Tabel 2.27	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Barru	II-39
Tabel 2.28	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Barru Menurut Lapangan Usaha	II-40
Tabel 2.29	Perbandingan PDRB atas harga konstan (ADHK) Dan harga berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan Wilayah sekitar	II-41
Tabel 2.30	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barru	II-44
Tabel 2.31	Kontribusi sektor usaha terhadap PDRB Kab. Barru	II-45
Tabel 2.32	Perbandingan inflasi Kabupaten/ Kota di Prov. Sulsel	II-47
Tabel 2.33	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barru dengan Wilayah sekitar	II-49
Tabel 2.34	Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Barru	II-50
Tabel 2.35	Penentuan nilai selang kelas hirarki untuk analisis scalogram	II-51
Tabel 2.36	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Barru	II-54
Tabel 2.37	Perbandingan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Barru dengan wilayah sekitarnya	II-55
Tabel 2.38	Persentase PAD terhadap pendapatan Kab. Barru	II-56
Tabel 2.39	Angka IPM dan Indikator pendukungnya di Kab. Barru.	II-59
Tabel 2.40	Perbandingan Angka harapan hidup Kabupaten Barru dengan wilayah sekitarnya	II-60
Tabel 2.41	Perbandingan Angka harapan lama sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitarnya	II-61
Tabel 2.42	Perbandingan Angka rata – rata lama sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitarnya	II-61

Tabel 2.43	Perbandingan paritas daya beli Kabupaten Barru dengan wilayah sekitarnya	II-62
Tabel 2.44	Tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Barru	II-63
Tabel 2.45	Perbandingan Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar.....	II-64
Tabel 2.46	Perbandingan Tingkat pengangguran terbuka Kab. Barru dengan wilayah sekitar	II-65
Tabel 2.47	Indeks Pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender Kabupaten Barru	II-67
Tabel 2.48	Komponen penilaian Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Barru	II-68
Tabel 2.49	Komponen penilaian Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Barru	II-69
Tabel 2.50	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Barru	II-69
Tabel 2.51	Pendidikan anak usia dini (PAUD) Kab. Barru	II-69
Tabel 2.52	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Barru	II-70
Tabel 2.53	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Barru	II-70
Tabel 2.54	Angka Partisipasi Sekolah Dasar (SD)	II-71
Tabel 2.55	Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Barru	II-72
Tabel 2.56	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	II-72
Tabel 2.57	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	II-73
Tabel 2.58	Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik di Kabupaten Barru	II-73
Tabel 2.59	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Barru	II-74
Tabel 2.60	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar	II-75
Tabel 2.61	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf di Kabupaten Barru	II-75
Tabel 2.62	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kab. Barru	II-75
Tabel 2.63	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Barru	II-76
Tabel 2.64	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Barru	II-76
Tabel 2.65	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Barru	II-77

Tabel 2.66	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Barru	II-77
Tabel 2.67	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Barru	II-78
Tabel 2.68	Rasio Dokter per satuan penduduk Kabupaten Barru..	II-78
Tabel 2.69	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Kabupaten Barru	II-78
Tabel 2.70	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kabupaten Barru	II-79
Tabel 2.71	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Barru.	II-79
Tabel 2.72	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kabupaten Barru	II-80
Tabel 2.73	Tingkat Prevalensi Stunting Kabupaten Barru	II-80
Tabel 2.74	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kabupaten Barru	II-81
Tabel 2.75	Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Barru	II-81
Tabel 2.76	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru ...	II-82
Tabel 2.77	Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru	II-82
Tabel 2.78	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Kabupaten Barru.....	II-83
Tabel 2.79	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Barru	II-83
Tabel 2.80	Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Kabupaten Barru	II-83
Tabel 2.81	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan Setingkat Kabupaten Barru	II-84
Tabel 2.82	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Baik Kabupaten Barru	II-84
Tabel 2.83	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Barru	II-85
Tabel 2.84	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Barru	II-85
Tabel 2.85	Persentase Jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kabupaten Barru	II-86
Tabel 2.86	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kab. Barru	II-86
Tabel 2.87	Persentase Drainase dalam kondisi Baik Kab. Barru	II-97
Tabel 2.88	Luas Irigasi Dalam kondisi Baik Kabupaten Barru	II-88

Tabel 2.89	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Barru	II-88
Tabel 2.90	Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Barru	II-89
Tabel 2.91	Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Barru	II-90
Tabel 2.92	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Barru	II-90
Tabel 2.93	Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Barru	II-91
Tabel 2.94	Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Barru	II-92
Tabel 2.95	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Barru	II-92
Tabel 2.96	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Kabupaten Barru	II-93
Tabel 2.97	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab. Barru	II-93
Tabel 2.98	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Barru	II-94
Tabel 2.99	Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Barru	II-95
Tabel 2.100	PMKS yang memperoleh bantuan sosial Kabupaten Barru	II-95
Tabel 2.101	Persentase PMKS yang tertangani Kab. Barru	II-96
Tabel 2.102	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Kabupaten Barru	II-97
Tabel 2.103	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Kerjasama di Kabupaten Barru	II-97
Tabel 2.104	Pencari Kerja Yang Ditempatkan Kabupaten Barru	II-98
Tabel 2.105	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Kabupaten Barru	II-98
Tabel 2.106	Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	II-99
Tabel 2.107	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Barru	II-100
Tabel 2.108	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Barru	II-100
Tabel 2.109	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru	II-101
Tabel 2.110	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Barru	II-102

Tabel 2.111	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Barru	II-102
Tabel 2.112	Rasio KDRT Kabupaten Barru	II-103
Tabel 2.113	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang Mendapatkan penanganan pengaduan di Kab. Barru ...	II-103
Tabel 2.114	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang Mendapatkan layanan kesehatan di Kab. Barru	II-104
Tabel 2.115	Cakupan layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan Dan anak korban kekerasan di Kab. Barru	II-104
Tabel 2.116	Cakupan penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kab. Barru	II-105
Tabel 2.117	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum di Kab. Barru	II-105
Tabel 2.118	Cakupan layanan pemulungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kab. Barru	II-105
Tabel 2.119	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kab. Barru	II-106
Tabel 2.120	Ketersediaan pangan utama Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Kabupaten Barru	II-106
Tabel 2.121	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	II-107
Tabel 2.122	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Barru	II-107
Tabel 2.123	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Kabupaten Barru	II-108
Tabel 2.124	Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Barru.....	II-108
Tabel 2.125	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH Kab. Barru	II-110
Tabel 2.126	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kabupaten Barru	II-111
Tabel 2.127	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Kabupaten Barru	II-111
Tabel 2.128	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan di Kabupaten Barru	II-111
Tabel 2.129	Timbulan sampah yang ditangani Kabupaten Barru	II-112
Tabel 2.130	Persentase jumlah sampah yang berkurang Melalui 3R di Kabupaten Barru	II-112

Tabel 2.131	Jumlah sampah yang tertangani Kabupaten Barru	II-112
Tabel 2.132	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Barru...	II-113
Tabel 2.133	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Kabupaten Barru	II-113
Tabel 2.134	Rasio bayi berakte kelahiran Kabupaten Barru	II-114
Tabel 2.135	Rasio penduduk berakte kelahiran Kab. Barru	II-114
Tabel 2.136	Rasio pasangan berakte Nikah di Kabupaten Barru	II-114
Tabel 2.137	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kabupaten Barru	II-115
Tabel 2.138	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru	II-115
Tabel 2.139	Cakupan penerbitan akte kelahiran Kabupaten Barru...	II-116
Tabel 2.140	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Kabupaten Barru	II-116
Tabel 2.141	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kabupaten Barru	II-117
Tabel 2.142	Jumlah kelompok binaan PKK Kabupaten Barru	II-117
Tabel 2.143	Jumlah LSM aktif Kabupaten Barru	II-117
Tabel 2.144	LPM Berprestasi Kabupaten Barru	II-118
Tabel 2.145	Persentase PKK Aktif Kabupaten Barru	II-118
Tabel 2.146	Posyandu Aktif Kabupaten Barru	II-118
Tabel 2.147	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Kabupaten Barru	II-119
Tabel 2.148	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru	II-119
Tabel 2.149	Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Barru	II-119
Tabel 2.150	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan melalui kampung KB Kab. Barru	II-120
Tabel 2.151	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk di Kabupaten Barru	II-120
Tabel 2.152	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal Kabupaten Barru	II-120
Tabel 2.153	Rasio Akseptor KB Kabupaten Barru	II-121
Tabel 2.154	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15–49 Kabupaten Barru	II-121

Tabel 2.155	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya Dibawah 20 tahun Kabupaten Barru	II-122
Tabel 2.156	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) Kabupaten Barru	II-122
Tabel 2.157	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Barru	II-123
Tabel 2.158	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Barru	II-123
Tabel 2.159	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Barru	II-123
Tabel 2.160	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Barru	II-124
Tabel 2.161	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Barru	II-124
Tabel 2.162	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan Kabupaten Barru	II-124
Tabel 2.163	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Barru	II-125
Tabel 2.164	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah	II-125
Tabel 2.165	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Barru	II-126
Tabel 2.166	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Kabupaten Barru	II-126
Tabel 2.167	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Kabupaten Barru	II-126
Tabel 2.168	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS Kab. Barru ...	II-127
Tabel 2.169	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap desa Kabupaten Barru	II-127
Tabel 2.170	Cakupan kelompok kegiatan melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kabupaten Barru ...	II-128
Tabel 2.171	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Barru	II-128
Tabel 2.172	Jumlah Uji Kir dan persentase kepemilikan Kir Kabupaten Barru	II-129

Tabel 2.173	Rasio Ijin Trayek Kabupaten Barru	II-129
Tabel 2.174	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis Kab. Barru	II-130
Tabel 2.175	Persentase layanan Angkutan Darat Kab. Barru	II-130
Tabel 2.176	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Barru	II-131
Tabel 2.177	Jumlah Orang/Barang yang melalui Dermaga/ Terminal Kabupaten Barru	II-131
Tabel 2.178	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Barru	II-132
Tabel 2.179	Persentase UKM non BPR/LKM Kabupaten Barru	II-132
Tabel 2.180	Persentase BPR/LKM aktif Kabupaten Barru	II-133
Tabel 2.181	Persentase Usaha Mikro, Kecil & Menengah Kab. Barru	II-133
Tabel 2.182	Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Barru	II-134
Tabel 2.183	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Barru	II-134
Tabel 2.184	Rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Barru	II-135
Tabel 2.185	Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN Kabupaten Barru	II-135
Tabel 2.186	Persentase Organisasi Pemuda Kabupaten Barru	II-136
Tabel 2.187	Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Barru	II-136
Tabel 2.188	Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Barru	II-137
Tabel 2.189	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Kabupaten Barru ..	II-137
Tabel 2.190	Cakupan pembinaan atlet muda Kabupaten Barru	II-137
Tabel 2.191	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Barru	II-138
Tabel 2.192	Jumlah prestasi cabang olahraga Kabupaten Barru ...	II-138
Tabel 2.193	Buku "kabupaten dalam angka" dan Buku "PDRB kabupaten" Kabupaten Barru	II-139
Tabel 2.194	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi di Kabupaten Barru	II-139
Tabel 2.195	Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kab.Barru ...	II-139
Tabel 2.196	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kabupaten Barru	II-140
Tabel 2.197	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Kabupaten Barru	II-140
Tabel 2.198	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Kabupaten Barru	II-141
Tabel 2.199	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Barru ...	II-141
Tabel 2.200	Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Barru	II-142

Tabel 2.201	Rasio perpustakaan persatuan penduduk Kabupaten Barru	II-142
Tabel 2.202	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan Kab.Barru	II-142
Tabel 2.203	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki Sertifikat di Kabupaten Barru	II-143
Tabel 2.204	Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku di Kabupaten Barru	II-143
Tabel 2.205	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kab. Barru ...	II-143
Tabel 2.206	Kunjungan wisata Kabupaten Barru	II-144
Tabel 2.207	PAD sektor pariwisata Kabupaten Barru	II-144
Tabel 2.208	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kabupaten Barru	II-145
Tabel 2.209	Cakupan bina kelompok petani Kabupaten Barru	II-146
Tabel 2.210	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Barru	II-146
Tabel 2.211	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kabupaten Barru	II-146
Tabel 2.212	Cakupan bina kelompok pengrajin Kabupaten Barru ...	II-147
Tabel 2.213	Pertumbuhan Industri Kabupaten Barru	II-147
Tabel 2.214	Produksi Perikanan Kabupaten Barru	II-147
Tabel 2.215	Konsumsi Ikan Kabupaten Barru	II-148
Tabel 2.216	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Barru	II-148
Tabel 2.217	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Barru	II-149
Tabel 2.218	Tersediannya Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada Kabupaten Barru	II-149
Tabel 2.219	Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Barru	II-150
Tabel 2.220	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Barru	II-151
Tabel 2.221	Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Barru	II-152
Tabel 2.222	Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Barru.....	II-153
Tabel 2.223	Persentase belanja pendidikan(20%) Kabupaten Barru..	II-153
Tabel 2.224	Persentase belanja kesehatan(10%) Kabupaten Barru...	II-153
Tabel 2.225	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Kabupaten Barru	II-157
Tabel 2.226	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Kabupaten Barru.	II-154
Tabel 2.227	Penetapan APBD Kabupaten Barru	II-155

Tabel 2.228	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Barru	II-155
Tabel 2.229	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Barru	II-155
Tabel 2.230	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kabupaten Barru	II-156
Tabel 2.231	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu di Kabupaten Barru	II-156
Tabel 2.232	Persentase implementasi rencana kelitbangan Kabupaten Barru	II-157
Tabel 2.233	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Kab. Barru .	II-157
Tabel 2.234	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Kabupaten Barru	II-158
Tabel 2.235	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan inovasi daerah Kab. Barru	II-158
Tabel 2.236	Daftar inovasi daerah Kabupaten Barru.....	II-158
Tabel 2.237	Persentase tindak lanjut temuan Kabupaten Barru	II-163
Tabel 2.238	Persentase pelanggaran pegawai Kabupaten Barru	II-164
Tabel 2.239	Jumlah temuan BPK Kabupaten Barru	II-164
Tabel 2.240	Tersedianya Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Barru	II-164
Tabel 2.241	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Barru	II-165
Tabel 2.242	Jenis dan jumlah Bank Kabupaten Barru	II-165
Tabel 2.243	Jumlah hotel dan restoran/rumah makan Kab. Barru..	II-166
Tabel 2.244	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Kabupaten Barru	II-166
Tabel 2.245	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon Kabupaten Barru	II-167
Tabel 2.246	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat Kabupaten Barru	II-167
Tabel 2.247	Cakupan layanan telekomunikasi Kabupaten Barru	II-167
Tabel 2.248	Proporsi rumah tangga dengan akses internet dan yang Memiliki Komputer Kabupaten Barru	II-167
Tabel 2.249	Lama proses perizinan Kabupaten Barru	II-168

Tabel 2.250	Jumlah kasus unjuk rasa Kabupaten Barru	II-168
Tabel 2.251	Jumlah dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Barru	II-169
Tabel 2.252	Jumlah PERDA yang mendukung iklim usaha Kab. Barru	II-169
Tabel 2.253	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Kabupaten Barru	II-170
Tabel 2.254	Angka kriminalitas yang tertangani Kabupaten Barru ..	II-170
Tabel 2.255	Review Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2020	II-171
Tabel 2.256	Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Barru	II-176
Tabel 3.1	Target Indikator Makro Kabupaten Barru	III-3
Tabel 3.2	Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	III-5
Tabel 3.3	Perkembangan Konsumsi RT & Investasi Terhadap PDB	III-7
Tabel 3.4	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Konstan (ADHK) Tahun 2016 – 2020	III-11
Tabel 3.5	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016 – 2020	III-12
Tabel 3.6	Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan Tahun 2016 – 2020	III-13
Tabel 3.7	Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020	III-14
Tabel 3.8	Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 -2020	III-16
Tabel 3.9	Tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Barru Tahun 2019-2020	III-19
Tabel 3.10	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Barru ...	III-23
Tabel 3.11	Proyeksi Belanja Daerah Kab. Barru Tahun 2021-2026	III-28
Tabel 3.12	Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja Terhadap Urusan Wajib Mendasarkan Pada SPM Tahun 2022	III-29
Tabel 3.13	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	III-31
Tabel 3.14	Proyeksi Pagu Belanja Daerah Tahun 2022	III-38
Tabel 3.15	Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Terhadap Tujuan SPB/ SDGs Tahun 2022	III-41

Tabel 3.16	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kab. Barru	III-48
Tabel 3.17	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	III-49
Tabel 3.18	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kab. Barru	III-50
Tabel 4.1	Penjelasan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021 – 2026	IV-2
Tabel 4.2	Penjelasan Perumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021 – 2026	IV-3
Tabel 4.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2022	IV-5
Tabel 4.4	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022 Kabupaten Barru	IV-8
Tabel 4.5	Tema Pembangunan Tahun 2022	IV-11
Tabel 4.6	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional	IV-12
Tabel 4.7	Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	IV-18
Tabel 4.8	Prioritas Pembangunan yang mendukung atau terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..	IV-20
Tabel 4.9	Penjabaran Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan Tahun 2022, Program Prioritas, indikator dan Perangkat Daerah/Lembaga Penanggung jawab	IV-25
Tabel 4.10	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, issue strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022	IV-32
Tabel 4.11	Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kab. Barru dengan Prioritas Prov. Sulawesi Selatan, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 ..	IV-33
Tabel 4.12	Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022	IV-34
Tabel 4.12	KeselaDukungan Pemerintah Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2022	IV-35
Tabel 5.1	Rincian Pendanaan Kabupaten Barru Tahun 2022	V-1
Tabel 5.2	Prioritas & Program Pembangunan Daerah Tahun 2022	V-3
Tabel 5.3	Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kab. Barru	V-8

Tabel 6.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru Tahun 2021-2022.....	VI-2
Tabel 6.2	Kondisi Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020, 2021 dan Target Tahun 2022 Kabupaten Barru	VI-3
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja SPM Kabupaten Barru	VI-18
Tabel 6.4	Penetapan Indikator Kinerja SDG's Kabupaten Barru ...	VI-19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan RKPD I-2

Gambar 1.2 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran I-5

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Barru II-1

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Barru II-4

Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barru II-5

Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Barru II-6

Gambar 2.5 Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Barru II-7

Gambar 2.6 Peta status daya dukung penyediaan air Kab. Barru .. II-10

Gambar 2.7 Peta pengembangan kawasan strategis Kab. Barru II-18

Gambar 2.8 Dokumentasi kejadian bencana alam di Kab. Barru ... II-26

Gambar 2.9 Peta kinerja ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir Kabupaten Barru II-29

Gambar 2.10 Peta kinerja ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor Kabupaten Barru II-31

Gambar 2.11 Peta kinerja ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran Kab. Barru II-32

Gambar 2.12 Peta hasil skalogram Kabupaten Barru II-52

Gambar 3.1 Dampak Covid 19 terhadap Sektor – sektor Ekonomi .. III-3

Gambar 3.2 Dampak Covid 19 terhadap Permintaan & Penawaran III-4

Gambar 4.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) IV-12

Gambar 4.2 Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2022 IV-13

Gambar 4.3 Prioritas Nasional Tahun 2022 IV-14

DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1	Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional	II-42
Grafik	2.2	Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru.....	II-43
Grafik	2.3	PDRB perkapita ADHB Kabupaten Barru	II-46
Grafik	2.4	Perbandingan PDRB perkapita ADHB Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar	II-46
Grafik	2.5	Hubungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi	II-48
Grafik	2.6	Gini rasio Nasional, Propinsi Sulsel dan Kab. Barru....	II-48
Grafik	2.7	Hubungan Indeks Gini dengan Pertumbuhan Ekonomi	II-49
Grafik	2.8	Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru	II-54
Grafik	2.9	Perbandingan Persentase penduduk miskin Kabupaten Barru dengan capaian propinsi Sulsel dan Nasional ...	II-55
Grafik	2.10	Perbandingan perunahan persentase penduduk miskin dengan pertumbuhan ekonomi	II-56
Grafik	2.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Barru	II-57
Grafik	2.12	Perbandingan IPM dengan capaian Provinsi Sulsel dan capaian Nasional	II-57
Grafik	2.13	Perbandingan IPM Kab. Barru dengan wilayah sekitar.	II-58
Grafik	2.14	Perbandingan angka harapan hidup Kab. Barru dengan capaian provinsi Sulsel dan Nasional.....	II-59
Grafik	2.15	Perbandingan angka harapan lama sekolah Kab. Barru dengan capaian provinsi Sulsel dan Nasional	II-60
Grafik	2.16	Perbandingan rata - rata lama sekolah Kab. Barru dengan capaian provinsi Sulsel dan Nasional	II-61
Grafik	2.17	Perbandingan paritas daya beli Kabupaten Barru dengan capaian provinsi Sulsel dan capaian Nasional	II-62
Grafik	2.18	Perbandingan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Barru dengan capaian provinsi Sulsel dan capaian Nasional	II-64

Grafik	2.19	Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kab. Barru dengan capaian provinsi Sulsel dan Nasional	II-65
Grafik	2.20	Perbandingan tingkat pengangguran terbuka dengan pertumbuhan ekonomi	II-66
Grafik	3.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	III-4
Grafik	3.2	Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran	III-6
Grafik	3.3	Perkembangan Konsumsi RT dan Investasi	III-7
Grafik	3.4	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Keseluruhan Tahun	III-9
Grafik	3.5	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan	III-9
Grafik	3.6	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan	III-15
Grafik	3.7	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Dan Harga Konstan Kab. Barru Tahun 2016–2020	III-17
Grafik	3.8	Gini Ratio Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Barru Tahun 2016–2020	III-18
Grafik	3.9	Tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2019–2020..	III-19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BARRU NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BARRU TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 5 Ayat (3) menyebutkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 263 menyebutkan dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

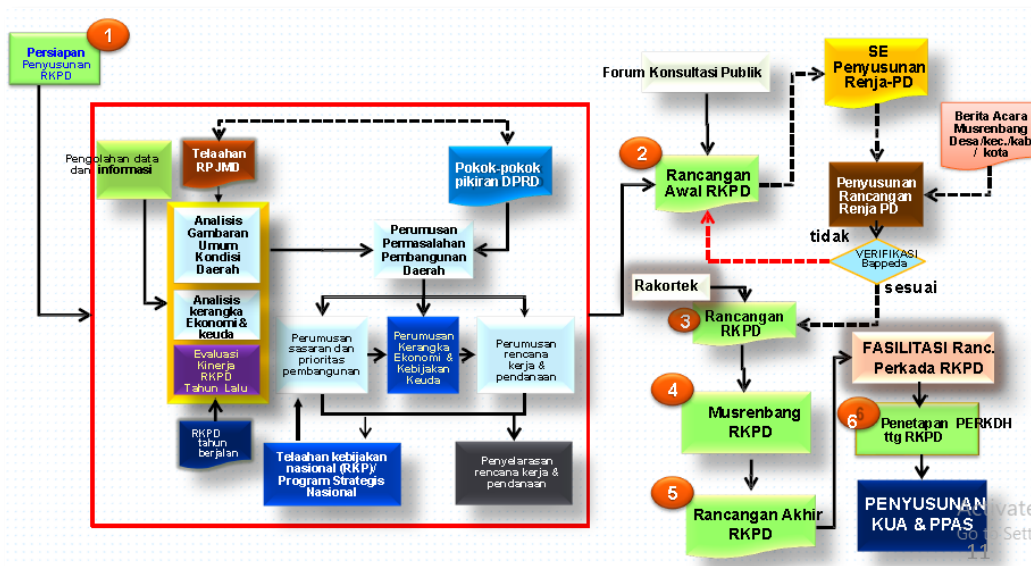
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud implementasi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

Dokumen RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 16 dengan Tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Alur Penyusunan RKPD sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rincian tahapan penyusunan RKPD dimulai dengan tahapan persiapan yang meliputi pembentukan tim, Orientasi, penyusunan agenda dan penyiapan data informasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya masuk ke tahapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 penggalan ke IV (ke-empat) dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, sehingga dalam penyusunan RKPD tahun 2022 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan berpedoman pada RKP Tahun 2022, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Proses penyusunan RKPD sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan pembangunan daerah. *Pertama*, Pendekatan Teknokratis, yaitu pendekatan menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. *Kedua*, Pendekatan Partisipatif, yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Ketiga*, Pendekatan Politis, yaitu penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih kedalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan *keempat*, yaitu pendekatan “*bottom-up*” dan “*top-down*” dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Musyawarah Nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Seluruh dokumen perencanaan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mempengaruhi pelaksanaan perencanaan. Berdasarkan kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mengarahkan Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah sehingga dibutuhkan prioritas anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 16);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 8);

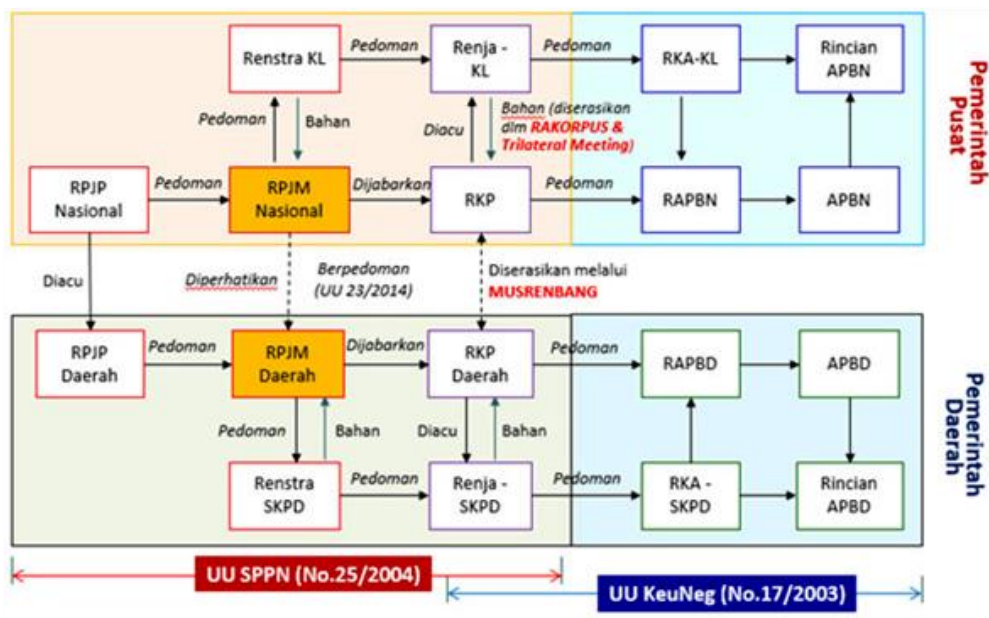
1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dengan keselarasan dan sinergitas antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintahan, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 juga berpedoman pada RKP Tahun 2022, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022. Untuk menjamin keselarasan RKPD dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022. Hubungan antar dokumen sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 1.2

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
3. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan kabupaten/kota; dan
4. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tujuan dari RKPD Kabupaten Barru:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2022;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Barru

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022, disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran C.3 Penyajian Dokumen RKPD dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan pembangunan daerah. Pada Bab ini menjelaskan dasar-dasar analisis dan hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta memperhatikan dokumen RPJMD tahun 2021-2026 dan dokumen RKPD tahun 2021 sebagai bahan acuan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Bab ini memberikan gambaran tentang kondisi pengembangan wilayah Kabupaten Barru, arah pengembangan wilayah Kabupaten Barru dan sasaran pembangunan Wilayah Kabupaten Barru.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

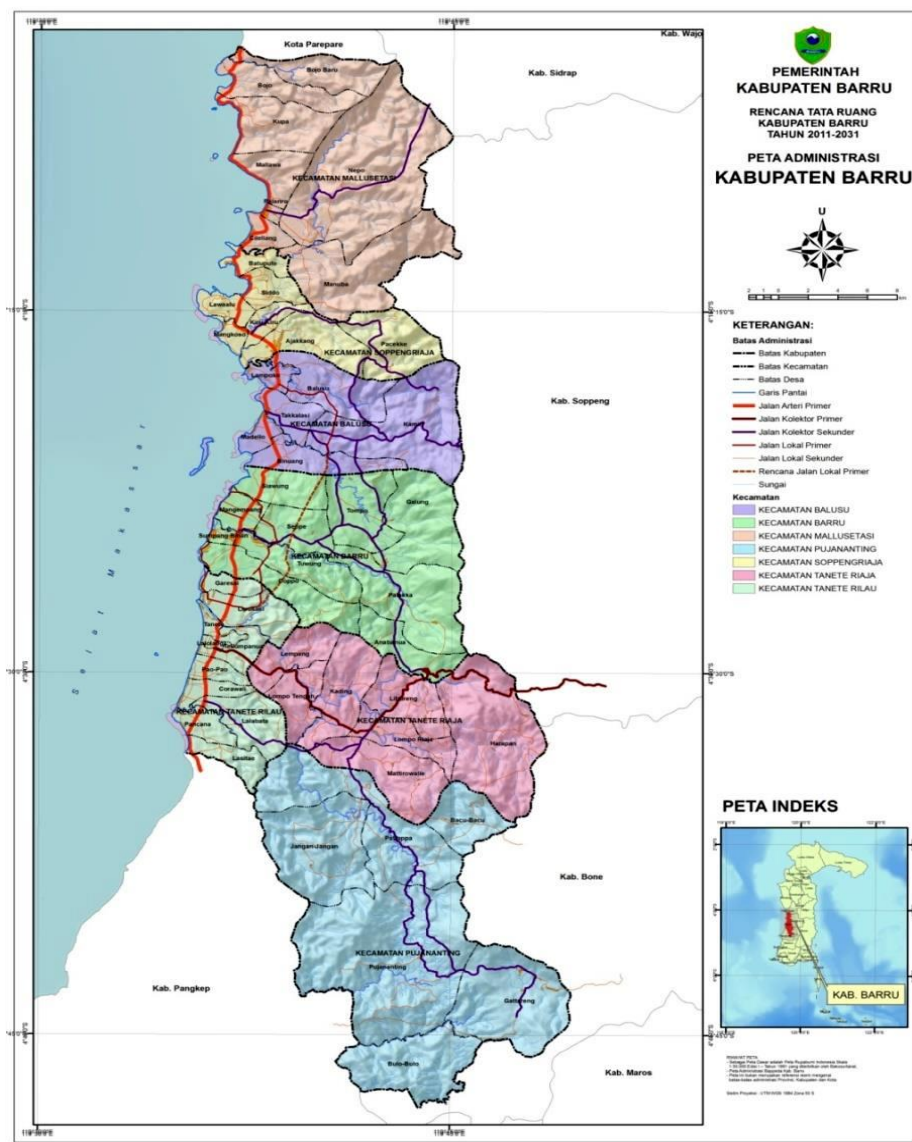
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Barru

Kabupaten Barru adalah salah satu dari 24 Kabupaten Kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru merupakan jalur perlintasan trans sulawesi yang terletak di pesisir pantai Barat Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 Km arah utara Kota Makassar dengan luas 1174,72 Km².

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Barru Tahun 2020



Sumber: Bappeda Kab. Barru Tahun 2020

Batas wilayah administrasi adalah batas wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola pemerintah daerah didalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Barru sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar

Secara administratif Kabupaten Barru terbagi atas 7 (Tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa
Kabupaten Barru Tahun 2020

Kode	Kecamatan	Desa	Kel	Luas (Km ²)	%	Jumlah Penduduk
731101	TaneteRiaja	6	1	174,29	14,83	25.702
731102	Tanete Rilau	8	2	79,17	6,74	37.788
731103	Barru	5	5	199,32	16,97	44.746
731104	Soppeng Riaja	5	2	78,90	6,72	18.548
731105	Mallusetasi	5	3	216,58	18,44	27.746
731106	Pujananting	6	1	314,26	26,75	13.355
731107	Balusu	5	1	112,20	9,55	19.507
Total		40	15	1174,72	100	187.392

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kecamatan Pujananting adalah kecamatan yang terluas di Kabupaten Barru yakni seluas 314,26 Km² atau sebesar 26,75% dari total wilayah Kabupaten Barru, sementara Kecamatan Soppeng Riaja merupakan kecamatan yang tersempit di Kabupaten Barru yakni hanya seluas 78,90 Km² atau sebesar 6,72% dari total wilayah keseluruhan.

Secara astronomis, Kabupaten Barru terletak diantara koordinat 4°0.5'35" – 4°47'35" LS (Lintang Selatan) dan 119°35'00" – 119°35'00" BT (Bujur Timur). Kabupaten Barru mempunyai wilayah yang cukup bervariasi terdiri dari daerah pesisir/laut, dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian timur Kabupaten Barru terbentang daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 100 sampai 1700 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian barat yang berhadapan dengan selat Makassar, bertopografi datar sampai landai dengan ketinggian 0 – 20 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, wilayah Kabupaten Barru memiliki kelerengan yang sangat bervariasi mulai datar, bergelombang hingga bergunung dengan persentase kemiringan antara 0% - >40%.

Topografi merupakan salah satu faktor pembatas pemanfaatan ruang untuk pembangunan. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis dan memiliki

tingkat erosi yang tinggi yang dipengaruhi oleh kecepatan pengaliran air. Secara topografis, Kabupaten Barru mempunyai wilayah bervariasi yang terdiri atas wilayah laut, dataran rendah dan wilayah pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 0–1.700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Keadaan wilayah Kabupaten Barru berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yang dibagi dalam 5 (lima) kriteria yaitu 0-25 m, 25-100 m, 100-500 m, 500-1.000 m dan ≥ 1000 m dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

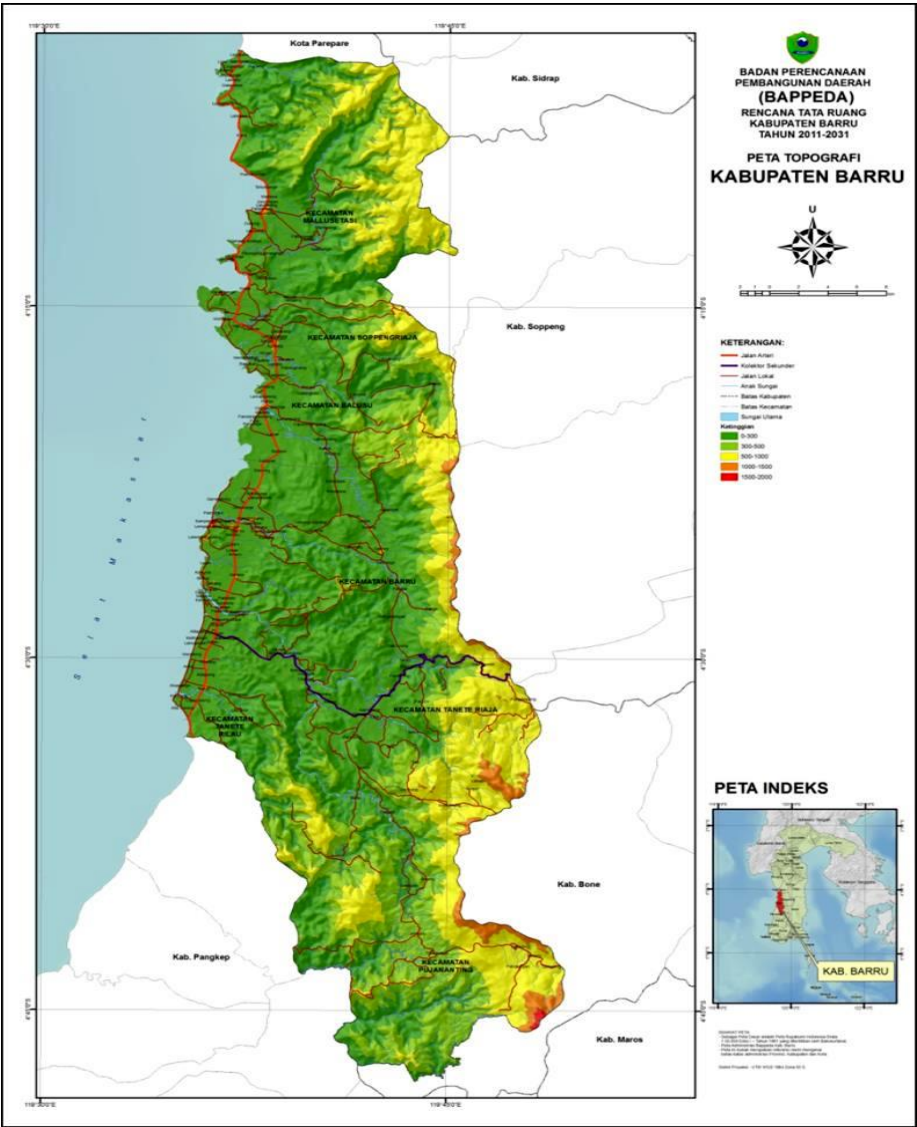
Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian di atas Permukaan Laut
Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Ketinggian Tempat (Ha)					Total
		0-25 m	25-100 m	100-500 m	500-1000 m	≥ 1000 m	
1	Tanete Riaja	1.132	4.547	6.082	5.153	515	17.429
2	Tanete Rilau	3.830	2.113	1.974	-	-	7.917
3	Barru	3.454	5.113	9.363	1.806	196	19.932
4	Soppeng Riaja	3.137	1.171	2.771	811	-	7.890
5	Malusetasi	2.583	2.4	11.100	5.575	-	21.658
6	Pujananting	-	275	21.723	8.368	1.060	31.426
7	Balusu	3.411	1.428	5.003	1.307	71	11.220
Total		17.547	17.047	58.016	23.020	1.842	117.472

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase luas wilayah yang paling besar adalah wilayah dengan ketinggian antara 100-500 m yaitu sebesar 58.016 Ha sedangkan yang paling sedikit adalah wilayah dengan ketinggian ≥ 1.000 m yaitu sebesar 1.842 Ha Secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Barru Tahun 2020



Sumber: Bappeda Kab. Barru Tahun 2020

Selanjutnya keadaan wilayah Kabupaten Barru berdasarkan kemiringan meliputi 4 (empat) kriteria yaitu kemiringan 0-2%, 2-15%, 15-40%, >40%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan
Kabupaten Barru Tahun 2020

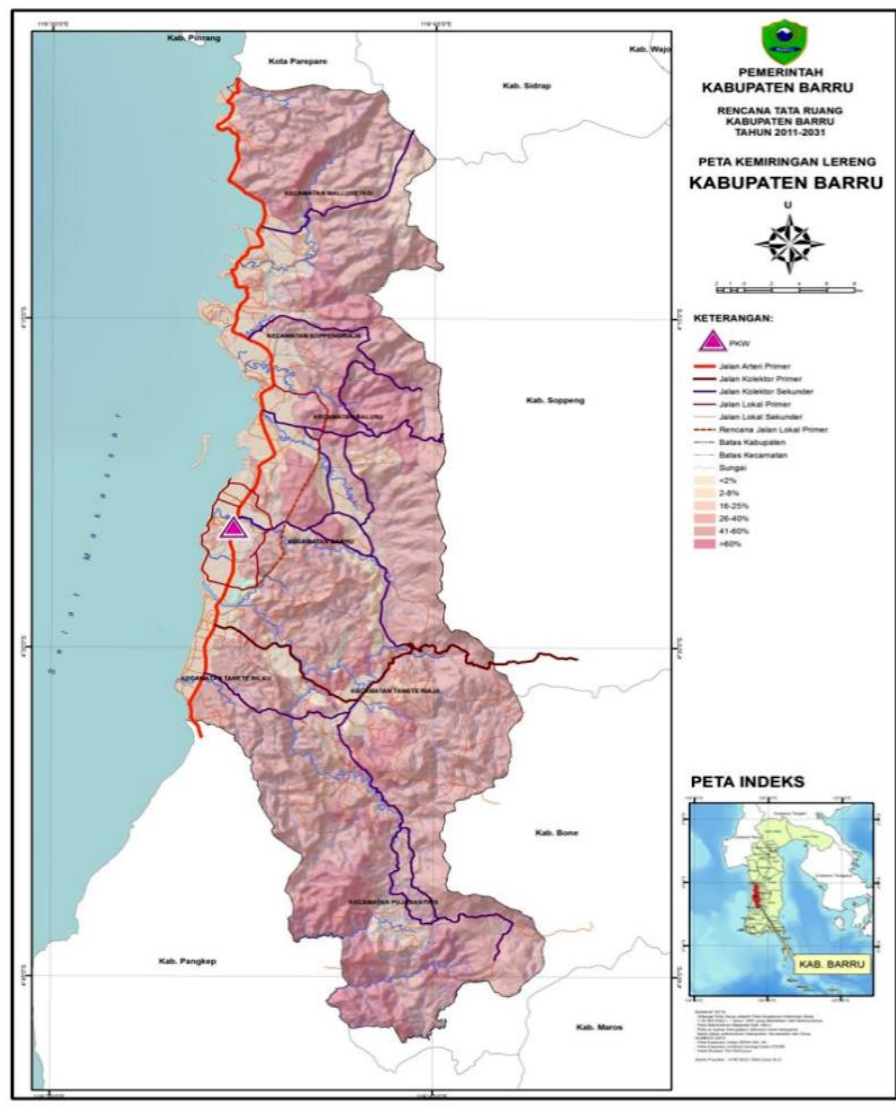
No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Kemiringan Tanah / Lereng				Total
		0-2%	2-15%	15-40%	>40%	
1	Tanete Riaja	593	5,552	7,985	3,299	17,429
2	Tanete Rilau	1,159	3,369	2,857	532	7,917
3	Barru	1,458	7,538	7,872	3,064	19,932
4	Soppeng Riaja	788	3,419	2,687	996	7,890
5	Malusetasi	611	4,360	9,371	7,316	21,658
6	Pujananting	239	5,730	15,718	9,739	31,426
7	Balusu	1,084	4,000	4,764	1,372	11,220
TOTAL		5,932	33,968	51,254	26,318	117,472
PERSENTASE		5.05%	28.92%	43.60%	22.40%	100

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Barru berdasarkan kemiringan tanah/lereng lebih didominasi oleh wilayah dengan kemiringan antara 15%-40% yaitu sebesar 43,60%, sedangkan yang paling sedikit yaitu dengan kemiringan antara 0-2% hanya sebesar 5.05%. Secara spasial kemiringan lereng wilayah Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3

Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barru Tahun 2020



Sumber: Bappeda Kab. Barru Tahun 2020

Pegunungan yang ada di Kabupaten Barru sebagian besar merupakan batuan gunung api yang bagian selatannya lebih tinggi, tetapi ke utara menyempit dan merendah. Secara bersama batuan itu menyusun Formasi Camba yang tebalnya sekitar 5.000m. Sebagian besar pegunungan terbentuk dari Formasi Camba yang menindih tak selaras Formasi Tonasa.

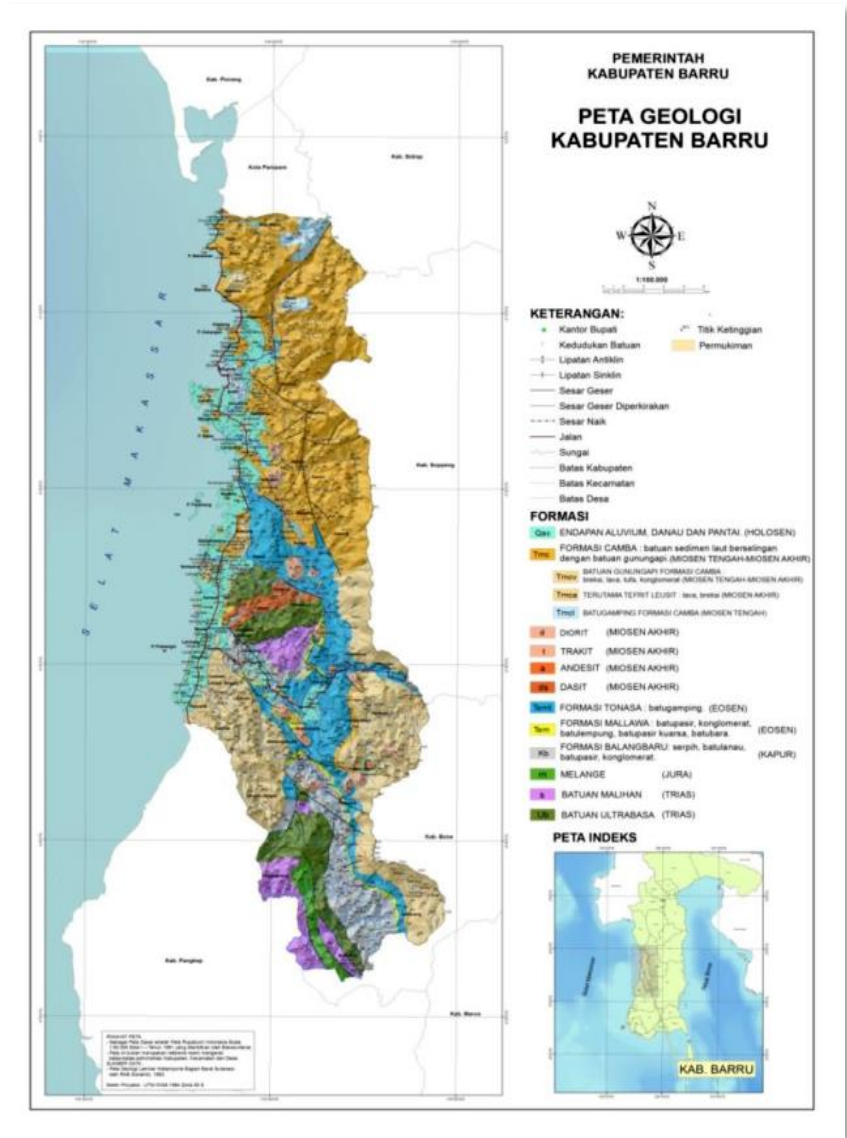
Terobosan batuan beku yang terjadi di Kabupaten Barru semuanya berkaitan erat dengan kegiatan gunung api. Bentuknya berupa stok, sill dan retas, bersusunan beraneka dari basal, andesit, trakit, diorit, dasit dan granodiorit yang diperkirakan berumur pada kiasan Miosen Akhir.

Endapan Holosen yang luasannya berupa endapan aluvium, danaudan pantai terdiri atas lempung, lanau, lumpur pasirdan kerikil

di sepanjang sungai besar dan disepanjang pantai. Endapan pantai setempat mengandung sisa kerang dan batu gamping koral. Secara umum endapan aluvium terdapat di sebelah barat atau pesisir pantai dari daerah Kabupaten Barru.

Gambar 2.4

Peta Geologi Kabupaten Barru Tahun 2020



Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2020

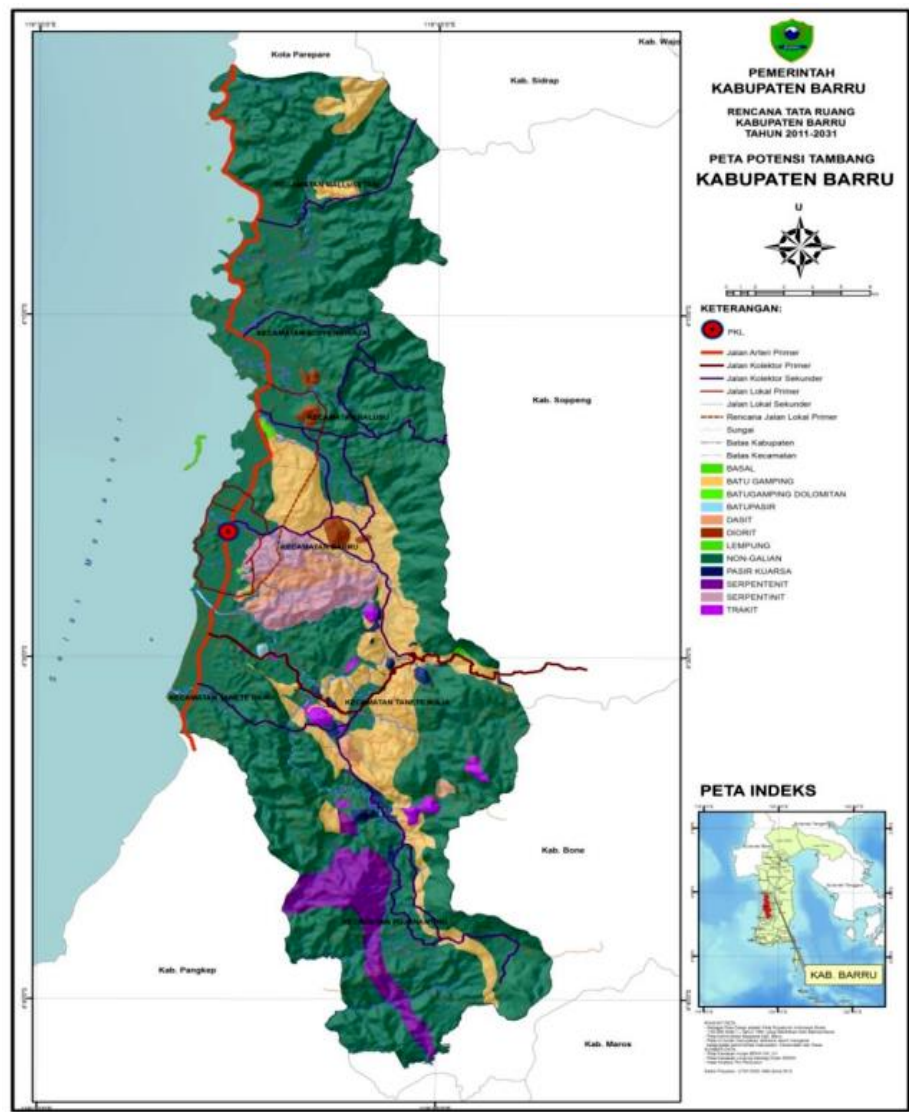
Struktur regional Kabupaten Barru terdiri atas struktur lipatan dan struktur sesar dimana struktur lipatan adalah suatu bentuk deformasi pada batuan sedimen, batuan vulkanik dan batuan metamorf yang memperlihatkan suatu bentuk bergelombang dan struktur yang berkembang di Kabupaten Barru adalah struktur sinklin. Sedangkan struktur sesar merupakan suatu rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran sehingga terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang berhadapan dan arahnya sejajar dengan bidang patahan. Secara spasial peta geologi Kabupaten Barru dapat dilihat melalui gambar diatas.

Kondisi geologi daerah Barru yang kompleks akibat tektonik inilah yang menyebabkan potensi pertambangan di Kabupaten Barru sangat besar dari segi bahangalian batuan, mineral dan logam. Bahan galian yang bernilai ekonomis tersebar dari Utara hingga selatan

daerah Barru. Kromit ditemukan dalam batuan ultrabasa di timur Barru, terutama pada bagian yang berlapis berupa lensa, tanah pelapukannya mengandung apungan kromit. Khusus disebelah Selatandaerah Barru di Kecamatan Pujananting dan Tanete Riaja potensi bahan galian yang bernilai ekonomis banyak dijumpai antara lain: emas, galena, mangan dan batubara.

Gambar 2.5

Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Barru Tahun 2020



Sumber: Bappeda Kab. Barru Tahun 2020

Tabel 2.4

Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan
Kabupaten Barru Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Tambang
1	Tanete Riaja	Batubara, kromit, batugamping, pasir kuarsa, marmer,serpentin, tanah liat, batupasir, pasir, dan batu sungai
2	Tanete Rilau	Pasir besi, pasir sungai, tanah liat dan serpentin
3	Barru	Batugamping, serpentin, tanah liat, pasir dan batu Sungai
4	Soppeng Riaja	Pasir dan batu sungai
5	Mallusetasi	Tras, pasir besi dan batu sungai

No.	Kecamatan	Jenis Tambang
6	Pujananting	Batubara, kromit, batugamping, marmer, serpentinit, mangan, galena, emas, pasir kuarsa, tanah liat, pasir dan batu sungai
7	Balusu	Batugamping dan tanah liat

Sumber: Bappeda Kab. Barru Tahun 2020

Sedangkan potensi batuan menyebar dari Utara sampai Selatan daerah Barru, seperti yang terlihat pada tabel 2.4. JenisTanah di Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan menjadi 4 (Empat) bagian yang tersebar di beberapa Kecamatan yaitu :

- a. Jenis Tanah Aluvial Muda, dari bahan induk Aluvium,tekstur beranekaragam dengan kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebaran jenis tanah ini didaerah daratanAluvialSungai, daratan Aluvial Pantai dan di daerah cekungan (depresi). Jenis tanah ini meliputi 12,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan terdapat di Kecamatan Tanete Riaja.
- b. Jenis tanah Litosol merupakan tanah mineral dari bahan induk batuan beku atau batuan sedimen keras, Solum dangkal, tekstur beraneka dan umumnya berpasir. Jenis tanah Litosol didapati umumnya di wilayah dengan tofograf berbukit, pegunungan. Di Kabupaten Barru jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja yang meliputi 24,72 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru.
- c. Jenis tanah Regosol meliputi 35,12 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah ini masih muda dengan tekstur pantai, kesuburan sedang berasal daribahan induk vulkanis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng volkan muda dan di daerah beting pantai atau gumuk–gumuk pasir.
- d. Jenis tanah Mediteran berasal dari bahan induk batuankapur keras (Limestone) dan Tufa Vulkanis bersifat basa. Tekstur umumnya lempung permeabilitas sedang dan peka erosi. Di Kabupaten Barru jenis tanah mediteran ini meliputi 27,68 persen terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Tanete Rilau.

Dari keempat jenis tanah tersebut, digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5
Jenis Tanah Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Jenis Tanah	Luas Dan Persentase	
		Ha	Persentase (%)
1.	Aluvial	14.659	12,48
2.	Litosol	29.043	24,72
3.	Regosol	41.254	35,12
4.	editeran	32.516	27,68
total		117.472	100

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel diatas, diantara ke 4 (empat) jenis tanah, yang memiliki persentase terbesar adalah Regosol sebanyak 35,12% dan terkecil adalah Aluvial sebesar 12,48%.

Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Potensi sumber air di Kabupaten Barru yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan adalah air hujan, air permukaan dan aliran sungai atau limpasan. Sungai-sungai yang ada selain airnya dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri, rumah tangga juga sungai-sungai yang ada berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan untuk budidaya perikanan. Berikut data sungai yang mengalir menurut lokasi:

Tabel 2.6
Sungai Mengalir Menurut Lokasi Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Nama Sungai	Panjang	Lokasi	Ketinggian	Kerendahan
1	Lisu	38 Km	Tanete Riaja	4 M	3 M
2	Jampue	20 Km	Barru	4,5 M	3 M
3	Nepo	18 Km	Mallusetasi	3,5 M	2,5 M
4	Lampoko	18 Km	Balusu	4 M	2,5 M
5	Manuba	23 Km	Mallusetasi	3 M	2 M
6	Waesai	24 Km	Tanete Riaja	4 M	2,5 M

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Untuk menentukan status daya dukung air di Kabupaten Barru yaitu dengan menghitung selisih antara jumlah ketersediaan air dengan jumlah kebutuhan air di Kabupaten Barru. Ketersediaan dan kebutuhan air pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3)	Kebutuhan Air (m3)	Selisih kebutuhan (m3)
1	Tanete Riaja	195.661.363,46	81.654.160,28	114.007.203,18
2	Tanete Rilau	87.766.378,69	50.709.850,85	37.056.527,84
3	Barru	231.806.923,49	78.743.615,96	153.063.307,53
4	Soppeng Riaja	119.005.762,91	35.461.502,11	83.544.260,80
5	Mallusetasi	264.204.914,68	45.266.824,14	218.938.090,54
6	Pujananting	368.810.276,56	58.699.474,88	310.110.801,69
7	Balusu	159.746.620,21	41.699.448,62	118.047.171,59
Total		1.427.002.240,01	392.234.876,83	1.034.767.363,18

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Barru Tahun 2020

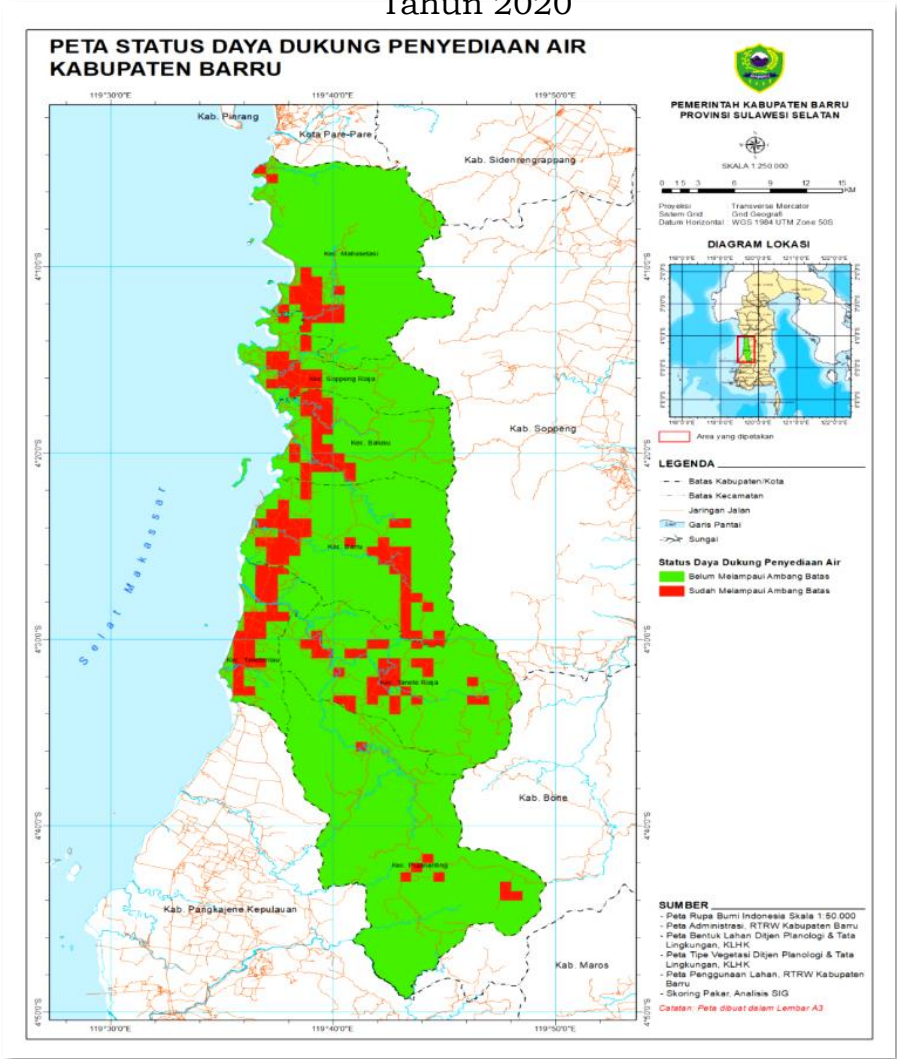
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan hidup untuk menyediakan air dari setiap Kecamatan tertinggi di Kecamatan Pujananting dan terendah di kecamatan Tanete Rilau. Kebutuhan air dalam perikehidupan manusia dibagi

menjadi 2 yaitu kebutuhan air untuk lahan dan kebutuhan domestik. Tabel diatas menunjukkan bahwa kebutuhan air tertinggi di Kabupaten Barru yaitu pada Kecamatan Tanete Riaja sebesar 81.654.160,28 m³ disebabkan tingginya kebutuhan air untuk lahan pada Kecamatan tersebut yaitu 79.542.630,68 m³ sedangkan kebutuhan air terendah yaitu pada Kecamatan Soppeng Riaja sebesar 35.461.502,11 m³ dengan kebutuhan air untuk lahan sebesar 33.971.534,11 m³.

Pada tabel diatas juga diketahui bahwa masih terdapat selisih daya dukung lingkungan hidup untuk menyediakan air di Kabupaten Barru dengan kebutuhan air bagi perikehidupan penduduk pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru sehingga dapat disimpulkan bahwa status daya dukung penyediaan air bagi penduduk Kabupaten Barru belum terlampaui pada setiap kecamatan. Berdasarkan jumlah ketersediaan air di Kabupaten Barru (123.337.296,00 m³), jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan airnya secara alamiah oleh Kabupaten Barru adalah 12.151.381 jiwa populasi, masih surplus sekitar 11.969.008 jiwa populasi penduduk dari total penduduk eksisting tahun 2019 sebanyak 182.373 jiwa.

Gambar 2.6

Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Barru Tahun 2020



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru (2020)

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampuan alam menyediakan pelayanan dalam hal penyediaan air terhadap kebutuhan yang digambarkan dari besarnya konsumsi air yang dibutuhkan masyarakat diwilayah tersebut. Rincian luasan status daya dukung wilayah penyediaan air disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8

Status Daya Dukung Air di Kabupaten Barru Tahun 2020

Kecamatan	Ambang Batas	Status Ambang Batas	Luas wilayah masih mendukung		Luas Wilayah tidak mendukung	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Tanete Riaja	1.343.976	1.296.795	17.295,18	85,8	2.852,88	14,2
Tanete Rilau	464.133	395.121	4.521,40	64,3	2.510,53	37,
Barru	1.812.225	1.730.508	16.187,82	80,1	4.025,20	19,9
Soppeng Riaja	984.197	949.057	6.579,90	81,5	1.490,69	18,5
Mallusetasi	2.560.383	2.508.465	20.840,56	91,9	1.836,05	8,1
Pujananting	3.601.887	3.576.145	30.813,80	97,8	681,26	2,2
Balusu	1.384.580	1.347.657	8.751,68	79,5	2.255,07	20,5
Total	12.151.381	11.803.748	104.990,34	87,0	15.651,68	13,0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru sebagian wilayah dalam kecamatan tersebut sudah tidak mendukung sebagai fungsi penyedia air.

Sementara itu untuk jumlah hari hujan dan curah hujan Kabupaten Barru pada tahun 2016 s/d 2020 mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9

Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Barru Tahun 2016–2020

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Curah Hujan (mm)	3.316	3.392	3.529	1.804	3.136
2	Hari Hujan	163	165	168	105	152

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Sedangkan jumlah hari hujan dan curah hujan menurut bulan sepanjang tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan
Kabupaten Barru Tahun 2020

No.	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm ³)
1	Januari	17	441
2	Februari	16	511
3	Maret	16	248
4	April	21	342
5	Mei	13	258
6	Juni	10	89
7	Juli	12	110
8	Agustus	2	28
9	September	7	38
10	Oktober	10	349
11	November	15	235
12	Desember	30	928

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana terhadap karakteristik dan kecenderungan pola pemanfaatan ruang wilayah. Rencana pola ruang meliputi alokasi pemanfaatan ruang, kawasan budidaya, kawasan lindung, serta kawasan perkotaan dan pedesaan.

Kawasan budidaya dapat diartikan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang. Kriteria teknis sektoral kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan. Luas arahan kawasan budidaya Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Luas Arahan Kawasan Budidaya Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	%
1	Hutan Produksi	17.290,03	14,52
2	Hutan rakyat	5.923,35	4,97
3	Kawasan Budidaya Perikanan	2.682,69	2,25
	Tambak	2.682,69	2,25
4	Kawasan Budidaya Perkebunan	14.046,91	11,79
	Perkebunan	14.046,91	11,79

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	%
5	Kawasan Budidaya Pertanian	19.880,78	16,69
	Pertanian lahan basah	14.322,14	12,02
	Pertanian lahan kering	1.785,70	1,50
	Holtikultura	3.772,94	3,17
6	Kawasan Budidaya Peternakan	2.290,54	1,92
	Peternakan Besar	2.290,54	1,92
7	Kawasan Permukiman	3.771,64	3,17
	Permukiman	3.771,64	3,17
8	Kawasan Pertambangan	1.490,56	1,25
	Pertambangan	1.490,56	1,25
Total Kawasan Budidaya		67.376,50	56,57

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2020

Sementara itu, Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan hutan lindung juga merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Kawasan sebagaimana dimaksud adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya terdiri dari :

- Kawasan hutan lindung yang memiliki skor >175, yang merupakan penjumlahan skor intensitas curah hujan, kepekaan tanah terhadap erosi dan kemiringan lereng. Selain itu kawasan ini meliputi pula wilayah dengan ketinggian > 2.000 meter dari permukaan laut.
- Kawasan resapan air yang meliputi hutan rawa.
- Kawasan sempadan sungai dan danau.

Secara keseluruhan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Barru seluas 51.969,00 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 17.879 hektar. Secara lebih rinci luasan kawasan hutan lindung berdasarkan kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan
Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Kecamatan	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Lindung	Jumlah
1	Tanete Riaja	4.811,00	3.539,00	8.350,00
2	Tanete Rilau	0	2.188,00	2.188,00
3	Barru	3.272,00	7.057,00	10.329,00
4	Soppeng Riaja	972	1.543,00	2.515,00
5	Mallusetasi	14	16.309,00	16.323,00
6	Pujananting	4.305,00	19.665,00	23.970,00
7	Balusu	4.505,00	1.668,00	6.173,00
Jumlah		17.879,00	51.969,00	69.848,00

Sumber Data : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Sedangkan kawasan perlindungan setempat terdiri dari beberapa kawasan sebagai berikut:

- Kawasan sempadan pantai ditetapkan berdasarkan pesisir pantai Kabupaten Barru sepanjang 78 Km yang terdistribusi pada lima kecamatan, yakni Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Balusu.
- Kawasan sempadan sungai ditetapkan pada Sungai Barru, SungaiBojo, SungaiKupa, SungaiNepo, Sungai Manuba, Sungai Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka, Sungai Bungi, Sungai Sikapa, Sungai Mareppang dan Sungai Jalanru.
- Kawasan sekitar mata air ditetapkan diKecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Mallusetasi.
- Kawasan lindung spiritual ditetapkan di kawasan perkampungan Suku Tobalo di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting.
- Kawasan ruang terbuka hijau berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologi, sosial budaya, estetika dan ekonomi dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20 persendan Ruang Terbuka Hijau privat paling sedikit 10 persen dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, PKLp dan PPK.

Kawasan lindung yang selanjutnya adalah Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang terdiri dari :

- Kawasan pantai berhutan bakau, dengan luasan kurang lebih 343,783Ha, ditetapkan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 26,322 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 86,804 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Balusu (termasuk Pulau Panikiang) dengan luasan kurang lebih 200,078 Ha dan sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 30,579 Ha.
- Kawasan taman wisata alam, ditetapkan di Pulau Dutungan, Pulau Bakki dan Pulau Batu Kalasi Kecamatan Mallusetasi.
- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di Kawasan Rumah Adat Saoraja Lapinceng diKecamatan Balusu, Kawasan Monumen Paccekke di Kecamatan Soppeng Riaja, Kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru dan Kawasan Pendidikan Pesantren Mangkoso diKecamatan Soppeng Riaja.

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah. Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Barru di sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan

Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting.

Untuk Kawasan Budidaya adapun Pengembangan wilayah Kabupaten Barru diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru. Hal ini guna mewujudkan ruang Kabupaten Barru yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkelanjutan.

Secara hirarki sebagaimana disebutkan dalam UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, telah ditetapkan istilah baku untuk pusat-pusat perkotaan mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Wilayah Kota merupakan pusat kegiatan bagi wilayah di sekelilingnya, yang sering disebut dengan beberapa istilah seperti wilayah pengaruh, wilayah pelayanan, hinterland dan lain-lain. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka upaya yang akan dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan dengan mengutamakan pengembangan wilayah berbasis rencana tata ruang melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti Kawasan Industri (KI) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

Dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031, telah mengatur beberapa Potensi pengembangan wilayah yang berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah. Diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, petambangan dan lainnya dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Adapun dari hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru maka diperoleh potensi pengembangan wilayah sebagai berikut.

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dalam Dokumen RTRW Kabupaten Barru, Penetapan kawasan peruntukan pertanian, di bagi kedalam beberapa kawasan sebagai berikut.

- a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri dari: kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luasan kurang lebih 14.527,07 Ha yang diarahkan pada sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan

Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Selanjutnya kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luasan sekitar 12.781,73 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luasan kurang lebih 6.305,99 (enam ribu tiga ratus lima koma Sembilan puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.

- b) Kawasan peruntukan perkebunan. Kawasan peruntukan perkebunan terbagi dalam beberapa peruntukan. *Pertama*, kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybrida dengan luasan kurang lebih 2.202 Ha, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Kedua*, Kawasan peruntukan perkebunan kopi dengan luasan kurang lebih 758 Ha, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Ketiga*, kawasan peruntukan perkebunan jambu mete dengan luasan kurang lebih 5.278Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Keempat*, kawasan peruntukan perkebunan cengkeh dan kakao dengan luasan kurang lebih 1.100 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru ,sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Kelima*, kawasan peruntukan perkebunan kemiri dan karet dengan luasan kurang lebih 4.617 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah

Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

- c) Kawasan peruntukan peternakan, ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dengan luas sekitar 2.290,54 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

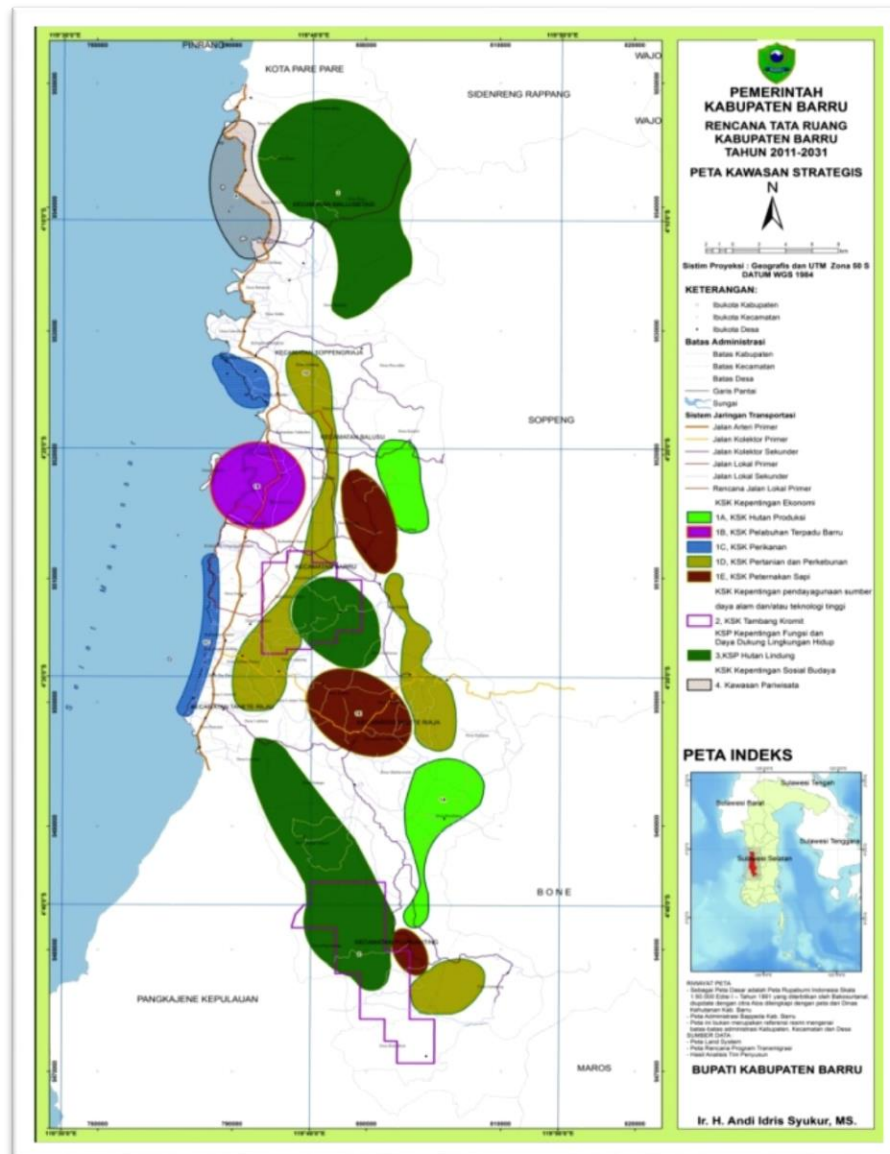
Sementara itu dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, arah pengembangan untuk kawasan pertanian untuk wilayah Kabupaten Barru diarahkan untuk sektor unggulan komoditas Tanaman Pangan padi, sementara untuk komoditas peternakan diarahkan untuk komoditas sapi potong.

Untuk Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana merupakan kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 17.879 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu dengan luasan kurang lebih 4.505 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 3.272 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 14 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dengan luasan kurang lebih 4.305 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 972 Ha, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dengan luasan kurang lebih 4.811 Ha.

Dan untuk pengembangan Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Barru ditetapkan dengan luasan sekitar 5.923,35 Ha, berada di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

Untuk pengembangan komoditas pangan jenis hortikultura, perkebunan dan kehutanan masih diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan konversi produk. Hal ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat yang tidak hanya mengandalkan dari sektor beras, namun juga harus didukung dengan komoditas pangan yang lain.

Gambar 2.7
Peta Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Barru Tahun 2020



Sumber : RTRW Bappeda 2012

2. Kawasan Perikanan

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan. Pengelolaan kawasan perikanan di Kabupaten Barru diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan. Adapun Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di dalam Dokumen RTRW terdiri dari:

- a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi kawasan pesisir dan laut Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mallusetasi.
- b) Kawasan peruntukan perikanan budidaya perikanan diarahkan pada; *Pertama*, kawasan budidaya perikanan air payau dengan komoditas udang dan bandeng ditetapkan disebagian wilayah

Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Balusu dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. *Kedua*, Kawasan pengembangan minapolitan merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan disebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi.

- c) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan akan dikembangkan di PPI Polejiwa di Kecamatan Tanete Rilau.

Sementara itu dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, arah pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, Teluk Bone, Kepulauan Spermonde, Kepulauan Selayar dan sekitar Kepulauan Tana Keke yang meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Sinjai, Pangkajene Kepulauan, Bone, dan Kota Makassar. Untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang.

3. Kawasan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industri dikawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yaitu kawasan perkotaan Mamminasata dan kawasan perkotaan di Kabupaten Bone, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Bantaeng, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan kota Makassar.

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Barru untuk Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan industri besar merupakan kawasan industri semen ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Barru.

- b. Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan industri pengolahan makanan dan pakan ternak ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Balusu.
- c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di kawasan perkotaan PKLp dan PPK.

Sementara untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Wilayah pertambangan di Kabupaten Barru terdiri dari:

- a) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi : Pertama, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa kromit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan TaneteRiaja, sebagian Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. Kedua, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa mangan, galena dan emas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. *Ketiga*, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir besi, pasir kuarsa dan batu gamping ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. *Keempat*, wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa tras, kerikil berpasir alami, tanah liat dan marmer ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting; wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Pujananting dan sebagian Kecamatan Tanete Riaja.
- b) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi dan gas alam terdiri dari wilayah usaha pertambangan panas bumi yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru dan wilayah usaha pertambangan gas alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.

4. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenities. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya

dan wisata buatan. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Barru pada beberapa kawasan berikut.

- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri dari:
 - ✓ Kawasan Makam Pajung Tenri Leleang, kawasan Makam Petta Pallase- LaseE, kawasan Makam We Pancai Tana, kawasan Masjid Tua Lalabata, kawasan Makam We Tenri Olle, kawasan Makam Datu Maddusila To Appaewa dan kawasan Makam Karaeng Lipukasi di Kecamatan Tanete Rilau;
 - ✓ Kawasan Mesjid Tua Barru, kawasan Makam H.M.Pudhail dan kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru;
 - ✓ Kawasan Makam Arung Nepo dan kawasan Makam La Bongo di Kecamatan Mallusetasi;
 - ✓ Kawasan permukiman suku To Balo di Kecamatan Pujananting;
 - ✓ Kawasan Saoraja Lapinceng di Kecamatan Balusu.
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri dari:
 - ✓ Kawasan Pantai Ujung Batu, kawasan Air Panas KalompiE, kawasan Air Terjun Tanjung Asap, Pantai LembaE dan kawasan Cek Dam Lajulo Indah di Kecamatan Barru.
 - ✓ Pulau Dutungeng, Pulau Bakki, Pantai Kupa, Taman Laut Mallusetasi, Pantai Lapakaka, kawasan permandian Bujung MatimbaoE, Bendungan LanraE dan Kawasan Wisata Mareppang di Kecamatan Mallusetasi.
 - ✓ Pulau Pasir Putih, Pantai Awerange dan Permandian Alam Batu SitongkoE di Kecamatan Soppeng Riaja.
 - ✓ Permandian Alam Datae Salopuru di Kecamatan Pujananting.
 - ✓ Permandian Waempubbu, Air Terjun Sarang Burung dan Gua Togenra di Kecamatan Balusu.
 - ✓ Kawasan Waenungnge, kawasan Batu Mallopie, kawasan Air Terjun Waesai, kawasan Celebes Canyon dan kawasan Bukit Harapan di Kecamatan Tanete Riaja.
- Pulau Puteanging, Sungai Bottoe dan Tanjung Butung di Kecamatan Tanete Rilau.

5. Sistem Perkotaan

Dalam Dokumen RTRW, Untuk Sistem Perkotaan di Kabupaten Barru diuraikan sebagai berikut :

- a) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari; Kantor Komando Distrik Militer Barru di Kota Parepare, Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting, Kantor Kepolisian Resort Barru di Kecamatan Barru, Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting.

- b) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yaitu kawasan yang merupakan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, terdiri dari:
- ✓ Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di kawasan perdagangan Garongkong Kecamatan Barru, kawasan perdagangan Palanro Kecamatan Mallusetasi, kawasan perdagangan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, kawasan perdagangan Takkalasi Kecamatan Balusu, kawasan perdagangan Ralla Kecamatan Tanete Riaja, Kawasan perdagangan Doi-doi Kecamatan Pujananting, dan kawasan perdagangan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau.
 - ✓ Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Balusu, Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau.
- c) Kawasan peruntukan perkantoran terdiri dari:
- ✓ Kawasan perkantoran pemerintahan skala kabupaten diarahkan pada kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru dan kawasan perkantoran skala kecamatan dan desa diarahkan pada kawasan perkotaan PKLp, PPK dan PPL.
 - ✓ Kawasan perkantoran swasta diarahkan menyatu pada kawasan perkotaan Barru.
- d) Kawasan peruntukan pelayanan umum terdiri dari:
- ✓ Kawasan pendidikan di bagi atas kawasan pendidikan dasar diarahkan pada kawasan PPL di Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting, kawasan pendidikan menengah diarahkan pada kawasan PKLp dan PPK di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, dan Kecamatan Pujananting dan kawasan pendidikan tinggi diarahkan pada kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru, kawasan perkotaan Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasan perkotaan Pekkae di Kecamatan Tanete Rilau.
 - ✓ Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan terdiri dari puskesmas dan balai pengobatan diarahkan pada kawasan PPL di Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting dan pelayanan kesehatan skala regional berupa rumah sakit diarahkan pada kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru.
 - ✓ Kawasan peruntukan olahraga terdiri dari kawasan olahraga skala kabupaten diarahkan di kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru dan kawasan olahraga skala kecamatan diarahkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.

- e) Pengembangan Kawasan peruntukan permukiman tersebar pada semua wilayah dan secara spesifik dibagi menjadi dua kawasan permukiman seperti diuraikan berikut ini.
 - a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. Kawasan ini ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Barru Kecamatan Barru, Kawasan Perkotaan Palanro Kecamatan Mallusetasi, Kawasan Perkotaan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, Kawasan Perkotaan Ralla Kecamatan Tanete Riaja, Kawasan Perkotaan Takkalasi Kecamatan Balusu, Kawasan Perkotaan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau, dan Kawasan Perkotaan Doi-Doi Kecamatan Pujananting.
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan ini ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Letak geografis dan kondisi geologis yang bervariasi dapat menyebabkan Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin kencang. Kondisi tektonik Kabupaten Barru tidak dapat dipisahkan oleh struktur-struktur tektonik Sulawesi Selatan dan Sulawesi, secara keseluruhan yang mengakibatkan aktivitas gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Selatan dan sekitarnya antara lain :

- 1). Aktivitas tektonik, palung Sulawesi Utara terletak di pinggir Selatan cekungan Sulawesi, ujung Barat dimulai dari Selat Makassar memanjang ke arah Timur sepanjang Laut Sulawesi, gempa yang terjadi dalam palung ini adalah umumnya berasal dari kedalaman dangkal dan menengah yang didominasi oleh sesar naik (*Thrust Fault*).
- 2). Struktur tektonik inilah yang menyebabkan wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya sering mengalami gempa bumi. Jika gempa bumi ini berpusat di tengah lautan dengan magnitudo lebih besar dari 0,6 skala richter dan pusat gempunya dangkal (kurang dari 33 km), serta gempa bumi yang terjadi memiliki pola mekanisme dominan yaitu sesar naik atau turun akan menyebabkan tsunami.

Wilayah rawan bencana merupakan kawasan yang sering dan berpotensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Pada wilayah Kabupaten Barru terdapat wilayah rawan bencana alam yang terdiri dari kawasan rawan bencana alam banjir, kebakaran hutan, tanah longsor dan kawasan rawan ombak besar.

1). Banjir

Penyebab utama bencana banjir adalah curah hujan yang cukup tinggi, penggundulan hutan dihilu sungai, penyumbatan aliran atau saluran, tidak berfungsinya tanggul, selokan air yang tidak dapat menampung derasnya/besarnya debit air pada musim hujan.

2). Tanah Longsor

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barru terdiri dari tanah regosol, mediteran, litosol, aluvial, sebagian tanah tersebut berpotensi mengalami gerakan-gerakan yang dapat dikategorikan dalam empat jenis pergerakan yaitu; aliran tanah dan batu batuan, longsor atau tanah longsor, runtuh atau tanah runtuh, amblesan atau pergeseran tanah. Sedangkan penyebabnya atau terjadinya gerakan tanah tersebut antara lain : Topografi wilayah (lereng/ kemiringan); Keadaan tanah, bebatuan, struktur perlapisan dan lainnya; Kandungan air termasuk curah hujan; vegetasi, flora dan penggunaan lahan.

3). Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung)

Cuaca ekstrem adalah fenomena meteorologi yang ekstrem dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia.

4). Gelombang Pasang

Bencana gelombang pasang dan abrasi terjadi akibat pengikisan daerah pantai akibat gelombang laut yang sifatnya merusak.

5). Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau yaitu antara bulan April sampai bulan Oktober. Hal ini biasanya terjadi kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan pembabatan hutan atau pembukaan lahan oleh masyarakat serta musim kemarau yang berkepanjangan.

6). Kekeringan

Kekeringan adalah kondisi dimana Ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

Adapun wilayah di Kabupaten Barru yang merupakan wilayah rawan bencana dapat dilihat pada tabel 2.13. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan bencana di daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barru. Adapun tahapan proses dalam upaya mengurangi risiko bencana di Kabupaten Barru dimulai dari fase pra bencana. Tanggap darurat, pasca bencana dan juga dipengaruhi beberapa hal yaitu tingkat sinergitas antara organisasi perangkat daerah terkait,

instansi lintas sektoral dan pihak dunia usaha dalam proses pengurangan risiko bencana. Juga dibutuhkan kelengkapan dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

Tabel 2.13

Tingkat Bencana di Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Kecamatan	Luas wilayah Terdampak Bencana dengan KLASIFIKASI Tinggi (Ha)					
		Banjir	Banjir Bandang	Longsor	Gelombang Pasang	Kebakaran	Kekeringan
1	Tanete Riaja	1.713 Ha	-	-	-	0,5 Ha	150 Ha
2	Tanete Rilau	2.607 Ha	-	-	12,44 km	-	-
3	B a r r u	2.458 Ha	-	-	3,33 km	0,13 Ha	65 Ha
4	Soppeng Riaja	2.289 Ha	-	-	-	0,5 Ha	250 Ha
5	Mallusetasi	1.197 Ha	-	-	4,56 km	0,6 Ha	60 Ha
6	Pujananting	-	-	-	-	-	-
7	Balusu	3.220 Ha	-	-	2,67 km	-	-

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020

Data kejadian bencana di Kabupaten Barru menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian berdasarkan rentang tahun data. Data-data yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan/penurunan kejadian secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14

Total Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Banjir	2	3	4	2	2
2.	Longsor	7	4	12	-	5
3.	Angin Puting Beliung	6	7	9	11	12
4.	Gelombang Pasang	1	-	-	-	-
5.	Kebakaran Hutan	3	-	-	6	-
6.	Kekeringan	-	-	1	1	1
Total		19	14	26	20	19

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa terdapat kecenderungan peningkatan/penurunan kejadian bencana di Kabupaten Barru dalam rentang waktu tahun 2016 – 2020 yaitu :

1. Bencana banjir yang diklasifikasikan ke dalam bencana Hydrometeorologi ini cukup berdampak besar bagi wilayah Kabupaten Barru hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 dengan angka kejadian sebesar 2 Kejadian, pada tahun 2017 dengan angka kejadian 3 Kejadian, pada tahun 2018 dengan angka kejadian 4 kejadian, frekuensi tertinggi dicapai pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 2 kejadian.
2. Bencana longsor adalah gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah.

- Di Kabupaten Barru pada tahun 2016 terdapat 7 kasus longsor dan menurun pada tahun 2020 sebesar 5 kasus.
3. Bencana angin Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Di Kabupaten Barru pada tahun 2016 terdapat 6 kasus dan meningkat secara signifikan sebesar 12 kasus pada tahun 2020.
 4. Bencana gelombang pasang dan abrasi terjadi akibat pengikisan daerah pantai akibat gelombang laut. Bencana gelombang pasang terjadi hanya pada tahun 2016 sebanyak 1 kejadian.
 5. Bencana kebakaran hutan adalah api yang tidak terkendali di daerah memiliki vegetasi yang mudah terbakar. Kejadian kebakaran hutan hanya terjadi pada tahun 2016 sebanyak 3 kejadian dan pada tahun 2019 sebanyak 6 kejadian.
 6. Bencana Kekeringan disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama. Kekurangan sumber air menjadi penyebab bencana ini. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 sebanyak 3 kejadian.

Gambar 2.8

Dokumentasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Barru Tahun 2020



Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020

Adapun gambaran wilayah relokasi bencana untuk 7 kecamatan yang telah ditentukan oleh BPBD Kabupaten Barru dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.15

Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Jenis Bencana	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
1.	Tanete Riaja	Longsor	Lapangan Sepak Bola Ralla
		Cuaca Ekstrim	Pasar Ralla
		Kebakaran	PKG Maruala
2.	Tanete Rilau	Longsor	Lapangan Sepak Bola Pekkae

No	Jenis Bencana	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
3.	Barru	Cuaca Ekstrim	SMA Aroppoe
		Kebakaran	Lapangan Sepak Bola Pancana
		Longsor	Lapangan Sepak Bola Sumpang Binangae
		Cuaca Ekstrim	SMA Lajulo
4.	Soppeng Riaja	Kebakaran	MAN Mangempang
		Longsor	Lahan Persawahan Pemda di Kel.Kiru-Kiru
		Cuaca Ekstrim	Lahan Perkebunan Pemda di Kel.Kiru-Kiru
		Kebakaran	Lapangan Sepak Bola Siddo
5.	Balusu	Longsor	Dusun Bulu Dua, Paddumpu, Baera, Rumpiah, dan Kamiri
		Cuaca Ekstrim	Dusun Madello, Pannikiang dan Ujunge
		Kebakaran	Lapangan Sepak Bola Madello
		Longsor	Lapangan Sepak Bola Doi-Doi
6.	Pujananting	Cuaca Ekstrim	PKG Ralla
		Kebakaran	SMP Doi-Doi
		Longsor	Lapangan Sepak Bola Palanro
		Cuaca Ekstrim	SMK Bojo
		Kebakaran	MAN Lakkalitta

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020

Pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir adalah meliputi ekosistem yang di dalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah area peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir dihilir. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh banjir umumnya terjadi pada bentuk lahan fluvial. Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi-sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah-rendah). Lahan yang berpotensi tinggi – sangat tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir memiliki luasan sebesar 55.221,88 Ha atau 45,76% dari keseluruhan lahan di Kabupaten Barru. Kategori sedang seluas 2.211,43 Ha (1,83%) dan kategori rendah seluas 63.208,71 Ha (52,41%). Rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir di Kabupaten Barru Tahun 2020

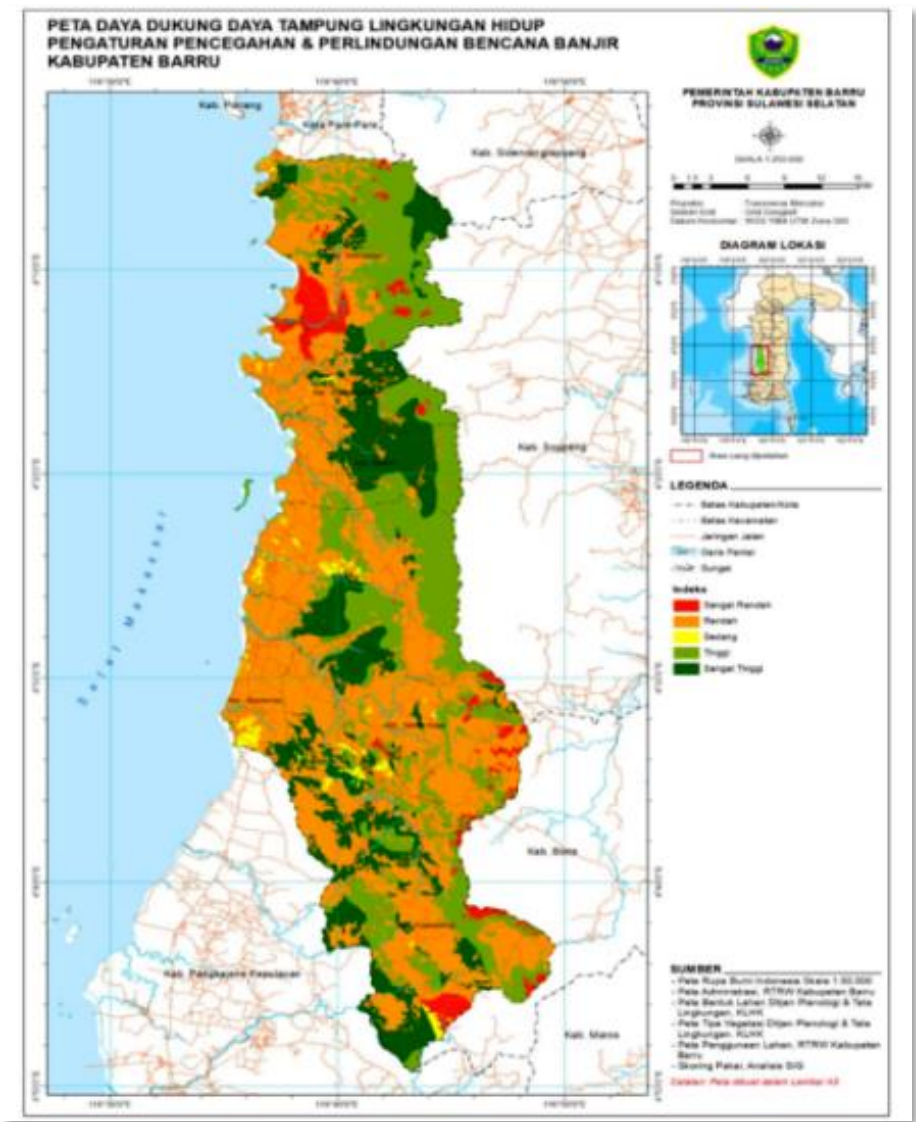
No	KECAMATAN	SANGAT RENDAH – RENDAH		SEDANG		TINGGI - SANGAT TINGGI	
		(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
1	Tanete Riaja	14.275,43	11,83%	201,65	0,17%	5.670,98	4,70%
2	Tanete Rilau	5.775,93	4,79%	474,80	0,39%	781,20	0,65%
3	Barru	9.235,13	7,66%	626,31	0,52%	10.351,58	8,58%
4	Soppeng Riaja	4.362,31	3,62%	205,53	0,17%	3.502,75	2,90%
5	Mallusetasi	8.878,42	7,36%	94,38	0,08%	13.703,82	11,36%
6	Pujananting	16.472,52	13,66%	559,71	0,46%	14.462,83	11,98%
7	Balusu	4.208,96	3,49%	49,05	0,04%	6.748,74	5,60%
TOTAL		63.208,70	52,41%	2.211,43	1,83%	55.221,90	45,76%

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kab Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas memberikan informasi bahwa Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori tinggi (tinggi-sangat tinggi) yaitu Kec. Pujananting dengan luas 14.462,83 Ha (11,98%), sedangkan kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori rendah (sangat rendah-rendah) juga Kec. Pujananting dengan luas 16.472,52 Ha (13,66%).

Gambar 2.9

Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan
Bencana Banjir Kabupaten Barru Tahun 2020



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru (2020)

Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi-sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah-rendah). Lahan yang berpotensi tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor memiliki luasan sebesar 25.698,16 Ha(19,24%). Kategori sedang seluas 69.603,17 Ha (57,69%) dan kategori kelas rendah (sangat rendah-rendah) seluas 25.340,68 Ha (21%). Rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan
Perlindungan Bencana Longsor di Kabupaten Barru Tahun 2020

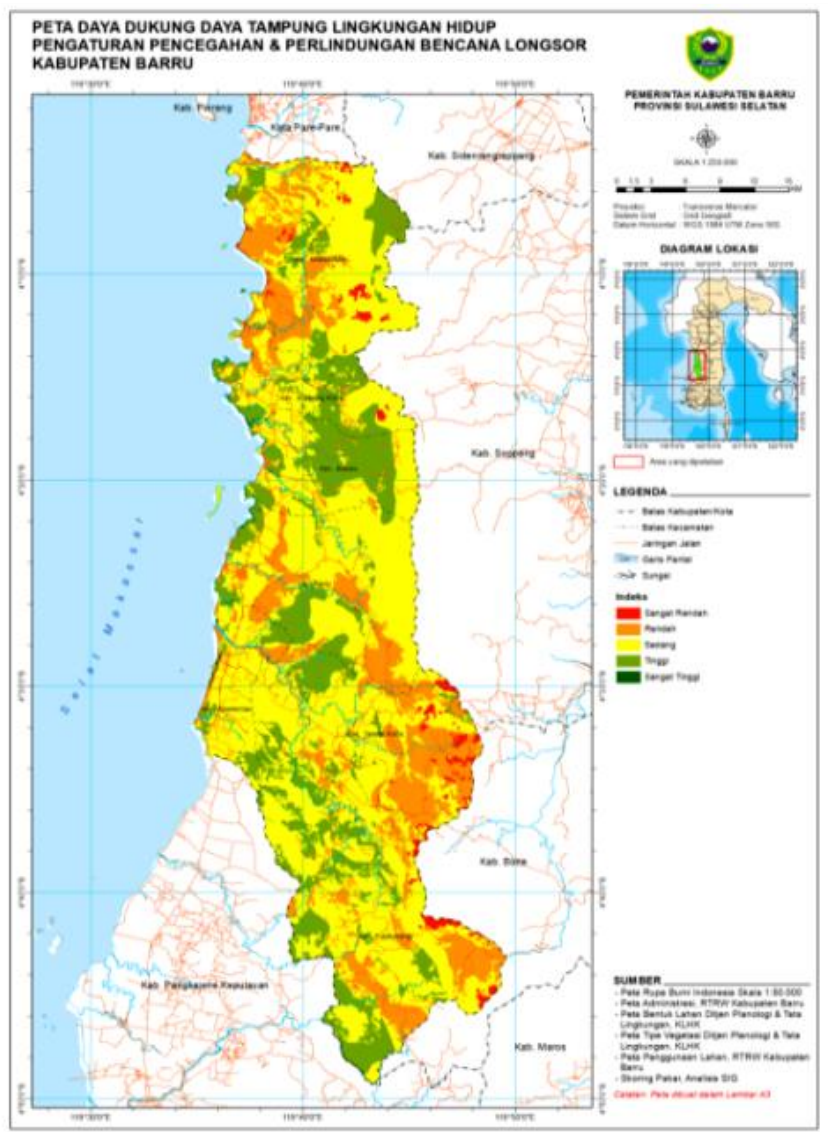
No	Kecamatan	Sangat rendah – rendah		Sedang		Tinggi – sangat tinggi	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Tanete Riaja	12.205,75	10,12	5.623,57	4,66	2.318,74	1,92
2	Tanete Rilau	3.933,75	3,26	1.775,40	1,47	1.322,78	1,10
3	Barru	7.423,08	6,15	9.995,90	8,29%	2.794,05	2,32
4	Soppeng Riaja	2.639,26	2,19	2.793,47	2,32%	2.637,86	0,40
5	Mallusetasi	8.400,95	6,96	10.151,39	8,41%	4.124,27	3,42
6	Pujananting	16.354,80	13,56	7.373,36	6,11%	7.766,90	6,44
7	Balusu	2.286,06	1,89	3.806,72	3,16%	4.913,96	4,07
Total		53.243,66	44,13	41.519,81	34,42	25.878,55	19,67

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dengan kategori tinggi (tinggi– sangat tinggi) yaitu kecamatan Pujananting dengan luas 7.766,90Ha (6,44%) sedangkan Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dengan kategori rendah (sangat rendah–rendah) yaitu kecamatan Tanete Riaja dengan luas 7.408,46 Ha (6,14%).

Gambar 2.10

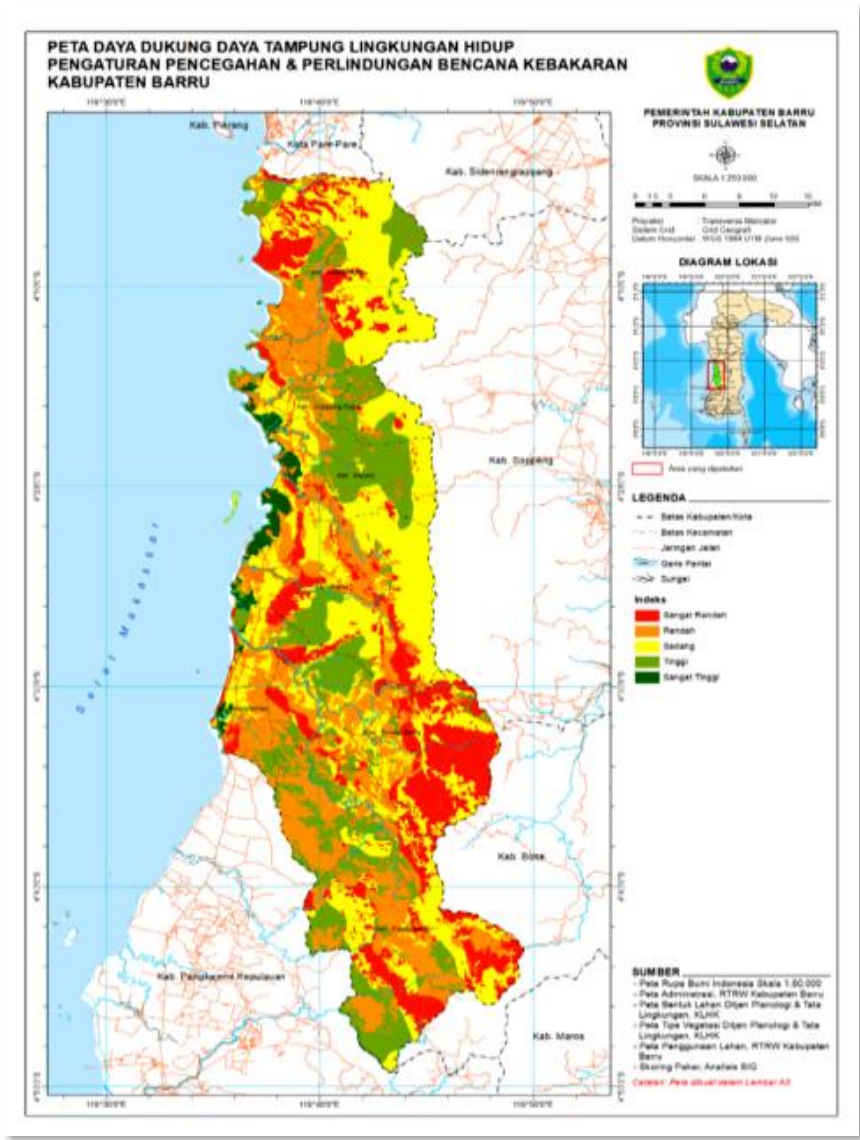
Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan
Perlindungan Bencana Longsor Kabupaten Barru Tahun 2020



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2020

Untuk Fungsi Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran dimana kinerja jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya kebakaran.

Gambar 2.11
Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan
Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2020



Sumber:Dinas Lingkungan Hidup 2020

Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi–sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah–rendah). Lahan yang berpotensi tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran memiliki luasan sebesar 25.698,16 Ha (19,67%). Kategori sedang seluas 69.603,17 Ha (57,69%) dan kategori kelas rendah (sangat rendah–rendah) seluas 25.340,68 Ha (21%).

Adapun rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18

Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Kecamatan	Sangat rendah – rendah		Sedang		Tinggi – sangat tinggi	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Tanete Riaja	917.43	0.76%	13,358.00	11.07%	201.65	0.17%
2	Tanete Rilau		0.00%	5,775.93	4.79%	474.80	0.39%
3	Barru	7.73	0.01%	9,227.40	7.65%	626.31	0.52%
4	Soppeng Riaja	433.52	0.36%	3,928.79	3.26%	205.53	0.17%
5	Mallusetasi	2,121.09	1.76%	6,757.33	5.60%	94.38	0.08%
6	Pujananting	1,289.52	1.07%	15,183.00	12.59%	559.71	0.46%
7	Balusu		0.00%	4,208.96	3.49%	49.05	0.04%
Total		4,769.29	3.95%	58,439.42	48.44%	2,211.43	1.83%

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Barru Tahun 2020

2.1.1.4 Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Barru menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun periode 2016-2020 sebesar 1,74 persen, dimana Jumlah penduduk Kabupaten Barru pada Tahun 2016 sebesar 173.163 jiwa meningkat menjadi sebesar 187.392 jiwa pada Tahun 2020. Jumlah penduduk Kabupaten Barru dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan, seperti diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk										Laju Pert. Pendudu k (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	Tanete Riaja	11.920	12.409	11.976	12.467	12.162	12.715	12.229	12.761	12.615	13.087	13,72
2	Tanete Rilau	17.044	17.755	17.279	17.959	17.869	18.570	18.031	18.642	18.639	19.149	20,17
3	Barru	19.572	20.442	19.933	20.704	20.910	21.657	21.216	22.061	22.018	22.728	23,88
4	Soppeng Riaja	8.182	8.877	8.317	8.926	8.675	9.337	8.769	9.409	8.944	9.604	9,90
5	Mallusetasi	12.870	13.456	12.920	13.448	13.223	13.745	13.349	13.751	13.700	14.046	14,81
6	Pujananting	6.164	6.310	6.231	6.419	6.332	6.569	6.402	6.615	6.606	6.749	7,13
7	Balusu	8.771	9.391	8.812	9.480	9.042	9.703	9.252	9.886	9.441	10.066	10,41
	Total	84.523	88.640	85.468	89.403	88.213	92.296	89.248	93.125	91.963	95.429	100.00

Sumber : Dinas Dukcapil 2020

Data kepadatan penduduk Kabupaten Barru berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyebutkan bahwa pada tahun

2020 dengan jumlah penduduk sebesar 187.392 jiwa, kepadatan penduduk Kabupaten Barru sebesar 163 Jiwa/ Km².

Distribusi penduduk di Kabupaten Barru pada Tahun 2020 ini terlihat sangat tinggi di Kecamatan Barru yakni sebesar 44.746 jiwa atau 23,87% penduduk, lalu disusul oleh Kecamatan Tanete Rilau sebesar 37.788 jiwa atau 20,16%, Kecamatan Mallusetasi sebesar 27.746 jiwa atau 14,80%, Kecamatan Tanete Riaja sebesar 25.702 jiwa atau 13,71%, Kecamatan Balusu sebesar 19.507 jiwa atau 10,41%, Kecamatan Soppeng Riaja sebesar 18.548 jiwa atau 9,89% dan Kecamatan Pujananting sebesar 13.355 jiwa atau 7,13%.

Komposisi penduduk menurut umur dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur tertentu. Komposisi menurut umur dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Usia belum produktif (kelompok umur <14 tahun)
- b. Usia produktif (kelompok umur antara 15 - 64 tahun),
- c. Usia tidak produktif (kelompok umur > 64 tahun)

Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Barru (Jiwa) Tahun 2020

No	Usia Non Produktif Dan Produktif	Jenis Kelamin		Penduduk	Persen
		laki2	perempuan		
		n(jiwa)	n(jiwa)	n(jiwa)	(%)
1.	00-14 Tahun (Usia Muda/Non Produktif)	23.480	21.998	45.478	24,27
2.	15-64 Tahun (Usia Produktif)	61.363	64.276	125.639	67,05
3.	>=65 Tahun (Usia Tua/Non Produktif)	7.120	9.155	16.275	8,69
Total		91.963	95.429	187.392	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barru masih didominasi oleh penduduk yang berusia produktif yaitu sebesar 125.639 Orang.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin adalah penduduk yang dibagi menjadi kelompok jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Struktur penduduk menurut jenis kelamin di suatu wilayah dapat dianalisis dengan menghitung rasio jenis kelamin (sex ratio) di wilayah tersebut. Rasio jenis kelamin merupakan angka yang didapat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Rasio jenis kelamin terakut penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana serta tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.21

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kab.Barru Tahun 2016 s.d 2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio
		L	P	Total	
1	2016	84.523	88.640	173.163	95
2	2017	85.468	89.403	174,871	96
3	2018	88.213	92.296	180.509	96
4	2019	89.248	93.125	182.373	96
5	2020	91.963	95.429	187.392	96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dan berdasarkan rasio pada tahun 2020 yang sebesar 96 berarti dari 100 orang perempuan terdapat 96 orang laki-laki.

Rumah tangga dapat diartikan satu orang anggota atau sekelompok orang yang tinggal bersama tetapi dengan atau tidak memiliki hubungan persaudaraan atau ikatan perkawinan. Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan jumlah rumah tangga pada tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22

Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga
Kab.Barru Tahun 2016 - 2020

Kode	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
731101	Tanete Riaja	6.893	7.060	7.420	7.692	8.189
731102	Tanete Rilau	10.115	10.288	10.958	11.308	11.870
731103	Barru	11.719	12.044	12.803	13.321	14.028
731104	Soppeng Riaja	5.132	5.195	5.571	5.754	5.991
731105	Mallusetasi	7.642	7.775	8.205	8.438	8.888
731106	Pujananting	3.547	3.621	3.867	4.014	4.237
731107	Balusu	5.455	5.527	5.883	6.130	6.432
TOTAL		50.503	51.510	54.707	56.657	59.635

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga di tiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni dari tahun 2016 sebesar 50.503 RT meningkat sampai dengan tahun 2020 sebesar 59.635 RT.

Tingkat pendidikan penduduk yang dicapai oleh suatu wilayah akan memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan di Kabupaten Barru pada tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Barru
Tahun 2016 s.d 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Belum/Tidak Punya ijazah	55.531	55.401	59.606	60.425	62.996
2	Tamat SD	54.094	54.012	54.136	54.058	54.021
3	Tamat SMP	23.126	23.841	23.939	24.110	25.353
4	Tamat SMA	29.036	29.700	30.082	30.573	31.448
5	Diploma	2.631	2.676	2.734	2.740	2.780
6	Sarjana S1	8.265	8.715	9.432	9.849	10.143
7	Sarjana S2	466	509	558	590	630
8	Sarjana S3	14	17	22	24	21
Total		173.163	174.871	180.509	182.373	187.392

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Barru masih banyak yang belum memiliki ijazah yakni sebesar 62.996 jiwa di Tahun 2020. Sementara untuk pendidikan tertinggi yakni strata 3 pada tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya menjadi 21 Jiwa.

Berdasarkan pengelompokan umur tersebut dapat diketahui rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) yang dapat digunakan untuk melihat angka ketergantungan suatu wilayah. Rasio beban tanggungan adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif. Persentase rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) yang rendah menunjukkan rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi.

Tabel 2.24
Rasio Ketergantungan Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	47.98	47.712	44.974	44.776	45.478
2	Jumlah Penduduk usia>64 tahun	13.273	13.562	15.285	16.340	16.275
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	61.253	61.274	60.259	61.116	61.753
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	110.653	111.493	120.250	121.257	125.639
5	Rasio ketergantungan (%)	55,36	54,96	50,11	50,40	49,15

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2020

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan EkonoI merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatannya itu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau yang dikenal dengan PDRB riil disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur laju pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi), angka yang ditunjukkan oleh PDRB merupakan penjumlahan seluruh pendapatan yang diperoleh perekonomian suatu daerah yang dikelompokkan dalam 17 sektor rincian kategori lapangan usaha yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sektor Jasa Lainnya.

Untuk mengetahui nilai dan distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan dan harga berlaku dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.25

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.436,85	1.501,20	1.581,31	1.652,72	1.662,67
2	Pertambangan dan Penggalian	119.72	125,04	130,68	138,15	139,11
3	Industri Pengolahan	212.67	222,58	232,09	253,70	247,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.34	5,70	6.10	6,39	6,80

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.05	4,28	4.62	5,10	5,80
6	Konstruksi	580,17	648,67	714,30	785	792,83
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	389,85	422,90	460,26	505,36	497,56
8	Transportasi dan Pergudangan	91,69	98,83	111,50	126,16	112,19
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36,61	39,17	43,32	48,28	48,24
10	Informasi dan Komunikasi	211,94	232,78	255,89	281,43	313,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	115,17	117,76	120,72	124,64	127,94
12	Real Estate	135,71	145,36	153,34	155,82	160,00
13	Jasa Perusahaan	0,96	1,04	1,14	1,25	1,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	293,58	309,79	338,93	375,96	371,71
15	Jasa Pendidikan	158,64	165,05	173,78	186,48	195,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98,15	102,55	108,28	117,30	125,65
17	Jasa Lainnya	25,17	27,29	30,29	33,68	31,60
Jumlah PDRB		3.916,34	4.169,98	4.420,93	4.797,43	4.839,12

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.26
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), 2016-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun (Miliar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.028,42	2.162,34	2.333,00	2.458,99	2.528,15
2	Pertambangan dan Penggalian	179,96	192,71	206,58	219,09	225,39
3	Industri Pengolahan	275,20	298,48	319,94	355,33	348,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,83	5,66	6,20	6,44	6,84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,14	5,66	6.16	6,96	7,93
6	Konstruksi	927,52	1.042,34	1.221,39	1.411,25	1.428,09

No	Lapangan Usaha	Tahun (Miliar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	468,54	532,23	605,96	686,75	688,31
8	Transportasi dan Pergudangan	138,67	152,01	173,04	197,96	181,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	51,37	56,88	63,73	73,22	75,78
10	Informasi dan Komunikasi	227,09	257,98	289,39	322,33	359,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	168,88	184,43	197,73	211,34	217,16
12	Real Estate	191,05	207,96	226,44	233,45	241,06
13	Jasa Perusahaan	1,28	1,36	1,51	1,74	1,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	430,70	467,86	533,93	612	616,47
15	Jasa Pendidikan	203,12	219,08	235,93	257,93	273,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,00	133,32	145,43	162,04	180,57
17	Jasa Lainnya	36,97	41,64	47,76	54,37	51,94
Jumlah PDRB		5.458,75	5.961,95	6.614,10	7.271,22	7.432,30

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.27
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Barru (Persen), 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Hb	Hk	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,10	36,48	36,10	35,78	35,58	35,40	33,82	34,45	34,36	34,36
2	Pertambangan dan Penggalian	3,30	3,06	3,24	3,00	3,39	3,02	3,01	2,88	2,87	2,87
3	Industri Pengolahan	5,05	5,44	5,01	5,35	5,06	5,29	4,89	5,29	5,11	5,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,14	0,10	0,14	0,10	0,14	0,09	0,13	0,14	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12
6	Konstruksi	16,98	14,81	17,44	15,54	16,59	15,58	19,41	16,36	16,38	16,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,73	10,09	9,15	10,30	9,64	10,67	9,44	10,53	10,28	10,28

8	Transportasi dan Pergudangan	2,54	2,35	2,55	2,38	2.74	2.42	2,72	2,63	2,32	2,32
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,94	0,94	1,00	0,94	0.99	0.95	1,01	1,01	1,00	1,00
10	Informasi dan Komunikasi	4,20	5,42	4,33	5,59	4.38	5.70	4,43	5,87	6,47	6,47
11	Jasa Keruangan dan Asuransi	3,10	2,96	3,10	2,83	3,23	2.89	2,91	2,60	2,64	2,64
12	Real Estate	3,56	3,47	3,55	3,49	3,61	3.52	3,21	3,25	3,31	3,31
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0.02	0.02	0,02	0.03	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,90	7,51	7,85	7,44	7,92	7.24	8,42	7,84	7,68	7,68
15	Jasa Pendidikan	3,73	4,06	3,70	3,97	3.69	3.96	3,55	3,89	4,04	4,04
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,20	2,51	2,24	2,46	2.24	2.42	2,23	2,45	2,60	2,60
17	Jasa Lainnya	0,70	0,64	0,70	0,66	0.74	0.67	0,75	0,70	0,65	0,65
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai produk domestik regional bruto (PDRB) baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sedangkan distribusi masing-masing kategori lapangan usaha terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) berfluktuatif dari tahun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB menurut sektor/kategori lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,02	4,48	5,34	4,52	0,6
2	Pertambangan dan Penggalian	3,68	4,44	4,51	5,72	0,69
3	Industri Pengolahan	6,11	4,66	4,27	9,31	-2,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,37	5,71	7,01	4,66	6,49

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,65	5,68	7,79	10,47	13,63
6	Konstruksi	7,87	11,81	10,12	9,90	1
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,03	8,48	8,84	9,80	-1,54
8	Transportasi dan Pergudangan	7,61	7,79	12,83	13,14	-11,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,63	6,99	10,59	11,45	-0,08
10	Informasi dan Komunikasi	9,78	9,83	9,93	9,98	11,25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,56	2,25	2,51	3,25	2,65
12	Real Estate	8,04	7,10	5,49	1,62	2,68
13	Jasa Perusahaan	3,21	7,63	9,67	10,27	-5,8
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,18	5,52	9,41	10,93	-1,13
15	Jasa Pendidikan	4,15	4,04	5,29	7,31	4,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,47	4,48	5,58	8,33	7,12
17	Jasa Lainnya	3,24	8,42	11,01	11,19	-6,18
Produk Domestik Regional Bruto		6,01	6,48	7,11	7,41	0,87

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas laju pertumbuhan masing-masing sektor lapangan usaha pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuatif namun cenderung meningkat. Sementara itu perbandingan PDRB atas Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan Wilayah sekitar diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29

Perbandingan PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) dan Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar
Tahun 2018 – 2020 (miliar RP)

No	Kabupaten/ Kota	ADHB			ADHK		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	6.614,19	7.271,22	7.432,30	4.466,54	4.797,43	4.839,12
2	Kota Pare-pare	6.602,36	7.230,40	7.323,65	4.639,40	4.947,79	4.944,03
3	Kab. Soppeng	10.005,94	10.937,39	11.382,12	6.494,39	6.993,51	7.146,65
4	Kab. Sidrap	12.937,37	13.893,72	14.073,43	8.075,03	8.450,69	8.401,06
5	Kab. Pangkep	23.944,89	25.990,11	25.662,55	16.168,91	17.205,16	16.915,23
6	Kab. Bone	33.120,53	36.034,84	36.560,64	20.660,07	22.108,04	22.053,74

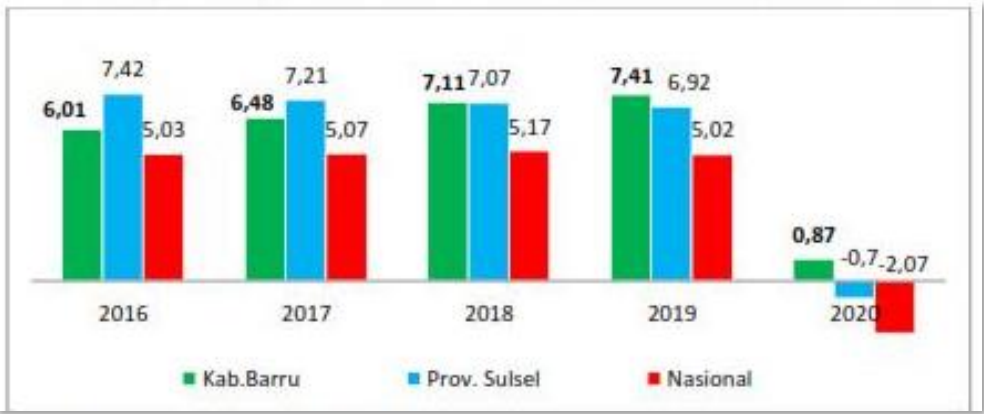
Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Triwulan I Tahun 2021

Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku seperti yang diuraikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota wilayah sekitar, Kabupaten Barru memiliki PDRB baik ADHK maupun ADHB yang lebih kecil dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016 – 2020



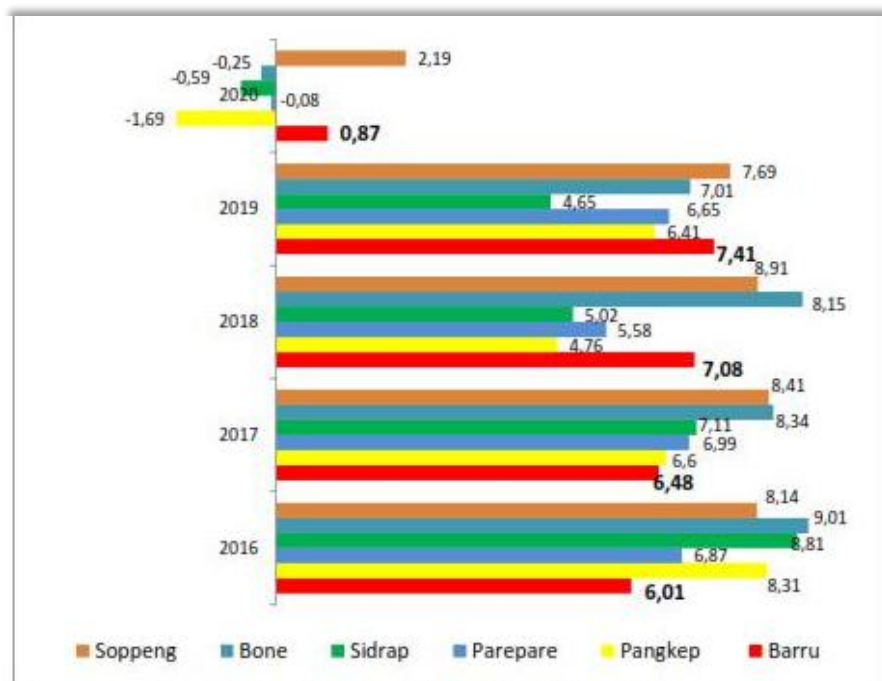
Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Grafik diatas menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru bertumbuh lebih cepat dari Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru berada pada angka 0,87 telah melebihi Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan yang masing masing berkontraksi negarif pada -2,07 dan -0,7. Hal ini diakibatkan oleh puncak masa pandemi covid19 di tahun 2020 sehingga sangat berpengaruh pada sektor-sektor ekonomi.

Sementara untuk Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 2.2

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016 - 2020



Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Triwulan I Tahun 2021

Grafik diatas menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru bertumbuh lebih cepat dari Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Selama kurun waktu tahun 2016 - 2020, kondisi perekonomian Kabupaten Barru sebelum terjadinya Pandemi Covid 19, menunjukkan trend peningkatan dari angka 6,01 pada Tahun 2016 meningkat menjadi 7,41 pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional capaian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru pada tahun 2019 telah melampaui capaian Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung positif dalam kurun waktu lima tahun ini dan telah mencapai target yang ditentukan memiliki faktor keberhasilan yakni Pertumbuhan konsumsi masyarakat, Investasi yang mulai tumbuh, dan intensifnya perbaikan serta pembangunan infrastruktur. Selain itu kondusifnya kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan atmosfer segar bagi perolehan PDRB Kabupaten Barru di tahun 2019 yang Lebih baik.

Pada Tahun 2020 karena adanya pandemi covid 19 mempengaruhi semua sektor, yang kemudian berimbas dengan terjadinya kontraksi perekonomian. Capaian 2020 pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi bertumbuh negative diangka -2,07 untuk nasional, sementara Provinsi berada pada angka -0,70. Untuk Kabupaten Barru sendiri PE tahun 2020 berada diangka 1,3. Angka PE Kabupaten Barru masih positif meskipun tumbuh melambat dipengaruhi oleh sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang menyumbang share terbesar tetap memproduksi dengan pencapaian yang maksimal.

Jika dibandingkan dengan wilayah tetangga yang berbatasan langsung yakni Kab. Pangkep, Kab. Soppeng, Kab. Sidrap, Kab. Bone dan Kota Parepare, Laju pertumbuhan ekonomi (PE) Kabupaten Barru meskipun pada tahun 2016 lebih rendah, pada tahun 2019 berada pada posisi dua setelah Kabupaten Soppeng. Dan jika di lcermati, diantara enam Kabupaten Kota ini, Laju PE Kabupaten Barru dari tahun 2016 - 2020 secara signifikan mengalami percepatan pertumbuhan dan meningkat tiap tahunnya jika dibandingkan dengan wilayah sekitar yang cenderung fluktuatif.

Sementara untuk Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada grafik di hawah ini.

Berdasarkan data pada grafik 2.2 tercermin gambaran terkait kondisi perekonomian Kabupaten Barru, dalam lima tahun terakhir terjadi fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional capaian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru pada tahun 2019 telah melampaui capaian Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar (Kab. Pangkep, Soppeng, Bone, Sidrap dan Kota Parepare), Laju pertumbuhan ekonomi (PE) Kabupaten Barru meskipun pada tahun 2016 lebih rendah, pada tahun 2019 berada pada posisi dua setelah Kabupaten Pangkep. Laju PE Kabupaten Barru dari tahun 2016-2020 secara signifikan mengalami percepatan pertumbuhan dan meningkat tiap tahunnya jika dibandingkan dengan wilayah sekitar yang cenderung fluktuatif. Dan pada Tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru tetap bertumbuh positif meskipun terjadi Pandemi Covid, jika dbandingkan dengan daerah tetangga yakni Kabupaten Pangkep, Sidrap, Bone dan kota Parepare yang bertumbuh negative, hanya Kabupaten Barru dan Soppeng yang bertumbuh positif.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat peranan masing-masing sektor lapangan usaha terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Struktur perekonomian Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barru Tahun 2016 - Tahun 2021

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
		%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,16	36,27	35,27	33,82	34,02
2	Pertambangan dan Penggalian	3,30	3,23	3,12	3,01	3,03
3	Industri Pengolahan	5,04	5,01	4,84	4,89	4,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,10	0,11

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
		%	%	%	%	%
6	Konstruksi	16,99	17,48	18,47	19,41	19,21
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,58	8,93	9,16	9,44	9,26
8	Transportasi dan Pergudangan	2,54	2,55	2,62	2,72	2,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,94	0,95	0,96	1,01	1,02
10	Informasi dan Komunikasi	4,16	4,33	4,38	4,43	4,84
11	Jasa Keruangan dan Asuransi	3,09	3,09	2,99	2,91	2,92
12	Real Estate	3,49	3,55	3,42	3,21	3,24
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,89	7,85	8,07	8,42	8,29
15	Jasa Pendidikan	3,72	3,67	3,57	3,55	3,68
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,20	2,24	2,20	2,23	2,43
17	Jasa Lainnya	0,68	0,70	0,72	0,75	0,7
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.31
Kontribusi Sektor Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Lapangan Usaha	2020
		%
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	13,33
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	7,15
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1,38
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB sektor Pertanian	97,37
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,34

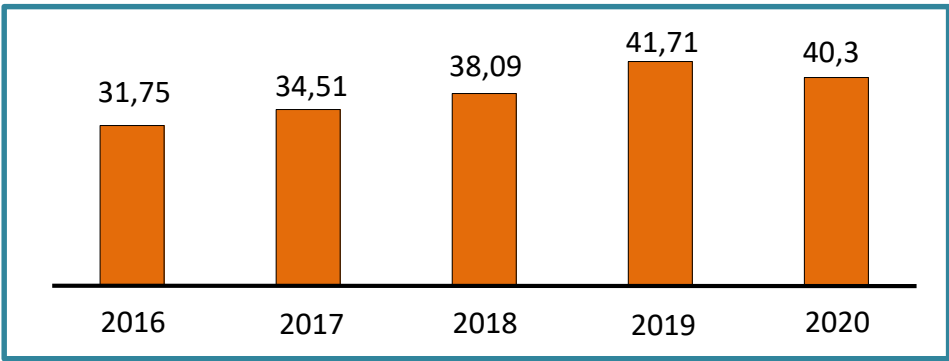
Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

2. PDRB Per kapita

Nilai PDRB per kapita sering digunakan sebagai alat ukur atau indikator tingkat kemakmuran suatu daerah, angka ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku lebih banyak digunakan oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi untuk melihat perkiraan pendapatan masyarakat pada waktu terkini, sedangkan atas dasar harga konstan biasanya dipergunakan untuk data perbandingan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2.3

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Barru Tahun 2016 s.d Tahun 2020

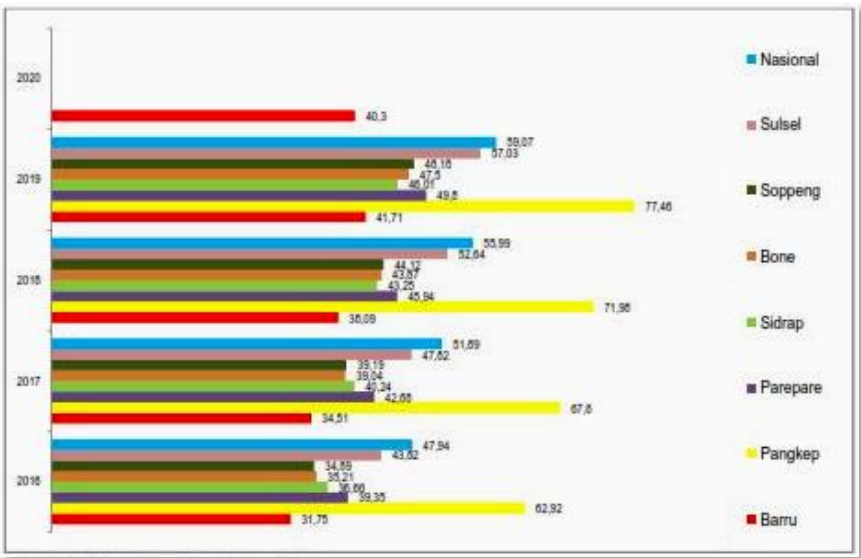


Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku (HB) terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2019, hanya pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dari Rp. 41.710.000 pada tahun 2019 menjadi 40.300.000 di tahun 2020. Penurunan tersebut masih dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid19. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar (Kab. Pangkep, Soppeng, Bone, Sidrap dan Kota Parepare), Kabupaten Barru merupakan yang paling rendah PDRB Perkapitanya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.4

Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB)
Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2016 s.d Tahun 2021
(dlm Juta Rupiah)



Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan PDRB perkapita kabupaten/kota wilayah sekitar, meskipun tiap tahunnya PDRB Perkapita terus mengalami tren peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 meskipun mengalami penurunan di tahun 2020, hal tersebut masih menunjukkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barru masih stabil, namun demikian Kabupaten Barru tetap berada di posisi paling bawah diantara 5 Kabupaten Kota pada wilayah sekitarnya.

3. Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga- harga secara umum dan terus menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu, hal ini bila berlebihan dapat berdampak penurunan daya beli masyarakat.

Data inflasi Kabupaten Barru sampai hari ini tidak tersedia (tidak dihitung) oleh Kabupaten Barru Dalam Angka (BPS) hanya ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan laju inflasi yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota Parepare, dan kota Palopo. Kabupaten/kota yang paling dekat dengan Kabupaten Barru adalah Kota Parepare. Laju inflasi Kabupaten/Kota yang menjadi sampel Kabupaten Barru Dalam Angka di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32

Perbandingan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016 -2020

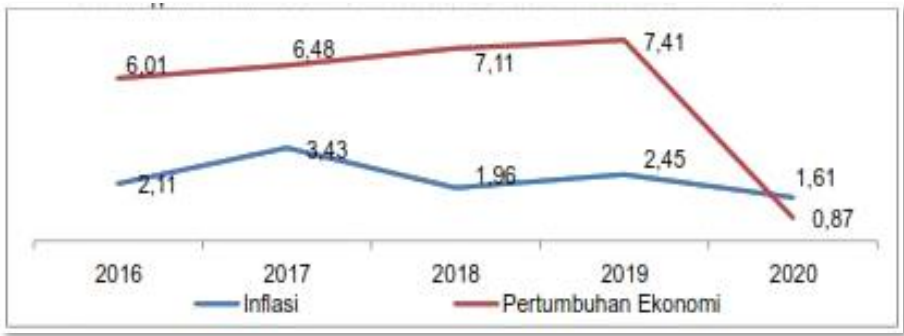
No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Bulukumba	1,48	4,66	3,85	2,25	2,30
2	Kab. Bone	1,5	5,54	4,69	1,64	1,89
3	Kota Makassar	3,18	2,11	3,48	2,43	2,13
4	Kota Pare-pare	2,11	3,43	1,96	2,45	1,61
5	Kota Palopo	2,74	3,95	4,19	1,91	1,21

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018 di hampir seluruh kota di Sulawesi Selatan. Tertinggi terjadi di Kabupaten Bone dan Bulukumba. Namun pada tahun 2020 rata – rata inflasi berada pada kisaran 2,30 – 1,21.

Dalam beberapa teori laju inflasi yang rendah dan stabil akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Barru dengan inflasi 2.11 – 2.45 sampai tahun 2019 dan memperlihatkan penurunan menjadi 1.61 di tahun 2020, hal ini masih dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi antara 6.01 – 7.14 meskipun di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi juga turun ke angka 0.87. Dengan inflasi senilai tersebut masih dapat mendorong sektor rill untuk berkembang serta sektor perdagangan berjalan dengan baik. Secara rinci hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 2.5
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Triwulan I Tahun 2021

4. Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator- Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) :

- 1. $GR < 0.4$ dikategorikan sebagaiketimpangan rendah
- 2. $0.4 < GR < 0.5$ dikategorikan sebagaiketimpangan sedang(Moderat)
- 3. $GR > 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Indeks Gini di Kabupaten Barru pada tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.6
Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru
Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS (Indikator Makro Sosek Prov. Sulsel Triwulan 4 2019)

Grafik di atas menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barru meskipun pada tahun 2017 meningkat sebesar 0.389, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 0.357. Penurunan Indeks Gini menunjukkan semakin meratanya pendapatan masyarakat yang berarti semakin inklusifnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru.

Tabel 2.33

Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016 – 2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	0,389	0,389	0,379	0,360	0,357
2	Kota Pare-pare	0,384	0,384	0,382	0,350	0,373
3	Kab. Soppeng	0,359	0,359	0,359	0,392	0,357
4	Kab.Sidrap	0,352	0,325	0,340	0,284	0,349
5	Kab. Pangkep	0,368	0,368	0,321	0,328	0,345
6	Kab. Bone		0,386	0,412	0,366	0,404

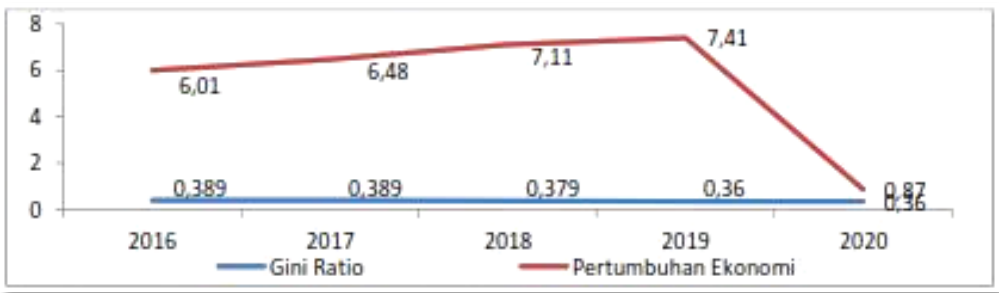
Sumber : BPS (Indikator Makro Sosek Prov. Sulsel Tahun 2021)

Berdasarkan Data yang disajikan diatas, Kabupaten Barru memiliki pertumbuhan ekonomi yang pertumbuhannya cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten wilayah sekitar dengan ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) yang setiap tahunnya menunjukkan trend yang semakin menurun. Ini mengindikasikan bahwa sejak tahun 2016 – tahun 2020 Kabupaten Barru telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta adanya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan yang mengarah pada kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah turut berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Konsen pemerintah Kabupaten barru dalam menurunkan kemiskinan memiliki peran yang cukup besar.

Pada gambar berikut menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh semakin menurunnya Indeks Gini berarti bahwa semakin inklusifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Gini secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 2.7

Hubungan Indeks Gini dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS (Indikator Makro Sosek Prov. Sulsel Triwulan 4 2019)

6. Indeks Williamson

Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yang digunakan dalam melihat disparitas yang terjadi antar wilayah dan lebih sensitif terhadap perubahan ketimpangan (Rustiadi *et al.* 2011). Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antara wilayah secara horizontal. Indeks Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika $Y_i = Y$ maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat ketimpangan antar kecamatan di satu kabupaten.

Menurut Rustiadi *et al.* (2011), wilayah yang memiliki PDRB per kapita tinggi, dan jumlah penduduknya relatif kecil, tingkat kesenjangannya tidak terlalu tinggi. Namun, besaran PDRB per kapita suatu wilayah relatif moderat apabila dibandingkan dengan wilayah lain yang kecil dengan jumlah penduduknya relatif besar, sehingga akan menyebabkan kesenjangan secara keseluruhan. Adapun indeks Williamson Kabupaten Barru seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34
Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Barru
Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Ketimpangan Williamson	0.25	0.24	0.27	0.29	0,29

Sumber : Data Olahan tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat tingkat disparitas yang terjadi di Kabupaten Barru berdasarkan PDRB Perkapita per Kecamatan. Dapat dilihat bahwa tingkat disparitas antar wilayah kecamatan di Kabupaten Barru pada tahun 2016 sebesar 0,25 meningkat pada tahun 2020 yang nilainya 0,29. Meskipun nilai indeks menunjukkan tingkat disparitas wilayah yang rendah yang berarti bahwa kinerja pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi wilayah dapat menekan terjadinya disparitas wilayah, namun kecendrungan terjadinya peningkatan nilai indeks menunjukkan bahwa jika tidak diantisipasi di masa mendatang akan rentan terjadi disparitas wilayah.

Sementara untuk melihat tingkat hirarki perkembangan wilayah berdasarkan jumlah ketersediaan fasilitas, luas wilayah, jumlah penduduk serta jarak tempuh wilayah ke pusat pelayanan digunakan metode skalogram. Metode yang banyak digunakan untuk menentukan hierarkhi wilayah oleh Struktural Analisis adalah *Guttman scales*. Metode ini mengidentifikasi hierarkhi pusat dari fasilitas umum yang dimiliki suatu wilayah. Skalogram yang merupakan penggabungan atau penyederhanaan Skala Guttman. Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh

setiap unit wilayah didata dan disusun dalam satu Tabel. Metode skalogram ini bisa digunakan dengan menuliskan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh setiap wilayah, atau menuliskan ada/tidaknya fasilitas tersebut di suatu wilayah tanpa memperhatikan jumlah/kuantitasnya.

Indeks Perkembangan Wilayah dikelompokkan ke dalam tiga kelas hirarki, yaitu; hirarki I (tinggi), hirarki II (sedang), hirarki III (rendah). Penentuannya didasarkan pada nilai hasil standar deviasi IPW dan nilai rataannya. Nilai yang didapat untuk selang hirarki dan digunakan untuk menentukan kelas hirarki dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.35

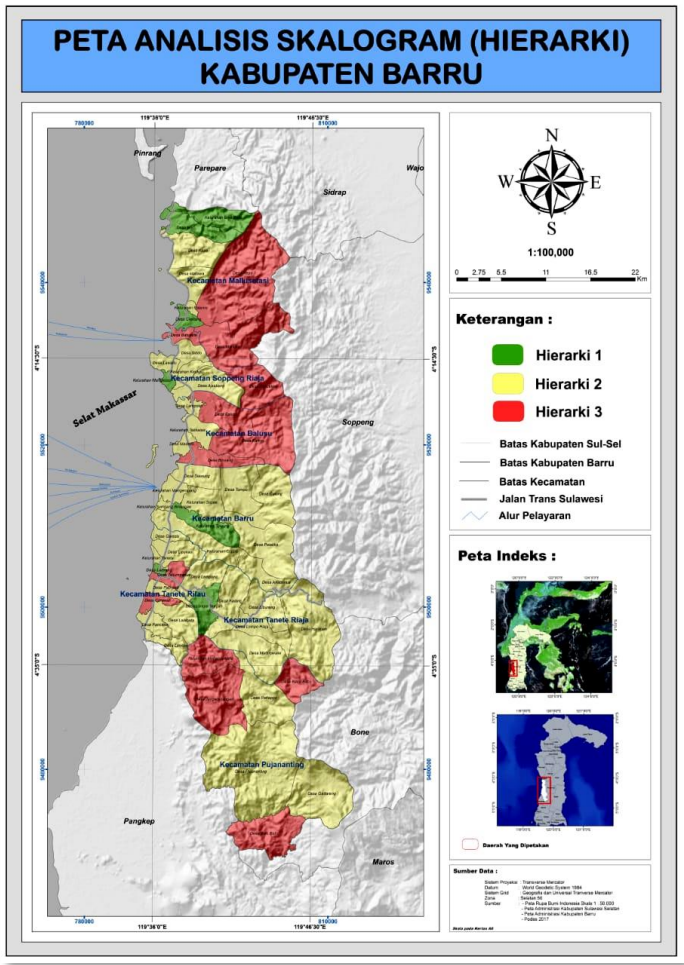
Penentuan nilai selang kelas hirarki untuk Analisis Skalogram

No	Kelas	Nilai Selang (x)	Tingkat Hirarki
1	Hirarki I	$X > [\text{rataan} + (\text{St Dev.IPW})]$	Tinggi
2	Hirarki II	$\text{rataan} < X < (\text{St Dev.IPW})$	Sedang
3	Hirarki III	$X < \text{rataan}$	Rendah

Tingkat perkembangan desa/kelurahan di tujuh kecamatan di Kabupaten Barru ditentukan dengan metode skalogram dimodifikasi dan dicerminkan oleh nilai Indeks Perkembangan Wilayah (IPW). Umumnya, semakin tinggi nilai IPW, semakin tinggi pula kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya. Sebaliknya, semakin rendah nilai IPW berarti semakin rendah kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya.

Dari hasil analisis skalogram dapat terlihat tingkat perkembangan wilayah desa dari pendekatan ketersediaan infrastruktur. Secara spasial hasil perhitungan skalogram dengan tiga hirarki dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.12
Peta Hasil Skalogram Kab.Barru Tahun 2020



Sumber : Data Olahan tahun 2020

Berdasarkan Gambar diatas terlihat penyebaran tingkat hirarki wilayah dari hasil analisis skalogram dimana tiga tingkatan hirarki di jelaskan sebagai berikut :

- Tingkat hirarki I (tinggi) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan tinggi. Terdapat tujuh (7) desa/kelurahan yang termasuk dalam hirarki I, atau hanya sekitar 12,73% desa/kelurahan dari seluruh jumlah desa yang ada di Kabupaten Barru. Hirarki I umumnya memiliki ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang lebih tinggi, lebih lengkap, dan tentunya lebih memadai daripada desa/kelurahan dengan hirarki yang lebih rendah (hirarki II dan III).
- Tingkat hirarki II (sedang) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan sedang. Terdapat 35 desa atau sekitar 63,64% dari seluruh jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Barru. Adapun wilayah desa/kelurahan dengan tingkat hirarki II mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut lebih sedikit dari hirarki I; (2) umumnya letaknya berada di pinggir wilayah berhirarki I dengan tingkat kehidupan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan wilayah di hirarki I.

- Tingkat hirarki III (rendah) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan rendah. Terdapat 13 desa/kelurahan atau sekitar 23,64% dari seluruh jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Barru. Desa/kelurahan pada tingkat hirarki III pada umumnya memiliki tingkat kehidupan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan desa/kelurahan yang termasuk ke dalam tingkat hirarki yang lebih tinggi.

Pada dasarnya, untuk fasilitas-fasilitas tertentu dengan kapasitas pemenuhan kebutuhan yang lebih kompleks, desa/kelurahan dengan tingkat hirarki yang lebih rendah masih harus mengaksesnya di desa/kelurahan dengan tingkat hirarki yang lebih tinggi.

7. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Angka Kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Adapun persentase garis kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kab.Barru
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Kemiskinan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)
1	2016	16.245	178.168	9,45	90,55
2	2017	16.760	174.871	9,71	90,29
3	2018	15.680	173.451	9,04	90,96
4	2019	14.920	182.373	8,57	91,43
5	2020	14.440	187.392	8,26	91,74

Sumber : BPS (Indikator Makro Sosek Prov. Sulsel Triwulan 4 2019)

Dari tabel diatas terlihat bahwa trend tingkat kemiskinan Kabupaten Barru berfluktuatif, proses pembangunan di kabupaten Barru terus berkontribusi dalam trend pertumbuhan penduduk miskin, meskipun relatif tidak stabil. Selain itu fokus penanggulangan kemiskinan dalam bentuk terwujudnya program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berkontribusi secara langsung maupun program-program prioritas pembangunan lainnya terus berusaha menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten Barru.

Disisi lain kondisi kemiskinan dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kinerja yang menurun. Adapun indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.8

indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan
di Kabupaten Barru Tahun 2016-2020



Sumber : BPS (Indikator Makro Sosek Prov. Sulsel Semester I Tahun 2021)

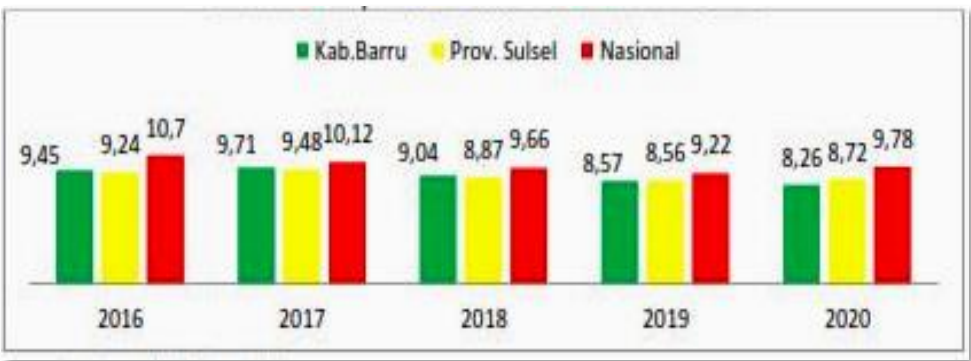
Indeks kedalaman dan indeks keparahan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, indikator ini menunjukkan kesenjangan dan kedalaman tingkat kemiskinan di suatu wilayah, pada gambar diatas terlihat bahwa angka P1 dan P2 Kabupaten Barru

berfluktuatif, namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini berindikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Barru cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Adapun perbandingan angka kemiskinan antara Kabupaten Barru dengan Capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.9

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Tahun 2021

Berdasarkan angka diatas terlihat bahwa persentase kemiskinan Kabupaten Barru selalu berada di bawah angka kemiskinan Nasional, sementara jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2020 berhasil berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk perbandingan dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.37

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab.Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2018-2020

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2
1	Kab. Barru	9,04	1,58	0,37	8,57	1,07	0,21	8,26	1,31	0,36
2	Kota Pare-pare	5,59	0,75	0,17	5,26	0,71	0,15	5,44	0,94	0,24
3	Kab. Soppeng	7,50	1,39	0,37	7,25	0,69	0,12	7,59	0,83	0,16
4	Kab.Sidrap	5,16	0,94	0,23	4,79	0,60	0,13	5,05	0,82	0,19
5	Kab. Pangkep	15,10	3,12	0,92	14,06	1,81	0,31	13,96	2,52	0,71
6	Kab. Bone	10,55		0,38	10,06		0,34	10,68		

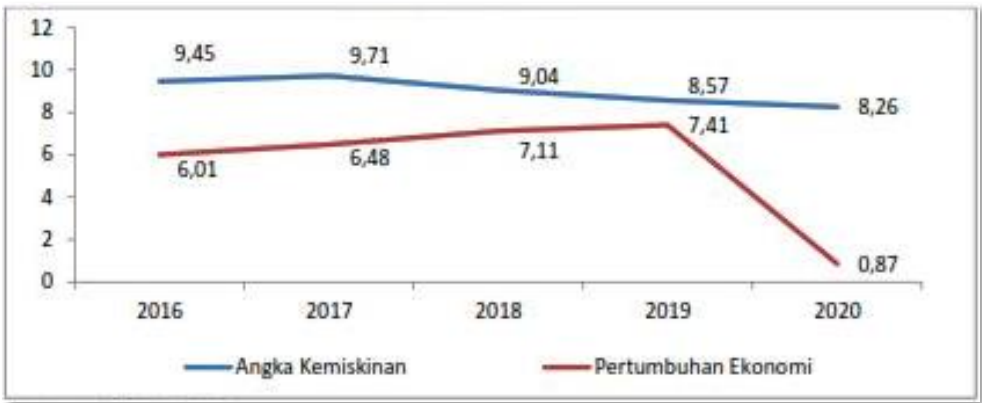
Sumber : BPS (Indikator Makro Sosek Prov. Sulsel Semester I Tahun 2021)

Pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi sangat besar terutama melalui pengeluaran pemerintah untuk membangun

berbagai sarana dan prasarana pemerintahan, berbagai proyek pembangunan memberikan stimulasi kepada pengusaha-pengusaha local untuk meningkatkan pendapatan usahanya, grafik dibawah ini menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Barru.

Grafik 2.10

Perbandingan perubahan Persentase Penduduk Miskin dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020



Sumber : BPS Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas terlihat korelasi sangat erat antara pertumbuhan ekonomi dengan persentase penduduk miskin. Jika Pertumbunan ekonomi meningkatkan persentase penduduk miskin juga menurun terutama tercermin dalam tiga tahun terakhir yakni tahun 2018–2020. Peningkatan kesejahteraan dan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu.

8. Persentase PAD terhadap pendapatan

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang salah satu komponennya adalah pajak daerah. Persentase PAD terhadap pendapatan digunakan untuk mengetahui proporsi PAD pada pendapatan daerah. Adapun persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38

Persentase PAD terhadap Pendapatan di Kabupaten Barru Tahun 2018-2020

No	Tahun	PAD	Total Pendapatan	Persentase
1	2018	104,627,706,924.57	963,311,132,483.57	10.86
2	2019	103,870,138,497.26	919,299,816,845.33	11.30
3	2020	101,324,046,920.50	914,860,358,822.21	11.08

Sumber : BPKAD Kab Barru Tahun 2020

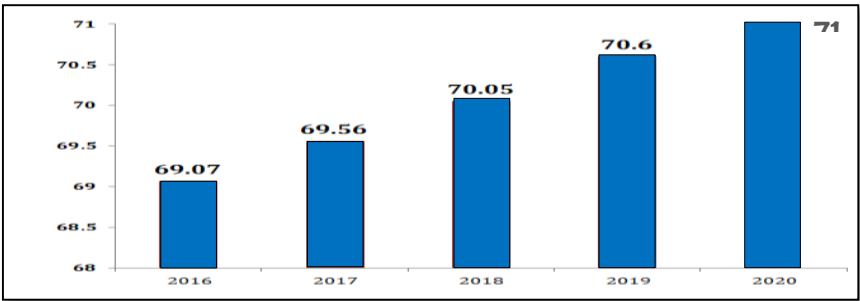
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Adapun IPM Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.11

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

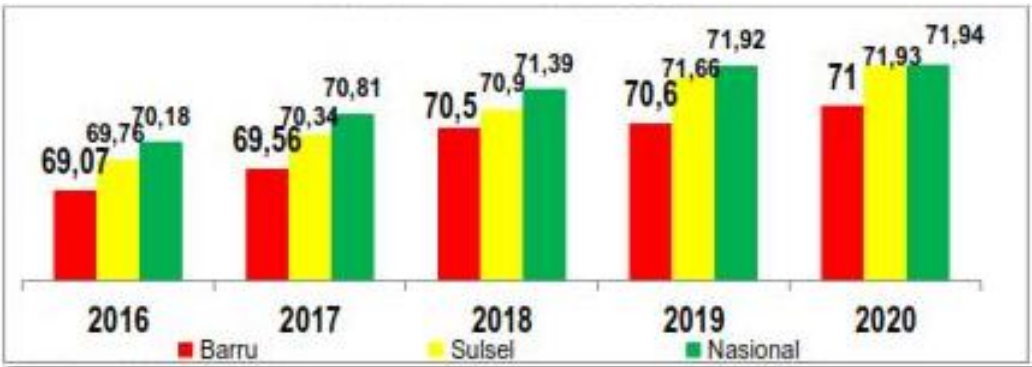


Sumber : BPS (Indikator Makro Sosek Prov. Sulsel Semester I Tahun 2021)

IPM Kabupaten Barru dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan trend positif, meningkat tiap tahunnya. Namun ketika disandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, capaian IPM Kabupaten Barru masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, seperti yang tersaji pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.12

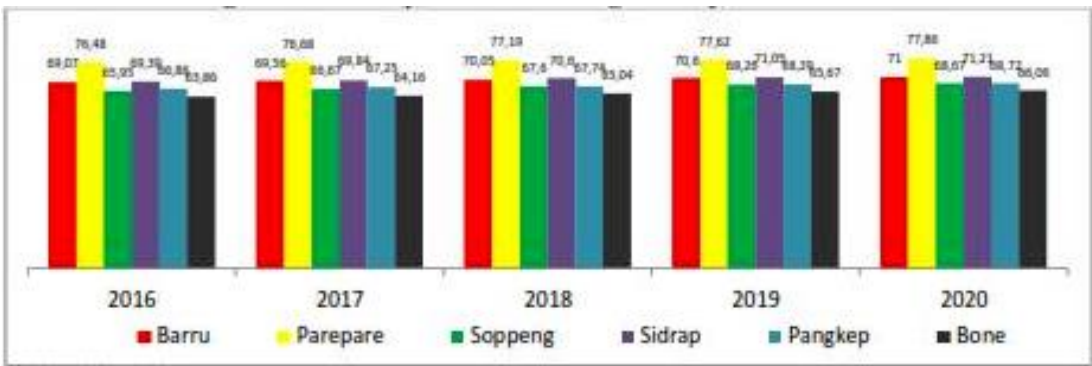
Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS (Indikator Makro Sosek Prov. Sulsel Semester I Tahun 2021)

Sementara itu, untuk perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar yang terdiri dari Kabupaten Pangkep, Bone, Soppeng, Sidrap dan Kota Parepare dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.13
Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS (Indikator Makro Sosek Prov. Sulsel Semester I Tahun 2021)

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian Kabupaten Barru untuk IPM berada pada posisi ketiga setelah Kota Parepare, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bone. Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri Kabupaten Barru berada pada posisi 15 diantara 24 Kabupaten/Kota.

Untuk indikator pembangun IPM sendiri pada Tahun 2015 metode perhitungan IPM telah dilakukan revisi/perbaikan dengan menyesuaikan metode yang dilakukan *United Nation Development Programme* (UNDP). Adapun indikatornya adalah :

a. Indeks Kesehatan

Diperoleh dari angka harapan hidup yang merupakan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

b. Indeks Pendidikan

Diperoleh dari dua unsur yaitu angka harapan lama bersekolah dan rata-rata lama sekolah dimana angka harapan lama sekolah mencerminkan pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan rata-rata lama bersekolah merupakan angka yang menggambarkan tingkat capain penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dalam bersekolah. Interpretasinya bahwa semakin tinggi angka lama bersekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai.

c. Paritas Daya Beli

Dikenal dengan *Purchasing Power Parity* (PPP); adalah PDRB riil per kapita yang telah disesuaikan dengan menggunakan PDRB riil per kapita, berarti mengasumsikan bahwa hasil pendapatan bruto daerah dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan indikator pendukungnya selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39

Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Harapan Hidup	68.16	68.30	68.60	68,91	69,02
2	Harapan Lama Sekolah	13.54	13.55	13.56	13,57	13,58
3	Rata-rata Lama Sekolah	7.60	7.85	7.86	7,96	8,23
4	Paritas Daya Beli (Rp.000.000)	10.15	10.28	10.62	10,91	10,92
IPM		68.64	69.07	69.56	69.56	71.00

Sumber : BPS (Indikator Makro Sosek Prov. Sulsel Semester I Tahun 2021)

Angka statistik di atas mengindikasikan performa pembangunan pemerintah Kabupaten Barru, realisasi program dan kegiatan selama periode tersebut terbukti mampu meningkatkan derajat dan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Barru.

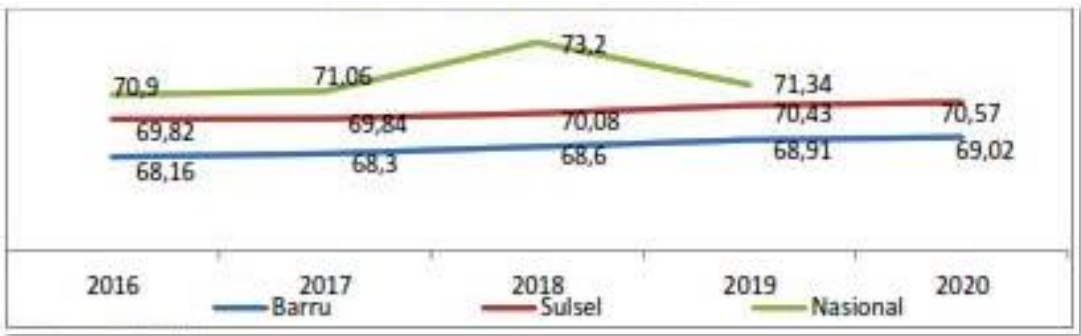
2. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan digambarkan melalui Angka Harapan Hidup yang mempersentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Barru jika dibandingkan antara capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar tersaji secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.14

Perbandingan Angka Harapan Hidup Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS (Indikator Makro Sosek Prov. Sulsel Semester I Tahun 2021)

Tabel 2.40
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Barru
dengan wilayah sekitar Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	68.16	68.3	68.60	68.91	69.02
2	Kota Pare-pare	70.64	70.69	70.88	71.18	71.27
3	Kab. Soppeng	68.62	68.72	69.02	69.43	69.65
4	Kab.Sidrap	68.69	68.82	69.15	69.59	69.83
5	Kab. Pangkep	65.77	65.86	66.12	66.49	66.66
6	Kab. Bone	66,12	66.22	66.50	66.88	67.07

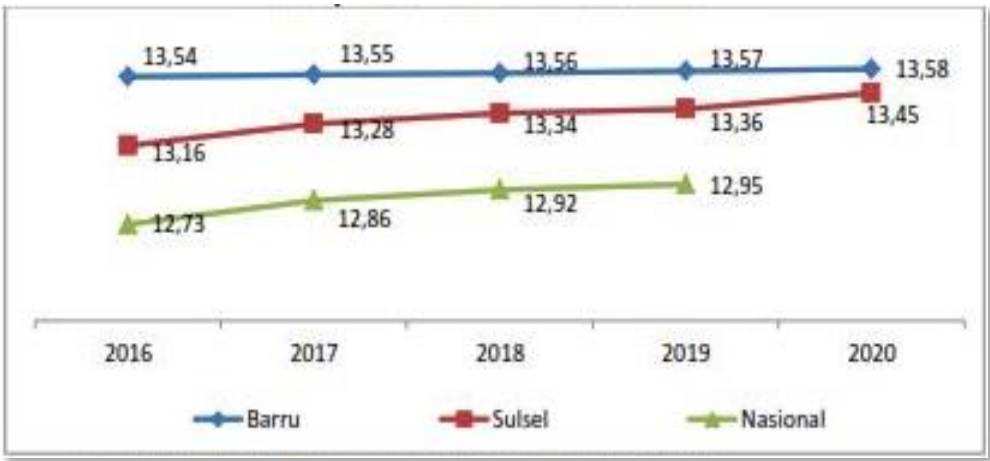
Sumber : BPS Tahun 2021

Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa meskipun dengan pergerakan lambat, AHH Kabupaten Barru selalu meningkat sejak tahun 2016. Namun jika dibandingkan dengan capaian Nasional, capaian provinsi sulsel dan wilayah sekitar, AHH Kabupaten Barru berada di posisi dua terbawah, dengan menyisakan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Pangkep yang lebih rendah dibanding capaian Kabupaten Barru. Pemerintah Kabupaten Barru perlu memperhatikan pembangunan dibidang kesehatan sebagai investasi untuk mendukung peningkatan kualitas SDM. Masyarakat yang terbiasa berlaku hidup bersih dan sehat, berpeluang lebih produktif dan menghemat pengeluaran biaya berobat sehingga menyumbangkan peluang hidup sejahtera lebih besar.

3. Indeks Pendidikan

Indikator pembangun IPM berikutnya adalah Indeks Pendidikan yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk angka Harapan Lama sekolah Tahun 2020 jika disandingkan antara capaian HLS Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan wilayah sekitar disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.15
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian
Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Tabel 2.41
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2016-2020

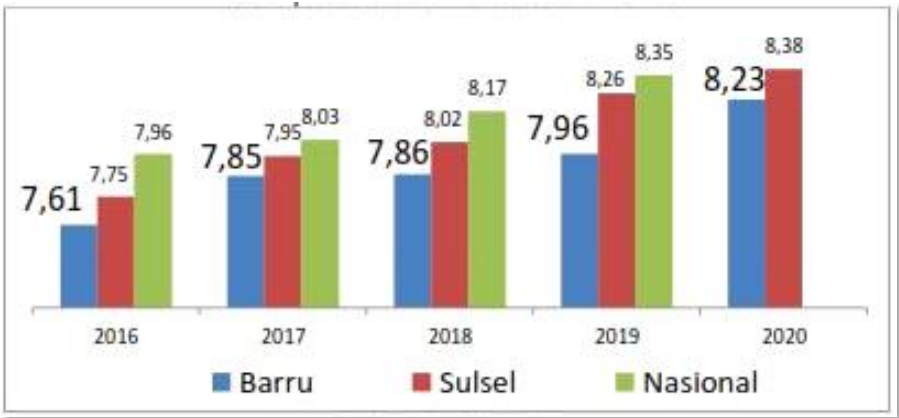
No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	13.54	13.55	13.56	13.57	13,58
2	Kota Pare-pare	14.45	14.46	14.47	14.49	14.50
3	Kab. Soppeng	12.20	12.33	12.57	12.73	12.90
4	Kab.Sidrap	12.89	12.90	12.91	12.93	12.95
5	Kab. Pangkep	12.39	12.40	12.41	12.51	12.76
6	Kab. Bone	12.42	12.43	12.67	12.80	12.88

Sumber : BPS Tahun 2021

Berdasarkan data statistik di atas terlihat bahwa capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan begitupun dengan Wilayah Sekitar. Capaian Kabupaten Barru hanya menempatkan Kota Parepare berada diatas dibanding kabupaten/kota pada wilayah sekitar lainnya.

Selanjutnya masih dari Dimensi Pendidikan, Indikator pembangun IPM Lainnya adalah angka Rata-rata lama sekolah (RLS). Perbandingan antara capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar lainnya disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.16
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.42
Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	7.6	7.85	7.86	7.96	8.23
2	Kota Pare-pare	10.02	10.09	10.29	10.30	10.45
3	Kab. Soppeng	7.06	7.42	7.63	7.74	7.81
4	Kab.Sidrap	7.33	7.52	7.79	7.83	7.84

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
5	Kab. Pangkep	7.33	7.48	7.49	7.60	7.66
6	Kab. Bone	6.76	6.77	6.97	6.98	7.15

Sumber : BPS Tahun 2021

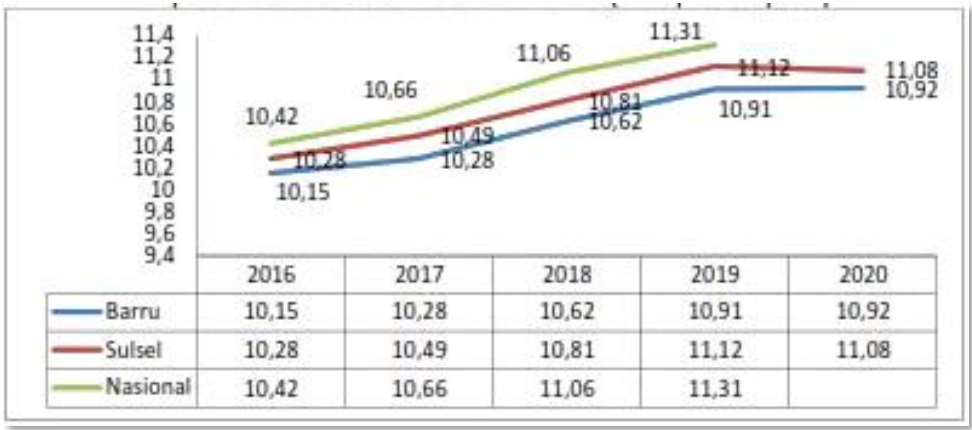
Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Barru berbeda dengan capaian Angka Harapan Lama Sekolah. Untuk sektor pendidikan lainnya yang merupakan pendukung IPM, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Nasional, sementara berfluktuatif jika dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, dan berada pada posisi kedua setelah Kota Parepare jika dibandingkan dengan wilayah sekitar.

4. Paritas Daya Beli

Indikator standart hidup layak pada komponen IPM diproyeksi berdasarkan nilai pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya kondisi ekonomi dan pemerataannya. Capaian Paritas Daya Beli Kabupaten Barru Tahun 2020 jika dibandingkan dengan capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar lainnya disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.17

Perbandingan Paritas Daya Beli Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016-2020 (dlm Juta Rupiah)



Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.43

Perbandingan Paritas Daya Beli Kabupaten Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	7.6	7.85	7.86	7.96	8.23
2	Kota Pare-pare	10.02	10.09	10.29	10.30	10.45
3	Kab. Soppeng	7.06	7.42	7.63	7.74	7.81
4	Kab.Sidrap	7.33	7.52	7.79	7.83	7.84
5	Kab. Pangkep	7.33	7.48	7.49	7.60	7.66
6	Kab. Bone				8.95	8.96

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa Paritas Daya Beli Kabupaten Barru telah menunjukkan peningkatan tiap tahunnya namun tetap perlu mendapat perhatian, dikarenakan jika dibandingkan dengan capaian Nasional dan Provinsi masih rendah, juga dengan wilayah sekitar.

5. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tiak terserap di dunia kerja. TPAK dan TPT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

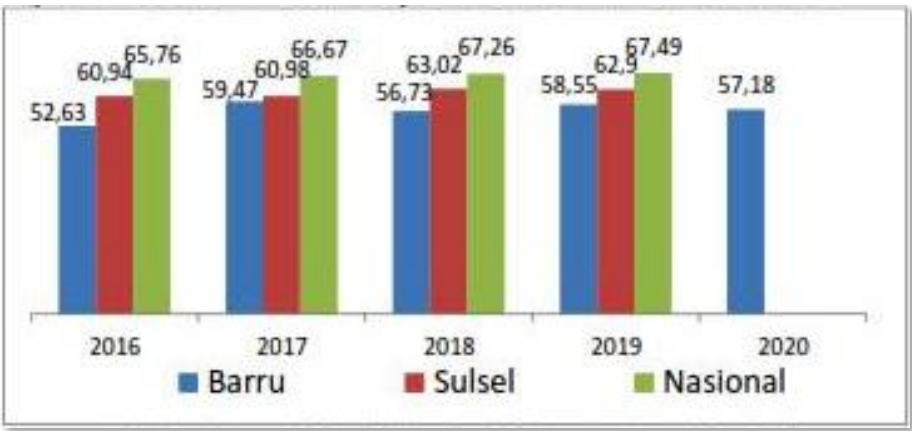
No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	52,63	59,47	56,73	58,55	57,18
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,68	5,60	5,38	5,79	6,39

Sumber : BPS Povinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Sepanjang tahun 2016 – 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami fluktuatif, namun diakhir periode tetap meningkat dari 52,62% pada tahun 2016 meningkat di tahun 2019 58,55% namun mengalami penurunan di tahun 2020 57,18%. Sementara kondisi ketenagakerjaan akan lebih tergambarkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. TPT di Kabupaten Barru terlihat berfluktuasi dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,68% dan mencapai pengangguran terendah pada tahun 2018 yaitu hanya 5,38%.

Grafik 2.18

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.45

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	52,63	59,47	56,73	58,55	57.18
2	Kota Pare-pare	60,25	66,65	64,09	63,27	65.53
3	Kab. Soppeng	56,29	60,84	63,64	57,47	57.5
4	Kab.Sidrap	53,27	49,17	56,22	55,30	56.92
5	Kab. Pangkep	59,25	59,36	63,50	61,22	63.85
6	Kab. Bone					60.57

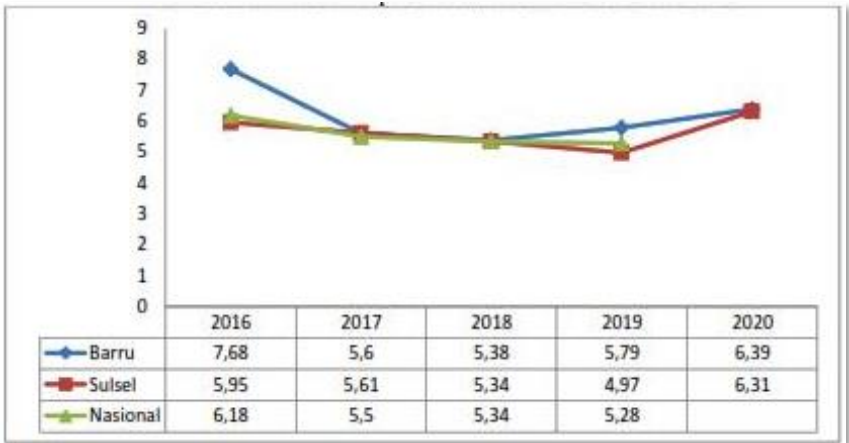
Sumber : BPS Tahun 2021

TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Dari tabel diatas sejak tahun 2016-2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Barru selalu di atas 50%, dengan TPAK tertinggi yaitu mencapai 59,47% pada Tahun 2019.

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Grafik 2.19

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Tabel 2.46

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	7.68	5.60	5.38	5.79	6.39
2	Kota Pare-pare	8.48	6.47	6.81	6.42	7.14
3	Kab. Soppeng	2.96	2.71	2.66	3.53	4.42
4	Kab.Sidrap	6.97	3.17	4.70	4.75	5.91
5	Kab. Pangkep	7.01	7.05	6.91	5.41	5.18
6	Kab. Bone			2.56	3..96	3.20

Sumber : BPS Tahun 2021

Berdasarkan data statistik diatas menunjukkan bahwa baik TAPK maupun TPT, capaian yang diperoleh Kabupaten Barru menunjukkan kinerja yang rendah.

Arthur Okun menemukan bahwa tingkat pengangguran menurun pada tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil tinggi, sedangkan tingkat pengangguran meningkat pada tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil tetap rendah atau bahkan negative. Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Untuk Kabupaten Barru hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.20
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas hubungan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016-2020 menunjukkan hubungan negative. Hal tersebut ditunjukkan oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 0,16 persen mampu menyerap tenaga kerja sebesar 2,08 persen. Begitupun pada tahun 2018 kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,73 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 0,22. Walaupun pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan pekerjaan namun semakin kecil bila dibandingkan dengan tahun 2017. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan yang awalnya meningkatkan produksinya melalui penambahan tenaga kerja beralih pada peningkatan penggunaan teknologi.

Fokus perusahaan yang beralih dari padat karya menjadi padat modal semakin bertambah pada tahun 2019 hal tersebut ditunjukkan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,30 persen tidak mampu menciptakan lapangan kerja sehingga terjadi peningkatan pengangguran terbuka. Berbeda pada tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi secara signifikan yang berbanding lurus dengan tingkat pengangguran yang mengalami kenaikan, hal ini akibat dari pandemic covid19 yang memaksa masyarakat harus lebih survive.

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pemberdayaan perempuan merupakan urusan yang sangat penting untuk menuju pencapaian kesetaraan gender yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan. Sedangkan perlindungan anak merupakan amanah undang-undang nomor 35 tahun 2013 tentang perlindungan anak dan dengan ditandatanganinya deklarasi menuju kabupaten layak anak pada tahun 2019, mengharuskan Kabupaten Barru memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan

hak-hak anak. Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, selama periode 2016 - 2020 telah disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. capaian pemberdayaan Perempuan ditunjukkan dari angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	95.51	95.44	95.42	95.52
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	63.54	69.24	63.31	63.96

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dari angka IPG dan IDG pada tabel diatas memperlihatkan bahwa angka untuk IPG dalam periode tahun 2016 - 2020 menunjukkan perolehan yang memuaskan meskipun mengalami penurunan. selain itu pada Tahun 2021 telah terbit Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa, untuk itu sangat penting memberikan perhatian dan fokus terhadap Pemberdayaan Perempuan.

Untuk perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Barru juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, diharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah dapat melindungi hak-hak anak di Kabupaten Barru.

7. Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020 - 2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Barru telah berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2020 adalah 46,34 dengan kategori C. Uraian komponen penilaiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.48
Komponen Penilaian Indeks Reformasi Biokrasi
Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2020
A	Komponen Pengungkit		
I.	Pemenuhan	20,00	5,87
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,43
III.	Reform	30,00	8,25
	Total Komponen Pengungkit	60,00	19,55
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,78
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,70
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,15
4	Kinerja Organisasi	10,00	2,16
	Total Komponen Hasil	40,00	19,55
	Indeks reformasi Birokrasi(Pengungkit+Hasil)	100,00	46,34

8. Nilai sakisip

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinrah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Barru. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berotientasi hasil (result oriented goverment) serta memberikan saran yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru memperoleh nilai 55,52 atau predikat CC. hasil evaluasi tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berotientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Barru belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut, Rincian hasil evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut.

Tabel 2.49

Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019-2020

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2019	2020
A	Komponen Pengungkit	30	20,79	21,04
B	Komponen Hasil	25	10,59	11,04
C	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	15	9,22	9,28
D	Kualitas Pelayanan Publik	10	3,46	4,18
E	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20	9,97	9,98
Nilai Hasil Evaluasi		100	54,03	55,52
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	CC

9. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Bidang Urusan Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman kanak-kanak adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6(enam) tahun yang dilakukan mulai pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal. Perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51

Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	73,91%	78,28%	79,21%	80,25%	80,05%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat angka partisipasi PAUD di Kabupaten Barru, terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang bersekolah pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sehingga dibutuhkan

upaya peningkatan minat orang tua untuk mengikutsertakan anaknya pada jenjang pendidikan PAUD.

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. Angka partisipasi kasar (APK) yang meliputi APK SD/MI, APK SMP/MTs di Kabupaten Barru tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	105,92%	112,87%	99,32%	100,49%	100,67%
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	106,03%	113,81%	103,23%	107,82%	112,09%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Barru pada jenjang SD Sederajat, dan jenjang SMP Sederajat tahun 2016 - 2020, yang berfluktuatif. APK tertinggi pada jenjang SD Sederajat yaitu 112,87% pada tahun 2017, kemudian jenjang SMP Sederajat sebesar 113,81% pada tahun 2017. Penyebab APKSD Sederajat maupun SMP Sederajat mencapai lebih dari 100%, hal ini disebabkan karena terdapat anak berusia kurang dari 7 tahun dan anak berusia lebih dari 15 tahun yang sekolah di jenjang SD/SMP Sederajat.

c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A dan SMP/ MTs/ Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka partisipasi murni yang meliputi angka partisipasi murni SD/MI, angka partisipasi murni SMP/MTs di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket Adan SMP/MTs/
Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,46%	93,67%	92,14	94,71%	93,99%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	88,59%	86,58%	85,61	90,42%	90,50%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas selama kurun waktu 5 (lima) tahun APM SD Sederajat dan APM SMP Sederajat menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun berfluktuatif. Baik APM SD Sederajat maupun APM SMP Sederajat belum mencapai angka ideal karena terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah dan anak usia sekolah yang sekolah tidak pada jenjang kelompok usianya.

d. Angka partisipasi sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A dan SMP/ MTs/ Paket B

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai dan dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan dan merupakan alat ukur pemerataan pendidikan yang paling mendekati dan paling baik jika dibandingkan dengan APK atau APM. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.54

Angka Partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	89,46%	93,67%	92,13%	100,40%	97,69%
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	88,59%	86,58%	85,61%	107,38%	93,41%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 100 anak usia 07-12 tahun yang sekolah pada SD/MI/Paket A menunjukkan angka yang berfluktuatif, di tahun 2019 mencapai angka 100,40% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 97,69%, Sementara pada tingkat pendidikan SMP/MTs/Paket B pada tahun 2019 mencapai 107,38% dan juga mengalami penurunan di tahun 2020 93,41 %. Kinerja yang diperlihatkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa adanya penurunan kesadaran masyarakat untuk bersekolah. Hal ini diindikasikan seiring dengan pandemi covid19, kesadaran untuk bersekolah juga menurun.

e. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI & SMP/MTs Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,12%	0,38%	0,18%	0,38%	0,44%
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,41%	0,59%	0,35%	1,08%	1,19%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

Dari tabel di atas, angka putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs fluktuatif namun cenderung meningkat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya APS SD/MI dan SMP/MTs antara lain yaitu siswa yang motivasi belajarnya rendah, tingkat ekonomi keluarga, dan karena alasan sosial budaya lainnya.

f. Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs

Angka kelulusan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses belajar mengajar disekolah. Semakin baik proses belajar mengajar, maka persentase angka kelulusan semakin baik pula. Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	98,81%	100%
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%	97,11%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa AL SD/MI dan AL SMP/MTs tahun 2016 – 2018 menunjukkan pencapaian hingga 100%, namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan hanya diangka 97 – 98%. Hal ini disebabkan karena kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan. Oleh karena itu nampaknya aspek mutu lulusan kurang mendapatkan perhatian.

g. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka Melanjutkan berguna untuk melihat apakah penduduk usia sekolah menyelesaikan pendidikannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Idealnya adalah semua lulusan melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya.

Namun di Kabupaten Barru pada tahun 2017 dan 2018, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs melebihi 100% disebabkan karena jumlah siswa/siswi yang masuk sekolah SMP/MTs lebih besar dari jumlah siswa/siswi yang lulus SD/MI yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI dan SMP/MTs
di Kab.Barru 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,52%	101,73%	105,81%	114,23%	122,23%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

Dari tabel di atas, selama tahun 2016 - 2020 AM SD/MI ke SMP/MTs selalu menunjukkan peningkatan.

h. Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik

Sekolah dengan kondisi bangunan baik merupakan perbandingan antara jumlah sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik dengan jumlah seluruh sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang dinyatakan dalam persen. Sekolah mempunyai jumlah ruang kelas yang berbeda-beda dan kondisi ruang kelas terbagi atas 4 (empat) kondisi yaitu kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Sekolah yang mempunyai ruang kelas dengan kondisi baik baik dan rusak ringan dinyatakan sebagai sekolah dengan kondisi bangunan baik karena ruang kelas yang rusak ringan bisa di biayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik
di Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A SD/MI						
1	Jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	206	215	199	202	210
2	Jumlah Seluruh Sekolah SD/MI	225	225	225	226	226
3	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	91.56	95.56	88.44	89	94,23
B SMP / MTs						
1	Jumlah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	50	51	26	29	29

B SMP / MTs								
2	Jumlah Seluruh Sekolah SMP/MTs		52	52	52	53	53	
3	Sekolah SMP/MTs	pendidikan kondisi bangunan baik (%)	96,15	98,07	50	55	55	

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

Selama kurun waktu 2016-2020 Persentase Sekolah pendidikan dengan kondisi baik berfluktuatif, baik bangunan SD/MI maupun SMP/MTs.

i. **Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP)**

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Barru disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.59

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Sekolah/Penduduk Sekolah Pendidikan (SD)	Ketersediaan Usia Pendidikan Dasar		115,58	122,39	114.07	102,63	100,06
2	Rasio Sekolah/Penduduk Sekolah Pendidikan (SMP)	Ketersediaan Usia Pendidikan Dasar		53,10	55,90	53.07	40,59	52,10

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

j. **Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP)**

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran. Rasio jumlah guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.60

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No.	Uraian		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Sekolah Dasar SD	Guru/Murid Pendidikan	920,51	1.011,57	1.074,24	1.228,34	1100,34
2	Rasio Sekolah Dasar SMP	Guru/Murid Pendidikan	559,56	707,60	819,67	1.109,48	1216,47

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

k. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidakbuta aksara) Kabupaten BarruTahun 2016-2020

No.	Uraian		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)		98,5	98,85	98,97	99,71	99,03

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

1. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru sebagai tenaga pendidik berinteraksi langsung dengan peserta didik sehingga harus memiliki keahlian atau kualifikasi atau kompetensi dalam menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik, hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mensyaratkan bahwa guru wajib memiliki latar belakang akademis strata satu (S1) atau diploma empat(D-IV). Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian		2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		92,89%	95,15%	90,27%	88,24%	94,89%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

Perkembangan jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di atas. Selama kurun waktu tahun 2016 – 2020 jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik berfluktuatif.

2. Bidang Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian indikator kesehatan antara lain:

a. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup). Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	6	6	7	31	10
2	Jumlah kelahiran hidup	2.998	3.044	3.035	3.140	3.068
3	Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,00	1,97	2.31	9,87	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

AKB pada tahun 2016 – 2020 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKB harus tetap di kedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita.

b. Angka kelangsungan hidup bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun dimana AKHB=1-Angka Kematian Bayi. Sedangkan untuk AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi dibawah usia 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKHB di Kabupaten Barru dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.64

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kab.Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	99,80	99,80	99.77	99,13	99,70

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

AKHB pada tahun 2016 – 2020 cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKBH harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita.

c. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Balita (AKBa) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Angka Kematian Balita (AKBa)/1000 kelahiran hidup
Kab.Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Balita	2	1	3	5	2
2	Jumlah kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	2.998	3.044	3035	3140	3069
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,67	0,33	0.99	1,59	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

d. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau di dapat selama kehamilan. Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup Kab.Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)	22	18	10	20	6
2	Jumlah kelahiran hidup	2.998	3.044	3.035	3.140	3069
3	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	7,34	5,91	3.29	6,37	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

e. **Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup**

Indikator ini menunjukkan Angka Kematian Ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas dari per 100.000 kelahiran. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	7	2	4	7	3
2	Jumlah kelahiran hidup	2.998	3.044	3.035	3.140	3069
3	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	233,49	65,70	131.80	222,93	98

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

f. **Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter yang diukur berdasarkan jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68

Rasio Dokter Persatuan penduduk Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokter	26	30	24	37	25
2	Jumlah penduduk	173.163	174.871	180,509	182.373	187.392
3	Rasio dokter per satuan penduduk	0,15	0,17	0.13	0,20	0.13

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

g. **Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk yang diukur berdasarkan jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio tenaga medis persatuan penduduk disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.69

Rasio Tenaga Medis per 1.000 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga medis	48	40	57	74	57
2	Jumlah penduduk	173.163	174.871	180,509	182.373	187.392
3	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,28	0,23	0.32	0,41	0,30

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

h. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada proses persalinan sehingga untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu maternal salah satunya melalui persalinan yang sehat dan aman, yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	451	526	480	515	775
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	688	679	688	684	775
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	65,57	77,44	69,77	75,29	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

i. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan adalah cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (linakes). Adapun perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Barru 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	3008	3036	3033	3133	3181
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	3228	3173	3279	3264	3246
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	98,18	95,68	92,50	95,99	98

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

j. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi buruk	7	12	3	4	5
2	Jumlah seluruh balita	13.718	13.597	13.344	13.084	13.343
3	Persentase balita gizi buruk (%)	0,05	0,09	0.02	0,03	0.04

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase balita gizi buruk Kabupaten Barru cenderung fluktuatif, namun masih dibawah angka 1%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 5%. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya diare, cacingan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita.

Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan yang mengikuti kaidah gizi dan kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Salah satu akibat kurang gizi balita dapat menyebabkan *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Prevalensi *Stunting* pada balita dan baduta di Kabupaten Barru dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.73
Prevalensi Stunting Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	10,81	9,13	25,20	17,43	11,04

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

Prevalensi *stunting* balita di Kabupaten Barru pada tahun 2018 (25,20%) berada pada angka tertinggi artinya lebih buruk dari tahun-tahun berikutnya, sedangkan pada baduta terjadi

penurunan di tahun 2019 sebesar 13,20%. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Oleh sebab itu pada perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak menjadi hal yang penting melalui praktek pengasuhan yang baik, perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses ke makanan bergizi serta air minum dan sanitasi yang memenuhi syarat.

k. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang di temukan dan telah mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali serratus persen. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu	7	12	3	4	3
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama	7	12	3	4	3
3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan(%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

1. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard dibagi jumlah seluruh bayi lahir hidup disuatu wilayah. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	3.123	3.104	3.045	3.050	2955

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	3.071	3.046	3136	3.140	3094
3	Cakupan Kunjungan Bayi	101,69	101,90	97.10	97,13	95,51

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

m. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan kunjungan ke-4 ibu hamil dan mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yaitu paling minim empat kali terhadap jumlah sasaran ibu hamil. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	3.183	3.104	3114	3145	3173
2	Jumlah sasaran ibu hamil	3.439	3.396	3440	3420	3404
3	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)	92,56	91,40	90.52	91,96	93,21

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

n. Cakupan Pelayanan Nifas

Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari. Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	2.947	2.938	2975	3054	3112
2	Jumlah seluruh ibu nifas	3.228	3.047	3279	3264	3246
3	Cakupan pelayanan nifas (%)	91,29	96,42	90.73	93,57	95,87

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

o. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan

kesehatan. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78

Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	257	234	244	268	313
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	450	457	455	466	313
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	57,15	51,20	53.63	54,47	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

p. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah persentase anak balita (usia 12 sampai dengan 59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standard. Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79

Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	11.114	9.233	11229	9774	7750
2	Jumlah seluruh anak balita	10.673	9.927	14085	12242	12788
3	Cakupan pelayanan anak balita (%)	104,13	93,01	79.72	79,84	60,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

q. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin

Gizi memegang peranan penting dalam siklus hidup manusia. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan dapat pula menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan. Untuk itu pemberian MP-ASI pada bayi usia 6-24 bulan dari keluarga miskin karena mereka memiliki keterbatasan dalam penyediaan pangan di rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80

Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	254	384	0	232	0
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	655	5.975	0	4605	0

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	38,78	6,42	0	5,04	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

r. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD/MI yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Barru dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.81

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	4.225	5.337	3.948	3315	10764
2	Jumlah murid SD dan setingkat	17.415	17.220	17574	3571	16737
3	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	24.26	30,99	22.47	92,83	64

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2020

4. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan merupakan perbandingan panjang jalan dalam kondisi baik terhadap panjang jalan secara keseluruhan. Jalan kondisi baik adalah semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis. Panjang jaringan jalan terbagi dalam empat kondisi yaitu kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang dan kondidi rusak berat. Kondisi pajang jaringan jalan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82

Kondisi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Baik	379,15	414,406	415,461	438,13	445,05
2	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Ringan	65,176	53,186	59,331	58,13	57,559
3	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Sedang	49,4	73,338	77,483	52,76	54,47
4	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Berat	189,63	142,429	131,080	134,3	126,28

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
5	Jalan secara keseluruhan(kabupaten)	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36
6	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,55	0,606	0,608	0,641	0,651

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barru Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan dari panjang jalan keseluruhan. Namun panjang jalan kondisi rusak sedang mengalami peningkatan di tahun 2020, hal ini disebabkan karena tidak adanya kontrol terhadap kendaraan dengan bobot tertentu yang melebihi tonase yang dipersyaratkan. Hal ini juga harus didukung oleh perencanaan konstruksi jalan yang baik.

b. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83

Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan Kabupaten	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36
2.	Jumlah Penduduk	173.163	174.871	180.509	182.373	187.392
3.	Rasio	0,0039	0,0039	0,0037	0,0037	0,0036

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barru Tahun 2020

c. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar dengan kecepatan diatas 40 km/jam tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84

Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (km)	428,55	467,52	415.461	490,89	502,609
2	Panjang Seluruh Jalan Kabupaten	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	62,71	68,41	60.80	71,72	73,55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barru Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam) yang diasumsikan sebagai jalan dalam kondisi mantap berdasarkan Permen PU No. 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan, dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung meningkat meskipun di tahun 2018 mengalami penurunan yaitu pada angka 60,80, hal ini dikarenakan tingginya tingkat kerusakan jalan akibat umur ekonomis sesuai jenis jalan.

d. Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pebuangan air (minimal 1,5 m) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pebuangan air (minimal 1,5 m) di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase	NA	NA	NA	NA	NA
2.	Panjang seluruh Jalan Kabupaten	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36
3.	Persentase	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barru Tahun 2020

e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi merupakan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dengan pemahaman akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	41.342	41.342	46.293	34.286	46.663
2.	Jumlah rumah tinggal	43.723	43.723	48.328	46.252	46.663
3.	Persentase	94,55	94,55	95.79	95,79	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas terlihat jumlah rumah yang berakses sanitasi meningkat setiap tahunnya dengan penjelasan data bahwa jumlah rumah dipersamakan dengan jumlah rumah tangga atau Kepala Keluarga. Angka pada tahun 2020 merupakan angka yang menunjukkan penjumlahan jumlah Rumah tangga atau kepala keluarga yang berakses layak bersama, layak sendiri, dan akses aman yang telah mencapai 100 % dengan predikat ODF.

e. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Untuk drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.87

Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)	0	15,24	0	2,5	
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	643.954	643.954	643.954	643.954	643.954
3	Persen	-	2,39	-	3,88	99,9

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas menunjukkan Persentase panjang drainase yang tersumbat pembuangan aliran airnya dengan total seluruh panjang drainase Kabupaten Barru cenderung stagnan, hanya pada tahun 2019 teridentifikasi drainase yang mengalami penyumbatan sehingga terjadi penurunan persentase, hal ini terjadi dikarenakan masih adanya masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke saluran drainase serta adanya tumpukan sedimen yang seharusnya diselesaikan secara gotong royong, namun harus menunggu lagi dari pemerintah, sehingga drainase yang baik dapat berkurang kualitasnya dan mengalami kerusakan dan penyumbatan.

f. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Irigasi berarti mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88

Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	4556	4556	4890	3325	3488
2	Luas Irigasi kabupaten	9792	9792	9792	6919	6919
3	Persentase	46,53	46,53	49,94	48,06	50,41

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barru Tahun 2020

Irigasi Kabupaten Barru tersebar di 7 kecamatan dengan klasifikasi berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 (tiga) yakni Fungsi Primer, Sekunder dan Tersier dengan persentase dalam kondisi baik pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang disebabkan besarnya perhatian pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian sehingga komitmen peningkatan irigasi ditahun 2020 sangat besar. Hal ini juga disebabkan adanya komitmen tentang Lahan Pangan Berkelanjutan sehingga luasan dapat dipertahankan dan yang dalam kondisi baik cenderung akan meningkat.

g. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah satu kesatuan bangunan dan saluran yang dipergunakan untuk mengatur jalannya air irigasi, dimulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pemanfaatannya. Secara umum saluran atau jaringan irigasi di bagi menjadi jaringan primer, sekunder dan tersier. Rasio jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89

Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Irigasi Jaringan primer	22356	22356	22356	22356	22356
2	Irigasi Jaringan Sekunder	76167	80120	83490	90264	90264
3	Irigasi Jaringan Tersier	79217	79217	79217	79217	79217
4	Panjang saluran irigasi	177.74	181.69 3	185.063	191.837	191.837
5	Luas Lahan Budidaya pertanian (Ha)	9792	9792	9792	6919	6919
6	Rasio	18,15	18,56	18,90	27,73	27,73

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas menunjukkan rasio panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian pada tahun 2020 mengalami kenaikan hal ini dikarenakan adanya dukungan dari Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Kabupaten Barru. Selanjutnya hal ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan partisipasi bukan hanya dari GP3A, tetapi dari unsur masyarakat lainnya.

h. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air minum/air bersih adalah air yang berasal dari air ledeng/PAM dengan menggunakan meteran atau tanpa meteran, pompa air/sumur bor, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal dimana syarat-syarat air minum menurut kementerian kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90

Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air	92.033	104.875	158.884	173.471	176.223
2.	Jumlah penduduk	173.163	174.871	180.509	182.373	187.392
3.	Persentase penduduk berakses air minum	53,53%	59,97%	88,02%	95.30%	96,63%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas menunjukkan persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Akses air minum yang dimaksud terdiri dari akses perpipaan dan non perpipaan dimana non perpipaan meliputi mata air terlindungi, air kemasan, air dijual eceran dan penampungan air hujan. Selanjutnya masih terdapat 3,37% penduduk yang mengakses air minum tidak layak dari mata air tak terlindungi dan sumur tak terlindungi.

i. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan, Pemukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91
Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Bidang/Urusan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Kawasan kumuh (Ha)	310,62	310,62	310,62	31.04	21,07
2	Luas Wilayah Kabupaten (Ha)	117.472	117.472	117.472	117.472	117.472
3	Persentase areal kawasan Kumuh	0,26	0,26	0,26	0,02	0,017

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas menunjukkan areal kawasan kumuh berdasarkan SK Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barru Nomor 354/Bappeda/VIII/2014 hingga tahun 2019 tidak mengalami perubahan, ditahun 2020 terjadi pengurangan setelah diintervensi melalui program KOTAKU, disamping itu Pemerintah Kabupaten Barru juga telah melakukan beberapa intervensi penganggaran pada lokasi kumuh tersebut, hanya saja belum pernah dilakukan deliniasi kembali luas areal kawasan kumuh yang ditetapkan tersebut.

j. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat pemakaman terdiri atas Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Sedangkan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. Sedangkan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kab.Barru Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Jumlah	Luas (m2)	Daya Tampung	Jumlah	Luas (m2)	Daya Tampung	Jumlah	Luas (m2)	Daya Tampung
1.	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	37	34.001	15112	37	34.001	22.667	39	40.001	26.667
2.	Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)	29	15.910	7071	29	15.910	10.606	29	15.910	10.606
3.	Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	11	218.000	-	11	218.000	-	11	218.000	-
4.	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Jumlah	Luas (m2)	Daya Tampung	Jumlah	Luas (m2)	Daya Tampung	Jumlah	Luas (m2)	Daya Tampung
5.	Jumlah Tempat Pemakaman	66	49.911	22.183	66	49.911	33.273	68	55911	37.273
6.	Jumlah Penduduk (jiwa)	180.509	-	-	182.373	-	-	187.392	-	-
7.	Rasio TPU Persatuan Penduduk(1/6)	83,71			124,28			213,46		

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Barru Tahun 2020

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tabel diatas mengalami peningkatan karena adanya penambahan daya tampung yang signifikan meskipun dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang meningkat pada tahun 2020. penambahan daya tampung pemakaman tersebut dilakukan dengan cara optimalisasi pemanfaatan lahan untuk setiap makam di areal pemakaman.

5. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93

Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Layak Huni	25805	44745	44745	45.089	44719
2.	Jumlah Penduduk	173.163	174.871	180.509	182.373	187.392
3.	Rasio	0,15	0,26	0,25	0,25	0.24

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas menunjukkan rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk berfluktuasi hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya yang tidak beriringan dengan jumlah rumah layak huni.

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman yang layak huni di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Permukiman Layak Huni (Ha)	3740,6	3740,6	3740,6	3740,6	3.750,57
2	Luas Wilayah Permukiman (Ha)	3.771,64	3.771,64	3.771,64	3.771,64	3.771,64
3	Rasio	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas rasio permukiman layak huni cenderung stagnan dari tahun 2016 sampai tahun 2020, untuk luas permukiman layak huni didapatkan dari hasil pengurangan luas wilayah permukiman secara keseluruhan dengan luas permukiman kumuh yang pengertiannya dipersamakan dengan permukiman tidak layak huni, khusus untuk tahun 2020 luas permukiman layak huni bertambah seiring dengan berkurangnya luas permukiman kumuh Kabupaten Barru.

6. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban
a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) yakni 100 orang petugas linmas kabupaten dibagi dengan satu wilayah kerja kabupaten. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.95
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kab.Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru	846	846	1082	1082	898
2	1 Wilayah kerja kabupaten	173.163	174.871	180.509	182.373	187.392
3	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,49	0,48	0,60	0,60	0,48

Sumber : Dinas Satpol dan PP Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) mengalami penurunan di tahun 2020, hal ini seiring dengan peningkatan jumlah penduduk sementara jumlah petugas juga mengalami penurunan dimana Petugas Linmas diharapkan membantu dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dengan jumlah pelanggaran K3 dikali 100 persen. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelanggaran terselesaikan	K3	Yang	19	3	19	14	254
2	Jumlah Pelanggaran K3 Yang Dilaporkan Masyarakat Dan Teridentifikasi			19	3	19	14	14
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)			100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Satpol dan PP Kab. Barru Tahun 2020

Data Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) menunjukkan bahwa semua kasus pelanggaran K3 cenderung menurun dan dapat diselesaikan dalam kurun tahun yang sama.

c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran meliputi jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi dengan luas wilayah kabupaten. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.97

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran	Luas	119.32	622.32	860.46	1174.7	1174,7
2	Luas Wilayah		1174.7	1174.7	1174.7	1174.7	1174,7
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran		10.16	52.98	73.25	100	100

Sumber : Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2020 target cakupan wilayah manajemen kebakaran dipertahankan dari tahun 2019, penempatan armada mobil pemadam kebakaran di WMK Kecamatan Pujananting menjadi unsur keterpenuhan jangkauan wilayah sehingga sampai Tahun 2020 ini sudah ada 6 WMK yang ada di Kabupaten Barru (Tanete Riaja, Balusu, Mallusetasi, Soppeng Riaja, Tanete Rilau, dan Pujananting) serta Posko Induk yang ada di Kecamatan Barru, yang diharapkan dapat meminimalisir kerugian masyarakat atau pun korban jiwa akibat kebakaran.

d. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Penanganan kebakaran merupakan hal yang diantaranya memerlukan keahlian, ketepatan dan kecepatan. Waktu penanganan kebakaran sangat menentukan tingkat keberhasilan penanganan dalam setiap kasus kebakaran. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit terhadap Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK yang dinyatakan dalam persen. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98

Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit	19	36	47	112	70
2	Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK	19	36	47	112	70
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan kebakaran di Kabupaten Barru dari tahun 2019, hal ini dikarenakan musim kemarau relative lebih singkat, disamping itu optimalisasi sosialisasi terhadap masyarakat tentang pencegahan dan bahaya kebakaran terus ditingkatkan. Adapun tingkat waktu tanggap daerah WMK telah mencapai 100%, hal ini diasumsikan dengan adanya pemadam kebakaran di tiap Kecamatan maka waktu respon terhadap setiap kejadian kebakaran relative dapat terpenuhi.

e. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan PERDA merupakan salah satu tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dimana setiap PERDA yang dihasilkan Kabupaten Barru menjadi tanggung jawab Satpol PP dalam Penegakannya. Persentase penegakan PERDA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99
Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	3	2	2	2	18
2	Jumlah Pelanggaran Perda	3	2	2	2	18
3	Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penyelesaian penegakan perda pada tahun 2020 masih sama pada tahun 2019, hal ini dikarenakan jumlah perda yang berpotensi dilanggar masih tetap dan respon terhadap pelanggaran tersebut sigap untuk dilakukan.

6. Bidang Urusan Sosial
a. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kaupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	3008	3434	7109	15.522	
2	Jumlah PMKS yang belum mendapatkan bantuan	9.326	779	3.675		
3	Jumlah PMKS yang ada	12,395	11,301	7,626	16.291	
4	Prosentase PMKS memperoleh Bantuan Sosial	24.76%	31.07%	93.2	95,68	

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyandang PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat tiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya.

b. Persentase PMKS Yang Tertangani

Persentase PMKS yang tertangani adalah perbandingan jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada, yang dinyatakan dalam persen. Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101
Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang tertangani	3008	3434	7109	15.522	17.967
2	Jumlah PMKS yang ada	12,395	11,301	7,626	16.291	17.967
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani	24.76%	31.07%	93.2%	95,68%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang PMKS yang tertangani meningkat tiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya sekaligus memenuhi pencapaian SPM.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi : angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

a. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Angka sengketa pengusaha/pekerja pertahun adalah perbandingan jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja dibandingkan dengan jumlah perusahaan di kali 100 persen. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
u m 1 b	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	Kasus	0	0	1	1	0
e r 2	Jumlah Perusahaan	Perusahaan	145	145	323	49	51
: 3 D t	Angka Sengketa Pengusaha- Pekerja per- Tahun		0	0	3,09	0,02	0,00

nas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2020

Jumlah perselisihan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja pada tahun 2020 yang dilaporkan dan ditangani oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja bekerjasama dengan Pengawas Ketenagakerjaan wilayah Parepare dan Barru. Sengketa tersebut terselesaikan 100%.

b. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Kerjasama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama adalah perbandingan jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama dibandingkan dengan jumlah kasus yang dicatatkan di kali 100 persen. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
e S u 1 m	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan kerjasama (PB)	Kasus	0	0	0	0	0
b 2 e	Jumlah kasus yang dicatatkan	Kasus	0	0	0	0	0
S u 3 m b e	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama (PB)		0	0	0	0	0

r : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2020

c. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar di kali

100 persen. Data besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	18	27	83	619	132
2	Jumlah Pencari kerja yang mendaftar	247	483	514	672	250
3	Pencari Kerja yang ditempatkan	7,29%	5,59%	16,15%	92,11%	52,80%

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2020

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan monitoring tenaga kerja pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 132 tenaga kerja dari total pencari kerja 250 tenaga kerja atau sebesar 52,80%.

d. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek adalah perbandingan antara pekerja/buruh jamsostek dengan pekerja/buruh secara keseluruhan di kali 100 persen. Data Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja/ Buruh JAMSOSTEK	678	291	515	37.131	38.111
2	Pekerja/ Buruh	1212	59790	70328	48.075	48.075
3	Persentase	55.94	0,49	0,73	77,23%	79,27

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2020

Sumber Potensi : Olahan Bappenas, BPS dan BPJS Ketenagakerjaan

Coverage : Data BPJS Ketenagakerjaan Tahun Data 2019

Peningkatan yang signifikan terhadap kepesertaan Jaminan ketenagakerjaan di Kabupaten Barru meningkat drastis dari 0,73 % pada tahun 2018 menjadi 77,23% di tahun 2019 dan 79,27 di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kerjasama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan BPJS ketenagakerjaan dalam penerbitan izin berbasis Jaminan Ketenagakerjaan;
2. Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan;

- 3. Coverage Pekerja Rentan yang dikerjasamakan oleh Pemda Kab. Barru, Baznas dan Pihak perbankan di wilayah Kab. Barru;
- 4. Coverage Non ASN Pemda Barru dengan BPJS Ketenagakerjaan berlanjut dalam APBD 2020.

e. Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda dengan jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda di kali 100 persen. Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tidak ada perselisihan. Data perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikutt.

Tabel 2.106

Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda	0 Kasus	0 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
2	Jumlah Kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda	0 Kasus	0 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
3	Persentase penyelesaian perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	0	0	100%	0	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2020

f. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah perbandingan tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.107

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenaga kerja yang dilatih	30	15	80	330	20
2	Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	30	15	80	330	20
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2020

Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan sertifikasi pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melalui Bidang Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Jasa Konstruksi sebanyak 20 Tenaga Kerja.

g. **Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan**

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan adalah perbandingan antara tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar pelatihan kewirausahaan dikali 100 persen. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.108

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan kewirausahaan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenaga kerja yang dilatih	20	113	80	80	20
2	Pendaftar pelatihan	20	113	80	80	20
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2020

Pelatihan tenaga kerja berbasis Kewirausahaan pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melalui Bidang Tenaga Kerja sebanyak 20 Tenaga Kerja yang dilatih untuk memperoleh pekerjaan atau membuka usaha.

2. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan merupakan urusan yang sangat penting untuk menuju pencapaian kesetaraan gender yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk

berperan aktif disemua bidang kehidupan. Sedangkan perlindungan anak merupakan amanah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan dengan ditandatanganinya deklarasi menuju kabupaten layak anak pada tahun 2019, mengharuskan Kabupaten Barru memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, selama periode 2016-2020 telah disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. Capaian pemberdayaan Perempuan ditunjukkan dari angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.109
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		95,51	95,44	95,42	95,52
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		63,54	69,24	63,31	63,96

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPPA Kab. Barru Tahun 2020

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Dari angka IPG dan IDG pada tabel diatas memperlihatkan bahwasanya angka untuk IPG dalam periode tahun 2016-2020 menunjukkan perolehan yang memuaskan meskipun mengalami penurunan.

Selain itu pada Tahun 2021 telah terbit Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa, untuk itu sangat penting focusing terhadap Pemberdayaan Perempuan.

Untuk perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Barru juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, diharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah dapat melindungi hak-hak anak di Kabupaten Barru.

a. **Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah**

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi eselon I-IV. untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.110
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	2	3	2	2	2
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	27	24	28	29	32
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	191	176	207	215	220
4	Pekerja perempuan di pemerintah	2.625	3,307	4,705	4.710	4088
5	Jumlah pekerja perempuan	18,265	23,609	25,413	25.415	21687
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	14,37 %	14.01 %	18.51 %	18,55 %	18,55 %

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPPPA Kab. Barru Tahun 2020

b. **Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD**

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah perbandingan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan jumlah total kursi di keanggotaan DPRD yang dinyatakan dalam persen. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111
Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	6 orang	6 orang	6 orang	5 orang	5 orang
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	24 %	24 %	24 %	20 %	20 %

Sumber : Sekretaris Dewan Kab. Barru Tahun 2020

c. **Rasio KDRT**

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112
Rasio KDRT Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	10	7	7	9	8
2	Jumlah Rumah Tangga	42.375	42	41,070	41.575	41950
3	Rasio KDRT (%)	0,024	0,17	0.02	0,02	0,02

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPPA Kab. Barru Tahun 2020

d. **Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu**

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	-
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	-
3	Persentase	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPPA Kab. Barru Tahun 2020

e. **Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit**

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	-
2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu	-
3	Persentase	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPPPA Kab. Barru Tahun 2020

f. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	-
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos dalam kurun waktu tertentu	-
3	Persentase	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPPPA Kab. Barru Tahun 2020

g. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	-
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	-
3	Persentase	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPPPA Kab. Barru Tahun 2020

h. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Barru Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	-
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	-
3	Persentase	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPPPA Kab. Barru Tahun 2020

i. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	-
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	-
3	Persentase	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPPPA Kab. Barru Tahun 2020

j. **Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan**

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	-
2	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	-
3	Persentase	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPPPA Kab. Barru Tahun 2020

3. Pangan

a. **Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan**

Pangan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Indikator ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan meningkatkan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120

Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama	4243	4178	4366	4379	261,588
2	Ketersediaan energi	105,10	106,75	115,00	118,61	2782
3	Protein perkapita	14,45	15,60	18,5	21,72	69,77
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0,201	0,249	0,275	0,423	53

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Barru Tahun 2020

b. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah persentase angka kecukupan gizi (AKG) di kalikan bobot masing-masing kelompok pangan. Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121

Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	91,2

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Barru Tahun 2020

4. Lingkungan Hidup

a. Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai instrument perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup dan harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan. Tersusunnya RPPLH dan terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.122

Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

NO.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya RPPLH kab/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kab/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

b. Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P

Regulasi yang mengatur tiap daerah untuk wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam Pasal 15 ayat (2). Pada ayat ini menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi : (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan (b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan

dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Pada prinsipnya KLHS adalah suatu kajian/penilaian mandiri (self assessment) untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun terlaksananya KLHS sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan rencana program Kabupaten Barru tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.123

Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2020

c. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, Indeks kualitas Udara, Indeks kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan merupakan indikator pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kualitas lingkungan dan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Indeks kualitas air adalah nilai yang menunjukkan status mutu air dengan metode indeks pencemaran, Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya yang dihitung berdasarkan emisi dari 2 (dua) polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Perhitungan indeks tutupan lahan dilakukan melalui perbandingan jumlah luas tutupan ber-hutan dibagi dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Barru

Tabel 2.124

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Pengukuran indeks Kualitas Air	Tidak ada data	52,4	62,22	62,22	50
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Tidak ada data	94,02	94,2	93,40	90,59
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Tidak ada data	51,104	51,1	63,77	69,77
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tidak ada data	65,84	69,17	72,19	69,85

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2020

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Barru pada Tahun 2019 dilakukan pada 3 sungai, yaitu sungai Sumpang BinangaE di Kecamatan Barru, Sungai BottoE yang melintasi wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan Tanete Rilau dan sungai Takkalasi yang melintasi wilayah Kecamatan Barru dan Kecamatan Balusu. Setiap sungai memiliki 3 titik pantau dengan pengambilan sampel minimal 2 kali dalam setahun. Parameter yang dinilai dalam indeks kualitas air yaitu TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli. Pada Tahun 2020 Nilai Indeks kualitas Air (IKA) Kabupaten Barru pada sebesar 50 berada pada kondisi baik. Nilai IKA tersebut dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain:

- Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada berbagai sumber air.
- ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global
- penggunaan air
- Tingkat erosi dan sedimentasi

Kualitas udara ambient di Kabupaten Barru dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan industri. Pemantauan dilakukan di 4 titik lokasi yang mewakili dari pemukiman, industri, dan padat lalu lintas dengan menggunakan metode passive sampler. Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pencemaran Udara adalah konsentrasi NO₂ dan SO₂. Nilai konsentrasi tahunan adalah rata-rata dari nilai konsentrasi yang terpantau setiap bulan untuk selanjutnya dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0-100. Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020 di Kabupaten Barru pada Tabel 8 menunjukkan angka 90,59 yang berarti indeks kualitas udara di Kabupaten Barru > 50 jadi termasuk dalam kondisi baik. Tetapi nilai IKU tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 kemudian turun kembali di tahun 2019 kemudian di tahun 2020 turun cukup signifikan diangka 90,59,. Hal ini disebabkan karena konsentrasi SO₂ Tahun 2019 mengalami penurunan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Barru harus meningkatkan upaya dalam peningkatan kualitas udara di Kabupaten Barru terutama pada lokasi perkantoran dan pemukiman. Berdasarkan data tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa status IKLH Kabupaten Barru pada Tahun 2020 berada dalam status cukup, hal ini menyimpulkan bahwa terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup dibanding pada tahun 2019, dimana pada tahun 2019 kualitas lingkungan hidup Kabupaten Barru berada dalam status kurang. Peningkatan kualitas lingkungan hidup ini disebabkan karena berubahnya status mutu air sungai pada beberapa titik pantau dari tercemar berat menjadi tercemar ringan dan yang tercemar sedang menjadi memenuhi baku mutu. Disamping itu juga disebabkan karena adanya perubahan metode perhitungan indeks tutupan lahan, yang sebelumnya beberapa tutupan lahan tidak dihitung sebagai

tutupan hutan, pada tahun ini dihitung sebagai tutupan hutan seperti semak belukar, taman keanekaragaman hayati dan hutan kota.

d. Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan perbandingan antara Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani dengan Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang dinyatakan dalam persen. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125

Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

NO.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	0	4.8%	9	8	5%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2020

e. Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)

Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) terdiri atas Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina dan Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum. Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126

Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana
Pejabat PengawasLingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)	0	0	1	0	1
1.1	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina;	0	0	1	0	0
1.2	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2020

f. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Penghargaan merupakan reward yang diberikan karena telah memenuhi dan/atau melebihi standar nilai yang ditentukan.

Tabel 2.127

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Lidup
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada (adiwiyata tingkat kabupaten dan provinsi)	Ada (Adiwiyata Tingkat Kabupaten)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2020

g. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1.	Pengaduan masyarakat yang ditangani	-
2.	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	-
3.	Persentase	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2020

h. Timbulan Sampah yang ditangani

Timbulan sampah yang ditangani adalah perbandingan antara volume timbulan yang ditangani dengan total timbulan sampah dikali dengan 100 persen. Timbulan sampah yang ditangani tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.129

Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1.	Volume timbulan sampah yang ditangani	-
2.	Total timbulan sampah	-
3.	Persentase	43

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2020

i. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R

Sampah yang berkurang melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.130

Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	22.000 m3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2020

j. Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani

Jumlah sampah yang tertangani yaitu volume sampah yang di tangani di bagi dengan Volume produksi sampah yang dinyatakan dalam persen. Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131

Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

NO.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani	97,82	97,92	98.01	80,41	80,52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2020

Persentase jumlah sampah yang ditangani di tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan komitmen pemerintah Kabupaten Barru dalam penanganan masalah sampah. Optimalisasi petugas, sarana dan prasarana menjadi faktor penentu peningkatan penanganan.

k. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.132

Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota
Kabupaten Barru Tahun 2020

NO.	Uraian	2020
1	Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota	76

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2020

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.133

Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP	116.009	119320	128967	131981	135033
2	Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	125.43	128.209	129177	131981	135045
3	Rasio	0,92	0,94	0.998	1	0,999

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2020

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barru terus menunjukkan tren positif. Terkait kepemilikan KTP terlihat bahwa pada tahun 2020 menunjukkan angka 0,999 yang mendekati angka 1, dimana tersisa 12 orang yg belum ber-KTP

b. Rasio Bayi Dan Penduduk Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Sedangkan Rasio penduduk berakte kelahiran adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang mempunyai akte kelahiran dengan jumlah penduduk. Rasio bayi dan penduduk berakte kelahiran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.134

Rasio Bayi dan Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	1386	2144	3503	3506	3506
2	Jumlah bayi	2998	2335	3995	3806	3806
3	Rasio	0.46	0,92	0,87	0,92	0,92

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2020

Sedangkan rasio penduduk berakte kelahiran tahun 2020 perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.135

Rasio Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2020

Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah Penduduk	Rasio
731101	Tanete Riaja	6080	7459	0.82
731102	Tanete Rilau	9133	11567	0.79
731103	Barru	10538	13312	0.79
731104	Soppeng Riaja	3826	5209	0.73
731105	Mallusetasi	6063	7998	0.76
731106	Pujananting	3104	3859	0.80
731107	Balusu	4047	5446	0.74
7311	Kab. Barru	42791	54850	0,78

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat kepemilikan akte kelahiran tidak mencapai angka maksimal. Pemerintah Kabupaten Barru perlu mengatasi keterlambatan pengurusan akte kelahiran yang menjadi permasalahan mengapa tidak pernah mencapai 100%.

c. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah. Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.136

Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	-
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	-
3	Rasio	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2020

d. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2020

e. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan (Orang)	121.793	128.967	131.981	131.981	135045
2	Jumlah penduduk wajib KTP (Orang)	128.209	129.177	131.981	131.981	135033
3	Persen ((1/2)x100%)	95	99.84	100	100	99,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Tahun 2020

f. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139

Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru Tahun 2020

NO.	Uraian	2020
1	Cakupan penerbitan akte kelahiran	97,01

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Pembangunan Prasarana diwilayah kelurahan/pedesaan mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Prasarana yang dibangun harus dapat dimanfaatkan sampai masa yang panjang, untuk itu diperlukan upaya pemanfaatan dan pemeliharaan. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Selain faktor kualitas konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang mempengaruhi berfungsinya suatu prasarana dan sarana adalah Pengelolaan prasarana, yang mencakup Organisasi Pengelola, Pemanfaatan/Pengoperasian dan Pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan. Bila salah satu hal tersebut tidak dipenuhi maka akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan dan umur pemanfaatan yang akhirnya akan mengakibatkan tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan dibangunnya prasaran dan sarana tersebut. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.140

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kantor pemerintahan Desa yang Baik	39	39	40	40	40
2	Jumlah seluruh pemerintahan desa	40	40	40	40	40
3	Persen	98	98	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah perbandingan jumlah kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah LPM yang dinyatakan dalam persen. Rata-rata kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.141

Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	55	55	55	55	55
2	Jumlah LPM	55	55	55	55	55
3	Rata-rata	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

c. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.142

Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok binaan PKK	1550	1636	1711	1712	2485
2	Jumlah PKK	63	63	63	63	63
3	Rata-rata	24,60	25,979	27,16	27,18	39,44

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

d. Persentase LSM Aktif

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif. Persentase LSM yang aktif adalah jumlah LSM yang terdaftar di pemerintah dari jumlah yang ada di Kabupaten Barru. Persentase LSM aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.143

Persentase LSM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LSM terdaftar	34	19	20	20	20
2	Jumlah LSM tidak aktif	0	0	0	0	0
3	Jumlah LSM aktif (1-2)	34	19	20	20	20
4	Jumlah LSM	34	19	20	20	20
5	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Barru Tahun 2020

e. **Persentase LPM Berprestasi**

Jumlah LPM berprestasi yaitu Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif melaksanakan kegiatan dibagi jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi dikali seratus. Persentase LPM berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144

Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LPM Berprestasi	55	55	55	55	55
2	Jumlah LPM	55	55	55	55	55
3	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

f. **Persentase PKK aktif**

PKK aktif yaitu jumlah PKK yang memiliki pengurus dan sekretariat dan memiliki program kerja. Persentase PKK aktif adalah perbandingan antara jumlah PKK yang aktif dengan keseluruhan jumlah PKK yang dinyatakan dalam persen. Persentase PKK aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145

Persentase PKK Aktif Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKK Aktif	63	63	63	63	63
2	Jumlah PKK	63	63	63	63	63
3	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

g. **Persentase Posyandu Aktif**

Persentase posyandu aktif adalah perbandingan jumlah posyandu aktif dengan jumlah semua posyandu yang dinyatakan dalam persen. Persentase posyandu aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.146

Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu Aktif	249	262	262	262	262
2	Total Posyandu	249	262	262	262	262
3	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

h. **Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat bisa berupa ide, gagasan, pikiran dan bisa pula berupa bantuan

finansial. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.147

Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	180	180	180	180	180
2	Total program pemberdayaan Masyarakat	6	6	6	6	6
3	Persen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

i. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan maka dilakukan serah terima dari pelaksana kegiatan kepada masyarakat dan masyarakat diwajibkan membentuk tim pemelihara sehingga apabila suatu saat ada kerusakan maka menjadi kewajiban masyarakat dan anggota tim pemelihara mempunyai kewajiban mengkoordinir iuran pemeliharaan serta proses pemeliharaannya.

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.148

Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	3	3	3	3	3
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	6	6	6	6	6
3	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah angka kelahiran total. Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.149

Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Barru Tahun 2020

NO.	Uraian	2020
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,55

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

b. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.150

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB
Di Kabupaten Barru Tahun 2020

NO.	Uraian	2020
1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	80%

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

c. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.151

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Di Kabupaten Barru Tahun 2020

NO.	Uraian	2020
1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	24,13

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

d. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan
Di Kabupaten Barru Tahun 2020

NO.	Uraian	2020
1	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

e. Ratio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah akseptor KB dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan dalam persen. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.153

Rasio akseptor KB Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB	21,801	21,344	21,065	20.141	61280
2	Jumlah pasangan usia subur	30,528	30,803	30,117	29.671	54320
3	Rasio akseptor KB (%)	71.41	69.29	70	67,88	1,128

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

f. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. CPR adalah perbandingan antara jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang ditanyakan dalam persen. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.154

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta KB aktif	21,736	21,344	21,065	20.141	19562
2	Jumlah pasangan usia subur	30,511	30,803	30,117	29.671	29361
3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49	71.24	69.29	69.94	67,88	66,63

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

g. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15-49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20-35 tahun

dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20-35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun. Dengan demikian yang dimaksud Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.155

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 thn	559	532	512	508	443
2	Jumlah pasangan usia subur	30,511	30,803	30,117	29.761	29361
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1.83	1.73	1.70	1,71	1,51

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

h. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) adalah perbandingan antara jumlah PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.156

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (unmet need) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	4.300	5.043	8.971	5.744	4906
2	Jumlah pasangan usia subur	30.511	30.803	30.117	29.671	29361
3	Persentase ((1/2)x100%)	14,09	16,37	29,78	19,35	16,71

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

i. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP) adalah perbandingan jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP dengan jumlah akseptor yang dinyatakan dalam persen. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.157

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	3.206	3.137	2.889	2.745	2760
2	Jumlah akseptor KB	21.736	21.344	21.065	20.141	19859
3	Persentase ((1/2)x100%)	14,75	14,70	13,71	13,62	13,90

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

j. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah perbandingan jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi dengan jumlah akseptor KB yang dinyatakan dalam persen. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.158

Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	8,775	8,590	9,540	9.930	9799
2	Jumlah akseptor KB	21,736	21,344	21,065	20.141	19562
3	Persentase ((1/2)x100%)	40.37	40.25	45.29	46,38	50,09

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

k. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.159

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	3,245	3,756	3,794	3.805	3642
2	Jumlah anggota kelompok BKB	5,802	6,716	6,716	6.716	7672
3	Persentase ((1/2)x100%)	55.93	55.93	56.49	56,65	45,13

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

1. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKR yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.160

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	3,078	3,972	3,984	3.997	3008
2	Jumlah anggota kelompok BKR	7,659	9,262	9,262	9.266	9992
3	Persentase ((1/2)x100%)	40.19	42.88	43.01	43,13	30,10

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

m. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB adalah jumlah anggota kelompok BKL yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.161

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	1,085	2,668	2,705	2.752	2325
2	Jumlah anggota kelompok BKL	3,913	7,346	7,367	7.374	7012
3	Persentase ((1/2)x100%)	27.73	36.32	36.72	37,32	33,16

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

n. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan adalah perbandingan antara jumlah PPKS dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.162

Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap
Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PPKS	7	7	7	7	7
2	Jumlah kecamatan	7	7	7	7	7
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

o. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa adalah perbandingan jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Untuk mengetahui cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.163

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PIK R/M	60	68	70	73	63
2	Jumlah kecamatan	7	7	7	7	7
3	Persentase ((1/2)x100%)	857.14	971.43	1000	1042	900

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

p. Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang penegendalian penduduk adalah perbandingan jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan dengan jumlah PKB/PKLB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PKB/PKLB yang didayagunakan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.164

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	44	47	47	50	50
2	Jumlah PKB/PLKB	44	47	47	50	50
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

q. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang ber-KB Mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri adalah perbandingan jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri dengan jumlah anggota kelompok UPPKS yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.165

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	172	352	381	412	469
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	876	917	917	917	917
3	Persentase ((1/2)x100%)	19.63	38.39	42	44,92	51,15

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

r. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa kelurahan adalah perbandingan jumlah petugas pembantu Pembina KB desa dengan jumlah desa kelurahan yang dinyatakan dalam persen. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.166

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	55	55	55	55	55
2	Jumlah desa/kelurahan	55	55	55	55	55
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

s. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah perbandingan jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon dengan perkiraan permintaan masyarakat yang dinyatakan persen. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.167

Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	56,900	55,315	48,362	20.588	34279
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	56,900	55,315	48,362	20.588	34279

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Cakupan $(1/2) \times 100\%$	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

t. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan adalah perbandingan jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dengan jumlah faskes dan jejaring yang dinyatakan dalam persen. Persentase faskes dan jejaringnya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.168

Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	12	14	14	14	14
2	Jumlah Faskes dan jejaring	12	14	14	14	14
3	Persentase $((1/2) \times 100\%)$	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

u. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa adalah perbandingan antara jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga yang dinyatakan dalam persen. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.169

Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
3	Persentase $((1/2) \times 100\%)$	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

v. **Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga**

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui fungsi keluarga merupakan perbandingan antara jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dengan jumlah kelompok kegiatan yang dinyatakan dalam persen. Cakupan kelompok kegiatan melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.170

Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	232	249	249	255	255
2	Jumlah kelompok kegiatan	232	249	249	255	255
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2020

8. **Perhubungan**

a. **Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**

Jumlah arus penumpang umum adalah jumlah keseluruhan penumpang yang menggunakan angkutan umum yang keluar masuk pada suatu daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.171

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penumpang Bis	4.769.581	1.773.098	1,693,893	1,682,943	826,600
2	Jumlah penumpang Kapal laut	30.284	36.993	23,103	45,287	28,164
3	Total Jumlah Penumpang	4.799.865	1.810.091	1,693,893	1,682,943	853,764

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penumpang bis maupun jumlah penumpang kapal laut berfluktuasi. Untuk jumlah penumpang kapal laut mengalami peningkatan di tahun 2019, hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adanya kenaikan biaya tiket pesawat udara.

b. **Jumlah Uji Kir Angkutan Umum**

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi

persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah Uji Kir Angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.172

Jumlah Uji Kir Angkutan umum Kabupaten Barru Tahun 2020

NO.	Uraian	2020
1	Jumlah Uji Kir angkutan umum	2.017
2	Persentase Kepemilikan Kir angkutan umum	41,29

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2020

c. Rasio Ijin Trayek

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Rasio ijin trayek adalah perbandingan antara jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.173

Rasio Ijin Trayek Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Izin Trayek perkotaan	-	-	-	-	-
2	Izin Trayek perdesaan	248	41	41	41	41
3	Jumlah Izin Trayek	248	41	41	41	41
4	Jumlah penduduk	173.163	174.871	180.509	182.373	187,392
5	Rasio Ijin Trayek	0,00144	2,34	2,27	2,24	2,18

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio ijin trayek dari tahun 2016 sampai 2020 menurun, hal ini di pengaruhi jumlah permintaan ijin yang berkurang dan jumlah penduduk yang terus bertambah.

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima kapal laut dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bis dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Jumlah pelabuhan laut/terminal bis di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.174
Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelabuhan laut	5	5	5	5	5
2	Jumlah terminal bis	5	5	5	4	3
	Jumlah	10	10	10	9	8

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pelabuhan laut/terminal bis cenderung stagnan, hanya saja khusus untuk terminal bis pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan oleh adanya pengalihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi.

e. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat adalah perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang yang terangkut yang dinyatakan dalam persen. Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.175
Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Angkutan darat	2259	1535	1,475	1,288	525
2	Jumlah penumpang angkutan darat	4.769,5 81	1.773,0 98	1,693,8 93	1,682,9 43	825,6 00
3	Persentase	0,047	0,087	0.087	0.076	0,063

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase layanan angkutan darat mulai pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuatif, hal ini di sebabkan oleh menurunnya jumlah penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi, disamping itu terjadinya penurunan jumlah angkutan darat karena kurangnya peremajaan kendaraan.

f. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang atau barang yang diangkut dengan moda transportasi angkutan umum. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.176

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	4.769.581	939,875	936,225	907,025	825,600
2	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum	17.977	11,278	11,235	10,884	8,784

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum cenderung menurun mulai pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, hal ini di sebabkan oleh menurunnya jumlah orang/barang yang menggunakan sarana angkutan umum karena beralih menggunakan kendaraan pribadi, disamping itu terjadinya penurunan jumlah angkutan umum karena kurangnya peremajaan kendaraan.

g. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Per Tahun

Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/ terminal adalah jumlah orang atau barang yang diangkut dengan moda transportasi angkutan umum yang melalui dermaga dan terminal. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.177

Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Pertahun
Di Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Tahun	Satuan	Dermaga	Terminal	Jumlah
1	2016	Orang	30,284	4,769,581	4,799,865
		Barang	17,977		17,977
2	2017	Orang	39,074	4,769,581	4,808,655
		Barang	11,382.72	12,382	23,765
3	2018	Orang	23,103	4,769,581	4,792,684
		Barang	12,335.87	12,382	24,717.87
4	2019	Orang	45,287	1,682,943	1,728,230
		Barang	9,683,355	10,884	9,694,239
6	2020	Orang	28,164	825,600	853,764
		Barang	12,657	8,784	21441

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas jumlah orang melalui dermaga cenderung menurun disebabkan pemilihan moda transportasi masyarakat dari kapal laut ke pesawat udara. Untuk jumlah orang yang melalui terminal menurun sangat signifikan hal ini disebabkan menurunnya jumlah penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan jumlah barang yang melalui dermaga dan terminal meningkat, hal ini terjadi karena fungsi dermaga sangat optimal dari sisi pengangkutan barang, disamping itu pemilihan pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Barru menjadi alternatif para pengguna jasa.

9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif merupakan perbandingan jumlah koperasi aktif dengan jumlah semua koperasi yang ada dan dinyatakan dalam persen. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.178

Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	97	58	58	63	65
2	Jumlah koperasi	119	103	103	102	104
3	Persentase koperasi aktif	81,51%	56,31%	56,31%	61,76	62,50

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2020

Meningkatnya jumlah koperasi aktif diukur dari indikator kinerja perbandingan antara jumlah koperasi dengan jumlah koperasi seluruhnya. Merupakan indikator utama dalam penilaian suatu koperasi dikatakan aktif apabila melakukan RAT dua tahun terakhir. Jumlah koperasi di Kabupaten Barru tahun 2020 adalah 104 unit, sebanyak 65 koperasi yang melakukan RAT dan 39 yang tidak melakukan RAT artinya sebanyak 62,50% koperasi aktif. Adapun penyebab keberhasilan dari pencapaian indikator adalah :

- Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pembinaan koperasi dan dilakukan pelatihan terhadap kemampuan untuk menyusun/membuat laporan pertanggung jawaban keuangan koperasi
- Dilakukannya pengusulan penghapusan terhadap koperasi yang sudah tidak melakukan operasional usaha.

b. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah UKM non BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM yang dinyatakan dalam persen. Persentase UKM non BPR/LKM di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.179

Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	1898	1571	1494	430	762
2	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	1898	1571	1494	458	790
3	Persentase	100	100	100	93,88	96,46

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2020

Jumlah usaha kecil dan menengah tahun 2020 non BPR/LKM adalah sebanyak 762 unit dari 790 unit. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. hal tersebut menandakan pertumbuhan UKM di Kabupaten Barru cukup tinggi.

c. **Persentase BPR/LKM Aktif**

Persentase BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang dinyatakan dengan persen. Persentase jumlah BPR/LKM aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.180

Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BPR/LKM aktif	20	20	20	20	20
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	48	28	28	28	28
3	Persentase	71.43%	71.43%	71.43%	71,43%	71,43%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2020

Data BPR/LKM di Kabupaten Barru adalah sebanyak 28 LKM yakni 20 unit merupakan Bumdes binaan Dinas PMDPPKBP3A sedangkan 8 merupakan binaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang sudah tidak aktif karena baik dari usaha maupun pengurus sudah tidak ada.

d. **Persentase Usaha Mikro dan Kecil**

Persentase usaha mikro dan kecil merupakan perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dengan jumlah seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen. Persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.181

Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Usaha mikro	15.611	17.979	17.820	18.999	9122
2	Jumlah Usaha Kecil	1.514	1.933	1.434	322	718
3	Usaha Menengah	79	50	88	136	9840
4	Jumlah UKM	17.204	19.962	19.342	19457	9912
5	Persentase	99,78%	99,75%	99.55%	99,74%	99,27%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2020

Jumlah usaha mikro dan kecil artinya jumlah seluruh usaha yang mempunyai omzet maksimal 300 juta. Jumlah usaha mikro dan kecil merupakan akumulasi dari jumlah pelaku industri, perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan. Berdasarkan tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan adalah 99,27% artinya dari 20.656 unit usaha yang ada di Barru ada 20.505 unit merupakan usaha mikro dan kecil.

10. **Penanaman Modal**

a. **Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Investor adalah orang perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik yang melakukan suatu investasi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jumlah investor

berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.182

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PMDN	538	323	325	260	118
2	PMA	-	-	-	-	-
3	Total	538	323	325	260	118

Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2020

Jumlah Persetujuan Investasi (usaha) tahun 2020 sebanyak 118 yang dikategorikan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan nilai investasi lebih dari 200 juta dan penambahan investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal Daerah tahun 2020.

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik untuk jangka waktu tertentu. Jumlah nilai investasi PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui dinas terkait. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.183

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
1	2016	559	537.393.500.000
2	2017	323	541.582.143.139
3	2018	325	729.568.409.663
4	2019	260	730.659.151.736
5	2020	118	855.316.873.042

Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2020

Terdapat Peningkatan nilai investasi sebesar Rp. 124.657.721.306 dari nilai investasi tahun sebelumnya. Peningkatan ini cukup baik dari periode sebelumnya. Hal yang perlu untuk diperhatikan dan dipertahankan adanya kepastian lahan dan sektor investasi yang dapat ditawarkan kepada investor dengan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Percepatan RDTR untuk seluruh wilayah di Kabupaten Barru, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kemudahan/ kebijakan investasi lainnya yang dapat ditawarkan oleh Pemda Kabupaten Barru.

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan dengan jumlah seluruh PMDN/PMA. Rasio daya serap tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.184

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Barru Tahun 2020

NO.	Uraian	2020
1	Rasio daya serap tenaga kerja	237

Sumber : DPMPTSPK Kab. Barru Tahun 2020

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dihitung dengan membandingkan realisasi PMDN tahun evaluasi dikurang realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.185

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Tahun	Realisasi PMDN Tahun Evaluasi	Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)
1	2016	537.070.000.026	841.535.650.684	-36,18
2	2017	541.582.143.139	537.393.500.000	0,78
3	2018	729.568.409	591.931.425.987	35
4	2019	730.659.151.736	729.568.409.663	0,15
5	2020	855.316.873.042	730.659.151.736	17,06

Sumber : DPMPTSPK Kab. Barru Tahun 2020

Terdapat Peningkatan nilai investasi sebesar Rp. 124.657.721.306 dari nilai investasi tahun sebelumnya atau sebesar 17,06 % pada tahun 2020. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan terhadap daya dukung investasi di Kabupaten Barru yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- Peningkatan Promosi investasi ditahun 2020 melalui pameran investasi baik di dalam maupun di luar Provinsi;
- Peningkatan koordinasi investasi antar lembaga pemerintah, swasta dan pihak lainnya;
- Semakin membaiknya pelaporan realisasi penanaman modal daerah baik yang dilakukan secara manual maupun online;
- Perbaikan percepatan berusaha melalui pembentukan satuan tugas percepatan berusaha dan perbaikan regulasi perizinan dan penanaman modal daerah.

11. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif adalah perbandingan antara jumlah organisasi pemuda yang aktif dengan jumlah seluruh organisasi pemuda yang dinyatakan dalam persen. Persentase organisasi pemuda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.186

Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Barru	15	15	42	42	64
2	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Tanete Rilau	15	15	26	26	44
3	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Tanete Riaja	15	15	21	21	38
4	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Pujananting	15	15	16	16	35
5	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Balusu	15	15	21	21	40
6	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Soppeng Riaja	15	15	21	21	39
7	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Mallusetasi	15	15	20	20	38
8	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	105	105	167	167	298
9	Jumlah seluruh organisasi pemuda	105	105	167	167	298
10	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2020

b. Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya untuk melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi atau orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Persentase wirausaha muda adalah perbandingan antara jumlah wirausaha muda di bagi dengan jumlah seluruh wirausaha yang dinyatakan dalam persen. Persentase wirausaha muda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.187

Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wirausaha muda	10	18	5	20	139
2	Jumlah seluruh wirausaha	18	23	90	150	150

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persen ((1/2)x100%)	55,56	78,26	5.56	13.33	92,66

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2020

c. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga merupakan perbandingan jumlah cabang olahraga yang dibina dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.188

Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabang	8	6	13	27	27
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabang	19	26	26	29	29
3	Persen ((1/2)x100%)	Persen	42,10	23,08	50	93,1	93,1

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2020

d. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi

Cakupan pelatih yang bersertifikasi adalah perbandingan antara jumlah pelatih bersertifikat dengan jumlah seluruh pelatih yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pelatih yang bersertifikat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.189

Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelatih bersertifikat	11	11	43	57	57
2	Jumlah seluruh pelatih	15	15	58	75	75
3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	73,33	73,33	74,13	76	76

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2020

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan atlet muda adalah perbandingan antara jumlah pembinaan atlet muda dengan jumlah seluruh pembinaan atlet muda yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.190

Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlit pelajar yang dibina	71	25	401	430	430

No	Uraian			2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah	seluruh	atlit	130	135	401	606	606
	pelajar							
3	Persen ((1/2)x100%)			54,61	18,52	100	70,9	70,9

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2020

f. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.191

Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	4	7	---	---	---

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2020

g. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi cabang olahraga adalah jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah prestasi cabang olahraga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.192

Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	3	4	---	---	---

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2020

12. Statistik

a. Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Barru"

Buku Kabupaten Dalam Angka sebagai sarana untuk menyediakan data statistik yang dapat menggambarkan indikator capaian pembangunan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta dan selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan. Sedangkan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah buku yang memuat jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Ketersediaan Buku Kabupaten Barru Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.193

Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan
Buku "PDRB Kabupaten Barru" Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buku Kabupaten dalam angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barru Tahun 2020

13. Persandian

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi
Dalam Komunkasi Perangkat Daerah

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah merupakan perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi dengan jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.194

Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi
Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat daerah	OPD	1	1	1	1	1
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	39	37	37	37	37
3	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barru Tahun 2020

14. Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Secara umum, seni budaya merupakan segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan biasanya ditampilkan pada kegiatan festival. Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.195

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival budaya	1 Kali	1 Kali	3 Kali	5 kali	5 kali

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

Dari data diatas terlihat bahwa penyelenggaraan festival budaya tiap tahunnya mengalami peningkatan.

b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan persentasenya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.196

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	11	11	11	15	15
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	27	27	29	28	15
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dilestarikan	40,7	30,6	40,9	53,57	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

c. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Revitalisasi dan inventarisasi karya budaya merupakan kewajiban dalam hal pelestarian budaya, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga, memelihara, membangkitkan serta memperkenalkan kekayaan budaya yang ada di suatu wilayah. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Barru yang dituangkan dalam bentuk dokumen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.197

Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Dokumen)	1	1	2	3	3

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

d. Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Pengelolaan cagar budaya Kabupaten Barru merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dari tahun ke tahun, hal ini sebagai bentuk pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya yang ada. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.198

Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	11 Jenis	11 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	15 Jenis

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2020

15. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.199

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	146.803	187.25	193,601	202.142	121.286
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	0	0	0	0	0
3	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	146.803	187.25	193,601	202.142	121.286

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Barru Tahun 2020

b. Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku dan judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah jumlah buku dan judul buku yang ada di perpustakaan. Jumlah koleksi buku dan judul buku yang tersediadi perpustakaan daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.200

Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	53.096	55.344	56,435	58.685	58.685
2	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	10.575	10.851	11.119	11.676	11.676

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Barru Tahun 2020

c. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi diwilayah pemerintah daerah dimana rasio perpustakaan persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan per 1.000 penduduk. Rasio perpustakaan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.201

Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan	56	56	56	56	56
2	Jumlah Penduduk	173.163	174.871	180,509	181.500	187,392
3	Rasio ($1/2 \times 1000$)	0,33	0,32	0.31	0,31	0,30

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Barru Tahun 2020

d. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.202

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	0,647

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Barru Tahun 2020

e. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki Sertifikat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.203

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	1	1	3	3	3
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	3	3	3	3	3
3	Persentase	33,33%	33,33%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Barru Tahun 2020

16. Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dengan jumlah seluruh perangkat daerah. Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.204

Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	17	26	27	30	29
2	Jumlah Perangkat Daerah	39	37	37	37	36
3	Persen	43,59	70.27	72.97	81,08	80,5

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Barru Tahun 2020

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.205

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	4	5	3	3	0

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Barru Tahun 2020

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata dihitung dengan membandingkan antara Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten dengan jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten

yang dinyatakan dalam persen. Kujungan wisata di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.206
Kunjungan Wisata Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten	26.5	49.35	54,835	117,967	61,519
2	Lama kunjungan wisata	-	-	-	1 hari	1 hari
3	Jumlah seluruh kunjungan wisata se-kabupaten	30	49.35	54,835	117,967	61,519
4	Jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten	26	28	29,500	31,000	33,000
5	Persen	101,92	176,25	185.88	378,30	186.4

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Barru Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah persentase kunjungan wisata ke Kabupaten Barru pada tahun 2020, hal ini dipengaruhi terdapat beberapa objek/daya tarik wisata sebagai tempat pelaksanaan event besar seperti Lappalaona yang menarik kunjungan sampai 18.907 wisatawan, terdapat juga beberapa objek/daya Tarik wisata baru yang berkembang seperti Diana Waterpark dengan jumlah kunjungan 47.086 wisatawan dan Embung Paccekke dengan jumlah kunjungan 2.552 wisatawan.

b. PAD Sektor Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata merupakan perbandingan antara PAD sektor pariwisata dengan total PAD yang dinyatakan dalam persen. Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.207
PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Tahun	PAD sektor pariwisata	Total PAD	Persen
1	2016	23,841,000	51,671,673,714.73	0,05
2	2017	25.570.000	130.717.794.632,7	0,05
3	2018	29,550,000	104.627.706.924,57	0,03
4	2019	34,350,000	110.310.167.038	0,03
5	2020	64,119,000	107,388,426,060.00	0.06

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Barru Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah Pemasukan Asli Daerah dari sektor pariwisata sebesar 64.119.000 dari tahun sebelumnya yang hanya 34.350.000, hal ini menunjukkan secara rasio keseluruhan dibandingkan dengan PAD Kabupaten meningkat sebesar 0.059 %, hal ini disebabkan terjadinya kenaikan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Barru yang dikarenakan adanya

event besar yang pernah dilakukan dan juga meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke tempat wisata baru yang sementara terus berkembang.

3. Pertanian

a. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal merupakan perbandingan antara produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya dengan luas areal tanaman padi/bahan pangan utama local yang dinyatakan dalam persen. Produktivitas padi atau bahan pangan local dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.208

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton)	110,514.01	116,874.30	121,470.07	124,399.04	128,131.01
2	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal (Ha)	22,323	22,975	23,488	23,986	24,706
3	Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ku/Ha)	51.15	54.13	56.71	58.140	53.42

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Barru 2020

Total Pertanaman Padi Tahun 2020 seluas 24.706 Ha, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, seiring dengan meningkatnya produksi tanaman padi, hanya saja dari sisi produktifitas padi menurun dari tahun sebelumnya.

b. Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok petani merupakan perbandingan antara jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda dengan jumlah kelompok tani yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.209
Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda	126	117	140	44	170
2	Jumlah kelompok tani	604	705	709	713	712
3	Persen	20,86	16,60	19,75	6,17	23,88

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Barru 2020

Jumlah Kelompok Tani meningkat sebanyak 170 kelompok merupakan kelompok yang mendapatkan Bantuan Pemda dari beberapa Bidang : Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan.

4. Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. Ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.210
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Tahun	Nilai ekspor	Nilai Impor	Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan
1	2016	112.278.000	0	112.278.000
2	2017	127.438.834	0	127.438.834
3	2018	128,712,891	0	128.712.891
4	2019	97.264.928	0	97.264.928
5	2020			

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2020

b. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.211
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	3	6	9	12	12
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	39	39	39	39	39
3	Cakupan (%)	7.69%	15.38%	23.08%	30,77%	30,77%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2020

5. Perindustrian

a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda dengan jumlah kelompok pengrajin yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pengrajin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.212

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	20	20	20	20.67	20.67

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2020

Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2020 sebesar 20,67 menunjukkan bahwa dari 30 kelompok pengrajin yang ada di kabupaten Barru terdapat 7 kelompok yang mendapatkan bantuan/binaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

b. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.213

Pertumbuhan Industri Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Pertumbuhan Industri	11

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2020

6. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah banyaknya produksi perikanan yang diperoleh dalam rentan waktu tertentu. Produksi perikanan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.214

Produksi Perikanan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi ikan (ton)	23.279,07	24.148,03	24.373,41	25.648,66	25.773,9
2	Target Daerah (ton)	24.112,72	24.968,64	25.874,52	26.587,30	27.324,19
3	Persen	96,54	96,71	94,20	96,46	94,32

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2020

Jumlah produksi ikan terdiri dari jumlah produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Jumlah produksi ikan mengalami peningkatan dari 25.648,66 ton pada tahun 2019 menjadi 25.773,9 ton pada tahun 2020. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh dukungan dari peningkatan sarana dan prasarana

pengelolaan perikanan, pembinaan terhadap nelayan yang semakin intensif serta peningkatan teknologi usaha perikanan.

Walaupun jumlah produksi ikan mengalami peningkatan namun belum mampu mencapai target daerah yang telah ditetapkan yaitu hanya sebesar 94,32 persen yang cenderung menurun dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertama, masih adanya lokasi perikanan budidaya yang rawan terhadap penyakit disebabkan seringnya tambak tergenang banjir dan saluran pemasok air untuk tambak sama dengan saluran pembuangan air sawah sehingga terjadi kontaminasi air tambak dengan zat kimia limbah pertanian. Kedua, adanya batasan kewenangan dalam pengawasan sumberdaya perikanan sehingga penangkap ikan secara illegal masih sering terjadi dan yang terakhir jumlah nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional masih lebih besar dibandingkan yang menggunakan alat tangkap modern.

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah konsumsi ikan dengan target daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase konsumsi ikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.215
Konsumsi Ikan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Konsumsi ikan	Target Daerah	Persentase
		Kg	Kg	
1	2016	7.787.740	7.804,53	99,78
2	2017	7.847.077	7.860.899	99,78
3	2018	7.913.736	7.917.209	99,96
4	2019	7.929.362	7.966.561	99,53
5	2020	8.014.464	8.014.496	99,99

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2020

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dengan target kelompok nelayan yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.216
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan	31	39	27	63	69
2	Target Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan	14	16	16	18	18
3	Persen	221	175	168,75	350	383

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2020

Besarnya capaian cakupan bina kelompok nelayan disebabkan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap melalui pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa alat tangkap, mesin kapal, GPS dan Kapal motor tidak hanya DAU namun juga DAK melalui 2 Kegiatan yaitu kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap dan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap.

d. **Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan perbandingan jumlah produksi ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan dengan jumlah produksi ikan di daerah yang dinyatakan dalam persen. Produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.217

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	Jumlah Produksi ikan di daerah	Prosentase
1	2016	5.161,07	23.279,07	22,17
2	2017	5.358,57	24.148,03	22,19
3	2018	8174,37	24.372,41	35,53
4	2019	8.583,09	25.874,52	33,17
5	2020	12.554,69	25.773,90	48,71

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2020

2.1.3.4 **Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan**

1. **Perencanaan Pembangunan**

a. **Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**

Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan rentan waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan rentan waktu 5 tahun, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rentan waktu 30 tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan ditetapkan dengan PERKADA. Ketersediaan dokumen perencanaan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.218

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	RPJPD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	RPJMD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	RKPD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
4	RTRW	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2020

Rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada tingkat daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun tahun 2020 adalah:

- Peraturan Bupati Barru Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021
- Peraturan Bupati Barru Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020

Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.219

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
Kabupaten Barru Tahun 2016 -2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan	169	191	166	157	276
2	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan	171	191	166	157	276

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persen	98,83%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2020

b. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD merupakan perbandingan antara jumlah program yang ada di APBD dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan dan dinyatakan dalam persen. Angka 100% menunjukkan dokumen RKPD telah konsisten dan angka dibawah 100% menunjukkan terjadi inkonsistensi antar dokumen APBD dengan RKPD. Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.220

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan	169	161	166	157	276
2	Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan	169	191	166	157	276
3	Persen	100%	84,29%	100%	100%	100%

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2020

Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah perbandingan jumlah program RKPD tahun berkenaan terhadap jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Sementara itu, Persentase penjabaran program RKPD kedalam APBD adalah perbandingan jumlah program APBD tahun berkenaan terhadap jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD sebesar 100% dicapai pada tahun 2018, 2019, dan 2020 sedangkan dibawah 100% pada tahun 2017. Demikian pula Penjabaran program RKPD kedalam APBD sebesar 100% dicapai pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sedangkan dibawah 100% dicapai pada tahun 2017. Angka 100% menunjukkan dokumen APBD telah konsisten dengan RKPD dan RKPD telah konsisten dengan RPJMD. Program yang ada pada PJMD telah dijabarkan sepenuhnya pada RKPD, dan program yang ada pada APBD sepenuhnya telah berpedoman kepada RKPD.

Keberhasilan pencapaian angka 100% ditunjukkan dengan implementasi sistem perencanaan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. selain itu, adanya komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan aplikasi E-Planning dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebagai tindak lanjut komitmen, pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan berbagai tahapan dalam Launching aplikasi SIMDA Perencanaan (e-planning) pada tahun 2017. Adapun kondisi eksisting penerapan perencanaan berbasis aplikasi e-Planning sampai dengan tahun 2020 adalah:

- 1. Penyelesaian penginputan RKPD Kabupaten Barru tahun 2021 pada tahun 2020
- 2. Penyelesaian penginputan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 pada tahun 2020
- 3. Penyelesaian penyusunan ASB dan SSH pada tahun 2020
- 4. Penyelesaian penginputan SSH pada tahun 2020

Adapun angka dibawah 100% menunjukkan terjadi inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Jumlah program yang direncanakan pada RPJM tidak seutuhnya termuat pada RKPD dan jumlah program yang direncanakan di RKPD tidak seutuhnya mendapat penganggaran pada APBD. Hal ini disebabkan karena belum diterapkannya aplikasi E-Planning dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah serta kurangnya pengawasan aparatur perencana terhadap konsistensi program pada RPJMD ke dalam RKPD dan program yang ada pada RKPD ke dalam APBD. Selanjutnya perlu peningkatan kualitas aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan sampai pada penganggaran baik di tingkat kabupaten maupun SKPD.

2. Keuangan

a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan merupakan penilaian ketaatan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.221

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barru
Tahun 2016 -2020

No	Tahun	Opini BPK
1	2016	WTP
2	2017	WTP
3	2018	WTP
4	2019	WTP
5	2020	WTP

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru Tahun 2020

b. Persentase SILPA

Silpa adalah sisa lebih perhitungan anggaran sebagai selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Sedangkan persentase SILPA merupakan perbandingan antara total SILPA dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase SILPA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.222

Persentase SILPA Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Total SILPA	Total APBD	Persentase
1	2016	171,849,905,419.98	1,094,126,775,699.72	15.71%
2	2017	171.858.014.411,98	1.357.790.897.071,09	12,66%
3	2018	141.476.534.480,84	992.656.086.174,65	14.25%
4	2019	83.717.109.878,35	1.119.164.212.811,57	13,37%
5	2020	83.734.357.547,35	920.669.003.812,00	9,09 %

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru Tahun 2020

c. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase belanja pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan pendidikan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase belanja pendidikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.223

Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barru

Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Total APBD	Persentase
1	2016	298,572,946,117.50	1,094,126,775,699.72	27.29%
2	2017	276.889.978.580,7	1.357.790.897.071,09	20,39%
3	2018	273.979.301.209,00	992.656.086.174,65	27,60%
4	2019	285.957.897.587,00	1.119.164.212.811,57	25,55%
5	2020		920.669.003.812,00	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru Tahun 2020

d. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan kesehatan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase belanja kesehatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.224

Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Barru

Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Total APBD	Persentase
1	2016	162,958,451,694.68	1,094,126,775,699.72	14.89%
2	2017	148.650.285.899,00	1.357.790.897.071,09	10,94%
3	2018	148.763.525.015,15	992.656.086.174,65	14,99%
4	2019	190.954.022.675	1.119.164.212.811,57	17,06%
5	2020		920.669.003.812,00	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru Tahun 2020

e. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung merupakan perbandingan antara jumlah belanja langsung dan jumlah belanja tidak langsung terhadap total APBD yang dinyatakan dalam persen. Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.225
Perbandingan Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Barru

No	Tahun	Jumlah Belanja Langsung	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Total APBD	Persentase Belanja Langsung	Persentase Belanja tidak langsung
1	2016	451,828,497,219.18	497,251,067,030.36	1,094,126,775,699.72	41.30%	45.45%
2	2017	553.615.796.779,10	804.175.100.291,99	1.357.790.897.071,09	40,77%	59,22
3	2018	488.253.434.390,15	504.402.651.784,65	992.656.086.174,80	49,19%	50,81%
4	2019	580.796.860.218,59	538.367.352.592,98	1.119.164.212.811,57	51,89%	48,10%
5	2020	413.690.046.654,10	586.660.283.440,98	920.669.003.812,00	44,93%	63,72%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru Tahun 2020

f. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Bagi hasil kabupaten/kota dan desa merupakan perbandingan antara jumlah belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa yang dinyatakan dalam persen. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.226
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa	Total APBD	Persentase
1	2016	83,275,874,757.00	1,094,126,775,699.72	7.61%
2	2017	90.275.979.009,00	1.357.790.897.071,09	6,65%
3	2018	96.250.293.737,00	992.656.086.174,80	9,70%
4	2019	43.901.994.559,07	1.119.164.212.811,57	3,92%
5	2020	NA	920.669.003.812,00	NA

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru Tahun 2020

g. Penetapan APBD

APBD ditetapkan dengan perkara yang sebelumnya telah dibahas dengan badan legislatif (DPRD). Penetapan APBD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.227

Penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Penetapan APBD
1	2016	29 Desember 2015
2	2017	29 Desember 2016
3	2018	20 Desember 2017
4	2019	17 Desember 2018
5	2020	17 Desember 2019

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru Tahun 2020

3.Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu kebijakan pemerintah dalam UU ASN nomor 5 Tahun 2014, Setiap ASN berhak mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan minimal 20 jam per tahun. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dihitung beradsarkan perbandingan antara jumlah jam pelajaran yang telah diikuti PNS dengan jumlah PNS. Rata-rata lama pegawai mendaptkan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.228

Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah JPL yang telah diikuti PNS Kab. Barru	74810	50125	39430	22104	64916
2	Jumlah PNS	4421	4217	4122	4098	3919
3	Rata - Rata lama Diklat	16,92 JPL	11,89 JPL	9,57 JPL	5,39 JPL	16,56 JPL

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2020

b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal adalah perbandingan antara ASN yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah seluruh ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.229

Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Diklat Teknis	4	109	217	1542	284
2	Jumlah PNS	4421	4217	4170	4098	3919
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0.09%	2.58%	5.26%	37.63%	7,25%

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2020

c. Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural adalah perbandingan antara jumlah ASN yang telah mengikuti diklat struktural dengan jumlah total jabatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.230

Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

NO	U R A I A N	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural	380	414	456	462	383
2	Jumlah Total Jabatan	695	664	664	664	668
3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	54.68%	62.35%	68.67%	69.58%	57,34%

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2020

d. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabaatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sedangkan jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.231

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Fabatan Fungsional Tertentu Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

NO	U R A I A N	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	27 Orang	33 Orang	26 Orang	33 Orang	30 Orang
2	Jumlah jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah	566 Orang	493 Orang	530 Orang	579 Orang	544 Orang

3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah	2.715 Orang	2.695 Orang	2.695 Orang	2.695 Orang	3345 Orang

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2020

4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu penunjang urusan pemerintahan yang berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu daerah dimana hasil penelitian dan pengembangan yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul disuatu wilayah.

a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan dalam RKPD dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD yang dinyatakan dalam persen. Persentase implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.232

Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	9	10	10	5	8
2.	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	9	10	10	10	8
3	Persen	100%	100%	100%	50%	100%

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2020

b. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam hal ini hasil-hasil kelitbangan yang sesuai dengan renja perangkat daerah yang berkenaan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dengan jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.233

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelitbangan yang ditindak lanjuti	100	85	15	3	7
2.	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat	110	91	17	4	8
3	Persen	90,91%	93,41%	88,24%	75%	87,5

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2020

c. **Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah.**

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dengan jumlah total perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.234

Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	5	15	17	19	40
2	Jumlah total perangkat daerah	37	36	36	36	44
3	Persen	5,41%	41,66%	47.22%	52,77%	90,90%

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2020

d. **Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah.**

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah adalah jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dengan jumlah inovasi yang diusulkan. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.235

Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Kebijakan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	5	15	17	19	50
2	Jumlah inovasi yang Diusulkan	15	36	36	36	77
3	Persen	33.33%	41,67%	47.22%	52,77%	64,93%

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2020

Tabel 2.236

Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 -2021

NO	NAMA OPD	INOVASI TAHUN 2018 – 2019	INOVASI TAHUN 2021	KET
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sistem pelayanan kepegawaian lancar efektif berkualitas, berintegrasi dan inovatif (SIPAKALEBBI) Tambahan Penghasilan pegawai Berbasis E- Kinerja	-	

NO	NAMA OPD	INOVASI TAHUN 2018 – 2019	INOVASI TAHUN 2021	KET
2	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah	Kopi Pintar	-	
		-	Peningkatan Minat Baca Pada Keluarga anak Pos PAUD dan Kelompok Bermain di Pendidikan anak Usia Dini	
3	Dinas Sosial	-	Percepatan Penerbitan Rekomendasi KIS, Melalui Ruang Pelayanan Publik	
		Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui Pendampingan TKSK di setiap Kecamatan	-	
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Percepatan penerbitan akta kelahiran melalui short message service (SMS)	-	
		-	JEBOL LADAKU (Jemput Bola Layanan administrasi kependudukan)	
		-	Percepatan penerbitan AKTA Kematian Melalui Whats'up	
		-	LAFOR pada DUKCAPIL (Pelayanan Informasi, Pengaduan Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	
5	Dinas Penanaman Modal, PTSP & TK	Agen Perizinan		
		-	Inventarisasi asset dengan Barcode	
		-	Peizinan di Ujung Jari	
6	Puskesmas Bojo Baru	Catin Sehat	-	
7	Desa Pao-Pao	Siap Desa Digital	-	
8	RSUD	-	Pelayanan Geriatri	2020
		-	Pelayanan Pendaftaran Online	2020
9	Dinas Kesehatan	-	PSC 119	
		-	Posyandu Terintegrasi	
10	Inspektorat Daerah	-	Klinik konsultasi	
		-	E- Audit	
		-	Asistensi APBDes	
		-	Asistensi RKAS	

NO	NAMA OPD	INOVASI TAHUN 2018 - 2019	INOVASI TAHUN 2021	KET
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Peningkatan Mitigasi Bencana	
		-	Peningkatan Penanganan Darurat Bencana	
		-	Analisis Kajian Bencana (JITU PASNA)	
12	BPKAD	-	BUKA MATA (Membangun Komitmen Menata Aset/Klinik Aset)	
		-	Sigadis Peka (Sistem Informasi dan Integrasi Pengelolaan Keuangan Daerah)	
13	Bakesbangpol & Linmas	-	Program Inovasi Pengolahan Data Kesbangpol Berbasis Internet	
14	BAPPEDA	-	Klinik Lakip	
		-	M-Water	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	e-Paper	
		-	Register tamu secara digital	
		-	Agenda Rapat Digital	
16	Dinas PMD,PPKB&P3A	-	Klinik Desa	
		-	Membangun Sinergitas dalam Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	
17	Dinas Lingkungan Hidup	-	Pemanfaatan sampah menjadi Biogas dan Pembangkit Tenaga Listrik	
		-	Peningkatan Laboratorium menjadi Laboratorium Terakreditasi	
		-	Pengurangan Sampah Kelola Bank Sampah	
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kampung olahraga	
		-	Kolaborasi dan Sinergitas percepatan pengembangan wirausaha muda	
19	Dinas Pertanian	-	Pengembangan Kawasan Agribisnis Berkelanjutan	
		-	Pelayanan Kesehatan Hewan Berbasis Masyarakat	
		-	Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pertanian oleh BPP	
20	Dinas Perikanan	-	Permentasi pakan alami untuk mengatur efisien dan efektifitas pakan	
		-	Aplikasi smart untuk menjaga kualitas benih unggul	

NO	NAMA OPD	INOVASI TAHUN 2018 – 2019	INOVASI TAHUN 2021	KET
21	Dinas Pariwisata	Event festival Budaya To Berru	Dokter Pariwisata (Pendorong kemajuan Terpadu Pariwisata)	
		Pengembangan Destinasi Baru	Aplikasi Jelajah Wisata Barru	
22	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	Terus Terang, Terang Terus	
		-	Pendataan RTLH Berbasis System Informasi (E-RTLH)	
23	Dinas Pendidikan	-	Literasi Sekolah	
		-	Memperkenalkan Sastra Tuter(Massure)Kepada Siswa	
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Total Jaring Kondom (Tindakan Operasional Tambal Lubang jalan Irigasi Kondisi Objek Aman)	
		-	Gerbang Putri Ayu (Gerakan Membangun Penetaan dan Pemanfaatan Ruang Aman dan Nyaman)	
25	Dinas Perhubungan	-	Sinergitas stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten Barru	
26	Satuan Polisi Pamong Praja	-	Pencegahan Pelanggaran PERDA melalui Bintaro (Pembinaan, Penguatan Kelembagaan&Integritas Patroli)	
		-	Penanganan Kebakaran Berbasis Masyarakat Melalui Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR)	
27	Sekretariat Dewan	-	E – Reses	
		-	E – Aspirasi	
28	Kecamatan Pujananting	-	P.5 Pujananting	
		-	Gebyar PBB	
29	Kecamatan Soppeng Riaja	-	Laboratorium Desa Membangun	
		-	Strategi advokasi Penanganan Sampah (Unit Layanan)	
30	Kecamatan Mallusetasi	-	SIMPLE (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Elektronik) Dengan Percepatan pelayanan pencatatan sipil Pendistribusian Surat Online	

NO	NAMA OPD	INOVASI TAHUN 2018 - 2019	INOVASI TAHUN 2021	KET
31	Kecamatan Balusu	-	Pelayanan Adinistrasi Terpadu	
		-	Pelayanan Perizinan (Aplikasi penerbitan IUMK dan Persuratan melalui WA)	
32	Kecamatan Tanete Rilau	-	APESPEDE (Aplikasi SPPD)	
		-	Anda Puas Kami Senang (Sistem Pelayanan)	
33	Kecamatan Tanete Riaja	-	BERJUMPA BERLIAN (Bersama Masyarakat, jum'at pagi bersihkan lingkungan)	
34	Kecamatan Barru	-	Inovasi Pelayanan Terpadu	
35	Bagian Hukum	-	Media Online Produk Hukum Daerah	
		-	Mempercepat Penyelesaian TL dengan Aplikasi SIPTL	
36	Bagian Humas	-	Teamsus Media Desa/Kel Sosial Care	
37	Bagian Pemerintahan dan Otoda	-	Excelent Service dengan Stop Reduplikasi Adminstrasi Pemerintahan	
		-	Pengumpulan Bahan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui e- mail pada semua Kecamatan di Kabupaten Barru	
		-	Aplikasi 3 Sipa	
38	Bagian Umum	-	Memberi Kenyamanan pada Pengguna Kamar Kecil Kantor Bupati Barru	
39	Bagian Administrasi perekonomian	-	Klinik UMKM	
		-	Dewan CSR	
40	Bagian Organisasi	-	E- TUSI (Tugas Pokok dan Fungsi secara Elektronik)	
41	Bagian Administrasi Pembangunan	-	Penerapan AMEL (Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal)	
		-	Pabbicara Administrasi Penyedia Barjas	
42	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	Reward Pemerintah Daerah kepada Imam Masjid, Pengawai Syara' dan Guru Mengaji menuju Baitullah	

NO	NAMA OPD	INOVASI TAHUN 2018 – 2019	INOVASI TAHUN 2021	KET
43	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	Pengadaan Sewa/Rental Mobil Operasional Pemerintah (E- Katalog)	

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2020

Ada 3 fase dalam proses inovasi yaitu : Inisiatif, Ujicoba dan Penerapan. Di Kabupaten Barru terdapat 10 (sepuluh) inovasi merupakan fase penerapan, yang dilakukan pada tahun 2018-2019, 2 (dua) inovasi dalam fase ujicoba, dilakukan pada tahun 2021 dan 75 (tujuh puluh lima) judul inovasi masuk dalam fase inisiatif yang akan dilakukan di tahun 2021.

Untuk jenis kebaruannya, inovasi dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, lebih fungsional, lebih mudah dan semacamnya. Hampir semua inovasi merupakan kebaruan. Inovasi yang telah dilakukan di Kabupaten Barru merupakan kebaruan untuk menunjang kinerja dari perangkat daerah yang bermanfaat bagi Aparatur sipil Negara, masyarakat maupun bagi pemerintah daerah, sehingga dapat menghemat energi dan biaya.

5. Pengawasan

a. Persentase Tindaklanjut Temuan

Persentase tindaklanjut temuan merupakan perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan yang dinyatakan dalam persen. Persentase tindaklanjut temuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.237

Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	234	87	51	171	156
2	Jumlah total temuan	293	98	68	243	204
3	Persen ((1/2)x100%)	79,86	88,77	91,67	70,37	76,47

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2020

b. Persentase Pelanggaran Pegawai

Persentase pelanggaran pegawai merupakan perbandingan antara jumlah ASN yang dikenai sanksi dengan jumlah total ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.238
Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Barru
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	29	7	7	0	
2	Jumlah total ASN	4.421	4217	4.122	4.098	3919
3	Persen ((1/2)x100%)	6,56	0,16	0,17	0	

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2020

c. Jumlah Temuan BPK

Indikator jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Tabel 2.239
Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan BPK	30	12	9	10	10

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2020

6. Sekretariat Dewan

a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota serta Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD dan RKPD) dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Tabel 2.240
Tersedianya Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber : Sekretaris DPRD Kab. Barru Tahun 2020

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang perjumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Barru tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.241

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan	683,36	683,36	683,36	683,36
2	Jumlah Kendaraan Bermotor	5.316	48.616	52.237	54.634
3	Rasio(1/2)	0.128	0.014	0.013	0,012

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan BPS Kabupaten Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas rasio panjang jalan perjumlah kendaraan cenderung menurun disebabkan bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahunnya dan panjang jalan secara keseluruhan tidak bertambah.

a. Jenis dan Jumlah Bank

Jenis dan jumlah Bank di Kabupaten Barru pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.242

Jenis dan Jumlah Bank Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	Kantor Cabang	Kantor Capem	Kantor Kas
1	Bank Pemerintah Indonesia	1	2	-
2	Bank Pembangunan Daerah	1	5	6
3	Bank Swasta	1	1	-
4	Jumlah	3	8	6

Sumber : BPS (Kabupaten Barru dalam Angka Tahun 2021)

b. Jumlah Hotel dan Restoran/ Rumah Makan

Jumlah hotel dan restoran/rumah makan di Kabupaten Barru tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.243

Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hotel Non Bintang	16	17*	17*	17*	23
2	Restoran/Rumah Makan	93	117	117	127	127

Sumber : Provinsi Sul-Sel dalam Angka Tahun 2021

c. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah seluruh rumah tangga yang dinyatakan dalam persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Barru tahun 2018 -2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.244

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Barru

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	44.007	47.546	57.154
2	Seluruh Rumah Tangga	54.707	56.657	59.635
3	Persentase	80%	83,91%	95,84%

Sumber : Provinsi Sul-Sel dalam angka Tahun 2020

d. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon di Kabupten Barru tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.245

Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk yang memiliki HP	30.657	33.657	37.223	41,235	41,235
2.	Penduduk yang memiliki telepon PSTN (Publik Switched Telephone Network)	1.308	1.089	786	786	786
3.	Total Jumlah penduduk yang memilikiHP/Telepon(1)+(2)	31.965	34.746	38.009	42,021	42,021
4.	Jumlah penduduk	171.248	173.163	174.871	174.871	187,392
5.	Persentase penduduk yang Menggunakan HP/Telepon(3/4)	0.18	0,20	0,22	0,24	0,24

Sumber : Dinas Komunikasi, informatika dan statistik Kab. Barru Tahun 2020

Dari tabel diatas pada tahun 2020 jumlah penduduk yang memiliki handphone meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memiliki telepon PSTN. Jika dilihat dari tahun 2016 s/d tahun 2020 rata-rata kenaikan berkisar 3.000 s/d 4.000 penduduk yang menggunakan HP, sedangkan penggunaan telepon PSTN dari tahun 2016 s/d 2020 terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan penduduk Kabupaten Barru perlahan-lahan meninggalkan Telekomunikasi menggunakan kabel dan beralih ke nirkabel.

e. Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.246

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	30%

Sumber : Dinas Komunikasi, informatika dan statistik Kab. Barru Tahun 2020

f. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi adalah perbandingan antara luas wilayah yang tercoverage dengan luas wilayah keseluruhan. Cakupan layanan komunikasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.247

Cakupan Layanan Komunikasi Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1.	Cakupan layanan komunikasi	85

Sumber : Dinas Komunikasi, informatika dan statistik Kab. Barru Tahun 2020

g. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet dan Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Proporsi rumah tangga dengan akses internet dan proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.248

Proporsi rumah tangga dengan akses internet dan rumah tangga yang memiliki Komputer pribadi Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Uraian	2020
1.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	40%
2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	50%

Sumber : Dinas Komunikasi, informatika dan statistik Kab. Barru Tahun 2020

2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Lama Proses Perizinan

Lama proses perizinan merupakan salah satu indikator yang sangat mempengaruhi iklim investasi pada suatu daerah. Adapun lama proses perizinan di Kabupaten Barru pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.249

Lama Proses Perizinan Kabupaten Barru Tahun 2020

No.	Uraian	Lama Penyelesaian
1.	Surat izin tempat usaha (SITU)	2 hari
2.	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	1 hari
3.	Tanda daftar perusahaan (TDP)	1 hari
4.	Izin gangguan (HO)	0 hari (dihapus)
5.	Izin mendirikan bangunan (IMB)	5 hari
6.	Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)	1 hari
7.	Izin penyelenggaraan reklame	1 hari
8.	Izin trayek	1 hari
9	Tanda daftar gudang (TDG)	2 hari
10	Tanda daftar industri (TDI)	0 hari (tidak ada pemohon)
11	Izin usaha industri (IUI)	0 hari (tidak ada pemohon)
12	Izin pendirian lembaga pendidikan dan pelatihan swasta (IPLP2S)	0 hari (tidak ada pemohon)
13	Izin lingkungan (IL)	5 hari
14	Izin Penelitian (IP)	1 hari
15	Kartu pencari kerja (kartu kuning)	1 hari
16	Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS)	3 hari

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2021

2. Jumlah Kasus Unjuk Rasa

Jumlah kasus unjuk rasa di Kabupaten Barru tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.250

Jumlah Kasus Unjuk Rasa Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Politik	4	-	-	2	
2	Bidang Agama	-	1	-	-	
3	Lainnya (Sosial Budaya)	10	4	4	-	
4	Total	14	5	4	2	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Barru Tahun 2020

3. Jenis dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Barru tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.251
Jumlah dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2020

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan
A	PAJAK	
1.	Pajak Hotel	28.446.000,00
2.	Pajak Restoran	766.432.394,00
3.	Pajak Hiburan	29.273.000,00
4.	Pajak Reklame	97.603.750,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	6.649.602.237,00
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	5.257.372.180,00
7.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.921.452.999,00
8.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.624.814.773,00
B	RETRIBUSI	
B.1	Retribusi jasa umum	
1	Retribusi pelayanan kesehatan	3.285.690.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	79.900.000,00
3	Retribusi pelayanan pasar	1.695.399.950,00
4	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB)	40.790.000,00
5	Retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi_LRA	49.500.400,00
6	Retribusi pelayanan tera /tera ulang	11.455.000,00
B.2	Retribusi jasa usaha	
1	Retribusi pemekaaian kekayaan daerah (PKD)	1.194.775.500,00
2	Retribusi tempat pelelangan ikan-Bapenda	58.878.000,00
3	Retribusi terminal	204.493.450,00
4	Retribusi tempat khusus parkir	466.956.000,00
5	Retribusi pelayanan kepelabuhanan	106.935.737,00
6	Retribusi tempat pariwisata	31.050.000,00
7	Retribusi pelayanan tempat olahraga	20.000.000,00
8	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	79.228.540,00
B.3	Retribusi perizinan tertentu	
1	Retribusi izin mendirikan bangunan	1.469.625.750,00
2	Retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi	55.000,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru Tahun 2020

4. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Regulasi merupakan salah satu factor yang sangat penting untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah. Adapun jumlah perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Barru sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.252
Jumlah PERDA yang Mendukung Iklim Usaha
Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Nama Perda	Nomor
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2 Tahun 2010
2	Bangunan Gedung	1 Tahun 2009
3	Izin Lingkungan	3 Tahun 2014
4	Izin Lokasi	16 Tahun 2017

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2020

5. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Desa swasembada atau disebut juga dengan desa maju atau berkembang. Data Jumlah desa swasembada di Kabupaten Barru disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.253

Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	55	32	16	16	13
2	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	-	8	17	17	16
3	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	-	15	22	22	26
4	Jumlah Desa/Kelurahan	55	55	55	55	55
5	Persentase Desa berstatus swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)*100%	0	27,27	40	40	47,27

Sumber : Dinas PMDKBPPPPA Kab. Barru Tahun 2020

6. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban suatu daerah relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun untuk kegiatan investasi. Angka kriminalitas yang tertangani dari tahun ke tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.254

Angka Kriminalitas yang Tertangani
Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	JENIS KRIMINALITAS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasus Uang Palsu	0	0	0	0	0
2	Kasus Pembunuhan	1	1	0	1	1
3	Kasus Perkosaan/Kejahatan Seksual	6	6	1	2	2
4	Kasus Perjudian	1	1	2	3	3
5	Kasus Penganiayaan Berat	0	0	0	16	16
6	Kasus Curanmor	33	33	22	15	15
7	Kasus Narkoba/Miras	31	31	22	1	1
8	Kasus Pengrusakan Kantor Pemerintah/Polri	0	0	0	0	0
9	Kasus PengrusakanTempat Ibadah	0	0	0	0	0
10	Kasus Penimbunan	0	0	0	0	0
11	Kasus Unjuk Rasa	14	14	4	2	5
12	Kasus Penjarahan	0	0	0	0	0
13	Kasus Pencurian	31	31	58	76	73
14	Kasus Penipuan	28	28	30	23	20
Jumlah Kriminalitas		210	153	139	139	136
Jumlah penduduk		171.217	171.906	180.509	182,373	187.392
Angka kriminalitas		12,27	8,90	7,7	7,6	7,25

Sumber : Bakesbangpol dan Linmas Kab. Barru Tahun 2020

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai. Review capaian kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.255
Review Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Indikator	Target Akhir periode (Tahun 2021)	Realisasi					Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,10	69,07	69,56	70,5	70,60	71	Melampaui
2	angka harapan lama sekolah	13,65	13,54	13,55	13,59	13,57	13,58	Belum Tercapai
3	Rata-rata lama sekolah	8,12	7,61	7,85	7,68	7,96	8,23	Melampaui
4	Angka harapan hidup	69	68,16	68,3	68,19	68,91	69,02	Melampaui
5	Persentase tingkat pengangguran terbuka	5,40	6,67	5,6	5,38	5,79	6,39	Belum Tercapai
6	PDRB Perkapita	47.147.498	31.703.442	34.477.874,4	37.148.367	41.710.000	40.293.929	Belum Tercapai
7	Pertumbuhan Ekonomi	6,98	6,09	6,48	6,81	7,41	0,87	Belum Tercapai
8	Inflasi	2,9	2,11	3,43	1,96	2,45	1,67	Melampaui
9	Indeks Gini	0,34	0,36	0,38	0,38	0,36	0,36	Belum Tercapai

No	Indikator	Target Akhir periode (Tahun 2021)	Realisasi					Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020	
10	Paritas Daya Beli (PPP)	10.923.600	10.160.000	10.290.000	10.620.000	10.911.000	10.920.000	Belum Tercapai
11	Persentase Penduduk Miskin	8,11	9,45	9,71	9,04	8,57	8,26	Belum Tercapai
12	Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang tertangani	100%	24,76 %	31,07 %	93,2%	95,68	100	Sesuai
13	Angka Kriminalitas yang tertangani	6,5	12,27	8,90	7,7	7,6	7,25	Belum Tercapai
14	Jumlah korban meninggal hilang, dan terkena dampak bencana	0	1,2	2,9	1,15	0,30	1	Belum Tercapai
15	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 blnn terakhir	0	0,063	0,078	NA	0,10	0,004	Belum Tercapai
16	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	90	10,16	52,98	73,25	90,59	100	Melampaui

No	Indikator	Target Akhir periode (Tahun 2021)	Realisasi					Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020	
17	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	NA	100	100	100	100	Sesuai
18	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100	100	Sesuai
19	Kinerja Infrastruktur Daerah	23,33	16,16	19,81	NA	55,33	30	Melampaui
20	Pertumbuhan Industri	11	12.03	11.18	11.24	11	11	Sesuai
21	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,72	0,55	0,61	0,61	0,64	0,82	Melampaui
22	Rasio Jaringan Irigasi	19,50	18,15	18,56	29.84	27,73	50,41	Melampaui
23	Persentase Penduduk Berakses air minum	100	53,54	60,7	91,18	95	96,63	Belum Tercapai
24	Persentase rumah tinggal bersantasi	100	90,04	90,04	94,89	100	100	Sesuai

No	Indikator	Target Akhir periode (Tahun 2021)	Realisasi					Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020	
25	Rasio Rumah Layak Huni	0,29	0,15	0,26	0.26	0,25	0,95	Melampaui
26	Indeks Kualitas Lingkungan	66	63,85	64,37	69.17	72,19	69,85	Melampaui
27	Total Realisasi Investasi	558.336 .715.695	537.3 93.50 0.000	541.5 82.14 3.139	729.5 68.40 9.663	730.6 59.15 1.736	941.7 11.74 6.000	Melampaui
28	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	NA	NA	Baik	Baik	Baik	Belum Tercapai
	Penerapan E-Government							
29	1. ePlanning	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Sesuai
30	2. eBudgeting	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Sesuai
31	3. eSDM	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Sesuai
32	4. ePengawasan	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Sesuai
33	5. ePerizinan	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Sesuai
34	6. eMas	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Sesuai
35	Presentase Tindak Lanjut Temuan	100	79,86	88,77	91,67	70	87	Belum Tercapai
36	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai
37	Akuntabilitas Pemerintah	B	C	C	CC	CC	CC	Belum Tercapai
39	Persentase sarana peribadahan yang dibangun pemerintah daerah	100	99,06	99,07	100	100	100	Sesuai

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berdasarkan urusan pemerintahan daerah diselenggarakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru, yang terbagi kedalam urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan mendorong peningkatan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Barru perlu membangun sistem perencanaan yang bersifat terpadu dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu melalui tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan) yang disusun secara partisipatif (melibatkan masyarakat, dunia usaha, dewan, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan lainnya) melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang menghasilkan Perencanaan Jangka Panjang atau RPJP, Jangka Menengah atau RPJM dan RENSTRA OPD pada masing-masing Satuan Kerja, serta perencanaan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Implementasi program/kegiatan RKPD sebagian besar didanai melalui APBD Kabupaten Barru yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam rangka penjabaran pelaksanaan RPJMD atau RENSTRA daerah melalui perencanaan tahunan, Pemerintah Daerah atau Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD), terlebih dahulu diawali dengan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja (RENJA) masing-masing OPD Periode 2020 yang mana hasil evaluasi RENJA tersebut akan menjadi lampiran penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022.

Tabel 2.256
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2020
Kabupaten Barru

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2020 (%)		Unit PD Penanggung jawab
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<u>1</u>	<u>3</u>	<u>Uraian</u>	<u>Satuan</u>	<u>K</u>	<u>Rp</u>	<u>K</u>	<u>Rp</u>	<u>K</u>	<u>Rp</u>	<u>K</u>	<u>Rp</u>	<u>K</u>	<u>Rp</u>	<u>K</u>	<u>Rp</u>	<u>-</u>
-	GAJI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Gaji dan Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Tambahan Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>1</u>	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.875.235.000	100%	1.091.068.252	100%	2.252.845.392	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-
-	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	1200	1200	700.000.000	1780	-	1200	1.256.713.800	77	87,9	2702	1.104.778.900	225,17	157,83	Sekretariat
-		Jumlah tenaga kontrak	110	110	-	113	-	110	-	100	-	223	-	202,73	-	Sekretariat
-		Jumlah pegawai	513	513	-	491	-	513	-	94	-	973	-	189,67	-	Sekretariat
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon	3 Jenis	3	722.400.000	3	489.387.337	3	581.400.000	100	95,3	6	1.043.548.682	200,00	144,46	Sekretariat
-	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	39	39	33.100.000	28	21.744.985	39	132.603.392	110	31,8	71	63.891.020	182,05	193,02	Sekretariat

-	<u>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</u>	<u>Jumlah alat kerja yang diperbaiki</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>7.275.000</u>	<u>24</u>	<u>7.015.000</u>	<u>34</u>	<u>7.150.000</u>	<u>56</u>	<u>100,0</u>	<u>43</u>	<u>14.163.000</u>	<u>126,47</u>	<u>194,68</u>	<u>Sekretariat</u>
-	<u>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor</u>	<u>Jumlah jenis alat listrik</u>	<u>5 jenis</u>	<u>5</u>	<u>1.975.000</u>	<u>6</u>	<u>1.837.500</u>	<u>5</u>	<u>1.901.600</u>	<u>100</u>	<u>99,9</u>	<u>11</u>	<u>3.737.500</u>	-	<u>189,24</u>	<u>Sekretariat</u>
-	<u>Penyediaan peralatan rumah tangga</u>	<u>Jumlah jenis alat rumah tangga</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>6.117.500</u>	<u>0</u>	-	<u>33</u>	<u>6.114.000</u>	<u>55</u>	<u>100,0</u>	<u>18</u>	<u>6.114.000</u>	<u>54,55</u>	<u>99,94</u>	<u>Sekretariat</u>
-	<u>Rapat rapat koordinasi ke luar daerah</u>	<u>Jumlah perjalanan dinas luar daerah</u>	<u>190 ok</u>	<u>190 ok</u>	<u>367.959.000</u>	<u>170</u>	<u>364.705.371</u>	<u>190</u>	<u>244.247.000</u>	<u>12</u>	<u>99,7</u>	<u>193</u>	<u>608.173.797</u>	-	<u>165,28</u>	<u>Sekretariat</u>
-	<u>Rapat rapat koordinasi ke dalam daerah</u>	<u>Jumlah perjalanan dinas dalam daerah</u>	<u>135 ok</u>	<u>135 ok</u>	<u>36.408.500</u>	<u>900</u>	<u>33.492.500</u>	<u>135</u>	<u>22.715.600</u>	-	<u>72,8</u>	<u>946</u>	<u>50.032.900</u>	-	<u>137,42</u>	<u>Sekretariat</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>70,36</u>	<u>85,92</u>	-	-	<u>118,06</u>	<u>160,23</u>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>rendah</u>	<u>tinggi</u>	-	-	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Tinggi</u>	-
<u>2</u>	<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</u>	<u>Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>375.000.000</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	<u>326.085.000</u>	<u>0</u>	-	<u>1</u>	-	-	-	<u>Sekretariat</u>
-	<u>Pengadaan kendaraan dinas/operasional</u>	<u>Jumlah kendaraan bermotor</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0</u>	-	<u>1</u>	<u>19.175.000</u>	<u>100,00</u>	<u>94</u>	<u>1</u>	<u>18.000.000</u>	-	<u>0</u>	<u>Sekretariat</u>
-	<u>Pengadaan peralatan gedung kantor</u>	<u>Jumlah peralatan gedung kantor</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>4</u>	<u>115.113.700</u>	<u>0</u>	-	-	<u>0</u>	<u>4</u>	<u>115.113.700</u>	-	<u>0</u>	<u>Sekretariat</u>
-	<u>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</u>	<u>Jumlah perlengkapan gedung kantor</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0</u>	-	<u>0</u>	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0</u>	<u>Sekretariat</u>
-	<u>Pengadaan Mebeleur</u>	<u>Jumlah mebeleur</u>	<u>8 jenis</u>	<u>8 jenis</u>	-	<u>3</u>	<u>60.065.000</u>	<u>0</u>	-	-	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>60.065.000</u>	-	<u>0</u>	<u>Sekretariat</u>

-	<u>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</u>	<u>Jumlah jenis pemeliharaan</u>	<u>2 jenis</u>	<u>2 jenis</u>	<u>10.500.000</u>	<u>2 jenis</u>	-	<u>2 jenis</u>	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0</u>	<u>Sekretariat</u>
-	<u>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</u>	<u>Jumlah kendaraan dinas/operasional</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>364.500.000</u>	<u>34</u>	<u>284.502.810</u>	<u>34</u>	<u>306.410.000</u>	<u>111,76</u>	<u>93</u>	<u>17</u>	<u>569.417.688</u>	<u>50,00</u>	<u>156</u>	<u>Sekretariat</u>
-	<u>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lanjutan'</u>	<u>Jumlah kendaraan dinas/operasional</u>	-	<u>1</u>	-	<u>1</u>	-	<u>1</u>	<u>500.000</u>	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0</u>	<u>Sekretariat</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>35,29</u>	<u>31,14</u>	-	-	<u>8,33</u>	<u>26,04</u>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-	-	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-
<u>3</u>	<u>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</u>	<u>Persentase aparaturnya yang telah mengikuti pengembangan kompetensi</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	<u>59.250.750</u>	-	-	-	-	-	-	<u>Sekretariat</u>
-	<u>Pendidikan dan pelatihan formal</u>	<u>Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	-	<u>15</u>	<u>196.030.318</u>	<u>15</u>	<u>59.250.750</u>	<u>26,67</u>	<u>88,43</u>	<u>15</u>	<u>248.426.818</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Sekretariat</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>26,67</u>	<u>88,43</u>	-	-	<u>100,00</u>	<u>26,04</u>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>Sangat rendah</u>	<u>Tinggi</u>	-	-	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat rendah</u>	-
<u>4</u>	<u>Program Bina Gizi dan KIA</u>	-	-	-	<u>3.994.624.420</u>	-	<u>649.345.100</u>	-	<u>1.041.187.800</u>	-	-	-	-	-	-	<u>Bidang Kesmas</u>
-	<u>Peningkatan pelayanan kesehatan antenatal</u>	<u>Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>2.155.867.210</u>	<u>91,96 %</u>	-	<u>100%</u>	<u>225.314.000</u>	<u>100,00</u>	<u>92,10</u>	<u>92%</u>	<u>207.506.500</u>	<u>91,96</u>	<u>9,63</u>	<u>Seksi Bina GIZI KIA</u>
-	<u>Peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin</u>	<u>Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>73.600.000</u>	<u>98,98 %</u>	-	<u>100%</u>	<u>1.500.000</u>	<u>100,00</u>	-	<u>99%</u>	-	<u>98,98</u>	<u>0,00</u>	<u>Seksi Bina GIZI KIA</u>

-	<u>Jaminan Persalinan</u>	<u>Jumlah puskesmas yang menyelenggara kan program jaminan persalinan</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>712.690.000</u>	<u>12</u>	<u>371.086.700</u>	<u>12</u>	<u>594.021.000</u>	<u>100,00</u>	<u>81,72</u>	<u>12,00</u>	<u>856.541.200</u>	<u>100,00</u>	<u>120,18</u>	<u>Seksi Bina GIZI KIA</u>
-	<u>Peningkatan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir</u>	<u>Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>51.100.000</u>	<u>97,64 %</u>	<u>9.873.700</u>	<u>100%</u>	<u>10.500.000</u>	<u>95,51</u>	<u>-</u>	<u>98%</u>	<u>9.873.700</u>	<u>97,64</u>	<u>19,32</u>	<u>Seksi Bina GIZI KIA</u>
-	<u>Peningkatan pelayanan kesehatan pada balita</u>	<u>Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>27.400.000</u>	<u>95,94 %</u>	<u>6.159.100</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>60,60</u>	<u>-</u>	<u>157%</u>	<u>6.159.100</u>	<u>156,54</u>	<u>22,48</u>	<u>Seksi Bina GIZI KIA</u>
-	<u>Peningkatan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar</u>	<u>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>22.700.000</u>	<u>97,17 %</u>	<u>-</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>92,10</u>	<u>-</u>	<u>189%</u>	<u>-</u>	<u>189,27</u>	<u>0,00</u>	<u>Seksi Bina GIZI KIA</u>
-	<u>Pemberian tambahan makanan dan vitamin</u>	<u>cakupan balita kurus yang mendapat PMT</u>	<u>95%</u>	<u>100%</u>	<u>629.650.000</u>	<u>96,8 %</u>	<u>219.083.600</u>	<u>95%</u>	<u>173.632.500</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>97%</u>	<u>219.083.600</u>	<u>96,80</u>	<u>34,79</u>	<u>Seksi Bina GIZI KIA</u>
-	<u>Penanggulangan anemia gizi besi</u>	<u>persentase bumil KEK mendapat PMT = 95 %</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>190.799.525</u>	<u>96,6 %</u>	<u>10.560.000</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>98,90</u>	<u>-</u>	<u>97%</u>	<u>10.560.000</u>	<u>96,80</u>	<u>5,53</u>	<u>Seksi Bina GIZI KIA</u>
-	<u>Penanggulangan KVA (kurang vitamin A)</u>	<u>Cakupan pemberian Vit.A</u>	<u>95%</u>	<u>100%</u>	<u>19.760.000</u>	<u>96,8 %</u>	<u>2.840.000</u>	<u>95%</u>	<u>24.729.500</u>	<u>103,47</u>	<u>-</u>	<u>97%</u>	<u>2.840.000</u>	<u>96,80</u>	<u>14,37</u>	<u>Seksi Bina GIZI KIA</u>
-	<u>Penanggulangan GAKY (gangguan akibat kekurangan yodium)</u>	<u>Cakupan Garam beryodium</u>	<u>92%</u>	<u>95%</u>	<u>15.815.000</u>	<u>95,6 %</u>	<u>5.950.000</u>	<u>92%</u>	<u>2.100.000</u>	<u>106,20</u>	<u>-</u>	<u>92%</u>	<u>5.950.000</u>	<u>96,84</u>	<u>37,62</u>	<u>Seksi Bina GIZI KIA</u>
-	<u>Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian</u>	<u>Cakupan pemberdayaan keluarga sadar gizi</u>	<u>12 klp</u>	<u>12</u>	<u>13.820.000</u>	<u>12</u>	<u>13.740.000</u>	<u>12</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>12,00</u>	<u>13.740.000</u>	<u>100,00</u>	<u>99,42</u>	<u>Seksi Bina GIZI KIA</u>

	<u>keluarga sadar gizi</u>															
-	<u>Peningkatan pelayanan asi eksklusif</u>	<u>Persentase bayi yang mendapat Asi Eksklusif</u>	<u>55%</u>	<u>60%</u>	<u>43.339.800</u>	<u>69,0 %</u>	<u>3.424.000</u>	<u>55%</u>	-	<u>101,85</u>	-	<u>69%</u>	<u>3.424.000</u>	<u>115,00</u>	<u>7,90</u>	<u>Seksi Bina GIZI KIA</u>
-	<u>Upaya kewaspadaan pangan dan gizi</u>	<u>Cakupan pemantauan kerawanan pangan dan gizi</u>	<u>12 pkm</u>	<u>12</u>	<u>13.820.000</u>	<u>12</u>	<u>4.190.000</u>	<u>12</u>	<u>9.390.800</u>	<u>100,00</u>	<u>78,88</u>	<u>12,00</u>	<u>11.597.600</u>	<u>100,00</u>	<u>83,92</u>	<u>Seksi Bina GIZI KIA</u>
-	<u>Pelayanan balita di posyandu</u>	<u>Cakupan balita yang datang ke posyandu (D/S)</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>9.762.885</u>	<u>78,6 %</u>	<u>2.438.000</u>	<u>100%</u>	-	<u>51,26</u>	-	<u>1,30</u>	<u>2.438.000</u>	<u>129,86</u>	<u>24,97</u>	<u>Seksi Bina GIZI KIA</u>
-	<u>Monitoring dan Evaluasi</u>	<u>Jumlah Monev</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>14.500.000</u>	<u>4</u>	-	<u>4</u>	-	<u>0,00</u>	-	<u>4,00</u>	-	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Seksi Bina GIZI KIA</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>73,99</u>	<u>11,47</u>	-	-	<u>111,10</u>	<u>32,01</u>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>Sedang</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-	-	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-
-	<u>Program Peningkatan Pelayanan Lansia</u>	<u>Jumlah Puskesmas yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan lansia</u>	<u>12 pkm</u>	<u>12</u>	<u>68.404.200</u>	<u>12</u>	<u>3.320.000</u>	<u>12</u>	<u>6.950.000</u>	<u>100,00</u>	<u>79%</u>	<u>12,00</u>	<u>8.820.000</u>	<u>100,00</u>	<u>12,89</u>	-
-	<u>Pelayanan Kesehatan lansia di posyandu</u>	<u>Jumlah posyandu lansia terintegrasi</u>	<u>255</u>	<u>264</u>	<u>30.700.000</u>	<u>34</u>	-	<u>255</u>	-	<u>13,33</u>	<u>0%</u>	<u>34,00</u>	-	<u>12,88</u>	<u>0,00</u>	-
-	<u>Pembinaan Puskesmas Santun Lansia</u>	<u>Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan puskesmas santun lansia</u>	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>37.704.200</u>	<u>12</u>	<u>3.320.000</u>	<u>10</u>	<u>6.950.000</u>	<u>120,00</u>	<u>79%</u>	<u>13,00</u>	<u>8.820.000</u>	<u>108,33</u>	<u>23,39</u>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>77,78</u>	<u>53%</u>	-	-	<u>73,74</u>	<u>12,10</u>	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tinggi	Rendah	-	-	Sedang	Sangat Rendah	-
5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah desa melaksanakan STBM berkelanjutan	55	55	229.859.465	100%	177.009.600	55	343.848.600	-	-	-	-	-	-	Bidang Kesmas
-		Jumlah Puskesmas melakukan pembinaan STBM berkelanjutan	12	12		12		12		100,00	75,51	1	89.251.000	50,00	194,14	Seksi KeslingKesjor
-	Peningkatan pelayanan sanitasi dasar dan STBM	Persentase TTU, TPM dan sarana air minum yang diawasi	TTU MS 75%, TPM MS 46%, SAM diawasi 35%	TTU MS 75%, TPM MS 48%, SAM diawasi 63%	45.971.893	TTU MS 75%, TPM MS 48%, SAM diawasi 63%	51.681.000	TTU MS 75%, TPM MS 46%, SAM diawasi 35%	49.753.000	0,00	-	1	-	50,00	0,00	Seksi KeslingKesjor
-	Peningkatan pengawasan dan pembinaan sanitasi lingkungan	Jumlah Puskesmas melakukan pembinaan sanitasi lingkungan TTU, TPM dan pengawasan kualitas air minum sesuai SOP	12	12	91.943.786	12	10.724.000	12	266.118.600	100,00	17,20	1	56.507.200	50,00	61,46	Seksi KeslingKesjor
-	Peningkatan kapasitas laboratorium pemeriksaan kesehatan lingkungan	Jumlah sarana/gedung laboratorium kesehatan lingkungan	1	0		0		1		100,00	-	1	21.186.500	50,00	46,09	Seksi KeslingKesjor
-		Persentase sampel yang diperiksa	50%	50%	45.971.893	0	21.186.500	50%	-	0,00	-	1	-	50,00	0,00	Seksi KeslingKesjor
-		Persentase tatanan kabupaten sehat terkait	100%	100%		100%		100%		5,00	-	1	-	50,00	0,00	Seksi KeslingKesjor

		<u>bidang kesehatan yang diintervensi</u>														
-	<u>Pengembangan dan pembinaan kabupaten sehat</u>	<u>Jumlah Puskesmas melakukan pembinaan kelembagaan desa/kelurahan sehat</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>45.971.893</u>	<u>12</u>	<u>93418100</u>	<u>12</u>	<u>27.977.000</u>	<u>100,00</u>	<u>86,45</u>	<u>1</u>	<u>117.605.100</u>	<u>50,00</u>	<u>255,82</u>	<u>Seksi KeslingKesjoar</u>
-		<u>Jumlah dokumen penunjang kabupaten sehat</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	-	<u>1</u>	-	<u>1</u>	-	<u>0,00</u>	-	<u>1</u>	-	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Seksi KeslingKesjoar</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>50,63</u>	<u>12,80</u>	-	-	<u>50,00</u>	<u>60,34</u>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-	-	<u>Rendah</u>	<u>rendah</u>	-
<u>9</u>	<u>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif strata Purnama dan Strata Mandiri</u>	<u>16% dan 5%</u>	<u>30%</u>	<u>439.956.000</u>	<u>25% dan 3.57%</u>	<u>438.912.600</u>	<u>16% dan 5%</u>	<u>50.808.000</u>	<u>Purnama 25% Mandiri 3,57%</u>	-	-	-	-	-	<u>Bidang Kesmas</u>
-	<u>Pembinaan Desa Siaga Aktif</u>	<u>Jumlah desa/kelurahan yang menganggarkan dana ADD untuk bidang kesehatan minimal 10%</u>	<u>40 Desa</u>	-	<u>169.687.500</u>	<u>100</u>	<u>14.346.000</u>	<u>40</u>	-	<u>0</u>	-	<u>100</u>	<u>14.346.000</u>	<u>100,00</u>	<u>8,45</u>	<u>Seksi Promosi Kesehatan</u>
-	-	<u>Cakupan Posyandu Strata Purnama dan strata mandiri</u>	<u>73% SP dan 9% SM</u>	<u>73% SP dan 10% SM</u>	-	<u>66% SP dan 5.28% SM</u>	-	<u>73% SP dan 9% SM</u>	-	<u>Purnama 77.9%, Mandiri 8,61%</u>	-	<u>Purnama 70.19%, Mandiri 8,30%</u>	-	<u>Purnama 70.19%, Mandiri 8,30%</u>	-	<u>Seksi Promosi Kesehatan</u>
-	<u>Pembinaan Posyandu</u>	<u>Rasio Posyandu</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>270.268.500</u>	<u>20</u>	<u>424.566.600</u>	<u>19</u>	<u>50.808.000</u>	<u>106,60</u>	<u>77,83</u>	<u>100</u>	<u>464.111.600</u>	<u>100,00</u>	<u>171,72</u>	<u>Seksi Promosi Keseh</u>

																<u>atan</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,30	77,83	-	-	50,00	18,02	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rendah	Tinggi	-	-	rendah	sangat rendah	-
19	<u>Pengembangan Kemitraan dengan LSM, Dunia Usaha, Media, Organisasi Profesi</u>	<u>Jumlah Kemitraan dengan Kelompok Potensial</u>	6	6	90.309.375	6	75.527.500	6	70.659.000	-	-	-	116.297.500	-	-	-
-	<u>Pembinaan UKS</u>	<u>Jumlah sekolah yang melaksanakan program UKS</u>	198 SD/MI, 52 SMP/MTs, 29 SMA/MA	198 SD/M, 1, 52 SMP/MTs, 29 SMA/MA	38.000.000	198 SD/M, 1, 52 SMP/MTs, 29 SMA/MA	17.505.000	198 SD/M, 1, 52 SMP/MTs, 29 SMA/MA	-	-	-	85	17.505.000	-	46,07	Seksi Promosi Kesehatan
-	<u>Pembinaan promosi kesehatan pada kelompok masyarakat</u>	<u>Jumlah kelompok masyarakat promkes</u>	5 klp	5	7.309.375	5	18.922.500	5	43.154.000	100	51,91	5	41.322.500	100,00	565,34	Seksi Promosi Kesehatan
-	<u>Pembinaan promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik</u>	<u>Jumlah Pembinaan promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik</u>	2 media	2	45.000.000	2	39.100.000	2	27.505.000	100	66,79	2	57.470.000	100,00	127,71	Seksi Promosi Kesehatan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,67	39,56	-	-	66,67	246,37	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sedang	sangat rendah	-	-	sedang	Sangat Tinggi	-

-	<u>Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</u>	<u>Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization</u>	<u>55 Desa/Kel</u>	<u>55 Desa/Kel</u>	<u>940.000.000</u>	<u>55 Desa/Kel</u>	<u>109.977.500</u>	<u>55 Desa/Kel</u>	<u>3.508.853.800</u>	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Peningkatan Imunisasi</u>	<u>Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Imunisasi sesuai Standar</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>60.000.000</u>	<u>100%</u>	<u>34.850.000</u>	<u>100%</u>	<u>22.700.800</u>	<u>100</u>	<u>97,05</u>	<u>100</u>	<u>56.882.000</u>	<u>100,00</u>	<u>94,80</u>	-
-	-	<u>Tingkat Prevelensi Tuberkolosis (Persentase Penderita TB yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standart)</u>	<u>120</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>120</u>	-	=	=	<u>0</u>	=	=	<u>0,00</u>	-
-	<u>Peningkatan pelayanan dan pencegahan penyakit TB Paru</u>	<u>Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita penyakit TBC BTA</u>	<u>85%</u>	<u>100%</u>	<u>150.000.000</u>	<u>100%</u>	<u>33.302.000</u>	<u>85%</u>	<u>26.743.000</u>	<u>118</u>	<u>97,75</u>	<u>1</u>	<u>59.444.000</u>	<u>100,00</u>	<u>39,63</u>	-
-	-	<u>Jumlah Puskesmas yang melakukan upaya penanggulangan TB terpadu</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100</u>	=	<u>0</u>	=	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	<u>Peningkatan pelayanan dan pencegahan penyakit HIV/AIDS</u>	<u>Persentase Pelayanan dan Penanganan Kelompok Resiko Tinggi (high Risk Group)</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>80.000.000</u>	<u>100%</u>	<u>14.550.000</u>	<u>100%</u>	<u>22.520.000</u>	<u>8.000</u>	=	<u>80</u>	<u>35.390.000</u>	<u>8.000,00</u>	<u>44,24</u>	-

-	-	<u>Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>10.000</u>	=	<u>100</u>	=	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>IR DBD <49 per 100.000 penduduk</u>	<u><49</u>	<u><49</u>	-	<u>20</u>	-	<u>49</u>	-	=	=	<u>49</u>	=	=	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>10.000</u>	=	<u>100</u>	=	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Tingkat Kematian karena Malaria (per 1000 penduduk)</u>	<u>≤ 0,001 per 1000 penduduk</u>	<u>≤ 0,001 per 1000 penduduk</u>	-	<u>0</u>	-	<u>0</u>	-	=	=	<u>0</u>	=	=	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Angka Kejadian Malaria (API malaria <1 / 1000 penduduk)</u>	<u><1</u>	<u><1</u>	-	<u>0,1</u>	-	<u>1</u>	-	=	=	<u>0</u>	=	=	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Proporsi Anak Balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida</u>	-	-	-	<u>0</u>	-	-	-	=	=	<u>0</u>	=	=	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat</u>	-	-	-	<u>0</u>	-	-	-	=	=	<u>0</u>	=	=	<u>0,00</u>	-

-	<u>Peningkatan Pencegahan dan Pelayanan Penyakit Bersumber Binatang (Zoonosis)</u>	<u>Jumlah Puskesmas yang melakukan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis sesuai SOP</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>450.000.000</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	<u>40.493.000</u>	=	<u>79,98</u>	<u>0</u>	<u>32.387.500</u>	=	<u>7,20</u>	-
-	-	<u>Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Rabies Centre</u>	<u>4 PKM</u>	<u>4</u>	-	<u>4</u>	-	<u>4</u>	-	=	=	<u>0</u>	=	=	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Persentase puskesmas melakukan pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	=	=	<u>0</u>	=	=	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Cakupan Balita pneumonia yang ditangani</u>	<u>Pneumonia : 10% dari seluruh Balita</u>	<u>Pneumonia : 10% dari seluruh Balita</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>Pneumonia : 10% dari seluruh Balita</u>	-	=	=	<u>1</u>	=	=	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Persentase diare yang ditangani</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100</u>	=	<u>1</u>	=	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	<u>Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Lainnya</u>	<u>Persentase puskesmas melakukan pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>40.000.000</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	<u>40.489.000</u>	<u>100</u>	<u>96,45</u>	<u>1</u>	<u>39.051.000</u>	<u>100,00</u>	<u>97,63</u>	-

-	-	<u>Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung sesuai Standar</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100</u>	-	<u>1</u>	-	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 Jam</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100</u>	-	<u>1</u>	-	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Jumlah penemuan kasus non Polio AFP Rate 100.000 penduduk pada umur < 15 thn</u>	<u>≥1</u>	<u>≥1</u>	-	<u>≥1</u>	-	<u>≥1</u>	-	-	-	<u>0</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
-	<u>Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah</u>	<u>Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan Community Based Surveillance (CBS)</u>	<u>55 Desa/Kel</u>	<u>55</u>	<u>160.000.000</u>	<u>55</u>	<u>27.275.500</u>	<u>55</u>	<u>3.355.908.000</u>	<u>100</u>	<u>75,55</u>	<u>55</u>	<u>2.562.815.200</u>	<u>100,00</u>	<u>1601,76</u>	-
-	-	<u>Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah sesuai standar</u>	<u>100%</u>	<u>100</u>	-	<u>100</u>	-	<u>100</u>	-	<u>100</u>	-	<u>100</u>	-	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>1257,29</u>	<u>19,43</u>	-	-	<u>1256,52</u>	<u>81,97</u>	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>sangat tinggi</u>	<u>sangat rendah</u>	-	-	<u>sangat tinggi</u>	<u>Tinggi</u>	-
16	<u>Program Peningkatan Masalah Kesehatan Matra</u>	<u>Penanganan terhadap kejadian masalah kesehatan pada kondisi tertentu</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>141.500.000</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	<u>10.580.000</u>	<u>100</u>	<u>29,49</u>	-	-	-	-	-
-	<u>Peningkatan pelayanan kesehatan matra</u>	<u>Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan pada kondisi tertentu</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>7.000.000</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	-	-	<u>1</u>	-	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Bidang P2PL</u>
-	<u>Pengendalian masalah kesehatan hiperbarik</u>	<u>Persentase kelompok</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>7.000.000</u>	<u>0%</u>	-	<u>100%</u>	-	-	-	<u>0</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>Bidang P2PL</u>
-	<u>Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan</u>	<u>Cakupan Pelayanan Penanggulangan bencana sesuai standar</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>120.000.000</u>	<u>100%</u>	<u>1.680.000</u>	<u>100%</u>	<u>6.320.000</u>	<u>100</u>	<u>49,37</u>	<u>1</u>	<u>4.800.000</u>	<u>100,00</u>	<u>0,04</u>	<u>Bidang P2PL</u>
-	<u>Peningkatan pelayanan kesehatan haji</u>	<u>Cakupan deteksi Dini dan Screening Jemaah Haji</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>7.500.000</u>	<u>100%</u>	<u>18.000.000</u>	<u>100%</u>	<u>4.260.000</u>	-	-	<u>1</u>	<u>18.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>2,40</u>	<u>Bidang P2PL</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>25,00</u>	<u>16,46</u>	-	-	<u>37,50</u>	<u>0,61</u>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-	-	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-
-	<u>Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular</u>	<u>Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan</u>	<u>83%</u>	<u>85%</u>	<u>230.000.000</u>	-	<u>252.832.940</u>	<u>83%</u>	<u>152.770.000</u>	-	<u>23,65</u>	-	-	-	-	-

-	-	<u>Persentase usia 15 thn - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	-	<u>91,16 %</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>57</u>	<u>:</u>	<u>148%</u>	<u>:</u>	<u>148,16</u>	<u>0,00</u>	-
-	<u>Pelayanan pencegahan dan pengendalian PTM usia remaja dan dewasa</u>	<u>Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining kesehatan sesuai SOP</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>46.000.000</u>	<u>100%</u>	<u>25.790.500</u>	<u>100%</u>	<u>:</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>100%</u>	<u>25.790.500</u>	<u>100,00</u>	<u>0,56</u>	-
-	<u>Pelayanan pencegahan dan pengendalian PTM usia remaja dan dewasa</u>	<u>Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining kesehatan sesuai SOP</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	<u>19.500.000</u>	<u>100</u>	<u>100,00</u>	<u>100%</u>	<u>19.500.000</u>	<u>100,00</u>	<u>#DIV/0!</u>	-
-	-	<u>Persentase usia 60 thn keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	-	<u>91,17 %</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>79</u>	<u>:</u>	<u>170%</u>	<u>:</u>	<u>170,17</u>	<u>0,00</u>	-
-	<u>Pelayanan pencegahan dan pengendalian PTM usia lanjut</u>	<u>Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining kesehatan pada usia 60 thn ke atas sesuai SOP</u>	<u>12 PKM</u>	<u>100%</u>	<u>40.000.000</u>	<u>12</u>	-	<u>12</u>	<u>:</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>100%</u>	<u>:</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>52</u>	<u>:</u>	<u>100%</u>	<u>:</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	<u>Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi</u>	<u>Jumlah puskesmas yang melaksanakan</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>40.000.000</u>	<u>100%</u>	<u>7.360.500</u>	<u>100%</u>	<u>16.350.000</u>	<u>100</u>	<u>66,97</u>	<u>100%</u>	<u>18.310.500</u>	<u>100,00</u>	<u>0,46</u>	-

		<u>pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai SOP</u>														
-	-	<u>Persentase penderita Diabetes Militus (DM)] mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>97</u>	=	<u>100%</u>	=	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	<u>Pemantauan pelayanan penderita Diabetes Mellitus</u>	<u>Jumah Pemantauan pelayanan penderita Diabetes Mellitus</u>	<u>1 Kali</u>	<u>1</u>	<u>35.000.000</u>	<u>1</u>	-	<u>1</u>	-	<u>100</u>	=	<u>100%</u>	=	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	<u>Peningkatan Pelayanan dan Pengendalian penderita Diabetes Mellitus (DM)</u>	<u>Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan dan pengendalian Diabetes Militus sesuai SOP</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	<u>4.000.500</u>	<u>100%</u>	<u>7.920.000</u>	<u>100</u>	<u>71,72</u>	<u>100%</u>	<u>9.680.500</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Cakupan Deteksi dini Penyakit akibat rokok</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	=	=	<u>100%</u>	=	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	<u>Peningkatan pelayanan penyakit akibat rokok</u>	<u>Persentase sekolah yang melaksanakan KTR</u>	<u>4%</u>	<u>6%</u>	<u>35.000.000</u>	<u>12%</u>	<u>215.681.440</u>	<u>4%</u>	<u>109.000.000</u>	<u>104</u>	=	<u>12%</u>	<u>215.681.440</u>	<u>207,20</u>	<u>6,16</u>	-
-	-	<u>Cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera sesuai standar</u>	<u>8 pkm</u>	<u>10</u>	-	<u>12</u>	-	<u>8</u>	-	<u>150</u>	=	<u>12</u>	=	<u>120,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	<u>Pelayanan deteksi dini kebutaan dan rujukan katarak</u>	<u>Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan</u>	-	<u>10 pkm</u>	<u>17.000.000</u>	<u>12</u>	-	<u>8</u>	=	<u>150</u>	-	<u>12</u>	=	=	<u>0,00</u>	-

		<u>indera sesuai SOP</u>															
-	-	<u>Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sesuai standar</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>82</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-	
-	<u>Pembinaan pelayanan kesehatan jiwa</u>	<u>Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa</u>	<u>67%</u>	<u>83%</u>	<u>17.000.000</u>	<u>100%</u>	-	<u>67%</u>	-	<u>150</u>	-	<u>100%</u>	-	<u>120,00</u>	<u>0,00</u>	-	
-	-	<u>Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) pecandu narkoba aktif</u>	<u>17%</u>	<u>25%</u>	-	<u>0%</u>	-	<u>17%</u>	-	-	-	<u>0</u>	-	-	<u>0,00</u>	-	
-	-	<u>Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) pecandu narkoba aktif</u>	<u>17%</u>	<u>25%</u>	-	<u>0%</u>	-	<u>17%</u>	-	-	-	<u>0</u>	-	-	<u>0,00</u>	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>84,48</u>	<u>17,05</u>	-	-	<u>49,04</u>	<u>#DIV/0!</u>	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>Tinggi</u>	<u>Sangat rendah</u>	-	-	<u>Sangat rendah</u>	<u>Sangat rendah</u>	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	<u>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan</u>	<u>Rasio PKM per jumlah penduduk</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>75.050.435.67</u> <u>2</u>	<u>0,01</u> <u>%</u>	<u>14.552.229.73</u> <u>2</u>	<u>100%</u>	<u>8.256.243.493</u>	-	-	-	-	-	-	-	

	<u>jaringannya</u>															
-	<u>Pembangunan Puskesmas</u>	<u>Cakupan Puskesmas</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>10.205.420.430</u>	<u>12</u>	<u>9.106.072.700</u>	<u>12</u>	<u>5.740.079.400</u>	<u>100</u>	-	<u>24</u>	<u>14.286.082.525</u>	<u>184,62</u>	<u>0,00</u>	-
-	<u>Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap</u>	<u>Jumlah PKM rawat inap</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>0</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
-	<u>Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan prasarana Puskesmas</u>	<u>Jumlah PKM yang melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala pada sarana dan prasarannya</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>0</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
-	<u>Penambahan Ruang PKM</u>	<u>Jumlah PKM yang ketersediaan ruangnya sesuai standar</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>6.165.015.960</u>	-	-	<u>12</u>	-	-	-	<u>0</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
-	<u>Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas</u>	<u>Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi sedang/berat</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>13.222.342.560</u>	-	-	<u>2</u>	-	-	-	<u>0</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Rehab Pustu</u>	<u>1 Unit</u>	-	-	-	-	<u>1 Unit</u>	-	-	-	<u>0</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>0</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
-	<u>Pembangunan Puskesmas Pembantu dan Poskesdes</u>	<u>Cakupan Pustu</u>	<u>38</u>	<u>39</u>	<u>563.690.000</u>	-	-	<u>38</u>	-	-	-	<u>0</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
-	<u>Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu</u>	<u>Jumlah Pustu yang melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala pada sarana dan prasarannya</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>200.000.000</u>	-	-	<u>2</u>	-	-	-	<u>0</u>	-	-	<u>0,00</u>	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0,00	-
-	<u>Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu/ Poskesdes/ Polindes</u>	<u>Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi sedang/berat</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>3.781.533.805</u>	-	<u>1.060.245.115</u>	<u>2</u>	-	-	-	0	<u>1.060.245.115</u>	-	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Jumlah Poskesdes/ Polindes yang direhabilitasi sedang/berat</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>1.263.700.000</u>	-	-	<u>2</u>	-	-	-	0	-	-	<u>0,00</u>	-
-	<u>Pembangunan pagar PKM/Pustu/Po skesdes</u>	<u>Jumlah pembangunan pagar</u>	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>3.532.380.505</u>	-	<u>1.313.018.917</u>	<u>10</u>	-	-	-	0	<u>1.313.018.917</u>	-	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Jumlah pembangunan pagar</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	<u>0,00</u>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	<u>0,00</u>	-
-	<u>Pengadaan Puskesmas Keliling, Ambulance dan Mobil Jenazah</u>	<u>Jumlah Puskesmas Keliling, Ambulance dan Mobil jenazah</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>6.595.433.331</u>	-	<u>3.072.893.000</u>	<u>2</u>	<u>1.362.049.830</u>	<u>100</u>	-	<u>2</u>	<u>4.074.678.000</u>	<u>66,67</u>	<u>0,00</u>	-
-	<u>Pembangunan Puskesmas Lanjutan</u>	<u>Cakupan Puskesmas</u>	-	<u>1</u>	-	<u>1</u>	-	<u>1</u>	<u>735.309.900</u>	<u>100</u>	-	<u>2</u>	<u>721.905.250</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana puskesmas (Lanjutan)</u>	-	-	-	-	-	-	<u>1</u>	<u>10.074.600</u>	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Rahabilitasi sedang berat puskesmas pembantu/ pos kesdes/ polinde s (Lanjutan)</u>	-	-	-	-	-	-	<u>1</u>	<u>199.237.985</u>	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Rehabilitasi sedang berat puskesmas (Lanjutan)</u>	-	-	-	-	-	-	<u>1</u>	<u>63.116.800</u>	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Penambahan ruang PKM (Lanjutan)</u>	-	-	-	-	-	-	<u>1</u>	<u>9.928.700</u>	-	-	-	-	-	-	-

-	<u>Pembangunan pagar PKM /pustu/ poskes des (Lanjutan)</u>	-	-	-	-	-	-	<u>1</u>	<u>136.446.278</u>	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>18</u>	-	-	-	<u>27</u>	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>sangat rendah</u>	<u>sangat rendah</u>	-	-	<u>sangat rendah</u>	<u>sangat rendah</u>	-
<u>16</u>	<u>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</u>	<u>Cakupan ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>10.449.681.325</u>	<u>100%</u>	<u>7.082.580.678</u>	<u>100%</u>	<u>5.524.337.914</u>	<u>100</u>	<u>94,35</u>	-	-	-	-	-
-	<u>Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan Masyarakat</u>	<u>Jumlah obat dan perbekalan kesehatan</u>	<u>147</u>	<u>147</u>	<u>6.000.000.000</u>	<u>147</u>	<u>4.852.148.874</u>	<u>147</u>	<u>3.533.143.534</u>	<u>91</u>	<u>93,81</u>	<u>281</u>	<u>8.166.441.331</u>	<u>191,16</u>	<u>1,36</u>	<u>Bidang P2PL</u>
-	<u>Pengadaan Perbekalan Kesehatan (alat Medis dan Penunjang Medis)</u>	<u>Jumlah pengadaan Perbekalan kesehatan</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>4.382.681.325</u>	<u>100</u>	<u>2.169.743.304</u>	<u>100</u>	<u>1.869.802.170</u>	<u>328</u>	-	<u>428</u>	<u>3.958.333.655</u>	<u>428,00</u>	<u>0,90</u>	<u>Bidang P2PL</u>
-	<u>Konsultasi dan koordinasi perencanaan</u>	<u>Jumlah Konsultasi dan koordinasi perencanaan ke provinsi dan pusat</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>67.000.000</u>	<u>4</u>	<u>60.688.500</u>	<u>4</u>	<u>57.626.000</u>	<u>100</u>	<u>91,04</u>	<u>8</u>	<u>113.150.796</u>	<u>200,00</u>	<u>1,69</u>	<u>Bidang P2PL</u>
-	<u>Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan Masyarakat (lanjutan)</u>	<u>Jumlah obat dan perbekalan kesehatan</u>	-	<u>1</u>	-	<u>1</u>	-	<u>1</u>	<u>57.125.210</u>	<u>100</u>	<u>100,00</u>	<u>2</u>	<u>57.125.210</u>	<u>200,00</u>	<u>#DIV/0!</u>	<u>Bidang P2PL</u>
-	<u>Pengadaan Perbekalan Kesehatan (alat Medis dan Penunjang Medis) Lanjutan</u>	<u>Jumlah pengadaan Perbekalan kesehatan</u>	-	<u>1</u>	-	<u>1</u>	-	<u>1</u>	<u>6.641.000</u>	<u>100</u>	-	<u>2</u>	-	<u>200,00</u>	<u>#DIV/0!</u>	<u>Bidang P2PL</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>173,05</u>	<u>92,42</u>	-	-	<u>273,05</u>	<u>1,32</u>	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	-	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	-
-	<u>Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Instalasi Farmasi</u>	<u>Cakupan ketersediaan obat yang cukup dan memenuhi syarat penyimpanan</u>	100%	100%	1.326.570.440	100%	9.493.000	100%	-	-	-	1	9.493.000	100,00	0,01	-
-	<u>Rehabilitasi sedang/berat Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK)</u>	<u>Jumlah gedung IFK yang direhabilitasi sedang/berat</u>	1	0	300.000.000	1	-	0	-	-	-	1	-	-	0,00	-
-	<u>Pengadaan sarana distribusi</u>	<u>Jumlah sarana distribusi</u>	2	2	600.000.000	2	-	2	-	-	-	2	-	-	0,00	-
-	<u>Pengadaan sarana pengolahan data</u>	<u>Jumlah sarana pengolahan data</u>	0	0	-	0	9.493.000	0	-	-	-	0	9.493.000	-	0,00	-
-	<u>Pengadaan sarana penyimpanan data</u>	<u>Jumlah sarana penyimpanan data</u>	0	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	0,00	-
-	<u>pengadaan sarana pengaman</u>	<u>Jumlah sarana pengaman</u>	0	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	0,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	-	Sangat Rendah	Sangat Rendah	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</u>	<u>Cakupan Rawat Jalan</u>	2,57%	2,59 %	1.935.977.854	2,57 %	1.898.956.300	2,57 %	2.146.194.800	-	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>Cakupan Rawat inap</u>	48,2%	48,5 %	-	48,2 %	-	48,2 %		-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Penyelenggaraa n akreditasi PKM</u>	<u>Jumlah PKM terakreditasi</u>	4 PKM	5 PKM	789.960.000	3	401.407.300	4	679.641.000	-	40,27	3	675.107.300	-	0,85	-

-	<u>Pemeliharaan pemuliharaan keehatan</u>	<u>Jumlah PKM RI & NON RRI yg melaksanakan pelayanan sesuai standar</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>727.137.450</u>	<u>11</u>	<u>1.461.245.000</u>	<u>11</u>	<u>1.441.852.800</u>	<u>109</u>	<u>88,36</u>	<u>11</u>	<u>2.735.210.543</u>	<u>91,67</u>	<u>3,76</u>	-
-	-	<u>Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan perkesmas sesuai standar</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	-	<u>12</u>	-	<u>12</u>	-	<u>75</u>	-	<u>12</u>	-	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>jumlah puskesmas yang melakukan pendataan dan pembinaan PIS-PK</u>	<u>80%</u>	<u>90%</u>	-	<u>80%</u>	-	<u>80%</u>	-	<u>125</u>	-	<u>1,8</u>	-	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Manajemen sesuai standar</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	-	<u>12</u>	-	<u>12</u>	-	<u>8</u>	-	<u>12</u>	-	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>jumlah fasyankes primer diawasi dan dibina</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	-	<u>17</u>	-	<u>17</u>	-	<u>88</u>	-	<u>12</u>	-	<u>70,59</u>	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>jumlah puskesmas yang menyelenggara kan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer sesuai standar</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	-	<u>12</u>	-	<u>12</u>	-	<u>100</u>	-	<u>12</u>	-	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Jumlah puskesmas yang menyelenggara kan pelayanan kesehatan gigi mulut sesuai standar</u>	<u>12</u>	<u>1200 %</u>	-	<u>12</u>	-	<u>12</u>	-	<u>100</u>	-	<u>12</u>	-	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-

-	-	<u>Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan darah</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	-	<u>12</u>	-	<u>12</u>	-	<u>100</u>	-	<u>12</u>	-	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	-
-	<u>Registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan</u>	<u>Cakupan registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan</u>	<u>130</u>	<u>460</u>	<u>7.000.000</u>	<u>130</u>	-	<u>130</u>	<u>3.016.000</u>	<u>163</u>	<u>50,93</u>	<u>342</u>	<u>1.536.000</u>	<u>74,35</u>	<u>0,22</u>	-
-	<u>Pelayanan Kesehatan Khusus</u>	<u>Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional</u>	<u>3 PKM</u>	<u>12</u>	<u>220.202.000</u>	<u>3</u>	<u>36.304.000</u>	<u>3</u>	<u>19.480.000</u>	<u>100</u>	<u>59,98</u>	<u>6</u>	<u>47.989.000</u>	<u>50,00</u>	<u>0,22</u>	-
-	-	<u>Jumlah puskesmas yang mengembangkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut</u>	<u>12 PKM</u>	<u>12</u>	<u>7.500.000</u>	<u>12</u>	-	<u>12</u>	-	<u>100</u>	-	<u>24</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan haji</u>	<u>3 PKM</u>	<u>12</u>	<u>18.794.404</u>	<u>3</u>	-	<u>3</u>	-	<u>100</u>	-	<u>6</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Jumlah puskesmas yang mengembangkan pelayanan kesehatan olahraga</u>	<u>3</u>	<u>12 PKM</u>	<u>116.384.000</u>	<u>3</u>	-	<u>3</u>	-	<u>100</u>	-	<u>6</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
-	-	<u>Jumlah puskesmas yang mengembangkan pelayanan kesehatan kerja dasar</u>	<u>3</u>	<u>12 PKM</u>	<u>49.000.000</u>	<u>3</u>	-	<u>3</u>	-	<u>100</u>	-	<u>6</u>	-	-	<u>0,00</u>	-
-	<u>Peembangan sistem administrasi dan</u>	-	-	<u>1</u>	-	<u>1</u>	-	<u>1</u>	<u>2.205.000</u>	-	-	<u>1</u>	-	<u>100,00</u>	<u>#DIV/0!</u>	-

	<u>manajemen kesehatan (Lanjutan)</u>															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>91</u>	<u>16</u>	-	-	<u>66</u>	<u>0</u>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-	-	<u>Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-
<u>6</u>	<u>Program Pengawasan Obat dan Makanan</u>	<u>Jumlah fasilitas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar</u>	<u>3 pkm</u>	<u>15 sarana</u>	<u>23.053.000</u>	<u>3 pkm</u>	<u>960.000</u>	<u>3 pkm</u>	<u>174.214.000</u>	<u>100</u>	<u>67,64</u>	<u>3</u>	<u>118.805.000</u>	<u>100,00</u>	<u>515,36</u>	<u>Farmal kes</u>
-	<u>Peningkatan Kapasitas pelayanan Kefarmasian di sarana farmasi</u>	<u>Jumlah PKM yang sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian</u>	<u>3 PKM</u>	<u>3 PKM</u>	<u>5.480.000</u>	<u>3 PKM</u>	<u>-</u>	<u>3</u>	<u>7.516.000</u>	<u>1</u>	<u>84,62</u>	<u>3</u>	<u>6.360.000</u>	<u>100,00</u>	<u>116,06</u>	<u>Farmal kes</u>
-	<u>Penerapan penggunaan obat rasional disarana pelayanan kefarmasian</u>	<u>Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas, Klinik dan Apotik</u>	<u>65%</u>	<u>65%</u>	<u>773.500</u>	<u>35%</u>	<u>-</u>	<u>65%</u>	<u>-</u>	<u>100</u>	<u>65,00</u>	<u>13</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Farmal kes</u>
-	<u>Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang farmasi, alkes dan PKRT</u>	<u>Jumlah penyuluhan dan pengawasan keamanan obat dan pangan</u>	<u>12 PKM</u>	<u>12 PKM</u>	<u>6.799.500</u>	<u>12</u>	<u>-</u>	<u>12</u>	<u>166.698.000</u>	<u>100</u>	<u>66,88</u>	<u>12</u>	<u>111.485.000</u>	<u>100,00</u>	<u>1639,61</u>	<u>Farmal kes</u>
-	<u>Peningkatan kapasitas Laboratorium</u>	<u>Jumlah ketersediaan alat dan bahan pemeriksaan lab sampel bahan pangan yang diduga berbahaya</u>	<u>5 kit</u>	<u>5 kit</u>	<u>10.000.000</u>	<u>6</u>	<u>960.000</u>	<u>5 kit</u>	<u>-</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>5</u>	<u>960.000</u>	<u>100,00</u>	<u>9,60</u>	<u>Farmal kes</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>75,25</u>	<u>54,12</u>	-	-	<u>100,00</u>	<u>441,32</u>	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>Sedang</u>	<u>Rendah</u>	-	-	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Tinggi</u>	-
7	<u>Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat</u>	<u>Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (SDGs)</u>	<u>90</u>	<u>6</u>	<u>47.130.117.790</u>	-	-	<u>12</u>	<u>53.205.917.019</u>	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Peningkatan Pelayanan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat</u>	<u>Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>17.234.808.000</u>	<u>100</u>	<u>12.930.225.511</u>	<u>100</u>	<u>17.249.198.619</u>	<u>100</u>	<u>74,96</u>	<u>12</u>	<u>25.859.531.422</u>	<u>12,00</u>	<u>150,04</u>	-
-	<u>Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas</u>	<u>Jumlah masyarakat miskin yang menjadi peserta PBI</u>	<u>60656</u>	<u>12</u>	<u>17.556.192.000</u>	<u>12</u>	<u>15.781.544.000</u>	<u>60656</u>	<u>25.902.694.400</u>	<u>100</u>	<u>87,80</u>	<u>12</u>	<u>38.524.494.800</u>	<u>100,00</u>	<u>219,44</u>	-
-	-	<u>Cakupan Puskesmas yang mendapatkan pembiayaan BOK</u>	<u>100%</u>	<u>12</u>	<u>12.339.117.790</u>	<u>100%</u>	<u>7.752.047.225</u>	<u>100%</u>	-	<u>100</u>	-	<u>12</u>	<u>7.752.047.225</u>	<u>100,00</u>	<u>62,82</u>	-
-	<u>BOK</u>	<u>Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembiayaan BOK</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>12.339.117.790</u>	<u>12</u>	<u>7.752.047.225</u>	<u>12</u>	<u>10.054.024.000</u>	-	<u>65,79</u>	<u>0</u>	<u>14.366.901.346</u>	-	<u>0,00</u>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>100,00</u>	<u>81,38</u>	-	-	<u>70,67</u>	<u>144,10</u>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Tinggi</u>	-	-	<u>Sedang</u>	<u>Sangat Tinggi</u>	-
8	<u>STATISTIK</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>Bidang Yang</u>
-	<u>Program peningkatan dan pengembangan statistik</u>	<u>Tersusunnya dokumen perencanaan tingkat puskesmas dan dinas kesehatan berbasis data</u>	<u>13 Dok</u>	<u>13</u>	<u>82.700.000</u>	<u>13</u>	<u>92.974.200</u>	<u>13</u>	<u>46.400.500</u>	<u>100</u>	<u>76,15</u>	<u>26</u>	<u>128.309.700</u>	<u>200,00</u>	<u>155,15</u>	-

-	<u>Penyusunan profil</u>	<u>Jumlah Profil kesehatan</u>	<u>13 Dok</u>	<u>13</u>	<u>20.000.000</u>	<u>13</u>	<u>10.122.000</u>	<u>13</u>	<u>11.380.500</u>	<u>100</u>	<u>99,43</u>	<u>13</u>	<u>21.437.500</u>	<u>100,00</u>	<u>107,19</u>	<u>Sekretariat</u>
-	<u>Pengolahan data dan informasi kesehatan</u>	<u>Jumlah dokumen data dasar kesehatan</u>	<u>1 Dok</u>	<u>1</u>	<u>50.000.000</u>	<u>1</u>	<u>80.232.200</u>	<u>1</u>	<u>30.420.000</u>	<u>100</u>	<u>74,62</u>	<u>2</u>	<u>102.932.200</u>	<u>200,00</u>	<u>205,86</u>	<u>Bidang Yanke s</u>
-	<u>Survey Kesehatan</u>	<u>Jumlah survey kesehatan</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>700.000</u>	<u>3</u>	<u>-</u>	<u>3</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Sekretariat</u>
-	<u>Monitoring dan Evaluasi</u>	<u>Jumlah Money</u>	<u>4 kl</u>	<u>4 kl</u>	<u>12.000.000</u>	<u>4</u>	<u>2.620.000</u>	<u>4</u>	<u>4.600.000</u>	<u>100</u>	<u>28,70</u>	<u>8</u>	<u>3.940.000</u>	<u>-</u>	<u>32,83</u>	<u>Sekretariat</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>75,00</u>	<u>62,55</u>	-	-	<u>166,67</u>	<u>156,07</u>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>Sedang</u>	<u>rendah</u>	-	-	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Tinggi</u>	-
<u>10</u>	<u>Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga</u>	<u>Cakupan penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>83.500.000</u>	<u>100%</u>	<u>82.950.250</u>	-	<u>82.950.250</u>	-	-	-	-	-	-	<u>Bidang P2PL</u>
-	<u>Perawatan dan Pendampingan Gizi Buruk</u>	<u>Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan Perawatan</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>83.500.000</u>	<u>100%</u>	<u>82.950.250</u>	<u>100%</u>	<u>82.950.250</u>	<u>100</u>	<u>1,45</u>	<u>69%</u>	<u>84.150.250</u>	<u>69,00</u>	<u>100,78</u>	<u>Bidang P2PL</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>100,00</u>	<u>1,45</u>	-	-	<u>69,00</u>	<u>100,78</u>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-	-	<u>Sedan g</u>	<u>Sangat Tinggi</u>	-
<u>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</u>									<u>77.260.096.318</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)</u>										<u>59,39</u>	<u>25,37</u>	-	-	<u>53,30</u>	<u>0,37</u>	-

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)										<u>Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-	-	<u>Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-
<u>Faktor Pendonggong Keberhasilan Kinerja :</u>	<u>1. Komitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan</u>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>2. Adanya uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas, sehingga aparaturnya memahami tugas pokok dan fungsinya</u>							-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>3. Dilaksanakannya pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas pada tahun 2017 berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebanyak 557 orang dan penempatan jabatan pelaksana sebanyak 733 orang</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :</u>	<u>1. Masih lemahnya koordinasi, baik internal maupun eksternal</u>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	2. Masih lemahnya perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2020 (%)		Unit PD Penanggung jawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			170	10.041.853.971	47	16.189.196.400	305	14.894.861.943	649	92	524	93.623.008.828	308	932	
	Pembangunan rumah sakit	Jumlah Pembangunan rumah sakit	unit	8	5.726.700.000	2	6.006.000.000	2	5.544.929.350	100	92,32	22	18.134.805.653	275	3,17	
	Pengadaan alat - alat rumah sakit	Jumlah alat - alat rumah sakit	unit	160	4.315.153.971	45	10.167.510.000	45	9.334.246.193	100	91,80	244	75.472.516.775	152,5	17,49	
	-pengadaan obat-obatan RS	- Jumlah Obat-obatan RS	paket	2	-	258	15.686.400	258	15.686.400	100	100,00	258	15.686.400			
	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD			3	48.454.750.000	1	47.391.415.126	1	47.218.535.863	1,00	99,64	1	172.235.160.695	0,33	355	

Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD	Jumlah Pelayanan dan pendukung pelayanan yang berkualitas	pendapatan	3	48.454.750.000	1	47.391.415.126	1	47.218.535.863	1,00	99,64	1	172.235.160.695	0,33	355	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								38.504.129.875	75,25	95,94			142,61	125	
PREDIKAT KINERJA								kurang							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 2)								38.504.129.875	54,08	7,67			25,69	77,69	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 2)								kurang							

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2020 (%)		Unit PD Penanggung jawab
(1)	(3)	(4)		(5)		(7)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12 / 7 * 100		(14) = 6 + 12		(15) = 13 / 5 * 100		(16)
		Uraian	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase kelancaran operasional perkantoran	Persen	100	573.973.081	100	604.445.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	penyediaan jasa Surat Menyurat	output: Jumlah penyelesaian surat menyurat	Bulan	12	187.854.000	12	187.854.000	12	179.932.100	100,00	95,78	24	384.663.425	833,33	0,00	DINAS PUPR
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Bulan	12	53.400.000	12	53.400.000	12	30.898.885	100,00	57,86	24	68.213.909	833,33	0,00	DINAS PUPR
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional dan	Unit	17	29.783.570	17	42.000.000	10	9.001.580	58,82	21,43	27	23.082.935	346,02	0,00	DINAS PUPR

	<u>dinas/operasio nal</u>	<u>Pembayaran STNK kendaraan roda 4 da roda 2</u>														
	<u>Penyediaan jasa kebersihan kantor</u>	<u>Pembayaran jasa kebersihan kantor</u>	<u>Bulan</u>	<u>12</u>	<u>9.600.000</u>	<u>12</u>	<u>9.600.000</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>12</u>	<u>14.400.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</u>	<u>Terlaksananya pebaikan peralatan kerja</u>	<u>Jenis</u>	<u>3</u>	<u>9.790.000</u>	<u>3</u>	<u>6.900.000</u>	<u>2</u>	<u>3.200.000</u>	<u>66,67</u>	<u>46,38</u>	<u>5</u>	<u>15.200.000</u>	<u>2222,22</u>	<u>0,00</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Penyediaan peralatan rumah tangga</u>	<u>Jumlah alat rumah tangga</u>	<u>Jenis</u>	<u>3</u>	<u>2.369.275</u>	<u>3</u>	<u>12.000.000</u>	<u>7</u>	<u>7.373.900</u>	<u>233,33</u>	<u>61,45</u>	<u>10</u>	<u>12.228.400</u>	<u>7777,78</u>	<u>0,00</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan</u>	<u>Pembayaran rekening surat kabar</u>	<u>Bulan</u>	<u>12</u>	<u>12.096.000</u>	<u>12</u>	<u>6.920.000</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</u>	<u>Perjalanan Dinas Luar Provinsi</u>	<u>Bulan</u>	<u>12</u>	<u>226.142.542</u>	<u>12</u>	<u>230.921.350</u>	<u>12</u>	<u>164.523.250</u>	<u>100,00</u>	<u>71,25</u>	<u>24</u>	<u>420.038.493</u>	<u>833,33</u>	<u>0,00</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</u>	<u>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>Bulan</u>	<u>12</u>	<u>42.937.694</u>	<u>12</u>	<u>54.850.000</u>	<u>12</u>	<u>31.540.000</u>	<u>100,00</u>	<u>57,50</u>	<u>24</u>	<u>85.130.000</u>	<u>833,33</u>	<u>0,00</u>	<u>DINAS PUPR</u>
<u>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</u>								<u>7,4 4</u>	<u>47385523,89</u>	<u>84,31</u>	<u>45,74</u>	<u>16,67</u>	<u>113661906,89</u>	<u>1519,93</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
<u>PREDIKAT KINERJA</u>								<u>San gat Re nda h</u>	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Tinggi</u>	<u>Sanga t Rend ah</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Renda h</u>	<u>-</u>
<u>2</u>	<u>PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR</u>	<u>Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi</u>	<u>Persen</u>	<u>100</u>	<u>213.151.500</u>	<u>100</u>	<u>224.370.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>-</u>	<u>Pembangunan gedung kantor</u>	<u>Tersedianya bangunan gedung kantor</u>	<u>Unit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</u>	<u>Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</u>	<u>Unit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Pengadaan peralatan gedung kantor</u>	<u>Jumlah peralatan gedung kantor</u>	<u>Unit</u>	<u>2</u>	<u>20.000.000</u>	<u>2</u>	<u>20.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>65.779.700</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>DINAS PUPR</u>

	<u>Pengadaan meubeleu</u>	<u>Jumlah pengadaan meubeler kantor</u>	<u>Jenis</u>	<u>4</u>	<u>20.000.000</u>	<u>4</u>	<u>20.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>4</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</u>	<u>Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor</u>	<u>Unit</u>	<u>1</u>	<u>987.469</u>	<u>1</u>	<u>897.699</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</u>	<u>Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</u>	<u>Unit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio</u> <u>nal</u>	<u>Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio</u> <u>nal</u>	<u>Unit</u>	<u>16</u>	<u>71.600.000</u>	<u>16</u>	<u>71.600.000</u>	<u>23</u>	<u>95.609.250</u>	<u>143.75</u>	<u>134</u>	<u>39</u>	<u>155.970.900</u>	<u>898.438</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</u>	<u>Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</u>	<u>Unit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</u>	<u>Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</u>	<u>Unit</u>	<u>7</u>	<u>4.500.000</u>	<u>7</u>	<u>4.500.000</u>	<u>1</u>	<u>2.000.000</u>	<u>14,285</u> <u>7</u>	<u>44</u>	<u>8</u>	<u>6.175.000</u>	<u>204,082</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</u>	<u>Jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubeler</u>	<u>Unit</u>	<u>10</u>	<u>5.000.000</u>	<u>10</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor</u>	<u>Jumlah Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor</u>	<u>Unit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>50.000.000</u>	<u>6</u>	<u>84.375.000</u>	<u>300</u>	<u>169</u>	<u>8</u>	<u>134.375.000</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional</u>	<u>Kendaraan Roda 2, roda 3, roda 4 dan roda 6</u>	<u>Unit</u>	<u>1</u>	<u>91.064.031</u>	<u>7</u>	<u>52.372.301</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>DINAS PUPR</u>
<u>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</u>								<u>2,50</u>	<u>15165354,17</u>	<u>38,17</u>	<u>28,89</u>	<u>5,08</u>	<u>31025050,00</u>	<u>91,88</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
<u>PREDIKAT KINERJA</u>								<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>-</u>

3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Outcome : Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	Persen	100	69.442.672	100	73.097.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1. Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah Peserta diklat formal	Orang	4	49.442.672	4	53.097.550	6	32.511.250	150	61,23	10	75.043.650	3750	0,00	DINAS PUPR
	2. Sosialisasi peraturan perundang- undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang- undangan	Orang	2	10.000.000	2	10.000.000	-	-	0	0,00	0	-	0	-	DINAS PUPR
	3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Jumlah peserta Bintek implementasi peraturan perundang- undangan	Orang	7	10.000.000	7	10.000.000	-	-	0	0,00	0	-	0	-	DINAS PUPR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								2	10837083,33	50	20,41	3,33	25014550	1250	4E-05	-
PREDIKAT KINERJA								San gat Re nda h	Sangat Tinggi	Sangat Renda h	Rend ah	-	-	Sangat Tinggi	-	-
4	PROGRAM PEMBANGUNA N JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	-	-	51.379.341.52 8	-	36.253.137.67 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Perencanaan Pembangunan Jalan	Rencana panjang jalan yang akan dibangun	Paket	0	300.000.000	0	250.000.000	0	0	0	-	0	891.733.500	0	0	DINAS PUPR
	Survey Kontur Jalan dan Jembatan	Panjang survey kontur jalan dan jembatan	Paket	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	-	0	81.795.000	0	0	DINAS PUPR
	Pembangunan Jalan	Panjang akses jalan yang terbangun	Paket	0	49.379.341.52 8	11	26.853.137.67 2	9	#####	0	40	9	91.583.329.01 3	0	8E-08	DINAS PUPR
	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang direncanakan	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000	0	0	0	-	0	269.404.000	0	0	DINAS PUPR

	<u>Pembangunan Jembatan</u>	<u>Jumlah akses jembatan yang terbangun</u>	<u>Paket</u>	<u>1</u>	<u>1.500.000.000</u>	<u>7</u>	<u>8.950.000.000</u>	<u>1</u>	<u>215.728.710</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>4.391.436.650</u>	<u>0</u>	<u>1,6E-07</u>	<u>DINAS PUPR</u>
<u>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</u>								<u>2</u>	<u>2170622912</u>	<u>0</u>	<u>8,4047144</u>	<u>2</u>	<u>19443539633</u>	<u>0</u>	<u>4,8E-08</u>	<u>-</u>
<u>PREDIKAT KINERJA</u>								<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>5</u>	<u>PROGRAM REHABILITASI /PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN</u>	<u>Persentase Jalan dan jembatan Dalam Kondisi Rusak Berat</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.569.206.607</u>	<u>-</u>	<u>1.494.482.483</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>-</u>	<u>Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan</u>	<u>Rencana Panjang rehabilitasi / pemeliharaan jalan</u>	<u>km</u>	<u>30</u>	<u>:</u>	<u>0</u>	<u>:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>:</u>	<u>0</u>	<u>:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>rehabilitasi / pemeliharaan jalan</u>	<u>panjang pemeliharaan jalan</u>	<u>Kec</u>	<u>7</u>	<u>1.069.206.607,00</u>	<u>7</u>	<u>1.444.482.483</u>	<u>7</u>	<u>1.153.129.950</u>	<u>0</u>	<u>80</u>	<u>14</u>	<u>1.442.116.250</u>	<u>0</u>	<u>7,5E-06</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>rehabilitasi / pemeliharaan Jembatan</u>	<u>panjang pemeliharaan jembatan</u>	<u>km</u>	<u>30</u>	<u>500.000.000</u>	<u>30</u>	<u>50.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>:</u>	<u>0</u>	<u>:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
<u>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</u>								<u>2,333</u>	<u>384.376.650</u>	<u>0</u>	<u>26,61</u>	<u>4,67</u>	<u>480705416,7</u>	<u>0</u>	<u>2,5E-06</u>	<u>-</u>
<u>PREDIKAT KINERJA</u>								<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>6</u>	<u>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN</u>	<u>Jumlah Alat Berat Dalam Kondisi Baik</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>900.000.000</u>	<u>-</u>	<u>1.050.000.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>-</u>	<u>Pengadaan Alat-alat Berat</u>	<u>-</u>	<u>Unit</u>	<u>1</u>	<u>550.000.000</u>	<u>1</u>	<u>550.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>:</u>	<u>0</u>	<u>:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan bengkel alat-alat berat</u>	<u>-</u>	<u>Unit</u>	<u>1</u>	<u>100.000.000</u>	<u>1</u>	<u>100.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>:</u>	<u>0</u>	<u>:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>

	<u>Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium Kebinamargaan</u>	-	<u>Unit</u>	<u>0</u>	-	<u>3</u>	<u>200.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0</u>	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Rehabilitasi/pe meliharaan alat-alat berat</u>	-	<u>Unit</u>	<u>6</u>	<u>150.000.000</u>	<u>5</u>	<u>100.000.000</u>	<u>15</u>	<u>48.393.000</u>	<u>300</u>	<u>48</u>	<u>15</u>	<u>48.393.000</u>	<u>5000</u>	<u>3,2E-05</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Rehabilitasi/ pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat</u>	-	<u>Unit</u>	<u>4</u>	<u>100.000.000</u>	<u>4</u>	<u>100.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0</u>	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Rehabilitasi/ pemeliharaan alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan</u>	-	<u>Unit</u>	<u>0</u>	-	<u>0</u>	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0</u>	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
<u>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</u>								<u>2,5</u>	<u>8065500</u>	<u>50</u>	<u>8,0655</u>	<u>2,50</u>	<u>8065500</u>	<u>833,333</u>	<u>5,4E-06</u>	-
<u>PREDIKAT KINERJA</u>								<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-	-	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-
<u>7</u>	<u>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</u>	<u>Outcome : Panjang jaringan irigasi kondisi baik</u>	-	-	<u>6.000.000.000</u>	-	<u>8.000.000.000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Pembangunan/ Peningkatan Saluran dan Bendung</u>	<u>Output : Terbangunnya Jaringan Irigasi</u>	<u>KM</u>	<u>2,5</u>	<u>2.140.000.000</u>	<u>0,9</u>	<u>850.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0</u>	<u>494.411.406</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Pelaksanaan normalisasi saluran sungai</u>	-	-	-	-	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0</u>	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Pembangunan Pintu Air</u>	<u>Output : Terbangunnya Pintu Air Irigasi</u>	<u>Unit</u>	<u>10</u>	<u>300.000.000,0</u>	<u>1</u>	<u>50.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0</u>	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>

	<u>Rehabilitasi/Pe meliharaan Jaringan Irigasi</u>	<u>Output : Rehabilitasi / Pemeliharaan Irigasi</u>	<u>KM</u>	<u>15,9</u>	<u>3.470.000.000</u>	<u>10, 875</u>	<u>7.070.000.000</u>	<u>7</u>	<u>5.465.603.450</u>	<u>64,367 8</u>	<u>77</u>	<u>7</u>	<u>10.614.294.03 0</u>	<u>404,829</u>	<u>2,2E- 06</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Penguatan kelembagaan kelompok Petani Pemakai Air</u>	<u>Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kelompok Petani Pemakai Air</u>	<u>Paket</u>	<u>3</u>	<u>90.000.000,00</u>	<u>1</u>	<u>30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
<u>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</u>								<u>1,4</u>	<u>1093120690</u>	<u>12,873 6</u>	<u>15,46 1396</u>	<u>1,4</u>	<u>2221741087</u>	<u>80,9658</u>	<u>4,5E- 07</u>	<u>-</u>
<u>PREDIKAT KINERJA</u>								<u>San gat Re nda h</u>	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Renda h</u>	<u>Sanga t Renda h</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Tinggi</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>8</u>	<u>Program Pengendalian Banjir</u>	<u>Outcome : Terbangunnya saluran pengendali banjir dan saluran pembuang</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>36.289.228.41 0</u>	<u>-</u>	<u>38.199.187.80 0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>-</u>	<u>Rehabilitasi pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai</u>	<u>Output : Terlaksananya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai</u>	<u>KM</u>	<u>6000</u>	<u>34.934.934.88 0</u>	<u>550 0</u>	<u>21.799.187.80 0</u>	<u>2</u>	<u>#####</u>	<u>0</u>	<u>174</u>	<u>2</u>	<u>39.270.679.35 0</u>	<u>0</u>	<u>5E-07</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Pembangunan prasarana pengaman pantai</u>	<u>Output : Terbangunnya prasarana pengaman pantai</u>	<u>KM</u>	<u>100</u>	<u>950.000.000</u>	<u>100</u>	<u>16.400.000.00 0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Peningkatan Pembangunan pusat pusat pengendali banjir</u>	<u>Output : Terbangunnya sal.pengendali banjir dan saluran pembuang</u>	<u>KM</u>	<u>100</u>	<u>404.293.530</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
<u>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</u>								<u>0,6 667</u>	<u>12655824650</u>	<u>0,0121 2</u>	<u>58,05 6405</u>	<u>0,6666 7</u>	<u>13090226450</u>	<u>0</u>	<u>1,7E- 07</u>	<u>-</u>
<u>PREDIKAT KINERJA</u>								<u>San gat Re nda h</u>	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Renda h</u>	<u>Sanga t Renda h</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Renda h</u>	<u>-</u>

9	<u>Program pembangunan dan pemeliharaan gedung negara</u>	<u>Outcome : Terlaksananya pembangunan gedung kantor</u>	-	-	<u>2.599.495.092</u>	-	<u>5.988.327.880</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Pembangunan gedung negara</u>	<u>Output : Terbangunnya sarana pemerintahan aparatur</u>	<u>Unit</u>	<u>5</u>	<u>2.599.495.092</u>	<u>7</u>	<u>5.988.327.880</u>	<u>1</u>	<u>389.814.000</u>	<u>14,285</u> <u>7</u>	<u>7</u>	<u>1</u>	<u>6.166.313.315</u>	<u>285,714</u>	<u>2,5E-07</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Pemeliharaan gedung negara</u>	<u>Output : Rehabilitasi dan Pemeliharaan sarana pemerintahan aparatur</u>	<u>Unit</u>	<u>7</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
<u>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</u>								<u>0,5</u>	<u>194907000</u>	<u>7,1428</u> <u>6</u>	<u>3,254</u> <u>7817</u>	<u>0,5</u>	<u>3083156658</u>	<u>142,857</u>	<u>1,3E-07</u>	-
<u>PREDIKAT KINERJA</u>								<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-	-	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-
10	<u>Program Perencanaan Tata Ruang</u>	<u>Outcome : Jumlah dokumen perencanaan tata ruang</u>	-	-	<u>338.465.061</u>	-	<u>376.072.290</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL</u>	<u>Output : Jumlah PERDA yang ditetapkan</u>	<u>Dokumen</u>	<u>1</u>	<u>338.465.061</u>	<u>1</u>	<u>376.072.290</u>	<u>1</u>	<u>157.018.000</u>	<u>100</u>	<u>42</u>	<u>2</u>	<u>568.784.600</u>	<u>10000</u>	<u>1,2E-05</u>	<u>DINAS PUPR</u>
<u>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</u>								<u>1</u>	<u>157018000</u>	<u>100</u>	<u>41,75</u> <u>2079</u>	<u>2</u>	<u>568784600</u>	<u>10000</u>	<u>1,2E-05</u>	-
<u>PREDIKAT KINERJA</u>								<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-	-	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	-
11	<u>Program pengendalian pemanfaatan ruang</u>	<u>Outcome : Terlaksananya penyusunan kebijakan dan pengendalian pemanfaatan ruang</u>	-	-	<u>72.438.219</u>	-	<u>80.486.910</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	<u>Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang</u>	<u>Output : Jumlah PERDA yang ditetapkan</u>	<u>Doku men</u>	<u>3</u>	<u>36.219.109</u>	<u>1</u>	<u>43.414.485</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>Pengawasan pemanfaatan ruang</u>	<u>Output : Rendahnya pelanggaran tentang pemanfaatan ruang</u>	<u>Kec</u>	<u>7</u>	<u>36.219.110</u>	<u>7</u>	<u>37.072.425</u>	<u>7</u>	<u>35.681.600</u>	<u>0</u>	<u>96,24 8357</u>	<u>14</u>	<u>106719000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang</u>	<u>Output : sosialisasi garis sempadan bangunan, pantai dan sungai</u>	<u>Orng</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>DINAS PUPR</u>
	<u>-</u>	<u>pengadaan papan informasi IMB 7 kecamatan</u>	<u>Unit</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>DINAS PUPR</u>
<u>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</u>								<u>1,7 5</u>	<u>8.920.400,00</u>	<u>-</u>	<u>24,06</u>	<u>3,50</u>	<u>26.679.750,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	
<u>PREDIKAT KINERJA</u>								<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>Sangat Rendah</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<u>FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :</u>				<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<u>FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :</u>				<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<u>TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :</u>				<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<u>TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :</u>				<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi (Triwulan IV 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah S/d Triwulan IV 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan IV Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan IV Tahun 2020 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	4	5	6	8	13 = 9 +10+11+12	14 = 13 / 8 * 100	15 = 7 +13	16 = 15 / 6 * 100	17

		Uraian	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
BELANJA LANGSUNG																
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	%	100	2.308.272.951	100	375.928.900	75,65	284.409.397	75,7%	75,7%	78,83	1.016.299.096	79%	44%	DPKP
1.1	1. Penyediaan jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah penyediaan surat menyurat	Jenis	20	353.469.785	4	64.498.550	4	64.498.550	100%	100%	36	153.678.250	180%	43%	DPKP
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Rek	23	277.964.900	6	50.566.500	3	28.603.450	50%	57%	35	44.212.300	152%	16%	DPKP
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan Pembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2	Unit	119	270.735.270	30	67.750.000	4	8.494.310	13%	13%	13	18.499.210	11%	7%	DPKP
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran jasa kebersihan kantor	OB	84	33.200.000	24	9.600.000	24	9.600.000	100%	100%	56	18.800.000	67%	57%	DPKP
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Unit	40	10.675.000	10	950.000	10	950.000	100%	100%	20	4.200.000	50%	39%	DPKP
1.8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga	Buah	138	26.937.973	25	2.034.850	25	2.034.850	100%	100%	20	12.036.150	14%	45%	DPKP
1.10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Luar Provinsi	Kali	1431	1.239.255.023	291	164.374.000	282	159.598.237	97%	97%	314	729.991.936	22%	59%	DPKP
1.11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kali	814	96.035.000	171	16.155.000	113	10.630.000	66%	66%	145	34.881.250	18%	36%	DPKP

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										78,2%	79,0%					
Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi					
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	%	100	1.391.383.404	100	15.902.131	69,37	15.787.130	69,4%	99,3 %	150,37	661.313.630	150%	48%	DPKP
2.3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	13	124.330.000	4	2.317.131	4	2.317.130	100%	100%	10	73.626.130	77%	59%	DPKP
2.4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	206	273.432.224	67	-	-	-	0%	0%	55	57.886.000	27%	21%	DPKP
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor	Unit	8	797.861.180	-	-	-	-	0%	0%	2	488.121.500	25%	61%	DPKP
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	24	72.000.000	6	12.210.000	6	12.210.000	100%	100%	11	34.710.000	46%	48,21%	DPKP
2.10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Unit	78	13.960.000	25	1.375.000	23	1.260.000	92%	92%	38	6.970.000	49%	50%	DPKP
2.13	Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan Roda 2, roda 3, roda 4 dan roda 6	Unit	3	109.800.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPKP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97,3%	97,2%					
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat tinggi					

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	%	100	140.363.910	100	32.438.750	67,83	31.695.000	67,8%	97,7 %	119	66.795.000	119%	48%	DPKP
3.1	Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah Peserta diklat formal	Orang	30	140.363.910	8	32.438.750	6	31.695.000	75%	98%	12	66.795.000	40%	48%	DPKP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										75,0%	97,7%					
Predikat Kinerja										Sedang	Sangat Tinggi					
5.	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dipedesaan dan jumlah bantuan RTLH	%	82,59	25.356.209.100	100	1.277.086.300	1,52	19.384.300	2%	2%	51,52	6.759.690.928	62%	27%	DPKP
5.1	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun	RT	2.883	24.137.903.000	540	-	-	-	0%	0%	6	6.589.116.628	0%	27%	DPKP
5.2	Rehabilitasi Perumahan masyarakat kurang mampu (bedah rumah)	Terlaksananya Rehabilitasi/Pembangunan Baru Perumahan bagi masyarakat kurang mampu/masyarakat berpenghasilan rendah	Unit	172	1.218.306.100	235	1.277.086.300	231	1.254.273.300	98%	98%	233	1.405.463.300	135%	115%	DPKP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98%	98%					
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

7	Program peningkatan fasilitas penerangan jalan	Outcome : peningkatan dan pemeliharaan penerangan jalan	%	48	15.464.659.250	14	1.002.370.000	13,09	937.264.625	93,5%	93,5%	472,09	8.482.732.593	984%	55%	DPKP
7.1	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Output : Tertatanya lampu penerangan jalan	Titik	8.082	15.464.659.250	300	459.030.000	269	409.378.900	90%	89%	728	7.954.846.868	9%	51%	DPKP
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Jumlah Pemeliharaan lampu penerangan jalan	Titik	1.150	370.677.410	200	457.465.000	194	443.985.725	97%	97%					
	Pengadaan Sarana dan prasarana kerja operasional PJU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Operasional PJU	Unit	9	500.000.000	8	85.875.000	8	83.900.000	100%	98%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										96%	95%					
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
8	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Outcome : Terpenuhinya sarana infrastruktur perkotaan	Unit	22	2.077.500.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPKP
8.1	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Output : Terpenuhinya sarana penunjang infrastruktur	Unit	7	1.381.350.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPKP
8.2	Pengembangan Infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan	Output : Penataan Lingkungan perkotaan yang teratur	Paket	5	696.150.000	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPKP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,0%	0,0%					
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah					

9	Program Pengembangan Perumahan	Outcome : Jumlah bantuan perumahan layak huni	-	40	1.520.000.000	15	74.315.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPKP
9.1	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)	Output : tersedianya panduan pelaksanaan perumahan sebagai pedoman	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPKP
9.2	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Output : tersedianya bantuan perumahan masyarakat miskin	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPKP
9.3	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Output: meningkatnya kualitas rumah layak huni	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPKP
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana	Unit	25	1.020.000.000	15	74.315.000	-	-	0%	0%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0%	0%					
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah					
10	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Outcome : Terpenuhinya sarana infrastruktur permukiman	Jenis	49	11.253.155.200	10	1.153.310.638	8,00	871.848.200	80%	76%	30	7.767.931.750	61%	69%	DPKP

10.1	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Output : Terlaksananya Pembangunan Saran dan Prasarana sanitasi dasar	RT	50	316.211.300	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPKP
10.2	Penataan lingkungan pemukiman kawasan perkotaan dan perdesaan	Output : Terbangunnya sarana dan prasarana Kawasan Perkotaan	Paket	6	10.936.943.900	2	-	-	-	0%	0%	5	6.896.083.550	83%	63%	DPKP
	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman	Jumlah taman yang terbangun	Taman	2	400.000.000	1	40.719.152	1	40.407.500	100%	99%					
	Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan	panjang jalan lingkungan yang terbangun	Meter	2400	2.000.000.000	1200	1.112.591.486	897	831.440.700	75%	75%					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										87,4%	87,0%					
Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi					
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana alat-alat kebersihan	%	100	23.302.526.520	100	4.022.715.900	90,00	3.620.543.100	90,0%	90,0%	180	12.128.305.974	180%	52%	DPKP
11.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Output : Terlaksananya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Unit	1.420	533.659.570	845	33.659.000	845	33.659.000	100%	100%	846	438.623.600	60%	82%	DPKP

11.3	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Output : Terlaksananya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan	Jenis	53	22.768.866.950	11	3.989.056.900	11	3.586.884.100	100%	90%	14	11.689.682.374	26%	51%	DPKP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,0%	95,0%					
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
12	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Outcome : Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat	RT	204	7.859.741.180	-	-	-	-	0%	0%	381	2.673.038.869	187%	34%	DPKP
12.1	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	Output : terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	RT	1.550	7.859.741.180	-	-	-	-	0%	0%	381	2.673.038.869	25%	34%	DPKP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,0%	0,0%					
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah					
13	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Outcome : Terpenuhinya sarana drainase Perkotaan dan Perdesaan	%	31,0	5.161.629.390	8,00	112.400.000	6,98	98.044.200	87,3%	87,2%	16	1.843.385.490	51%	36%	DPKP
13.1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Output : terlaksananya pembangunan Drainase dan Gorong-gorong	Km	12,26	5.161.629.390	6,70	112.400.000	6	98.044.200	90%	87,2%	15	1.843.385.490	120%	36%	DPKP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										89,6%	87,2%					

Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi					
14	Program pengelolaan areal pemakaman	Outcome : Terpenuhi sarana areal pemakaman	Unit	9	2.461.618.150	-	-	-	-	0,0%	0,0%	5	674.856.595	56%	27%	DPKP
14.1	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Output : terbangunannya Sarana dan Prasarana Pemakaman	Unit	12	1.815.099.400	-	-	-	-	0%	0%	5	674.856.595	42%	37%	DPKP
14.2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Output : terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemakaman	Unit	4	646.518.750	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPKP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,0%	0,0%					
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah					
15	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Pelayanan Publik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPKP
15.1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPKP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,0%	0,0%					
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah					
16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan	Persentase Pelayanan Publik dan tingkat kepuasan	%	100	9.863.132.100	100	3.351.995.814	99,05	3.320.315.788	99,1%	99,1%	102	4.071.794.988	102%	41%	DPKP

	dan Pemanfaatan Tanah	masyarakat terhadap pelayanan														
16.2	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah	Lokasi yang dibebaskan	Lokasi	10	9.863.132.100	4	3.351.995.814	1	3.331.461.788	25%	99%	4	4.082.940.988	40%	41%	DPKP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										25,0%	99,4%					
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM (BELANJA LANGSUNG)							11.418.463.433		9.199.291.740							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										82,9%	92,8%					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Tinggi	Sangat Tinggi					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																
Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya *) :																
Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Berikutnya *) :																

NO	URUSAN/ BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2020) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI S/D SEMESTER II 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II 2019 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D S/D SEMESTER II 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II 2019 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(4)	(5)		6		8		(13) = 9+10+11+12		(14) = 13 / 8 * 100		(15) = 7 + 13		(16) = 15 / 6 * 100		(17)
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URAIAN	SATUAN													
1	Gaji dan Tunjangan															

1.1	Gaji dan Tunjangan		OK	255	16.289.360.990	53	4.002.367.874	53	3.707.070.080	100	92,62	418	13.742.166.325	164	84,36	Satpol PP & Damkar
Rata-rata capaian kinerja (%)										100	93			164	84	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
	Perumahan Rakyat dan Pemukiman															
2	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	WMK	7	861.462.400	100	389.795.850	0	379.846.550	100	97,45	7	858.913.100	100	99,70	Satpol PP & Damkar
2.1	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah Petugas Damkar bertanggung jawab dalam tugas	OK	450	300.000.000	150	364.130.000	150	358.050.000	100	98,33	150	358.050.000	33	119,35	
	Kegiatan Kerjasama antar Wilayah dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Naskah Kerjasama dengan Daerah tetangga dalam Penanganan Bahaya Kebakaran	Dokumen	3	35.000.000	1	4.965.000	1	4.914.500	100	98,98	1	4.914.500	33	14,04	Satpol PP & Damkar
	Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran														
		Pembangunan Parkir Pemadam (Lanjutan)	Unit	6	526.462.400	6	20.700.850	6	16.882.050	100	81,55	12	495.948.600	200	94,20	Satpol PP & Damkar

Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	92,96			88,89	75,87	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat															
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	Persen	100	258.272.000	100	129.950.000	100	129.160.000	100	99,39	200	168.575.000	200	65,27	Satpol PP & Damkar
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tekhnis pencegahan kejahatan	Jumlah kegiatan Razia/penertiban: PNS, anak sekolah, tempat hiburan & demonstrasi	Kali	143	108.272.000	30	9.210.000	30	8.770.000	50	95,22	76	48.185.000	53	44,50	Satpol PP & Damkar
	Kegiatan Penjagaan dan Pengamanan Asset-Asset Daerah	Jumlah Petugas Jaga	OK	100	150.000.000	100	120.740.000	100	120.390.000	100	99,71	100	120.390.000	100	80,26	
Rata-rata capaian kinerja (%)										75,00	97,47			76,57	62,38	
Predikat Kinerja										sedang	Sangat Tinggi			sedang	sedang	
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah satuan Keamanan Lingkungan yang terdapat di masyarakat	Persen	100	144.000.000	100	540.528.000	200	415.439.000	100	76,86	200	415.439.000	200	288,50	Satpol PP & Damkar

	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat	Jumlah Satlinmas yang dilantik di Kecamatan, Kel/desa	OK	1170	144.000.000	935	540.528.000	1870	415.439.000	100	76,86	1870	415.439.000	160	288,50	Satpol PP & Damkar
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	76,86			159,83	288,50	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat															
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase Perda yang ditegakkan	Persen	100	96.000.000	100	19.615.000	183	19.365.000	183	98,73	269	103.169.500	269	107,47	Satpol PP & Damkar
	Penegakan Perda	Jumlah penegakan Perda dan penyuluhan di masyarakat	Kali	48	96.000.000	6	19.615.000	18	19.365.000	300	98,73	59	103.169.500	123	107,47	Satpol PP & Damkar
Rata-rata capaian kinerja (%)										300,00	98,73			122,92	107,47	
Predikat Kinerja										sangat Tinggi	sangat Tinggi			sangat Tinggi	sangat Tinggi	
	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi	Persen	100	6.989.698.818	100	1.614.705.300	100	1.560.244.626	100	96,63	100	7.089.209.720	100	101,42	Satpol PP & Damkar

	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar yang terkirim	Surat	3210	4.936.407.318	650	1.320.288.500	640	1.311.896.500	98	99,36	2550	5.261.449.300	79	106,58	Satpol PP & Damkar
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	227	88.016.318	31	9.553.500	31	9.353.500	100	97,91	179	83.521.500	79	94,89	Satpol PP & Damkar
		Jumlah Perangko, Materi dan Benda Pos lainnya	Jenis	12	1.500.000	1	120.000	1	120.000	100	100,00	9	1.320.000	75	88,00	Satpol PP & Damkar
		Jumlah Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Kali	36	12.000.000	6	2.400.000	6	2.400.000	100	100,00	30	12.000.000	83	100,00	Satpol PP & Damkar
		Jumlah Jasa Dokumentasi	Jenis	18	6.025.000	3	585.000	3	375.000	100	64,10	15	4.600.000	83	76,35	Satpol PP & Damkar
		Biaya Jasa Pihak Ketiga	OK	1037	4.719.000.000	200	1.245.000.000	200	1.240.750.000	100	99,66	2139	5.009.500.000	206	106,16	Satpol PP & Damkar
		Jumlah Cetakan Kantor	Jenis	30	23.999.000	3	1.400.000	3	1.400.000	100	100,00	36	17.606.300	120	73,36	Satpol PP & Damkar
		Jumlah Penggandaan	Jenis	18	25.375.000	3	2.210.000	3	2.210.000	100	100,00	16	28.204.500	89	111,15	Satpol PP & Damkar
		Jumlah makanan dan minuman harian pegawai	OK	#####	60.492.000	#####	59.020.000	#####	55.288.000	94	93,68	100534	104.697.000	133	173,08	Satpol PP & Damkar
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Jenis	18	445.290.000	3	82.200.000	3	50.774.311	100	61,77	15	216.435.375	83	48,61	Satpol PP & Damkar
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perisinan kendaraan dinas/operasional	Unit	97	140.000.000	22	38.300.000	22	24.128.365	100	63,00	76	107.313.995	78	76,65	Satpol PP & Damkar

	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kantor	Jenis	36	143.700.000	6	19.900.000	6	19.640.000	100	98,69	30	125.054.000	83	87,02	Satpol PP & Damkar
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	30	13.000.000	3	676.000	3	676.000	100	100,00	31	5.969.500	103	45,92	Satpol PP & Damkar
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Jenis	61	28.055.000	11	1.703.000	11	1.703.000	100	100,00	66	31.428.840	108	112,03	Satpol PP & Damkar
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	OK	222	667.754.000	94	103.012.000	94	102.961.450	100	99,95	459	807.574.310	207	120,94	Satpol PP & Damkar
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah	OK	8306	581.576.500	194	47.165.000	194	47.005.000	100	99,66	2799	513.499.900	34	88,29	Satpol PP & Damkar
		Jumlah makanan dan minuman rapat	OK	3072	24.096.000	100	880.000	100	880.000	100	100,00	1481	13.851.000	48	57,48	Satpol PP & Damkar
		Jumlah makanan dan minuman tamu	OK	1104	9.820.000	66	580.800	66	580.000	100	99,86	539	6.633.500	49	67,55	Satpol PP & Damkar
Rata-rata capaian kinerja (%)										99,63	92,84			97,79	89,85	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana perkantoran yang terpenuhi	Persen	100	1.144.074.046	100	404.039.912	100	401.938.714	100	99,48	200	1.567.808.176	200	137,04	Satpol PP & Damkar

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Unit	105	1.009.374.046	24	388.204.400	24	386.128.202	100	99,47	98	1.485.636.664	93	147,18	Satpol PP & Damkar
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jenis	10	10.000.000	2	4.050.000	2	4.025.000	100	99,38	13	12.825.000	130	128,25	Satpol PP & Damkar
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	11	124.700.000	6	11.785.512	6	11.785.512	100	100,00	10	69.346.512	91	55,61	Satpol PP & Damkar
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	99,62			104,75	110,35	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	Persen	100	484.780.400	100	70.000.000	100	67.100.000	100	95,86	100	67.100.000	100	13,84	Satpol PP & Damkar
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian kerja lapangan	Jenis	15	484.780.400	1	70.000.000	1	67.100.000	100	95,86	1	67.100.000	7	13,84	Satpol PP & Damkar
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	95,86			100,00	13,84	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumber daya aparatur	Persen	100	578.723.792	100	62.590.750	60	53.122.350	60	84,87	80	295.414.938	80	51,05	Satpol PP & Damkar

	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah personil Satpol PP mengikuti Diklat	orang	112	537.250.000	5	10.300.000	1	10.261.850	20	99,63	14	214.872.038	13	39,99	Satpol PP & Damkar
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	6	41.473.792	5	52.290.750	5	42.860.500	100	81,97	9	80.542.900	150	194,20	Satpol PP & Damkar
Rata-rata capaian kinerja (%)										60,00	90,80			81,25	117,10	
Predikat Kinerja										Tinggi	tinggi			tinggi	sangat Tinggi	
J U M L A H							7.233.592.686		6.733.286.320							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Kerjasama seluruh aparat Satpol. PP dan Pemadam Kebakaran serta Pejabat -Pejabat Struktural dan Instansi lainnya																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Biaya Operasional yang belum memadai, Ada Kegiatan yang berdasarkan permintaan dari Pusat/Provinsi																
Tindak Lanjut yang diperlukan berikutnya :																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang dievaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renja PD s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulaan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2020 (%)		Unit PD Penangg ung jawab
1	4	5		6		8		13=9+10+11+12		14=13/8x100		15= 7+13		16=15/6x100 %		17
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
	Bidang Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.															

A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			14	1.542.730.615,00	14	1.655.351.160,00	6	708.108.382,00	42,85714	42,77692849	39,00	2.824.304.658,00	0,5	183	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan			14	1.383.347.435,00	14	1.237.842.060,00	6	548.725.202,00	42,85714	44,32917734	34	2.664.921.478,00	0,5	193	
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				159.383.180,00	12	417.509.100,00	5	159.383.180,00	41,66667	38,1747799	5	159.383.180,00		100	
	BELANJA LANGSUNG				3.108.610.585,00	70	612.455.066,00	61	332.124.444,00	87,14286	54,2283773	61,00	2.620.303.369,00	3,46	84,29	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	persen	100	1.037.213.454,00	100 Perse n	160.096.263,00	41	154.907.044,00	#VALU E!	96,75868824	235,43	778.126.572,00	235	75,02	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jasa surat menyurat yang tersedia meliputi	Surat	1389	226.062.696	210 Surat	34.982.200	200 Surat	34.982.200,00	#VALU E!	100	#VALU E!	177.743.493,00	#####	78,63	
	Penyediaan Jasa Komunikaasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah jenis pembayara n jasa Komunikasi ,Sumber daya air,listrik	jenis	3	51.282.840	3	16.200.000	3	12.987.032,00	100	80,1668642	9,00	35.792.506,00	300	69,79	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa perizinan kedaraan Dinas/Oper asional	unit	4	16.789.025	5	3.400.000	1	1.423.749,00	20	41,87497059	11,00	9.717.984,00	275	57,88	
	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	org		-	0	-	0	-	0	0	-	-		-	

	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jasa perbaikan peralatan kerja	unit	4	8.028.207	2	2.924.000	1	2.924.000,00	50	100	102,00	8.954.000,00	2550	112	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Penyediaan Instalasi Listrik//penerangan Bangunan kantor	jenis	11	5.663.702	5	1.655.283	5	1.655.283,00	100	1.655.283	16,00	6.865.483,00	145	121	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis		-	0	-	0	-	0		-	-		-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	jenis	12	8.551.721	11	6.458.280	11	6.458.280,00	100	100	34,00	14.875.405,00	283	174	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	jenis	3	19.047.912	0	-	0	-			-	3.120.000,00		16	
	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar daerah	kali	307	603.037.358	48	78.944.000	20	78.944.000,00	41,66667	100	188,00	457.200.201,00	0,40	76	
	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	kali	367	98.749.993	102	15.532.500	102	15.532.500,00	100	100	334,00	63.857.500,00	0,42	65	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN...)									154.907.044,00		-		778.126.572,00		75,02	
PREDIKAT KINERJA DARI PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN									154.907.044,00		-		778.126.572,00		75,02	

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur	Persen	100	211.813.453	100	21.129.703	5	15.486.915,00	5	73,29452288	105,00	175.376.512,00	0,42	83	0
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			-	0	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	jenis		144.962.244	0	-	0	-	0	0	11,00	92.720.700,00	-	64	
	Pengadaan Meubeler	Terlaksananya Pengadaan Meubeler	jenis			0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	unit	1	11.905.312	1	2.855.083	0	2.855.083,00		2.855.083,00	2,00	16.314.203,00		137	
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas /Operasional	unit	8	54.945.900	5	18.274.620	5	18.274.620,00	100	100	98	71.984.397,00	0,42	131	
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jenis		-	0	-	0	-				-			

	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	jenis		-	0	-	0	-				-			
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	-	unit		-	0	-	0	-		-		-		-	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeler	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeler			-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Pakaian dinas	-	orang		-	0	-	0	-		-		-		-	
	Program pelayanan Publik	Cakupan peningkatan pelayanan Publik			-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR...)												5	39.797.530,00			
PREDIKAT KINERJA DARI PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR										15.486.915,00		5			-	
III	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia	Persen	100	58.847.059	3	63.799.000	7	61.149.000	233,3333	95,84632988		144.819.200,00		-	
	Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah yang mengikuti kegiatan pelatihan formal	org	5	58.847.059	8	63.799.000	7	61.149.000	87,5	95,84632988		144.819.200,00	0	-	
	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	org		-	0	-	0	-	0	0	0	-			

	Bimbingan Tekhnis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi peraturan perundang-undangan	org		-	0	-		-				-			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR												0		0		
PREDIKAT KINERJA DARI PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR												0		0		
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	dokumen	45	15.242.604	0	-	0	-				-			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Terselesaikannya penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	5	3.051.940	0	-	0	-				-		0	
	Penyusunan laporan semesteran	Laporan Keuangan semesteran terselesaikan tepat waktu	dokumen	0	-	0	-		-				-			
	Penyusunan laporan akhir tahun	laporan Keuangan akhir tahun terselesaikan tepat waktu	dokumen	0	-	0	-		-				-			

	Penyusunan RKA/DPA	RKA dan DPA terselesaikan dengan tepat waktu	dokumen	20	12.190.664	0	-	0	-				-		0	
	Penyusunan Renja SKPD	Terlaksananya penyusunan Renja SKPD dengan tepat waktu	dokumen	0	-	0	-		-				-		0	
	Pengelolaan Data Base On line	-		0	-	0	-		-				-			
	Monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	dokumen		-	0	-		-				-			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN												-		-		
PREDIKAT KINERJA DARI PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN												-		-		
									-				-			
V	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketersediaan Informasi yang cukup tentang situasi dan kondisi ipoleksosbud hamkan	bln		2.200.098.607	0	208.658.000	25	208.658.000,00	#DIV/0!	100	37	954.203.050,00	0,26	43	
	Penguatan Jaringan Kominda	Pemantauan situasi dan kondisi IPOLEKSOS BUDHAMKAN	bln	60	1.513.833.895	0	-	0	-	0	0	36	540.000.000,00	0,20	36	
	Fasilitasi Forum pengkajian masalah strategis daerah(FOKMAS)	Melaksanakan kegiatan pengkajian masalah strategis daerah	bln	60	460.595.008	7	199.002.000	7	199.002.000,00	100	100	14	876.904.250,00	0,25	190	
	Pemaantauan orang asing dan lembaga / LSM sing	Terlaksananya	bln	45	133.518.537	12	9.656.000	5	9.656.000,00	41,66667	100	44	62.203.000,0	0,33	47	

		pemantau n kegiatan orang asing dan lembaga/LS M Asing											0			
	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Melaksanak an Pelatihan Linmas	Orang	100	15.095.800	0	-		-				15.095.800,0 0			
	Rapat Koordinasi Polkam Tingkat Kabupaten	Jumlah Rapat Koordinasi Polkam Tingkat Kabupaten	kali	0	77.065.569	0	-		-				-			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN										0,26			-		0	
PREDIKAT KINERJA DARI PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN										0,26	Sangat rendah					
									-				-			
VI	Program Pengembangan wasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan peningkat an persatuan dan kesatuan bangsa	keg	48	168.342.027	8	18.156.000	1	14.725.000,0 0	12,5	81,10266 579	15	93.017.000,0 0	0,21	55	
	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Forum kerukunan ummat beragama yang dilksanaka n	kali	24	129.513.591	4	14.956.000	1	13.900.000,0 0	25	92,93928 858	9	80.662.000,0 0	0,22	62	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Forum pembauran kebangsaan yang dilaksanaka n	kali	24	38.828.436	4	3.200.000	0	825.000,00	0	25,78125	0	12.355.000,0 0	0,18	32	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN													93.017.000,0 0		#DIV/ 0!	
PREDIKAT KINERJA DARI PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN																

VII	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	kali	12	125.757.124	100	-	0	-	0	#DIV/0!	0	89.625.800,00	0%	71	
	Penguatan Konsensus berbangsa dan bernegara	Jumlah peserta penguatan konsensus nasional berbangsa dan bernegara	org	500	30.158.557	100	-	0	-	0	#DIV/0!		17.412.700,00		58	
	Pelaksanaan Forum Komunikasi , Sosialisasi dan dialog Wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan forum Komunikasi Sosialisasi dan dialog Wawasan kebangsaan	org	500	72.213.100	100	-	0	-	0	#DIV/0!		72.213.100,00	0%	100	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN											-		-			
PREDIKAT KINERJA DARI PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN											-		-			
									-				-			
VIII	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	tim	6	1.048.714.674	1	59.240.200	3	41.915.000,00	300	70,75431886	0	666.354.700,00	0,19	64	
	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat (FKDM)	Jumlah kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	tim	6	120.514.674	3	41.932.500	3	41.915.000,00	100	99,95826626	1	666.354.700,00	0,19	553	

	Orientasi Bela Negara	Jumlah Kegiatan Orientasi Bela Negara	org	500	139.230.000	100 Orang	17.307.700	0	-				17.307.700,00		12	
	Rapat Koordinasi bersama Kominda, FKDM, FKUB dan PFK	Jumlah Rapat Koordinasi bersama Kominda, FKDM, FKUB dan PFK	kali	5	139.230.000	0	-	0	-				-		0	
	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pertemuan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	triwulan	24	232.050.000	0	-	0	-				-		0	
	Bimtek peningkatan kapasitas pencegahan dan resolusi konflik	jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas pencegahan dan resolusi konflik	org	500	139.230.000	0	-	0	-				-		0	
	Pengenalan dasar-dasar intelijen	Jumlah peserta pengenalan dasar-dasar intelijen	org	500	139.230.000	0	-	0	-				-		0	
	Penyuluhan pengawasan Org Asing dan LSM Asing	Jumlah Peserta Penyuluhan pengawasan Org Asing dan LSM Asing	org	500	139.230.000	0	-	0	-				-		0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN										0,19					0	
PREDIKAT KINERJA DARI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN										0,19						
IX	Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	Jumlah kasus kriminalitas	kasus	150	103.003.416	200	-		-	0	-		34.397.900,00		33	

	Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta penyuluhan tentang budaya narkoba dan minuman keras	org	500	82.588.659	100	-	0	-	0	-		34.397.900,00		42	
	Penyuluhan pencegahan tindak pidana perjudian dan prostitusi	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan tindak pidana perjudian dan prostitusi	org	300	20.414.757	100	-	0	-	0	0		-		0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENINGKATAN PEMBERATASAN PENYAKIT MASYARAKAT(PEKAT)										0	-		34.397.900			
PREDIKAT KINERJA DARI PROGRAM PENINGKATAN PEMBERATASAN PENYAKIT MASYARAKAT(PEKAT)										0						
				0	0	0	0	0	-	0	0		-		#DIV/0!	
X	Program pendidikan Politik masyarakat	Meningkatnya jumlah stakeholder yang mengetahui dan paham tentang undang-undang politik	org	135371	339.676.774	64	290.033.900	31	52.573.000,00	48,4375	18	103777	647.217.200,00	0,43	191	
	Pembinaan Ormas, Orpol dan organisasi Profesi	Jumlah kegiatan pembinaan ormas, orpol, LSM dan organisasi profesi	Ormas/ Orpol	4	339.676.774	64	235.921.400	31	3.000.000	48,4375	1,271609951	0	383.295.200,00	0	113	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu (Desk Pemilu/Pilkada dan Rakorda)	Penyelenggaraan Pemilu yang difasilitasi	tim	2	214.349.000	2	54.112.500	0	49.573.000	0	91,61099561	100	263.922.000,00	0,63	123	

	Dialog Pablik peningkatan peran parpol dalam pendidikan politik masyarakat	Jumlah peserta Dialog Pablik peningkata n peran parpol dalam pendidikan politik masyarakat	org	0	-	0	10.610.000	2	10.550.000	0	0		10.550.000,00		0	
	Bimtek Politik Pemuda	Jumlah peserta Bimtek Politik Pemuda	org	400	-	0	-	0	-				-		0	
	Pemantauan dan pengawasan Parpol,Ormas dan LSM	Jumlah Pemantaua n dan pengawasa n Parpol,Orm as dan LSM	bln	60	-	0	-	0	-	0	-		-		0	
	Penyusunan data Base Orkemas	-	bln	60	-	0	-	0	-	0	-		-		0	
0													647.217.200,00		123,13	
PREDIKAT KINERJA DARI PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK																
Rata-rata capaian kinerja (%)												-				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							2.267.806.226,00	0,39	1.040.232.826,00	56,94	46	2	5.184.396.642,00	0,39	754,89	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)										56,94	45,87		5.184.396.642,00		754,89	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)										56,94	Cukup Berhasil					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																

No	Urusan / Bidang	Indikator Kinerja	Target Renstra PD	Target Kinerja	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	Realisasi Kinerja dan	Tingkat Capaian	Unit PD

	Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Pada Tahun 2016 s/d 2021		dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2020)		Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang dievaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2020)		Kinerja dan Realisasi anggaran Renja PD s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2020 (%)		Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulaan II Tahun 2020		Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2020 (%)		Penanggung jawab
(1)	(4)	(5)		(6)		(8)		(13) = 9 + 10 + 11 +12		(14) = 13 / 8 * 100		(15) = 7 + 13		(16) = 15 / 6 * 100		(17)
		URAIAN	SATUA N	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
A																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	%	90	1.211.367.5 38,00	90	252.112.78 1,00	99	249.835.27 3,00	110, 11	99,10	199	494.797.620 ,00	100,00	40,85	Sekretariat
	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat yang dikelola selama satu tahun	surat	3.41 6	21.139.200,0 0	65 0	63.993.400, 00	65 0	63.983.009, 00	100, 00	99,98	1350	137.722.009, 00	39,52	651,50	Subag. Umum
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening pembayaran, telepon, air dan listrik	rekening	18	109.463.936, 00	2	40.452.000, 00	2	39.131.803, 00	100, 00	96,74	5	45.632.303,0 0	27,78	41,69	Subag. Umum
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al	Kendaraan dinas/operasion al yang dipelihara dan diperpanjang perizinannya	unit	9	44.709.694,0 0	9	8.150.000,0 0	10	7.203.080,0 0	111, 11	88,38	19	12.036.627,0 0	211,11	26,92	Subag. Umum
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga penyedia jasa kebersihan kantor.	Orang	2	58.515.700,0 0	2	16.130.381, 00	2	16.130.381, 00	100, 00	100,00	4	28.202.781,0 0	200,00	48,20	Subag. Umum

	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	OK	483	809.874.008,00	40	98.517.000,00	40	98.517.000,00	100,00	100,00	80	218.623.900,00	16,56	26,99	Subag. Umum
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	OK	2.258	167.665.000,00	256	24.870.000,00	256	24.870.000,00	100,00	100,00	512	52.580.000,00	22,67	31,36	Subag. Umum
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										101,85	97,74			88,24	123,93	
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			tinggi	sangat tinggi	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuh	%	80	409.769.740,00	80	76.154.400,00	91	18.905.080,00	113,75	24,82	161,001	104.021.580,00	201,25	25,39	Sekretariat
	<i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor.	unit	32	244.706.190,00	2	1.392.000,00	2	1.392.000,00	100,00	100,00	9	53.222.300,00	28,13	21,75	Subag. Umum
	<i>Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional</i>	Jumlah Mobil/Kendaraan Operasional dalam kondisi layak.	unit	24	112.811.550,00	4	61.570.000,00	12	61.570.000,00	300,00	100,00	16	85.545.200,00	66,67	75,83	Subag. Umum
	<i>Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor</i>	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi layak.	jenis	3	15.932.000,00	3	2.240.000,00	3	2.240.000,00	100,00	100,00	6	5.026.000,00	200,00	31,55	Subag. Umum
	<i>Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor</i>	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi layak.	unit	72	36.320.000,00	20	10.952.400,00	20	10.952.400,00	100,00	100,00	40	17.477.400,00	55,56	48,12	Subag. Umum
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										150,00	100,00			87,59	44,31	
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			tinggi	sangat rendah	

										tinggi						
0	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan sub urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	%	95	54.955.000,00	100	62.358.000,00	90	43.016.750,00	90,00	68,98	190	73.051.450,00	200,00	132,93	Sekretariat
	Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur yang mengikuti diklat formal	orang	28	38.817.666,00	4	5.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Subag. Umum
	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Aparat mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	orang	36	54.955.000,00	4	3.000.000,00	2	3.000.000,00	50,00	100,00	2	3.000.000,00	5,56	5,46	Subag. Umum
	Bimbingan Teknis	Aparat mengikuti Bimbingan Teknis.	orang	36	54.955.000,00	4	54.358.000,00	4	43.016.750,00	100,00	79,14	12	73.051.450,00	33,33	132,93	Subag. Umum
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										60,00	62,03			59,72	67,83	
PREDIKAT KINERJA										rendah	rendah			rendah	sedang	
2	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAA N BENCANA	Jumlah lokasi penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah	Desa	12	1.398.838.762,00	2	143.566.000,00	2,00	130.163.000,00	100,00	90,66	4	352.361.600,00	100,00	25,19	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.	Jenis media informasi pelaksanaan penanganan bencana di Kabupaten Barru.	jenis	8	157.551.400	2	23185000,00	2	22.205.000,00	100,00	95,77	4	82.812.500,00	50,00	52,56	Seksi kesiapsiagaan
	Pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Peserta yang mengikuti Simulasi/Gladii Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	orang	200	98.311.600,00	60	23.022.000,00	60	20.554.000,00	100,00	89,28	120	58.919.500,00	60,00	59,93	Seksi Pencegahan

	Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat melalui Desa Tangguh Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Desa Tangguh Bencana	orang	500	604.773.162,00	100	59.959.000,00	100	50.004.000,00	100,00	83,40	200	173.229.600,00	40,00	28,64	Seksi kesiapsiagaan
	Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	Jumlah Peserta Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana tingkat Desa.	orang	110	604.773.162,00	40	37.400.000,00	40	37.400.000,00	100,00	100,00	40	37.400.000,00	36,36	6,18	Seksi kesiapsiagaan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	92,11			46,59	36,83	
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			sangat rendah	sangat rendah	
3	PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	Persentase Kegiatan Penanganan Darurat pada Wilayah Rawan Bencana.	%	100	1.371.213.776	100	248.594.000	74	182.837.100	73,55	73,55	173,548	462.457.976,00	173,55	33,73	Bidang kedaruratan dan logistik
	Operasional Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS) BPBD Kab.Barru	Jumlah Sarana dan Prasarana yang memadai dan dapat digunakan dalam penanganan darurat bencana.	unit crisis centre	1	468.719.800	1	88.231.000	1	88.196.600,00	100,00	99,96	2	189.961.300,00	200,00	40,53	Seksi kedaruratan
	Penyelamatan Korban di Lokasi Bencana	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per-100.000 Orang	orang	4	76.306.066	0	12.765.000	-	12.453.000,00	100,00	97,56	3	20.023.000,00	75,00	26,24	Seksi kedaruratan
	Rehabilitasi jalan dalam kondisi darurat	Jumlah Kecamatan dilaksanakan perbaikan darurat jalan dan biaya operasional perbaikan dampak darurat	KEC.	7	63.552.160	7	12.379.000	5	10.206.250,00	71,43	82,45	5	10.206.250,00	71,43	16,06	Seksi kedaruratan

		bencana.														
	Rehabilitasi Jembatan dalam kondisi darurat	Jumlah Kecamatan dilaksanakan perbaikan darurat Jembatan dan biaya operasional perbaikan darurat dampak bencana.	KEC.	7	118.707.550	7	27.980.000	2	3.076.000,00	28,57	10,99	3	5.185.900,00	42,86	4,37	Seksi kedaruratan
	Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk dari Ancaman Korban Bencana.	Jumlah paket pengadaan lokasi penampungan sementara disertai rambu dan Peta Jalur Evakuasi di daerah rawan bencana.	unit	54	329.258.750	10	49.920.000	2	16.635.250,00	20,00	33,32	9	72.443.250,00	16,67	22,00	Seksi kedaruratan
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana	Jumlah Alat Pelindung Diri Rescuer, Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana.	jenis	10	148.941.000	4	37.140.000	4	36.995.000,00	100,00	99,61	14	104.756.676,00	140,00	70,33	Seksi logistik
	Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara.	Jumlah paket penyediaan Kebutuhan Dasar dan Logistik bagi korban bencana.	paket/KK	688	165.728.450	150	20.179.000,00	134	15.275.000,00	89,33	75,70	254	59.881.600,00	36,92	36,13	Seksi logistik
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										72,76	71,37			83,27	30,81	
PREDIKAT KINERJA										sedang	sedang			tinggi	sangat rendah	

3	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA.	Jumlah Kecamatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Wilayah Rawan Bencana.	Kec.	6	4.151.892.660	6	196.567.500	6	87.655.800	100,00	44,59	11	1.332.241.366,00	100,00	32,09	Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi
	Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana/Rencana Aksi Daerah (RAD)	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana.	Dokumen	4	79.565.000	1	22.397.500	1	14.980.000,00	100,00	66,88	2	18.128.000,00	50,00	22,78	Seksi Rekonstruksi
	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam.	Jumlah unit perbaikan sarana dan prasarana perumahan akibat bencana alam.	Unit	176	479.700.960	30	62.200.000	39	33.716.000,00	130,00	54,21	194	1.228.923.766,00	110,23	256	Seksi Rekonstruksi
	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana non alam.	Jumlah unit perbaikan sarana dan prasarana perumahan akibat bencana non alam.	Unit	115	288.499.600	30	55.810.000	11	30.379.800,00	36,67	54,43	31	76.609.600,00	26,96	26,55	Seksi Rekonstruksi
	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial.	Jumlah unit perbaikan sarana dan prasarana perumahan akibat bencana sosial.	Unit	40	41.380.000	10	16.360.000	-	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Seksi Rekonstruksi
	Pendampingan Pemulihan Kondisi Kesehatan dan Psikologis Pasca Bencana.	Jumlah jiwa yang memperoleh Pemulihan Kesehatan dan Psikologis Pasca Bencana.	jiwa	150	59.280.000	50	12.140.000	-	8.580.000,00	0,00	70,68	0	8.580.000,00	0,00	14,47	Seksi Rekonstruksi

	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Umum	Jumlah unit pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Fasilitas Umum.	unit	21	117.620.000	5	27.660.000	-	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Seksi Rekonstruksi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											44,44	41,03			31,20	53,33
PREDIKAT KINERJA											sangat rendah	sangat rendah			sangat rendah	rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									0,00					0,00		
											97,90	66,95			145,80	48,36
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)											sangat tinggi	sedang			sangat tinggi	sangat rendah
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : KONSISTENSI PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA DENGAN RKPD, DAN RENSTRA DENGAN RPJMD																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : KETIDAKAKURATAN DALAM MENENTUKAN TARGET KINERJA DAN ANGGARAN BAIK DALAM PERENCANAAN JANGKA MENENGAH MAUPUN TAHUNAN																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang dievaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renja PD s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung jawab
1	4	5	6	8	13 = 9 + 10+11+12	(14) = 13 / 8 * 100	(15) = 7 + 13	(16) = 15 / 6 * 100	17							
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
	Bidang Urusan Penanaman Modal															

2	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	%	100	1.276.711.357	100	256.648.280	44,68	253.846.659	44,68	98,91	100,00	1.066.630.975	100,00	83,55	DPMP TSP TK
2.1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama satu tahun	Eks	2.795	288.175.100	510	37.349.500	510	37.349.500	100,00	100,00	2.644	220.523.000	94,60	76,52	DPMP TSP TK
2.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Rek.	24	81.797.915	3	2.500.000	-	-	0,00	0,00	8	25.821.465	33,33	31,57	DPMP TSP TK
2.3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	81	57.222.000	8	2.630.000	8	2.630.000	100,00	100,00	51	43.552.000	62,96	76,11	DPMP TSP TK
2.4	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor	Jenis	253	52.027.755	11	16.096.780	11	16.093.580	100,00	99,98	133	40.705.335	52,57	78,24	DPMP TSP TK
2.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	2	1.860.000	0	-	-	-	0,00	0,00	2	1.860.000	100,00	100,00	DPMP TSP TK
2.6	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas keluar daerah	OK	158	605.178.587	36	169.028.000	36	168.897.579	100,00	99,92	233	597.292.675	147,47	98,70	DPMP TSP TK
2.7	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	OK	571	190.450.000	128	29.044.000	128	28.876.000	100,00	99,42	246	136.876.500	43,08	71,87	DPMP TSP TK
Rata-rata capaian kinerja (%)										83,33	83,22			76,29	76,14	
Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi			Tinggi	Tinggi	

3	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	%	100	1.627.624.533	100 %	71.253.680	100,00	68.081.100	83,33	81,68	100,00	1.020.269.585	100,00	62,68	DPMPTSP TK
3.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	434	569.628.000	2	17.570.000	2	16.889.200	100,00	96,13	17	446.585.300	3,92	78,40	DPMPTSP TK
3.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Unit	57	186.354.000	0	-	-	-	0,00	0,00	34	111.715.700	59,65	59,95	DPMPTSP TK
3.3	Pengadaan meubeleur	Jumlah Meubeleur Kantor	Unit	25	66.625.000	0	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DPMPTSP TK
3.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	8	389.964.098	0	-	-	-	0,00	0,00	2	214.023.000	25,00	54,88	DPMPTSP TK
3.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	58	314.103.435	8	41.333.680	8	38.841.900	100,00	93,97	31	193.165.585	53,45	61,50	DPMPTSP TK
3.6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	103	43.200.000	2	1.500.000	2	1.500.000	100,00	100,00	72	26.880.000	69,90	62,22	DPMPTSP TK
3.7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Unit	76	37.050.000	20	10.050.000	20	10.050.000	100,00	100,00	53	25.600.000	69,74	69,10	DPMPTSP TK
3.8	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	33	8.700.000	8	800.000	8	800.000	100,00	100,00	23	2.300.000	69,70	26,44	DPMPTSP TK
3.9	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah rehab sedang/berat Kendaraan Operasional	Unit	1	12.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPMPTSP TK
Rata-rata capaian kinerja (%)										83,33	81,68			39,04	45,83	

Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	%	90	273.401.000	18,5 %	33.726.550	14,29	33.726.550	100,00	100,00	45,00	90.880.550	50,00	33,24	DPMPPTSP TK
5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	Org	20	196.000.000	5	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DPMPPTSP TK
5.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Org	14	77.401.000	2	33.726.550	3	33.726.550	150,00	100,00	13	90.880.550	92,86	117,42	DPMPPTSP TK
Rata-rata capaian kinerja (%)										150,00	100,00			92,86	117,42	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	%	100	16.461.700	14	-	100	-	100,00	-	46,00	12.599.200,00	60,00	76,54	DPMPPTSP TK
6.1	Penyusunan Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip	dok	6	1.820.000	1	-	1	-	100,00	0,00	5	1.820.000	83,33	100,00	DPMPPTSP TK

6.2	Penyusunan laporan semesteran	Dokumen Laporan Semesteran	dok	12	1.496.000	2	-	2	-	100,00	0,00	9	1.496.000	75,00	100,00	DPMPTSP TK
6.3	Penyusunan laporan akhir tahun	Dokumen laporan akhir tahun	dok	6	1.496.000	1	-	1	-	100,00	0,00	4	1.496.000	66,67	100,00	DPMPTSP TK
6.4	Monitoring dan Evaluasi	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi	dok	12	9.833.100	1	-	1	-	100,00	0,00	4	5.970.600	33,33	60,72	DPMPTSP TK
6.5	Penyusunan RKA dan DPA	Dokumen RKA dan DPA	dok	6	1.816.600	1	-	1	-	100,00	0,00	4	1.816.600	66,67	100,00	DPMPTSP TK
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	0,00			65,00	92,14	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
8	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	Persentase Penyelesaian Pedoman Investasi dan system informasi Perizinan Penanaman Modal	%	52,94	1.076.229.496	18%	156.325.000	18%	156.315.000	100,00	99,99	50,18	596.765.000,00	94,78	55,45	DPMPTSP TK
8.1	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah / Kabupaten (RUPMD)	Dok	2	154.831.280	1	82.325.000	1	82.325.000	100,00	100,00	1	82.325.000	50,00	53,17	DPMPTSP TK
8.2	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Jumlah Paket Sistem Informasi dan database	Modul	4	321.888.000	1	74.000.000	1	73.990.000	100,00	99,99	4	514.440.000	100,00	159,82	DPMPTSP TK

8.3	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah prosedur perizinan dan penanaman modal yang diterbitkan / direvisi	Regulasi	12	401.583.800	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
8.4	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah paket pengembangan kebijakan penanaman modal	Regulasi	3	195.516.416	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
8.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Monitoring Evaluasi	Dok	5	2.410.000	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	99,99			75,00	106,50	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Tinggi	
11	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Org	355	1.940.917.003	20	160.005.900	20,00	157.327.750,00	100,00	98,33	168,00	796.639.750,00	47,32	41,04	DPMPPTSP TK
11.1	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Unit	12	120.000.000	10	65.459.900	10	62.784.000	100,00	95,91	10	62.784.000	83,33	52,32	DPMPPTSP TK
11.2	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah tenaga kepelatihan dan instruktur BLK yang terlatih	Org	6	200.000.000	0	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DPMPPTSP TK

11.3	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja	Org	451	1.618.424.503	20	94.546.000	20	94.543.750	100,00	100,00	248	733.855.750	54,99	45,34	DPMPTSP TK
11.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Monitoring Evaluasi	dok	7	2.492.500	0	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DPMPTSP TK
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	97,95			69,16	48,83	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah	
11.5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Org	100	74.659.205	0	-	-	-	0,00	-	71,00	3.600.000,00	71,00	4,82	DPMPTSP TK
11.6	Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan informasi bursa kerja	Org	100	73.175.205	0	-	-	-	0,00	0,00	71	3.600.000	71,00	4,92	DPMPTSP TK
11.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Monitoring Evaluasi	dok	2	1.484.000	0	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DPMPTSP TK
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00			35,50	2,46	
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
12	Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Jumlah Investor yang mengenal potensi investasi	Investor	49	2.225.569.650	5	41.107.500	5,00	41.107.500,00	100,00	100,00	11,00	1.305.123.753,00	22,45	58,64	DPMPTSP TK

12.1	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Kemitraan UKM dengan perusahaan PMDN/PMA	Kemitraan	8	70.000.000	0	-	-	0	0	0	0	-	0,00	0,00	DPMPTSP TK
12.2	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah buku potensi unggulan Penanaman Modal	Buku	800	66.320.000	400	32.340.000	400	32.340.000	100	100,00	600	48.920.000	75,00	73,76	DPMPTSP TK
12.3	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Jumlah kegiatan Koordinasi antar Lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	OK	28	292.813.489	0	-	-	-	0	0,00	31	312.596.107	110,71	106,76	DPMPTSP TK
12.4	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pengawasan / Pengendalian (LKPM) yang terselesaikan	Lap.	186	84.215.000	35	8.767.500	61	8.767.500	174,29	100,00	167	42.912.500	89,78	50,96	DPMPTSP TK
12.6	Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas bagi aparatur Perizinan dan Penanaman Modal	Org	205	209.465.500	0	-	-	-	0	0,00	65	57.680.500	31,71	27,54	DPMPTSP TK
12.6	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Promosi / pameran Investasi yang diikuti	Pameran	37	1.412.268.161	0	-	-	-	0	0,00	9	843.014.646	24,32	59,69	DPMPTSP TK
12.6		Bahan informasi potensi Penanaman Modal dalam bentuk elektronik	Jenis	13	87.417.500	-	-	-	-	0	0,00	0	-	0,00	0,00	DPMPTSP TK

12.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Monitoring Evaluasi	Dok	11	3.070.000	-	-	-	-	0	0,00	0	-	0,00	0,00	DPMPPTSP TK
Rata-rata capaian kinerja (%)										137,14	100,00			41,44	39,84	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
13	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Jumlah pemanfaatan Migas dan Energi secara efektif dan efisien	Lokasi	6	116.562.600	-	-	-	-	0,00	0,00	2,00	60.845.000,00	33,33	52,20	DPMPPTSP TK
13.	Penelitian dan Pengembangan Potensi Panas Bumi dan Energi	Jumlah Wilayah penelitian dan pengembangan potensi panas bumi dan Energi	Lokasi	6	116.562.600	-	-	0	0	0	0	2	60.845.000	33,33	52,20	DPMPPTSP TK
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Monitoring Evaluasi	Dok	3	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0			16,67	26,10	
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
15	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja	%	100	106.808.350	100	-	-	-	0,00	0,00	27,59	35.430.000,00	27,59	33,17	DPMPPTSP TK

15.1	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah peserta penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sosialisasi	org	160	30.675.000	0	-	-	-	0	0,00	80	14.375.000	50,00	46,86	DPMPTSP TK
15.2	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Sosialisasi /Penyuluhan Peraturan Ketenaga Kerjaan	org	40	10.630.600	-	-	-	-	0	0,00	0	-	0,00	0,00	DPMPTSP TK
15.3	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	org	200	63.502.750	0	-	-	-	0	0,00	80	21.055.000	40,00	33,16	DPMPTSP TK
15.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Monitoring Evaluasi	dok	4	2.000.000	-	-	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	DPMPTSP TK
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00			22,50	20,00	
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16	Program Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan	%	100	2.028.495.050	82,5	404.594.000	82,50	396.354.000	82,50	97,96	82,50	1.587.387.000	82,50	78,25	DPMPTSP TK

16.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah izin yang dilayani	Izin	18.036	1.490.767.750	2.975	286.884.000	2.975	278.684.000	100,00	97,14	20.204	1.239.736.500	112,02	83,16	DPMPTSP TK
16.2		Jumlah Kunjungan Survei Tim Teknis Ke Lapangan	OK	4.840	535.317.300	1.500	117.710.000	1.500	117.670.000	100,00	99,97	3.011	347.650.500	62,21	64,94	DPMPTSP TK
16.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Monitoring Evaluasi	Dok	2	2.410.000	0	-	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	DPMPTSP TK
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	98,55			53,36	72,48	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sedang	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							1.123.660.910		1.106.758.559							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 8)										106,73	94,49			53,35	58,89	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 8)										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Barang yang sudah tidak tersedia di pasaran, Harga Barang lebih tinggi dari anggaran																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penganggaran berdasarkan SSH / e-katalog																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : pengadaan barang tidak menjelaskan detail spesifik barang , hanya spesifikasi umum																

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2020) YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2020)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2020 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2020	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2020 (%)	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

1	3	4		5		7		12 = 8+9		13 = 12/7 x 100		14= 6+12		(15) = 13 / 5 * 100		16
		URAIAN	SATUAN	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG															
1.	Belanja Gaji dan tunjangan	Belanja Gaji dan Tunjangan	Bulan	60	12.574.721.040	12	2.514.944.208	12	2.891.751.727	114,98	114,98	36	4.938.546.961	60,00	39,27	SEKRETARIAT
										114,98	114,98					
										SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI					
							2.514.944.208		2.891.751.727							
	BELANJA LANGSUNG															
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
	SOSIAL															
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2.	Program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	persen	100	836.689.715	100	12.490.000		12.430.000	-	99,52		576.912.400	68,95	68,95	BIDANG PMD
2.1	Percepatan implementasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PIK-PAKET)	jumlah binaan kelompok Masyarakat penerima	Kelompok	59	836.689.715	59	12.490.000	-	12.430.000	-	99,52	-	576.912.400	68,95	68,95	BIDANG PMD

		bantuan PIK-Paket														
		jumlah kelompok yang difasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan	Kelompok	28												
										-	99,52					
										-	-					
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR															
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
3.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah Kasus KDRT	Kasus	46	174.743.212	8	15.521.000	-	13.609.000	-	87,68		37.371.600	21	21,39	
3.1	Sosialisasi dan Advokasi kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja	Klp	12	111.208.212	2	-	-	-	-	-	-	12.651.600		11,38	BIDANG PP DAN PA
3.2	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah Kegiatan Sosialisasi pencatatan dan pelaporan KDRT	Kegiatan	2	63.535.000	2	15.521.000	2	13.609.000	100,00	87,68	4	24.720.000	200,00	38,91	BIDANG PP DAN PA
										50,00	43,84					
										SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH					

											H					
4.	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pemb.	Jumlah Perempuan yang telah memahami Kesetaraan Gender yang mendapatkan keterampilan	Orang	3720	569.341.600	620	-	-	-	-	-	620	343.971.900	60,42	60,42	
4.1	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibentuk	orang	10	383.783.450	10	-	-	-	-	-	10	224.229.400	100	58,43	BIDANG PP DAN PA
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah Pelatihan Kesetaraan Gender	Kegiatan	12	185.558.150	2	-	-	-	-	-	2	119.742.500	16,67	64,53	BIDANG PP DAN PA
											-	-				
5.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Jumlah Anak yang terlibat dalam forum anak dan berprestasi	Orang	4	324.470.097	4	24.218.000	1	19.121.250	25	78,95	5	230.269.350	70,97	70,97	
5.1	Pengembangan kelembagaan Anak	Jumlah Kegiatan Hari Anak Nasional dan kreatifitas forum anak	Kegiatan	6	324.470.097	6	24.218.000	6	19.121.250	99,17	78,95	12	230.269.350	199,17	70,97	BIDANG PP DAN PA

										99,17	78,95					
										SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI					
6.	Program Peningkatan Kese- rasian Kebijakan dan Perlindungan Anak	Jumlah P2TP2A Aktif yang dibina	Lemba- ga	1	224.460.209	1	-	-	-	-	-	1	91.860.000	40,92	40,92	BIDANG PP DAN PA
6.1	Fasilitasi pengembangan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A)	- Jumlah Kelangka- pan dan Prasaran a P2TP2A mem- enuhi Standar pelayana- n	Jenis	24	224.460.209	4	-	-	-	-	-	4	91.860.000	16,67	40,92	BIDANG PP DAN PA
										-	0					
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR															
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA															
7.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Kebutuh- an Adimistrasi yang terpenuhi	Persen	100	1.373.316.913	100	235.097.100	100	219.880.106	100,00	93,53	100	1.133.543.856	82,54	82,54	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK	Surat	3.750	335.874.770	750	60.646.900	750	58.046.900	100,00	95,71	1.500	287.509.900	40,00	85,60	SEKRETARIAT
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Telpo	Pembaya- ran rekening telepon, air dan listrik	Rekeni- ng	3	141.700.000	3	22.200.000	3	13.759.376	88,33	61,98	6	93.781.376	188,33	66,18	SEKRETARIAT
7.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasio- nal	Unit	11	51.750.000	11	12.650.000	11	8.816.630	100,00	69,70	22	48.566.630	200,00	93,85	SEKRETARIAT

7.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	pembayaran jasa kebersihan kantor	OK	1	42.100.000	1	9.600.000	1	9.600.000	100,00	100,00	2	43.200.000	200,00	102,61	SEKRETARIAT
7.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Unit	14	41.700.000	14	0	-	-	-	-	14	7.700.000	100,00	18,47	SEKRETARIAT
7.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Buah	50	13.990.000	10	1.008.000	10	1.008.000	100,00	100,00	20	14.138.000	40,00	101,06	SEKRETARIAT
7.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Buah	60	8.626.750	12	506.000	12	506.000	100,00	100,00	24	4.132.750	40,00	47,91	SEKRETARIAT
7.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dan Provinsi	Kali	375	641.911.393	25	116.829.000	25	116.531.000	100,00	99,74	100	555.556.000	26,67	86,55	SEKRETARIAT
7.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	Kali	1.250	95.664.000	24	11.657.200	24	11.612.200	100,00	99,61	274	78.959.200	21,92	82,54	SEKRETARIAT
										87,59	80,75					
										TINGGI	TINGGI					
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	Persen	100	465.663.600	100	57.520.000	100	57.515.000	100,00	99,99	100	284.174.000	61,03	61,03	
8.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	1	91.735.000	1	19.500.000	1	19.500.000	100	100,00	2	39.735.000	200,00	43,31	SEKRETARIAT

8.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Unit	24	149.303.600	4	-	-	-	-	-	4	45.799.000	16,67	30,68	SEKRETARIAT
8.3	Pengadaan Mebeulair	Jumlah Mebeuler Kantor	Buah	156	35.550.000	93	-	-	-	-	-	93	25.550.000	59,62	71,87	SEKRETARIAT
8.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Paket	12	68.250.000	2	7.800.000	2	7.800.000	100	100	4	60.050.000	33,33	87,99	SEKRETARIAT
8.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	6	97.100.000	1	29.620.000	1	29.615.000	100	100	2	102.715.000	33,33	105,78	SEKRETARIAT
8.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Kali	24	14.000.000	4	600.000	4	600.000	100	100	8	6.600.000	33,33	47,14	SEKRETARIAT
8.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Jumlah Meubeler yang dipelihara	Buah	258	9.725.000	43	-	-	-	-	-	43	3.725.000	16,67	38,30	SEKRETARIAT
										57,14	57,14					
										RENDAH	RENDAH					
9.	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi Spesifik urusan dan non urusan yang terpenu	Persen	100	174.278.270	100	56.092.750	90	50.331.500	90	89,73		181.972.500	104,41	104,41	

		hi sumber daya aparatur nya														
9.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparat yang mengikuti i Diklat Fungsional dan struktural	Orang	18	97.020.300	3	15.379.000	3	12.440.500	100	81	6	95.317.500	33,33	98,24	SEKRETARIAT
9.4	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pengiriman aparat mengikuti i Bimtek peraturan perundang-undangan	Orang	17	77.257.970	3	40.713.750	3	37.891.000	100	93	6	86.655.000	35,29	112,16	SEKRETARIAT
										100,00	86,98					
										SANGAT TINGGI	TINGGI					
11.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	cakupan desa/ kel yang mengalami peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	persen	100	3.302.765.595	100	186.057.300	100	162.282.100	100	87,22	100	3.035.945.123	91,92	91,92	
11.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat Pedesaan	jumlah desa/ kel yang mendapatkan fasilitasi peningka	desa/ kel	55	1.298.117.604	-	0	-	-	-	-	-	1.087.878.923	-	83,80	BIDANG PMD

		tan kapasita s kelembag aannya														
11. 2	Pembinaan, Pelatihan dan Pelaksanaan HKG dan Rakerda PKK	jumlah desa/kel dan kec yang menda ptan Pembina an; jumlah pelaksan aan HKG	desa/ kel, Kec, Kali	55	1.243.062.0 91	55	165.694.300	55	151.295.80 0	100	91,31	55	1.237.654.8 00	100, 00	99,57	BIDANG PP DAN PA
11. 3	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Dasawisma	jumlah desa/kel yang menda ptan Pembina an pemberd ayaan perempu an dan kelompo k dasawis ma	desa/ kel	55	761.585.900	55	20.363.000	55	10.986.300	100	53,95	55	710.411.40 0	100, 00	93,28	BIDANG PP DAN PA
										66,67	48,42					
										SEDANG	SANGAT RENDA H					
12.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	cakupan desa/ kel yang mendap atkan pembina an kelemba gaan ekonomi	Persen	100	572.461.18 1	100	20.756.000	65 ,0 0	17.363.100	65,00	83,65		442.410.50 0	77,2 8	77,28	
12. 3	Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDES	Jumlah desa	Orang	40	312.906.681	40	20.756.000	40	17.363.100	100	83,65	55	262.676.00	137,	83,95	BIDANG PMD

		yang mendapatkan pembinaan pengembangan BUMDES											0	50		
12.1	Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan	jumlah desa/ kel yang masyarakatnya mendapatkan keterampilan usaha	desa/ kel	12	184.186.000	2	-	-	-	-	-	2	135.766.000	16,67	73,71	BIDANG PMD
12.2	fasilitasi dan bimbingan teknis pengelolaan pasar desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan pasar desa	Desa	14	75.368.500	14	-	-	-	-	-	14	43.968.500	100,00	58,34	BIDANG PMD
										33,33	27,88					
										SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH					
13.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	cakupan desa/kel yang memiliki Dokumen Perencanaan Tahunan	desa/ kel	55	551.004.795	55	45.808.000	55	45.728.000	100	99,83		472.285.000	85,71	85,71	
13.1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan	jumlah desa/ kel di 7 kec yang mendapatkan fasilitasi musremb	desa/ kel	55	350.433.095	55	45.808.000	55	45.728.000	100	100	55	289.313.300	100,00	82,56	BIDANG PMD

		ang														
13.2	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	jumlah desa dan kelurahan yang mendapatkan Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kel	desa/kel	55	200.571.700	55	-	-	-	-	-	55	182.971.700	100,00	91,23	BIDANG PMD
										50,00	49,91					
										SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH					
14.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	cakupan desa/kel yang meningkat dalam pengelolaan pemerintahan desa/kel	Persen	100	1.112.337.789	100	44.802.500	12	31.763.000	12	70,90		577.884.141	51,95	51,95	
14.5	Penyusunan kerangka Regulasi Pemerintah Desa dan LKD/LKK		Regulasi	17	97.279.000	5	-	-	-	-	-	3	18.422.000	17,65	18,94	BIDANG PEMDES
14.6	Pembentukan BPD		Desa	40	89.176.600	40	4.640.000	-	1.847.000	-	40	-	72.775.800	-	81,61	BIDANG PEMDES
14.7	Penyusunan, pendayagunaan dan pembinaan Profil Desa dan Kelurahan	jumlah desa / kelurahan yang mendapatkan pembinaan	Desa/Kel	55	306.765.000	55	26.722.000	55	16.902.000	100	63	55	128.667.000	100,00	41,94	BIDANG PEMDES

		an profil desa/ kel														
14. 1	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	jumlah desa /kelurah an yang mendapa tkan penilaian evaluasi perkemb angan	Desa/ Kel	55	619.117.189	55	13.440.500	55	13.014.000	100	97	55	449.217.14 1	100, 00	72,56	BIDANG PEMDES
										66,67	66,63					
										SEDANG	SEDAN G					
15.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan adimistrasi desa	Persetas e seluruh desa yang terfasilit asi dalam pengelol aan adimistr asi desa	Persen	100	1.393.156.8 39	100	128.586.14 8	38	125.675.74 8	98	97,74		1.520.620. 748	100	100,00	
15. 1	Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa	jumlah desa yang difasilita si dalam pengelola an Alokasi dana desa	Desa	40	474.297.329	40	48.313.148	40	46.713.148	100	97	40	575.906.94 8	100, 00	121,42	BIDANG PEMDES
15. 5	Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Dana Desa	jumlah desa yang difasilita si dalam pengelola an dana desa	Desa	40	494.381.910	40	56.052.500	40	56.029.100	100	100	40	617.662.70 0	100, 00	124,94	BIDANG PEMDES

15.2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah desa yang mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan desa	Desa	40	138.088.200	40	10.366.800	40	10.366.800	100	100	40	128.455.000	100,00	93,02	BIDANG PEMDES
15.3	Fasilitasi kerjasama desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam kerjasama desa	Desa	40	104.321.200	40	13.853.700	40	12.566.700	100	90,71	40	77.707.900	100,00	74,49	BIDANG PEMDES
15.4	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	jumlah desa yang mendapatkan pelatihan dan fasilitasi aparatur dalam bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	Desa	40	182.068.200	40	-	-	-	-	-	40	120.888.200	100,00	66,40	BIDANG PEMDES
										80,00	77,47					
										TINGGI	TINGGI					
16.	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Teknologi Baru	cakupan desa/ kel yang menerapkan TTG	Persen	100	478.402.059	100	1.525.000	100	1.525.000	100	100,00		565.197.200	100	100,00	
16.1	Pengembangan dan Rekayasa TTG dan Teknologi Baru Pedesaan	jumlah desa/ kel yang menerapkan teknologi tepat guna	Unit	55	254.913.180	45	1.525.000	45	1.525.000	100	100,00	45	397.051.200	81,82	155,76	BIDANG PMD

16.2	Pelaksanaan Gelar TTG Nasional, Pekan Inovasi Desa, dan Pameran Potensi Desa	jumlah partisipasi kab pada event nasional	Kegiatan	3	223.488.879	3	-	-	-	-	-	3	168.146.000	100,00	75,24	BIDANG PMD
										50,00	50,00					
										SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH					
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR															
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
17.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Jumlah PUS yang terdaftar menjadi Peserta KB Aktif	Orang	3000	18.261.282.457	3000	3.453.258.000	-	2.727.866.566	78,99	78,99		11.417.195.966	62,52	62,52	
17.2	Promosi Pelayanan Khiba	Jumlah Kec yang dipasilitasi dalam pelayanan Khiba	Kecamatan	7	115.223.000	7	4.880.000	7	4.620.000	100	94,67	7	62.243.000	100,00	54,02	BIDANG KB DAN KS
17.3	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan hari keluarga (provinsi dan Pusat)	Orang	100	816.803.200	100	22.622.000	100	22.474.000	100	99,35	100	455.369.800	100,00	55,75	BIDANG KB DAN KS
17.4	Pengadaan Insentif Operasional PPKBD dan Sub PPKBD dan PKB Gaya Baru	Jumlah Wkt terbayarkan insentif PPKBD dan Sub PPKBD dan PKB	Triwulan	4	3.271.048.000	4	655.920.000	4	649.320.000	100	98,99	8	2.292.600.000	200,00	70,09	BIDANG KB DAN KS

		Gaya Baru														
17.5	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi (DAK)	Jumlah kebutuhan Sarana dan Prasarana dan Operasional	Jenis	72	13.588.943.657	12	2.769.836.000	12	2.051.452.566	100	74,06	24	8.330.133.566	33,33	61,30	BIDANG KB DAN KS
17.11	Fasilitasi Bhaksos	Jumlah Mitra Bhaksos Pelayanan	Mitra	24	469.264.600	0	-	-	-	-	-	4	276.849.600	16,67	59,00	BIDANG KB DAN KS
										80,00	73,42					
										TINGGI	SEDANG					
22.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Jumlah BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang dibina	Kelompok	810	171.112.235	810	21.829.500	70	21.113.000	8,64	96,72		76.234.000	44,55	44,55	
22.2	Pelatihan tenaga Pendamping kelompok bina keluarga dikecamatan	Jumlah Kec yang difasilitasi Pelatihan kader kelompok BKB BKR BKL	Kecamatan	7	171.112.235	7	21.829.500	7	21.113.000	100	96,72	14	76.234.000	200,00	44,55	BIDANG KB DAN KS
										100,00	96,72					
										SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI					
3.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah Kasus KDRT	Kasus	36	250.708.120	36	-	-	-	-	-	-	64.652.200	25,79	25,79	

3.5	Workshop Analisis Data Gender	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data terpilah	Perangkat Daerah	36	250.708.120	36	-	-	-	-	-	-	64.652.200	-	25,79	BIDANG PP DAN PA
										-	-					
											-					
							4.303.561.298		3.506.203.370		81,47					
							6.818.505.506		6.397.955.097		93,83					
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 17)															
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 17)															

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN OUTPUT	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2016-2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2020) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RETAHUN ANGGARAN 2020 (%)	
1	4	5	6		8		14		15		16		17	
							Kolom 9+10+11+12		(14/8) x 100		Kolom 7 + 14		16 / 6 * 100	
			(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp			(K)	Rp		
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tingkat Pencemaran Air	1	3.447.074.975	1	53.484.000	0,82	39.845.755	82,00	74,50	3,76	3.158.338.440	376,00	91,62
		Tingkat Pencemaran Udara	0,18		0,19		0,27		142,1052632		0,49		2,72	
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah dokumen pemantauan kualitas lingkungan	7	2.996.224.975	1	17.535.000	1	16.460.000,00	100	93,86940405	6	2.927.949.975	85,71	97,72

		Jumlah lokasi pelaksanaan pengendalian pencemaran lahan dan/atau tanah akibat biomassa	4	194.000.000	1	0	-	-	0	#DIV/0!	2	10.562.760	50,00	5,44
	Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah objek yang dipantau kualitas limbah cair			1	26.003.000	1	21.769.755,00	100	83,7201669	5	21.769.755	83,33	65,00
		Jumlah titik Pencemaran status mutu air	15	203950000	3	-	3	-	100	#DIV/0!	12	104.500.000	80,00	51,24
	Pengendalian Pencemaran Udara	Jumlah lokasi pemantauan kualitas udara			6	9.146.000	-	836.000,00	0	9,140607916	18	35.072.600	60,00	21,80
	Monitoring dan evaluasi	jumlah Dokumen monitoring program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2	4900000	1	800000	1	780.000,00	100	97,5	1	780000	50	15,92
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									75,00	71,06			69,76	50,11
PREDIKAT KINERJA									sedang	sedang			sedang	sangat rendah
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah jenis data lh yang dapat diakses/jumlah jenis data keseluruhan	100%	1.474.374.526	100%	36.835.000	100%	27.859.750	100,00	75,63	200%	550.394.903	200,00	37,33

	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah lokasi pelaksanaan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	18	126.925.980	4	1.670.000	-	1.632.000,00	0,00	97,72	10	46.763.800	55,56	36,84
		Pendampingan pengakuan masyarakat hukum adat	2	27500000	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00	0,00
	Pembinaan ADIWIYATA	Jumlah sekolah pelaksanaan pembinaan ADIWIYATA	12	87.196.870	2	9.404.000	2	6.591.000,00	100,00	70,09	10	54.330.500	83,33	62,31
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah objek yang diawasi	57	361.780.078	10	9.859.000	10	8.167.750,00	100,00	82,85	53	316.579.403	92,98	87,51
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	12	119.520.700	2	7.988.500	2	5.867.000,00	100,00	73,44	10	101.471.700	83,33	84,90
	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Jumlah kasus pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditangani	5	56.027.270	1	6.870.500	1	4.822.000,00	100,00	70,18	4	30.469.500	80,00	54,38

	Monitoring dan evaluasi	jumlah Dokumen monitoring program Peningkatan kualitas dan akses informasi sda dan lh	2	4.900.000	1	1.043.000	1	780.000,00	100	74,78427613	1	780.000	50,00	15,92
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									80,00	79,80			72,37	55,91
PREDIKAT KINERJA									tinggi	tinggi			sedang	rendah
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	74%	29.127.972.160	75%	364.611.000	0,09	349.528.440	12	95,86338317	0,89	19.832.091.500	120,2702703	68,09
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Tercapainya indikator penilaian penghargaan kota sehat/adipura	21	1.552.249.382	3	30.010.000	3	27.477.500,00	100	92	6	1.422.713.872	28,57	91,65
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah unit prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	783	11.412.186.728	124	279.277.000	-	278.407.340,00	-	100	522	8.515.983.298	66,67	74,62
		Persentase Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1,00	96.200.000	0,2	-	-	-	-	#DIV/0!	1	-	60,00	-
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	3	393.488.990	3	29.937.000	3	29.030.500,00	100	97	3	29.030.500	100,00	7,38
	Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah MoU kerjasama pengelolaan persampahan	23	282.700.980	8	4.852.000	8	3.885.000,00	100	80	16	112.354.200	69,57	39,74

	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	tertibnya pelaku usaha dalam pengelolaan b3 dan lb3	2	76.000.000	1	9.476.000	1	4.209.600,00	100	44	1	4.209.600	50,00	5,54
	Pembinaan, pengawasan, penyuluhan pengelolaan lb3	tercapainya pembinaan dan pengawasan lb3	20	131.500.000	10	11.059.000	10	6.518.500,00	100	59	10	6.518.500	50,00	4,96
	Penyusunan Kebijakan Manajemen Persampahan	Jumlah dokumen pengelolaan persampahan	4	665.310.000	1	1.375.000	1	1.186.500,00	100	86	1	1.186.500	25,00	0,18
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah Dokumen monitoring program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	2	4.900.000	1	690.000		620.000,00						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									85,71	79,71			55,69	32,01
PREDIKAT KINERJA									tinggi	tinggi			rendah	sangat rendah
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terkelolanya ruang terbuka hijau (RTH)	0,02	3.613.849.821	0,004	189.148.000	0,004	170.856.000	100	90,33	0,020	2.047.290.556	100,00	56,65
	Pemeliharaan RTH	Jumlah luasan RTH yang dipelihara	3	992.949.821	1	171.503.000	0,5	167.826.000,00	100	97,86	2,50	911.033.056	83,33	91,75
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah Dokumen monitoring program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2	4.900.000	1	922.500	1	530.000,00	100	57,45	1,00	530.000	50,00	10,82
	Penataan RTH (LANJUTAN)	Jumlah luasan RTH yang dibuat dan ditata	0,5	16.722.500	0,5	16.722.500	0,2	2.500.000,00	40	14,94991778	0,2	2.500.000	40,00	14,95
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									80,00	56,75			57,78	39,17
PREDIKAT KINERJA									tinggi	rendah			rendah	sangat rendah

	Program penataan lingkungan hidup	Persentase dokumen yang dikaji dan dikeluarkan izin lingkungannya	100	0	100	34736000	100	28112000	100	80,9304468	200	28112100	200	#DIV/0!
	Penyusunan laporan SLHD	Jumlah dokumen SLHD yang disusun	2	-	1	3.961.000		2.274.000,00	0	57,40974501	1	2274001	50	#DIV/0!
	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun	2	-	1	1.519.000	0	1.250.000,00	0	82,29098091	1	1250000	50	#DIV/0!
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengendalian dampak perubahan iklim	2	-	1	18.744.000	1	15.003.000,00	100	80,04161332	2	15003001	100	#DIV/0!
	Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah rekomendasi lingkungan	20	-	10	9.172.000	10	8.615.000,00	100	93,92716965	20	8615010	100	#DIV/0!
	Monitoring dan evaluasi	jumlah dok monitoring dan evaluasi dan rencana tindak lanjut program penataan lingkungan hidup	2	0	1	1.340.000	1	970.000,00	100	72,3880597	2	970.001	100,00	#DIV/0!
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									60,00	77,21			80,00	#DIV/0!
PREDIKAT KINERJA									rendah	sedang			tinggi	rendah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	500	2397471811	100	157.660.231	100	149.807.790	100	95,01939015	400	1.728.198.018	80	72,08
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	3385	180.110.446	660	22.794.200	660	22.759.200,00	100	99,85	2775	138.911.200	81,98	77,13

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34	99.741.880	7	19.800.000	7	17.359.350,00	100	87,67	27	76.896.313	79,41	77,10
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	62	25.699.615	2	6.510.000	2	4.527.660,00	100	69,55	40	19.728.916	64,52	76,77
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	57.600.000	2	9.600.000	2	9.600.000,00	100	100,00	10	48.000.000	83,33	83,33
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	50	26.445.750	3	1.600.000	3	1.548.000,00	100	96,75	27	17.760.000	54,00	67,16
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	22	214.406.997	4	21.500.000	4	21.500.000,00	100	100,00	18	156.158.800	81,82	72,83
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	24	25.337.906	4	9.760.631	4	9.203.780,00	100	94,29	20	13.907.780	83,33	54,89
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	434	488.389.459	67	49.943.000	67	47.236.800,00	100	94,58	372	402.508.895	85,71	82,42
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	938	162.007.705	185	16.152.400	185	16.073.000,00	100	99,50843218	740	114.189.000	78,89	70,48
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,00	93,58			77,00	73,57
PREDIKAT KINERJA									sangat tinggi	sangat tinggi			tinggi	sedang
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur	500	189.258.100	100	29.159.000	100	29.090.903	100	99,76646318	500	140.735.781	100	74,36

	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5	35.895.727	1	2.039.000	1	2.039.000,00	100	100,00	4	27.250.700	80	75,92
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67	142.745.383	10	27.120.000	10	27.051.903,00	100	99,74890487	53	113.485.081	79,10	79,50
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,00	99,87			79,55	77,71
PREDIKAT KINERJA									sangat tinggi	sangat tinggi			tinggi	tinggi
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	500	151.663.711	100	39.085.750	70	26.838.000	70	68,66	370	137.100.226	74	90,40
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Formal	64	151.663.711	13	39.085.750	8	26.838.000,00	61,53846154	68,66441094	61	137.100.226	95,31	90,40
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									61,54	68,66			84,66	90,40
PREDIKAT KINERJA									rendah	sedang			tinggi	sangat tinggi
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				40.401.665.104		906.783.981		821.938.638				27.594.149.424		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)									80,28	78,33			72,10	59,84
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									Tinggi	Tinggi			sedang	Rendah

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang di Evaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II + Triwulan III + Triwulan IV Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II + Triwulan III + Triwulan IV Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II + Triwulan III + Triwulan IV Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II + Triwulan III + Triwulan IV Tahun 2020 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab

1	4	5		6		8		12= 9+10+11+12		13 = 12 / 8 * 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 * 100		16
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Belanja Langsung																
1	Program Penataan Admintrasi Kependudukan	Jumlah Pendudukn yang dilayani Asminstrasi kependudukan dan Pencatatan sipil	Org	342.996	6.871.137.499	26.298	916.502.500	26.703	866.982.250	102	95	456.627	5.381.160.590	133	78	
	Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan Lap.Imformasi kependudukan	Jumlah Buku Profil yang diterbitkan	Buku	6	468.713.500	1	24.508.500	1,00	20.908.500	100	85	5	371.447.000	83	79	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Pelayanan KTP, SKPWNI, KK	orang	256.128	4.512.233.299	17.602	807.334.000	18.371	779.412.750	104	97	364.997	3.541.602.190	143	78	
	Kegiatan Pengembangan data base kependudukan	Jumlah Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegara an	orang	86.813	1.491.849.700	8.687	70.960.000	8.323	62.860.000	96	89	91.589	1.216.560.400	106	82	
	Kegiatan Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah kegiatan Sosialisasi bidang kependudukan	kecamatan	42	328.341.000	7	3.801.000	7	3.801.000	100	100	35	251.551.000	83	77	
	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Tenaga	orang	7	70.000.000	1	9.899.000	1	-	100	-	1	-	14	-	

		Pengelola SIAK														
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan Admintrasi yang terpenuhi	%	100	1.611.364.500	20	237.272.340	20	217.797.140	100	92	80	1.056.590.415	80	66	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyusrat	Jumlah Surat terkirim	lbr	1200	711.574.420	200	133.460.840	237	133.460.840	119	100	1.037	626.293.580	86	88	
	Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional	Jumlah kendaraan dinas /Oprasional untuk jasa pemeliharaan	unit	120	34.987.200	21	6.300.000	20	3.649.000	95	58	101	26.374.670	84	75	
	Kegiatan Penyedia jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor	org	72	33.600.000	1	1.200.000	1	1.200.000	100	100	49	25.200.000	68	75	
	Kegiatan Penyedia komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor	jenis	18	5.452.000	3	952.000	3	952.000	100	100	15	4.719.000	83	87	
	Kegiatan Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah tangga	jenis	102	10.105.400	17	12.017.000	17	12.017.000	100	100	85	19.462.500	83	193	
	Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas ke luar daerah	kali	432	350.231.000	14	77.592.500	11	60.778.300	79	78,33	299	289.121.300	69	83	
	Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan dinas ke dalam daerah	kali	624	82.141.500	28	5.750.000	28	5.740.000	100	99,83	444	65.419.365	71	80	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Afaratur	Cakupan Saranan dan Prasarana Perkantoran yang terpenuhi	%	100	508.223.118	20	242.100.000	20	236.001.500	100	97	81	553.689.738	81	109	
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	unit	12	128.833.880	6	201.630.000	6	200.290.500	100	99	14	340.515.500	117	264	

	Kegiatan Pengadaan Meubiler	Jumlah Pengadaan Meubiler	jenis	25	170.581.500	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5	93.881.500	20	55	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/oprasional	Jumlah pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas oprasional	unit	94	130.172.738	21	34.470.000	21	30.011.000	100	87	71	101.357.738	76	78	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	jenis	16	78.635.000	1	6.000.000	1	5.700.000	100	95	10	17.935.000	63	23	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi Sfesifik terpenuhi sumber daya aparatur	%	100	163.135.850	20	23.112.750	20	22.019.500	100	95	59	85.155.350	59	52	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur/PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	6	30.000.000	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	
	Sosialisasi dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	orang	6	28.520.000	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	
	Kegiatan Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bintek inplementasi perundang undangan	orang	41	104.615.850	5	23.112.750	5	22.019.500	100	95	32	85.155.350	78	81	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kenerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan Lap.Kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai stansar	%	100	19.890.500	100	-	-	-	-	#DIV/0!	50	8.211.000	50	41	

		dan tepat waktu														
	Kegiatan Penyusunan Lap. Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Lap. Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	5	2.628.500	1	-	-	-	-	#DIV/0!	2	1.064.500	40	40	
	Kegiatan Penyusunan Lap. keuangan Sementara	Jumlah Laporan keuangan semesteran	laporan	10	2.428.500	2	-	-	-	-	#DIV/0!	4	796.000	40	33	
	Kegiatan Penyusunan Lap. keuangan Akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	laporan	5	2.142.500	1	-	-	-	-	#DIV/0!	2	918.000	40	43	
	Kegiatan Monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	laporan	20	9.510.000	4	-	-	-	-	#DIV/0!	8	2.862.000	40	30	
	Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	dokumen	10	3.181.000	2	-									
Rata-rata capaian kinerja																
Predikat Kinerja																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							1.418.987.590		1.342.800.390		95		7.084.807.093		346	
..																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)																
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN	UNIT PERANGKAT DAERAH

	DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN			TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2020) YANG DIEVALUASI		ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)		RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2020		REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)		PENANGGUNG JAWAB
1	4	5		6		8		13=9+10+11+12		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
		URAIAN	SATUAN	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR															
	PERHUBUNGAN															
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi		100%		100%										DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	kegiatan	4	Rp 546.966.150	4	Rp 72.956.500	4	Rp 51.956.500	100%	71,22%	4	Rp 428.433.100	100 %	78,33%	DINAS PERHUBUNGAN
		Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer	orang	26	Rp 126.000.000	0	Rp -									
		Jumlah Alat Tulis Kantor	jenis	159	Rp 168.441.150	31	Rp 26.799.500	31								
		Jumlah barang cetakan dan Penggandaan Dokumen	jenis	15	Rp 119.475.000	2	Rp 25.500.000	2								
		makan minum harian pegawai	OH	133.050	Rp 133.050.000	225	Rp 20.657.000	215								

s	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening	10	Rp 533.960.000	9	<u>Rp 65.400.000</u>	9	Rp 20.197.769	100%	30,88%	9	Rp 171.281.865	90%	32,08%	DINAS PERHUBUNGAN
		Belanja Air					Rp 19.200.000									
		Belanja Listrik					Rp 46.200.000									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan	kendaraan	18	Rp 66.780.000	16	Rp 7.600.000	16	Rp 3.042.630	100%	40,03%	16	Rp 20.406.474	89%	30,56%	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik tersedia/terpasang	unit	28	Rp 68.480.000	28	<u>Rp -</u>	28	Rp -	100%	#DIV/0!	28	Rp 44.100.500	100%	64,40%	DINAS PERHUBUNGAN
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp -									
		Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin					Rp -									
	penyediaan peralatan rumah tangga	Belanja modal peralatan dan mesin (tangga aluminium)	unit	4	Rp 14.900.000	1	Rp -	1	Rp -	100%	#DIV/0!	4	Rp 14.440.000	100%	96,91%	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan bahan bacaan dan undangan	Pembayaran rekening surat kabar dan majalah	rekening	8	Rp 6.825.000	0	Rp -	0	Rp -	0,00%	0,00%	8	Rp 6.825.000	100%	100%	DINAS PERHUBUNGAN
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	OK	314	Rp 1.253.982.400	50	Rp 185.647.000	49	Rp 185.647.000	98,00%	100,00%	249	Rp 1.024.094.455	79%	81,67%	DINAS PERHUBUNGAN
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan Dinas dalam daerah	OH	1.130	Rp 205.220.000	187	<u>Rp 83.460.000</u>	182	Rp 82.860.000	97,33%	99,28%	641	Rp 183.194.500	57%	89,27%	DINAS PERHUBUNGAN

		Belanja bahan bakar minyak/gas					Rp -									
		Belanja makanan dan minuman rapat					Rp 2.640.000									
		Belanja Perjalanan dinas dalam daerah					Rp 80.820.000									
	Rata-rata capaian kinerja (%)									99,33 %	#DIV/0!					
	Predikat Kinerja									Sangat Tinggi	Sedang					
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi		100%		100%										DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional	unit	26	Rp 720.550.000	1	Rp -	1	Rp -	100%	#DIV/0!	2	Rp 37.392.300	8%	5,19%	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	unit	100	Rp 189.902.100	6	Rp -	6	Rp -	100%	#DIV/0!	68	Rp 116.636.000	68%	61,42%	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor	unit	63	Rp 397.532.200	16	Rp 9.337.800	16	Rp 9.337.800	100%	100,00%	52	Rp 304.684.300	83%	76,64%	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	unit	2	Rp 9.280.000	2	Rp -	2	Rp -	100%	#DIV/0!	2	Rp 8.690.000	100 %	93,64%	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan gedung dan pagar	gedung kantor	4	Rp 213.274.837	1	Rp -	1	Rp -	100%	#DIV/0!	4	Rp 163.647.074	100 %	76,73%	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penggantian suku cadang kendaraan	kendaraan	17	Rp 438.770.500	15	Rp 171.779.600	14	Rp 158.377.800	93,33 %	92,20%	15	Rp 375.501.459	88%	85,58%	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit	140	Rp 54.940.500	30	Rp 3.000.000	30	Rp 2.251.000	100%	75,03%	85	Rp 12.344.600	61%	22,47%	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	unit	31	Rp 11.300.000	20	Rp -	0	Rp -	0,00%	#DIV/0!	0	Rp -	0%	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
	Rata-rata capaian kinerja (%)									86,67	#DIV/0!					

									%							
				Predikat Kinerja					Tinggi	Sedang						
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan jumlah PNS		100%		100%					-					DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan pakaian dinas dan beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan beserta kelengkapannya	orang	216	Rp 169.215.000	0	Rp -	0	Rp -	0%	0,00%	151	Rp 118.800.800	70%	70,21%	DINAS PERHUBUNGAN
	Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00%	0,00%						
				Predikat Kinerja					-	-						
4	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparturnya		100%		100%										DINAS PERHUBUNGAN
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah staf yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	46	Rp 346.239.020	10	Rp 5.555.750	7	Rp -	70,00%	0,00%	33	Rp 163.776.949	72%	47,30%	DINAS PERHUBUNGAN
	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah staf yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang	1	Rp 6.400.000	0	Rp -	0	Rp -	0,00%	0%	1	Rp 6.400.000	100%	100%	DINAS PERHUBUNGAN
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah staf yang mengikuti bimbingan teknis, Implementasi peraturan perundang-undangan	dokumen	13	Rp 66.470.000	3	Rp 37.050.000	1	Rp 29.668.000	33,33%	80,08%	7	Rp 45.238.000	54%	68,06%	DINAS PERHUBUNGAN

				Rata-rata capaian kinerja (%)					51,67 %	40,04%						
					Predikat Kinerja					Rendah	Sangat Rendah					
5	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu		100%		100%										DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKIP	dokumen	6	Rp 1.372.875	1	Rp -	1	Rp -	100%	0%	4	Rp 1.372.875	67%	100%	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen laporan semesteran	dokumen	6	Rp 1.372.875	1	Rp -	1	Rp -	100%	0%	4	Rp 1.372.875	67%	100%	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	dokumen	6	Rp 1.372.875	1	Rp -	1	Rp -	100%	0%	4	Rp 1.372.875	67%	100%	DINAS PERHUBUNGAN
	Monitoring dan Evaluasi	Dokumen laporan monitoring dan Evaluasi	dokumen	24	Rp 5.426.400	4	Rp -	4	Rp -	100%	0%	16	Rp 5.426.400	67%	100%	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan RKA dan DPA	Dokumen RKA dan DPA	dokumen	12	Rp 1.372.875	2	Rp -	2	Rp -	100%	0%	8	Rp 1.372.875	67%	100%	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan RKA dan DPA Perubahan	Dokumen RKA dan DPA Perubahan	dokumen	12	Rp 719.125	2	Rp -	2	Rp -	100%	0%	8	Rp 719.125	67%	100%	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan Renstra SKPD Perubahan	Dokumen Renstra Perubahan	dokumen	1	Rp -	0	Rp -	1	Rp -	0%	0%	1	Rp -	100 %	0%	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen Renja	dokumen	6	Rp -	1	Rp -	1	Rp -	100%	0%	4	Rp -	67%	0%	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan Renja SKPD Perubahan	Dokumen Renja Perubahan	dokumen	6	Rp -	1	Rp -	1	Rp -	100%	0%	4	Rp -	67%	0%	DINAS PERHUBUNGAN
				Rata-rata capaian kinerja (%)					88,89 %	0,00%						

								Predikat Kinerja	Tinggi							
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase kegiatan oprasional pengelolaan pelabuhan penyebrangan dan kepemilikan sertifikat kapal GT 7		kegiatan 55 % dan 79 % sertifikat kapal		kegiatan 55 % dan 73 % sertifikat kapal										DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan Norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Jumlah Dokumen Kajian ANDALALIN Pembangunan Terminal Tipe C	dokumen	1	Rp 102.175.000	1	Rp -	0	Rp -	0,00%	0,00%	0	Rp -	0%	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	kegiatan	23	Rp 221.305.500	3	Rp -	2	Rp -	66,67 %	#DIV/0!	15	Rp 102.950.800	65%	46,52%	DINAS PERHUBUNGAN
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) Pelabuhan Laut/curah Garungkong	dokumen	6	Rp 189.500.000	2	Rp -	0	Rp -	0,00%	0,00%	6	Rp 187.570.000	100 %	98,98%	DINAS PERHUBUNGAN
								Rata-rata capaian kinerja (%)	66,67 %	#DIV/0!						
	Predikat Kinerja									Sedang	Sangat Rendah					

7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara dan direhabilitasi		100%		92,86 %										DINAS PERHUBUNGAN
	Rehabilitasi /Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang di kalibrasi	unit (alat uji)	7	Rp 61.440.000	0	Rp -	0	Rp -	0%	0,00%	3	Rp 35.830.000	43%	58,32%	DINAS PERHUBUNGAN
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan terminal/ pelabuhan	Jumlah Terminal /pelabuhan /prasarana perhubungan lainnya yang terpelihara	unit	16	<u>Rp 237.367.381</u>	12	<u>Rp 25.295.150</u>	12	Rp 9.220.000	100%	36,45%	12	Rp 189.338.463	75%	79,77%	DINAS PERHUBUNGAN
		- Pemeliharaan Terminal Mattirowalie	unit	3	Rp 136.825.000	1	Rp -						Rp 111.812.000			
		- Jumlah Halte Bus/ shelter yang dipelihara	unit	13	Rp 100.542.381	11	Rp -						Rp 49.234.000			
								Rata-rata capaian kinerja(%)		100%	36,45%					
								Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi					
8	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Persentase penghargaan yang diperoleh di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		67%		50%										DINAS PERHUBUNGAN
	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	jumlah kepemilikan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal	kegiatan	5	Rp 7.500.000	0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	5	Rp 7.500.000	100 %	100%	DINAS PERHUBUNGAN

	Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah kegiatan pengendalian pengoperasian angkutan umum di jalan	kegiatan	18	Rp 446.964.000	3	Rp 33.396.000	3	Rp 19.818.000	100%	59,34%	9	Rp 196.761.500	50%	44,02%	DINAS PERHUBUNGAN
	Sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah kegiatan pelaksanaan sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	kegiatan	7	Rp 44.949.000	1	Rp -	1	Rp -	100%	#DIV/0!	1	Rp 7.218.000	14%	16,06%	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemilihan dan pemberian penghargaan supir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemilihan dan pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Umum Teladan	kegiatan	8	Rp 151.743.500	1	Rp -	0	Rp -	0%	#DIV/0!	0	Rp -	0%	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	kegiatan	21	Rp 2.219.043.100	4	Rp 418.800.000	4	Rp 418.800.000	100,00%	100,00%	14	Rp 1.851.883.000	67%	83,45%	DINAS PERHUBUNGAN
					Rata-rata capaian kinerja (%)					75,00%	#DIV/0!					
									Predikat Kinerja	Rendah	Rendah					
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan fasilitas pendukung angkutan darat dan sarana		30 unit (63,82 %)		23 unit (48,93 %)										DINAS PERHUBUNGAN

		terminal sebagai simpul moda														
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Terminal Angkutan Darat yang diadakan	unit	6	Rp 1.682.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -	0%	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
	Pembangunan Halte Bus, taxi, gedung terminal	Jumlah Halte Bus dan shelter yang diadakan	unit	8	Rp 573.747.500	3	Rp -	3	Rp -	100%	#DIV/0!	8	Rp 526.627.350	100%	91,79%	DINAS PERHUBUNGAN
				Rata-rata capaian kinerja (%)						100%	#DIV/0!					
									Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
10	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas	Persentase ketersediaan fasilitas pendukung angkutan darat dan sarana Terminal sebagai simpul moda transportasi		Rambu 86,27 %, Marka 40,45 % dan Pagar 76,9%		Rambu 81,48 %, Marka 32,98 % dan Pagar 62,62 %						657				DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan Rambu Lalu lintas	kegiatan	20	<u>Rp 1.459.165.310</u>	3	<u>Rp -</u>	1	Rp -	33,33 %	#DIV/0!	7	Rp 761.486.310	35%	52,19%	DINAS PERHUBUNGAN
		- Jumlah rambu lalu lintas yang diadakan	unit	785	Rp 1.109.340.410	168	Rp -	168	Rp -	100,00 %	#DIV/0!	508	Rp 711.560.410	65%	64,14%	
		- Jumlah rambu lalu lintas yang dipelihara	unit	200	Rp 76.024.400	0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	145	Rp 48.714.490	73%	64,08%	
		- jumlah APILL yang diadakan	unit	1	Rp 254.165.000	1	Rp -	0	Rp -	0%	#DIV/0!	0	Rp -	0%	0,00%	

		- jumlah APILL yang dipelihara	unit	5	Rp 19.635.500	4	Rp -	0	Rp -	0%	0%	4	Rp 1.211.410	80%	6,17%	
	Pengadaan Marka Jalan	Panjang marka jalan yang terpasang	km	46	Rp 1.603.214.186	6	Rp -	6	Rp -	100%	#DIV/0!	31,10	Rp 1.063.348.736	68%	66,33%	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Panjang pagar pengaman jalan yang terpasang	m	5.899	Rp 2.392.429.638	192	Rp -	192	Rp -	100%	#DIV/0!	1.338	Rp 1.872.287.638	23%	78,26%	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah yang terpasang	unit	4	Rp 643.955.000	0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	4	Rp 596.207.000	100%	92,59%	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan	Panjang pagar pengaman jalan yang dipelihara	m	5.675	Rp 34.112.500	0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	4.156	Rp 25.400.000	73%	74,46%	DINAS PERHUBUNGAN
Rata-rata capaian kinerja(%)										77,78%	#DIV/0!					
Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							Rp 1.119.277.800		Rp 992.301.499	82,89%	88,66%		Rp 10.683.058.198			
								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			82,89%					
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			Tinggi					
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program / kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2020) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (SEMESTER I TAHUN 2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I TAHUN 2020(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJADAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2020 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	SATU AN	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5		6		8		13		14		15		16		17
Urusan Wajib															
Bidang Urusan Kominsta															
Program Pelayanan administrasi Perkantoran															DINAS KOMINFO
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat					139.053. 850		139.053.8 50	100	100		354.905.70 0			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio nal	Pembayaran surat tanda nomor kendaraan	STNK	6	3.208.00 0	6	3.208.86 0		2.228.935	69	69		4.168.055		130	DINAS KOMINFO
Penyediaan komponen instalasi Listrik/peneran gan bangunan kantor	komponen instalasi listrik tersedia/terpasang	jenis	1	1.560.00 0	4	9.735.60 0	4	9.735.600	100	100		22.561.200		1446	DINAS KOMINFO
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga	buah	3	1.808.25 0	2	2.773.00 0	2	2.773.000	100	100		4.581.250		253	DINAS KOMINFO

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				23	444.580.000	23	415.055.000	93	93		859.635.000			
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	OK	46	102.812.000	44	203.832.000		201.766.980	99	99		378.096.830		368	DINAS KOMINFO
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	Oh	129	5.755.000	163	20.420.000		19.590.000	96	96		44.810.000		779	DINAS KOMINFO
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)							94	%							
PREDIKAT KINERJA							sangat berhasil								
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur															
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor	buah	2	24.500.000	3	46.599.375		46.136.000	99	99		75.638.670		309	DINAS KOMINFO
Pengadaan perlengkapan gedung kantor						3.213.131		3.213.131	100	100		3.213.131			DINAS KOMINFO
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan ruangan layanan informasi Publik (PPID)	jenis	2	20.000.000	1	11.600.000		11.600.000	100	100		33.600.000		168	DINAS KOMINFO
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penggantian suku cadang kendaraan	unit	2	16.500.000	2	30.510.000	2	30.510.000	100	100		47.010.000		285	DINAS KOMINFO
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	buah	7	3.500.000	15	13.700.000	6	13.700.000	22	100		23.100.000		660	DINAS KOMINFO

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)							100		%						
PREDIKAT KINERJA							sangat berhasil								
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur															
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah staf yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	2	2.200.000	6	2.850.000	5	2.400.000		84		2.400.000		109	DINAS KOMINFO
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah staf yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	orang	2	11.000.000	3	58.604.000	3	54.691.300		93		84.552.979		769	DINAS KOMINFO
Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa								-				-			
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi					138.500.000		115.530.000		83		305.559.000		#DIV/0!	
Pengkajian dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Sewa Bandwith	Bulan	1	1.066.035.000		1.028.633.852		1.025.175.000		100		2.055.075.000		193	
Pelaksanaan kegiatan informasi dan dokumentasi	Jumlah informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan					52.232.000		42.895.000		82		42.895.000		#DIV/0!	
RATA RATA CAPAIAN KINERJA (%)							63		%						
PREDIKAT KINERA															

Program kerjasama informasi dengan media massa															
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terpenuhinya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah					1.045.301.000		1.041.342.850	100	100		1.041.342.850			DINAS KOMINFO
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)							100		%						
PREDIKAT KINERJA															
Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi dan hubungan antar Lembaga															
Pengembangan Operasional Kehumasan Daerah	Jumlah kegiatan operasional kehumasan daerah					42.984.000		35.931.350	84	84		35.931.350		#DIV/0!	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)							84								
PREDIKAT KINERJA															
Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi															
Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Pengadaan aplikasi, server dan pemeliharannya					765.904.000		760.543.300	99	99		1.293.227.300		#DIV/0!	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)							99								
PREDIKAT KINERJA															
Program Optimalisasi Keamanan Informasi															

Penyelenggara n persandian dan pengamanan informasi daerah	Jumlah dokumen yang dikirim dan diterima serta diamankan					12.279.0 00		10.912.50 0	89	89		60.398.500		#DIV/0!	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)							89	%							
PREDIKAT KINERJA															
Program Pengembangan Data/Informasi								-				-			
Daerah dalam angka dan kecamatan dalam angka	Jumlah dokumen DDA dan KCA tahun 2016	Buku	1	90.000.0 00		49.342.0 00		49.244.00 0	100	100		98.586.000		110	DINAS KOMINFO
PDRB Kabupaten	Jumlah cetak buku PDRB Kab.Barru Tahun 2016	Buku	1	228.200. 000		13.817.0 00		13.585.00 0	98	98		27.402.000		12	DINAS KOMINFO
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)							99	%							
PREDIKAT KINERJA															

No	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD pada tahun 2016 - 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Reaisasi Anggaran Renstra Pd s/d Th. 2019		Unit PD Penanggung Jawab
1	4	5		6		8		13		14		15		16		17
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Belanja Tidak Langsung																
	Gaji dan Tambahan Penghasilan															
	Gaji dan Tunjangan															
	Tambahan Penghasilan															
	Program Pelayanan Adminstras i Perkantora	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	%	100	439.155.89 4.060	100	220.117.70 0	10 0	#####	100	96	100	1.199.021. 065	100	0,27	

	n															
	Penyediaan jasa Surat Menyurat		%	100	303.648.000	100	83.375.200	100	82.788.700	100	99	100	370.410.378	100	1,22	
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	37	65.000.000	37	14.870.200	-	-	-	-	37	7.033.000	100	0,11	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	lbr	160.000	40.000.000	47.867	14.360.000	-	-	-	-	59.155	17.746.500	36,97	44,37	
		Pembayaran honorarium tenaga honorer	OK	38	160.800.000	7	46.200.000	-	-	-	-	16	80.400.000	42,11	50,00	
		Minum harian pegawai	OH	70385	37.848.000	12.255	7.945.000	-	-	-	-	11.400	6.465.684	16,20	17,08	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran penggunaan Listrik, Air dan Telepon	Rek	3	146.400.000	3	15.600.000	3	14.117.777	100	90	3	40.700.216	100,00	27,80	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran STNK kendaraan dinas/operasional	Unit	48	27.900.000	11	4.353.500	11	2.837.870	100	65	15	11.721.335	22,92	42,01	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jaasa kebersihan kantor	OK	1	4.800.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja	Jenis	3	6.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	10	14.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Penyediaan peralatan	Jumlah peralatan rumah tangga	Jenis	25	23.284.900	6	1.608.000	6	1.757.70	100	109	14	6.044.200	56,00	25,96	

	rumah tangga							0								
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	4	19.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OK	1064	1.002.286.300	47	96.099.000	15	95.923.229	31,91	100	152	666.793.489	14,29	66,53	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan Dinas dalam daerah	OK	4740	255.140.000	63	15.267.200	5	14.298.564	7,94	94	164	110.623.437	3,46	43,36	
		Makan minum rapat pegawai	OK	4420	47.700.000	132	1.161.600	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Makan minum tamu	OK	4.200	46.575.000	120	2.653.200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										54,98	69,72			37,08	25,86	
Predikat Kinerja										BS						
	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	%	100	23.250.000	100	-	60	-	60	100	160	7.598.500	160,00	32,68	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Lakip	Dok	6	2.500.000	1	-	1	-	100	#DIV/0!	4	998.000	66,67	39,92	
	Penyusunan laporan semesteran	Dokumen Laporan Semesteran	Dok	6	2.500.000	1	-	-	-	-	#DIV/0!	3	998.000	50,00	39,92	

	Penyusunan laporan akhir tahun	Dokumen laporan akhir tahun	Dok	6	2.500.000	1	-	-	-	-	#DIV/0!	3	995.000	50,00	39,80	
	Monitoring dan Evaluasi	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi	Lap	24	11.250.000	4	-	1	-	25	#DIV/0!	13	3.050.000	54,17	27,11	
	Penyusunan RKA dan DPA	Dokumen RKA dan DPA	Dok	12	4.500.000	2	-	2	-	100	#DIV/0!	6	1.557.500	50,00	34,61	
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat Kinerja																
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	%	100	1.128.700.000	100	153.803.200	100	133.352.616	100	87	70	469.922.636	70	41,63	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Unit	8	500.000.000	1	-	-	-	-	####	1	37.775.300	12,50	7,56	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jenis	25	198.550.000	2	12.400.000	-	11.000.000	-	-	1	59.236.000	4,00	29,83	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Unit	25	107.000.000	8	102.380.000	-	93.646.446	-	91	4	191.672.746	16,00	179,13	
	Pengadaan meubeleur	Jumlah meubeleur	Unit	10	87.000.000	11	-	-	-	0	####	22	46.000.000	220,00	52,87	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	1	43.200.000	1	10.073.200	-	5.359.300	-	53	2	42.795.900	200,00	99,06	
						-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	12	111.500.000	11	24.900.000	4	19.356.870	36,36	78	22	79.502.690	183,33	71,30	

	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Unit	5	30.000.000	3	600.000	-	540.000	0	-	-	540.000	-	2	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Unit	22	35.450.000	9	3.450.000	1	3.450.000	11	100	3	10.250.000	13,64	28,91	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	35	16.000.000	-	-	-	-			1	2.150.000	2,86	13,44	
Rata-rata capaian kinerja (%)										8						
Predikat Kinerja																
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	Orang	16	569.325.000	2	50.111.000	6	46.699.600	300	36	14	204.086.355	87,50	35,85	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Peserta diklat formal	Orang	18	526.900.000	2	50.111.000	6	46.699.600	300	93	12	201.142.355	66,67	38,17	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	16	42.425.000	-	-	-	-	-	6,9	6	2.944.000	37,50	6,94	
Rata-rata capaian kinerja (%)										150						
Predikat Kinerja																
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Terbentuknya Kampung UMKM	Kampung UMKM	1	300.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	####	-	11.230.000	0,00	3,74	

	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang dibina untuk pembentukan Kampung UMKM	Orang	700	180.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	####	140	11.230.000	20,00	6,24	
	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang difasilitasi	UMK	2000	120.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	0,00	0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-						
Predikat Kinerja										-						
	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM	Persentase wirausaha baru	%	7,70	661.143.510	0,8	453.643.000	0,23	440.077.600	29	97	-	969.568.200	0,00	146,65	
	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMK yang difasilitasi kemitraan usaha dalam peningkatan permodalan	Orang	200	140.296.470	30	11.255.000	20	6.165.000	67	10	50	66.032.200	25,00	47,07	
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah pelaku usaha yang dilatih manajemen kewirausahaan	Orang	200	260.847.040	80	113.086.400	70	111.446.400	88	99	120	281.416.100	60,00	107,89	
	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Jumlah koperasi yang dilatih tentang akuntansi, manajemen dan kewirausahaan bagi pengurus/pengawas/pengelola koperasi	Koperasi	50	260.000.000	10	329.301.600	10	322.466.200	100	98	10	622.119.900	20,00	239,28	
Rata-rata capaian kinerja (%)										85						
Predikat Kinerja																

	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMK yang memiliki Izin Usaha			800.969.000	1,000	97.818.000	## #	81.431.374	100	83	-	480.260.405	### #	59,96	
	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah peserta sosialisasi mengenai Izin Usaha Mikro	Orang	100	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Terlaksananya koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Kali	20	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana/fasilitas bantuan pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya pemantauan pengelolaan penggunaan dana/fasilitas bantuan pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kali	20	228.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMK yang dipromosikan produknya	UMK	72	402.769.000	12	97.818.000	1	81.431.374	8	83	42	719.185.089	58,33	178,56	
Rata-rata capaian kinerja (%)										8						
Predikat Kinerja										-						
	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Koperasi/KUD yang direvitalisasi	%	12,71	1.431.196.200	2,54	71.732.400	-	65.035.000	-	91	-	441.026.057	0,00	30,82	

	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah Koperasi syariah yang terbentuk	Kop	7	321.800.200	1	27.980.000	-	26.815.000	-	96	1	212.214.600	14,29	65,95	
	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	laporan data keragaan koperasi	Laporan	5	100.000.000	1	-	-	-	-	-	-	187.611.700	0,00	187,61	
	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian (lanjutan)				-		-	1	-							
	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah KSP/USP yang sehat	Kop	58	591.379.300	53	43.752.400	58	38.220.000	109	87	46	271.808.207	79,31	45,96	
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Temu usaha antara koperasi dengan koperasi, koperasi dengan UMKM dan Koperasi dengan BUMN	Kali	40	154.016.700	4	-	-	-	-	-	2	16.883.400	5,00	10,96	
	Kerjasama SMK dalam penyediaan tenaga pengelola Koperasi	Tenaga kerja koperasi yang profesional	Orang	28	264.000.000	7	-	-	-	-	####	7	43.733.150	25,00	16,57	
Rata-rata capaian kinerja (%)										36						
Predikaat Kinerja																

	Program Peningkatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Persentase LKM yang dibina dan dikembangkan	%	50	460.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Pembentukan LKM Prakoperasi	Terbentuknya LKM Prakoperasi	LKM	8	120.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Pelatihan dan workshop anggota LKM	Jumlah anggota LKM yang dilatih	Orang	140	200.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Bimtek Administrasi LKM	Jumlah LKM yang dibina	LKM	8	140.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
1	3	4		5		7		12		13		14		15		16
	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro keluarga miskin yang difasilitasi	KK	250	4.320.000.000	120	209.706.000	120	203.500.000	100	5	180	740.470.000	72,00	17,14	
	Inventarisasi Data Usaha Mikro (Keluarga Miskin)	Tersedianya data usaha mikro (keluarga miskin)	Dok	4	180.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-			
	Fasilitasi Bantuan Modal (modal kerja dan atau modal investasi) Bagi Usaha Mikro (keluarga miskin)	Jumlah usaha mikro (keluarga miskin) yang mendapat bantuan	KK	250	4.000.000.000	60	209.706.000	120	203.500.000	200	97	168	740.470.000	67,20	18,51	

	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan	Laporan	4	140.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-		0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)										200						
Predikat Kinerja																
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Daerah Tertib Ukur Mandiri	%	85	9.240.678.570	65	121.011.375	65	111.211.025	100	92	-	3.479.303.345	0,00	37,65	
	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan lembaga Perlindungan Konsumen	Kali	12	100.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	####	-	-	0,00	0,00	
	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang difasilitasi	Pengaduan	20	297.516.750	-	-	-	-	#DIV/0!	####	-	37.263.000	0,00	12,52	
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Menurunnya jenis barang beredar yang tidak sesuai dengan BDKT	Jenis	7	226.963.320	5	12.420.000	7	11.720.000	140	94	14	95.380.600	200,00	42,02	
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolologi Daerah	Persentase Operasionalisasi UPTD Kemetrolologi Daerah	%	75	8.616.198.500	10	108.591.375	10	99.491.025	100	92	60	#####	80,13	37,71	
		Jumlah alat UTTP yang ditera	UTTP	4000	216.198.500	2.22	70.399.000	30	61.298.6	13	87	112	61.298.65	2,80	28,35	

						5		0	50				0			
		Pembangunan UPTD Kemetrolgian Daerah, pengadaan kendaraan operasional, dan Laboratorium	UPTD	1	8.400.000.000	1	38.192.375	1	38.192.375	100	100	2	2.982.876.995	200,00	35,51	
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgi an Daerah (Lanjutan)	Persentase Operasionalisasi UPTD Kemetrolgian Daerah	UPTD	1		1	-			-	####	-	-	0,00	####	
Rata-rata capaian kinerja (%)										100						
Predikaat Kinerja																
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor			121.947.763.800			-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi Kebijakan Penyerdehaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	Jumlah calon pelaku ekspor yang mengikuti sosialisasi kebijakan penyederhaan prosedur dan dokumen ekspor	Orang	80	100.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Database Informasi Data Unggulan	Jumlah laporan database produk unggulan	Dok	4	100.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Membangun Jejaring dan eksportir	Jumlah pelaku ekspor	Orang	2	50.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat Kinerja																
1	3	4		5		7		e		13		14		15		16

	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pasar Sehat dan Ber-SNI	Pasar	18	37.324.821.200	1	1.634.320.004	1	1.591.851.100	100	97	1	8.649.570.109	5,56	23,17	
	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Jumlah peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Dok	1	100.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang	Jumlah Pasar yang direvitalisasi dalam kondisi baik	Pasar	18	36.637.122.000	3	1.180.479.000	4	1.156.230.000	133	98	10	10.804.521.110	55,56	29,49	
	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang (Lanjutan)					5	420.369.004	5	403.301.100	100	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Terbentuknya lembaga kerjasama kemitraan (forkom pasar)	Lembaga	7	200.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Jumlah pengusaha yang mengikuti bimtek pasar lelang	Orang	20	60.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Pasar	Tersedianya Data Informasi Pasar	Laporan	12	172.699.200	12	33.472.000	6	32.320.000	50	97	15	87.965.900	125,00	50,94	
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku pasar yang mengikuti sosialisasi	Orang	240	155.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										92						
Predikat Kinerja																

	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Persentase Pedagang Kakilima yang dibina	%	23,04	2.290.000.000	12,35	5.000.000	## #	88.752.800	100	1.775	-	88.752.800	0,00	3,88	
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah pedagang Kakilima dan asongan yang dibina	Orang	120	200.000.000	30	5.000.000	30	3.220.000	100	64	-	20.703.759	0,00	10,35	
	Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah Pedagang Kakilima dan asongan yang mengikuti penyuluhan	Orang	120	140.000.000	-	-	-	-	#VALUE!	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah pasar yang tertata lokasi Pedagang kakilima	Pasar	6	1.650.000.000		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0	0,00	
	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan (Lanjutan)	Jumlah pasar yang tertata lokasi Pedagang kakilima					85.532.800		85.532.800							
	Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah pedagang kakilima yang mendapat bantuan modal usaha	Orang	30	300.000.000	-	-	-	-	#VALUE!	-	-	-	0	-	

Rata-rata capaian kinerja (%)										#DIV /0!						
Predikat Kinerja																
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Produk IKM Unggulan daerah	Produk	15	6.027.614.200	3	53.646.000	3	35.915.000	100	67	20	3.759.530.871	133	62,37	
	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah kelompok IKM yang mendapat bantuan peralatan	Klp	47	641.575.000	-	-	-	-	#DIV /0!	#DIV/0!	51	378.781.700	109	59,04	
	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster	Jumlah IKM yang dibina	IKM	1	3.539.950.000	40	45.556.000	-	27.825.000	-	61	100	2.935.960.171	100	82,94	
		Tersedianya sarana sentra IKM	Sentra	1	2.589.950.000	-	-	-	-	#DIV /0!	-	-	-	-	-	
1	3	4		5		7		10		11		12		13		14
		Tersedianya Mesin dan Peralatan untuk sentra IKM Binaan	Sentra	1	750.000.000	-	-	-	-	#DIV /0!	-	-	-	-	-	
	Magang dan kunjungan kerja pengusaha	Jumlah IKM Binaan yang mengikuti magang dan kunjungan kerja	Orang	175	750.000.000	-	-	-	-	#DIV /0!	-	-	-	-	-	
	Survei pendataan sosialisasi dan penyuluhan	Tersedianya Data Base IKM	Dok	Dok	60.000.000	1	8.090.000		8.090.000	-	-	1	-	-	-	
	Pelatihan teknologi produksi	Jumlah anggota IKM yang dilatih	Orang	550	1.036.089.200	70	-			0	####	65	429.469.000	11,80	41,45	

	kewirausahaan, GKM, dan AMT															
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikaat Kinerja																
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang memiliki kemasan sesuai standar	IKM	56	190.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang dibina dalam rangka peningkatan kemampuan penggunaan teknologi industri	IKM	56	500.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah IKM yang berkembang dan terlayani teknologi industri	IKM	56	190.000.000		-	-	-	#DIV/0!	####	13	-	22,32	0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-						
Predikat Kinerja																
	Program Penataan Struktur Industri	Industri Kemasan	Ind. Kemasan	1	290.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Penyediaan sarana maupun prasarana Industri Kemasan	Jumlah sarana dan prasarana	Unit	6	275.000.000	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
	Pembinaan IKM terkait kemasan	Jumlah IKM yang dibina terkait kemasan produksi	IKM	15	15.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Program Pengembangan Industri Sentra-Sentra Potensial	Jumlah Sentra Industri potensial yang berkembang	Sentra	5	1.559.045.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	

	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Sarana dan prasarana IKM	Sentra	4	55.000.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
		Tersedianya Sarana sentra IKM	Sentra	4	4.000.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
		Tersedianya Mesin dan Peralatan untuk kelompok IKM Binaan	Paket	8	1.500.000.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan pengembangan	Tersedianya data laporan	Lap	1	45.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Program Pengembangan ekonomi Masyarakat	Persentase Usaha yang difasilitasi melalui program	%	100	515.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Pembinaan pengembangan Usaha	Jumlah UMKM yang difasilitasi	UMKM	37	300.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kemitraan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga	UMKM	12	215.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat Kinerja																
	PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL	Terlaksananya penyuluhan Transmigrasi Lokal bagi Masyarakat	Orang	300	62.294.000	-	-	-	-	#DIV/0!	####	50	10.372.000	16,67	16,65	
	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	- Tercapainya pemahaman masyarakat tentang transmigrasi lokal	Orang	300	62.294.000	-	-	-	-	#DIV/0!	####	50	10.372.000	16,67	16,65	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							2.184.399.3		3.070.90		3.009.54		98	-	20.295.39	61,27

			24.540		8.679		9.955				5.988	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)												
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :												
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : *)												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : *)												

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	4	5		6		8		13= 9+10+11+12		14 = 12 / 8 * 100		15 = 7 + 13		16 = 14 / 6 * 100		17
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Belanja Langsung																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			555	6.492.423.999	555	168.065.600	736	340.852.620	133	203	430.664	584.163.420	77.597	9	DISPORA
	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pembayaran jasa surat menyurat	surat	500	129.000.000	500	52.257.800	500,00	96.390.000	20	69	592	149.932.100	4	116	DISPORA
		Jumlah tenaga honorer	OK	6	4.512.233.299	6	36.000.000	24,00	44.707.800	100	24	122	80.707.800	1.667	2	DISPORA
		Jumlah Jenis alat tulis	Jenis	40	1.491.849.7	40	8.707.80	40,00	13.168.0	25	1	140	21.200.900	63	1	DISPORA

		kantor			00		0		00							
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis	6	328.341.000	6	7.550.000	24,00	18.772.000	100	99	124	28.106.200	1.667	9	DISPORA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening Listrik, Telepon dan air	Rekening	3	31.000.000	3	11.400.000	8,00	5.312.520	67	21	108	17.912.520	2.222	58	DISPORA
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	2	2.500.000	2	2.400.000	6,00	3.027.500	100	65	6	6.027.500	5.000	241	DISPORA
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	jenis	4	9.000.000	16	5.900.000	64,00	23.600.000	100	100	64	26.050.000	2.500	289	DISPORA
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah jenis peralatan listrik / penerangan bangunan kantor yang disiapkan	Jenis	5	900.000	4	782.200	12,00	3.128.800	100	100	12	3.911.000	2.000	435	DISPORA
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	6	750.000	6	2.109.000	40,00	17.295.000	167	523	40	17.880.000	2.778	2.384	DISPORA
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disiapkan	bacaan	4	4.200.000	4	-	0,00	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	DISPORA

	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	95	150.000.000	65	79.100.000	125,00	150.465.000	100	123	125	300.465.000	105	200	DISPORA
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	kali	140	53.500.000	65	14.116.600	125,00	43.133.800	100	171	125	63.485.300	71	119	DISPORA
		Volume Penyediaan Bahan Bakar (BBM) operasional kendaraan	liter	600				0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPORA
		Jumlah Orang untuk Makan dan minum harian pegawai	ok	35	7.945.000,00	5625	4.994.000	16.875,00	7.488.000	-	-	16.875	12.438.000	-	157	DISPORA
		Jumlah Orang untuk Makan dan minuman Rapat	orang	100	3.379.200,00	30	1.161.600	90,00	2.773.200	-	-	90	4.115.200	-	122	DISPORA
		Jumlah Orang untuk Makan dan minum harian Tamu	orang	68	660.000,00	15	561.000	45,00	846.000	-	-	45	1.364.500	-	207	DISPORA
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	kali	125	16.290.000,00	1	7.400.000	3,00	7.920.000	-	-	3	17.765.000	-	109	DISPORA
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Afaratur	Cakupan Saranan dan Prasarana Perkantoran yang terpenuhi		100%	155.500.000	20	66.204.000	300,00	114.750.000	-	-	400	165.738.000	-	107	DISPORA
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		unit	2	18.000.000	0		0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	DISPORA

	Pengadaan peralatan gedung kantor		unit	3	40.000.000	3	32.784.000	11,00	97.462.500	167	99	11	135.462.500	5.556	339	DISPORA
	Pengadaan Mebeleur		unit	1	17.000.000	1		0,00	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	DISPORA
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		unit	1	60.000.000	1	12.500.000	2,00	25.000.000	100	100	2	32.188.000	10.000	54	DISPORA
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		unit	2	7.000.000	2	20.420.000	8,00	56.195.000	100	100	8	61.995.000	5.000	886	DISPORA
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		unit	4	6.000.000	4	500.000	4,00	2.000.000	25	100	4	2.000.000	625	33	DISPORA
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobileur	Jumlah mobilieur yang telah diperbaiki	unit	1	7.500.000	5	-	0,00	-	-	#DIV/0!	99	-	-	-	DISPORA
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi sedang / berat	unit	94	-	0	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPORA
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				90.000.000	20	32.000.000	9,00	86.934.000	-	-	108	125.934.000	#DIV/0!	140	DISPORA
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	3	30.000.000		32.000.000	12,00	125.350.750	#DIV/0!	120	12	164.350.750	#DIV/0!	548	DISPORA
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	2	20.000.000			0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	DISPORA

	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti BinteK implementasi perundang-undangan	orang	2	20.000.000	-	1,00	4.680.000	#DIV/0!	#DIV/0!	100	4.680.000	#DIV/0!	23	DISPORA
	Program Peningkatan peran serta kepemudaan				66.548.304	3	41.535.600	0,00	-	-	99	79.260.900	#DIV/0!	119	DISPORA
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti pengkaderan	okp	3	12.000.000		0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	55.113.000	#DIV/0!	459	DISPORA
		Jumlah kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina					0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPORA
	Pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	orang	50	12.000.000		0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	24.147.900	#DIV/0!	201	DISPORA
	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	orang	100	12.000.000		0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	DISPORA
	Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di kalangan Pemuda	Jumlah orang yang mengikuti Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah	orang	100	10.000.000	14.862.800	50,00	14.862.800	#DIV/0!	100	50	14.862.800	#DIV/0!	149	DISPORA
	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	orang	50	10.548.304	26.672.800	50,00	26.672.800	#DIV/0!	100	50	26.672.800	#DIV/0!	253	DISPORA
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		dokumen	1	10.000.000		0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	DISPORA
							0,00		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	DISPORA

									-	0!	0!	99	-	0!		
4	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			100 %	5.057.000	100 %	18.956.800	210,00	75.827.200	-	100	310	75.827.200	-	1.499	DISPORA
	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	orang	5	2.628.500	1	18.956.800	280,00	75.827.200	7.000	100	380	75.827.200	140.000	2.885	DISPORA
	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan keterampilan	orang	5	2.428.500	2	-	0,00	-	-	#DIV/0!	100	25.000.000	-	1.029	DISPORA
	Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga			100 %	19.929.645		33.472.400	15,00	28.077.800	#DIV/0!	62	15	101.441.300	#DIV/0!	509	DISPORA
	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Jumlah organisasi cabang olahraga yang dibina	organisasi	5	5.000.000		7.438.900	10,00	14.877.800	#DIV/0!	100	10	14.877.800	#DIV/0!	298	DISPORA
	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi	Jumlah Wasit / Pelatih yang mengikuti sertifikasi dan standarisasi profesi	orang	5	5.000.000		19.000.000	5,00	13.200.000	#DIV/0!	69	5	86.563.500	#DIV/0!	1.731	DISPORA
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		dokumen	1	9.929.645		7.033.500	1,00	7.033.500	#DIV/0!	100	1	7.033.500	#DIV/0!	71	DISPORA
	Program Pembinaan dan masyarakatan olahraga			70	856.000.000	70	208.956.100	210,00	49.005.000	-	-	210	809.419.000	-	95	DISPORA

	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah atlet yang mengikuti seleksi dan pelatihan	atlit	50	-		18.587.500	95,00	52.082.500	#DIV/0!	89	95	52.082.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPORA
	Penyelenggaraan kompetisi Olahraga	Jumlah atlet yang mengikuti POPDA dan KEJURDA Pelajar	atlit	60	115.000.000		-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	DISPORA
	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah atlet berprestasi yang menerima penghargaan	atlit	12	-		94.777.600	0,00	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPORA
	Pelatihan pasukan pengibar bendera	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka)	orang	70	741.000.000		95.591.000	210,00	46.645.000	#DIV/0!	35	210	807.059.000	#DIV/0!	109	DISPORA
	Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga				35.225.000.000		215.594.250	0,00	35.643.000	#DIV/0!	-	-	2.342.243.000	#DIV/0!	7	DISPORA
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun	unit	16	35.055.000.000			0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	2.101.600.000	#DIV/0!	6	DISPORA
		Pembangunan Stadion Olahraga Ramang (Tahap 1)	unit	1				0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPORA
		Pembangunan Lapangan Takrow yang permanen	unit	1				0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPORA

		Pembangunan Lapangan Takrow	unit	2				0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPORA
		Pembangunan Lapangan Volley	1 unit	15x 8 M				0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPORA
		Rehabilitasi Sarana Olahraga Lapangan Tennis Pelti (Flexi)	1 unit	15x 8 M				0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPORA
	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kepemudaan	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang terpelihara	unit	1	130.000.000	1	201.463.250	2,00	191.732.300	100	92	3	191.732.300	10.000	147	DISPORA
	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara	unit	1	40.000.000	1	14.131.000	3,00	42.393.000	100	100	4	247.393.000	10.000	618	DISPORA
		Pengadaan alat olahraga takrow volley dan takrow	unit	1				0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPORA
		Pembangunan Pagar Lapangan Sepakbola Mangkoso	unit	1				0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPORA
		Perbaikan (Penimbunan) Lapangan Sepakbola Labandu Ralla	unit	1				0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPORA
		Pembangunan GOR dan Ruang Terbuka	unit	1				0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPORA
Rata-rata capaian kinerja																
Predikat Kinerja																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							784.784.		512.491.		65				1.755	

	750		630								
--											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)											
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :											
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :											

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)		Target Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Target Kinerja dan anggaran renja SKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi capaian kinerja dan anggaran renja SKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran SKPD tahun 2020 (%)		Realisasi kinerja dan anggaran renstra SKPD s/d 2020		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra SKPD s/d 2020 (%)		Unit Pengg jawab
1	4	5		6		8		13 (9+10+11+12)		14=(13/8X100%)		15=7+13		16=15/6X100%		17
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Wajib bukan pelayanan dasar															
	Perpustakaan															
	Belanja tidak langsung															
	Gaji dan Tambahan Penghasilan			100	9.849.801.650	100 %	3.003.706.006	95,12	2.857.097.754	95,12	95,12	88	8.721.266.257	88	89	
	Gaji dan Tunjangan	Jumlah Org bulan yang dibayarkan Gaji	32 OB	100	#####	100 %	#####	95,12	#####	100	95,12	65 OB	#####	52%	89	
Total Rata-Rata Kinerja											95				89	
Predikat Kinerja											Sgt tinggi				Sgt tinggi	

1	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan Desa/Kel dan Taman Baca	Unit	1 - 55-120	4.065.239.561	1 - 55-115	600.165.056	1- 55-105	570.738.156	24,65	49,65	45,74	681165257,50	45,74	45,74	
1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah jenis kegiatan yang mendukung pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca	3 Jenis	100	2.895.200.571	19,58	566.835.856	19,30	558.853.956	98,59	98,59	77,98	2.257.557.260	77,98	77,98	
2	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah kecamatan yang dikunjungi roadshow perpustakaan keliling	7 kecamatan	100	43.773.800	17,87	7.824.000	0,00		0,00	0,00	59,71	26.138.800	59,71	59,71	
3	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah penginputan data buku ke pangkalan data dan buku ke cd	884 Judul	100	41.356.000	32,94	13.621.000	0		0,00	0	4,79	1.981.960	4,79	4,79	
4	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah buku (Eks)	64.696 Eks	100	1.084.909.190	1,10	11.884.200	1,10	11.884.200	0,00	100,00	40	438.983.010	40	40	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										24,65	49,65	45,74	#####	45,74	45,74	
Predikat Kinerja											Sgt rendah				Sgt rendah	

2	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah dokumen arsip yang tersimpan sesuai dengan jenis klasifikasi kearsipan	dok	14098	65.993.348	100		100		33,35	33,33	66,78	27883213,33	66,78	66,78	
1	Pengklasifikasian Data	Jumlah jenis dokumen yang terpilah rapi	2 Jenis	100	#####	0		0		0,00	0,00	81,30	#####	81,30 2	81,30	
2	Penyusunan sistem katalog data	Jumlah dokumen katalog data yang disusun	1 eks	100	3.088.688	0		0		0,00	0,00	30,31	936.200	30,31 1	30,31	
3	Pengumpulan data	Jumlah data yang dikumpulkan	2 Jenis	100	#####	11,2 2	3.994.000	11,2 2	3.994.000	100	100,00	88,72	#####	88,72	88,72	
Total Rata-Rata capaian kinerja										33,35	33,33	66,78	#####	66,78	66,78	
Predikat kinerja										Sgt rendah	Sgt rendah	sedang		sedang	sedang	
3	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen arsip yang penting yang bernilai sejarah yang terpelihara	300 Dok	100	62.176.676	19,2 3	11.960.600	19	11.960.600	100	100	79,67	49.541.800	79,67	79,68	
1	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah dokumen yang diduplikasikan	300 Dok	100	62.176.676	19,2 3	11.960.600	19,2 3	11.960.600	100,00	100,00	79,67	49.541.800	79,67	79,68	
Total Rata-Rata capaian kinerja										100,00	100,00	79,67	#####	79,67	79,68	
Predikat kinerja										sgt tinggi	sgt tinggi	Tinggi		Tinggi	Tinggi	

4	Program pemeliharaan rutin/bekala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah dokumen arsip pemerintah yang tersimpan secara rapi	dok	14.098	36.530.890	100	1.421.000	100	1.421.000	100	100	70	25.558.800	70	70	
1	Pemeliharaan rutin berkala arsip daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	300 dok	100	36.530.890	3,89	1.421.000	3,89	1.421.000	100	100	70	25.558.800	70	70	
Total Rata-Rata capaian kinerja										100	100	70	25.558.800	70	70	
Predikat kinerja										sgt tinggi	sgt tinggi	sedang		sedang	sedang	
5	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah SKPD yang menerapkan arsip baku	SKPD	36	#####	3	#####	0		0	0	58	#####	58	58	
1	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan kearsipan	460 Org	100	#####	12,70	#####	0		0	0	58	#####	58	58	
Total Rata-Rata capaian kinerja										0	0	58	#####	58	58	
Predikat kinerja										sgt rendah	sgt rendah	rendah		rendah	rendah	
6	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparatur	%	100%	124.653.405	43%	25.211.750	43%	24.986.750	44	50	140	126.686.305	140	145	

1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	83 Org	100	96.253.405	0		0		0	0	65,31	62.859.555	65,31	65,31	
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	12 org	100	28.400.000	88,77	25.211.750	78,43	24.986.750	88,34	99	215,19	63.826.750	215,19	224,74	
Total Rata-Rata capaian kinerja										44,17	49,55	140	#####	140	145	
Predikat kinerja										rendah	rendah	sgt tinggi		sgt tinggi	sgt tinggi	
7	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	100%	#####	100%	251.715.600	97	218.244.786	81	81	77	188.030.861	77	77	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	3000 surat	100	758.985.640	16,79	127.409.800	16,00	121.409.800	95	95,29	81	617.153.440	81	81,31	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air	3 rek	100	181.290.518	18,76	34.002.000	14,72	26.680.356	78	78	70	127.756.273	70	70	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	50 Unit	100	21.353.175	15,92	3.400.000	11,69	2.495.630	73	73	71	15.054.785	71	71	

4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pegawai kebersihan kantor	17 Org	100	#####	12,50	#####	12,50	#####	100	100	75	#####	75	75	
5	Pengadaan peralatan rumah tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	5 jenis	100	3.939.570	9,81	386.500	9,81	386.500	100	100	90	3.553.070	90	90	
6	Rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	69 kali	100	473.233.395	13,68	64.736.500	11,32	53.553.300	83	82,73	86	408.678.736	86	86	
7	Rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	147 kali	100	129.240.520	9,42	12.180.800	3,19	4.119.200	34	34	67	86.419.720	67	67	
Total Rata-Rata capaian kinerja										81	81	77	#####	77	77	
Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Tinggi	
8	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	414.975.470	29%	66.709.300	29%	97.257.300	110	110	78	59.102.067	78	78	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	25 unit	100	#####	11	17.450.000	32	49.568.800	284	284	97	#####	97	97	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	2 unit	100	64.324.900	12	7.521.000	12	7.521.000	100	100	74	47.365.900	74	74	

3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	58 unit	100	114.462.600	26	29.488.300	26	29.417.500	100	100	89	101.737.700	89	89	
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	70 unit	100	33.500.000	21	7.000.000	16	5.500.000	79	79	75	25.000.000	75	75	
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	67 unit	100	32.905.000	16	5.250.000	16	5.250.000	100	100	56	18.555.000	56	56	
6	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	432 buah	100	12.725.000	0		0	0	-	0	80	10.215.000	80	80	
Total Rata-Rata capaian kinerja										110	110	78	59.102.067	78	78	
Predikat kinerja										sgt tinggi	sgt tinggi	tinggi		tinggi	tinggi	
Total Rata-Rata capaian kinerja																
Predikat kinerja																
Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program										62	65	77		77	78	
predikat kinerja dari seluruh program										sedang	sedang	tinggi		tinggi	tinggi	
Faktor pendukung keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana tepat waktu, PNS dan Non PNS menjalankan Tupoksi dengan baik																
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : anggaran dirasakan masih minim, proses administrasi pengadaan barang dan jasa mengalami keterlambatan, adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Masih perlunya tambahan anggaran dibeberapa program dan kegiatan dan pengisian jumlah jabatan staf yang masih banyak kosong																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Masih perlunya tambahan anggaran dibeberapa program dan kegiatan dan pengisian jumlah jabatan staf yang masih banyak kosong																
No	Urusan /	Indikator Kinerja	Target Renstra PD	Target Kinerja dan	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian								

	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Pada Tahun 2016 s/d 2021		Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2020)		Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang Di Evaluasi s/d Triwulan II 2020		Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2020		Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2020(%)	
1	3	4		5		7		10 = 8+9		11 = 10/7 x 100%		12= 6+10		13= 12/5 x 100%	
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	BELANJA TIDAK LANGSUNG														
	Belanja Pegawai	-	Orang	-	-	24	2.373.511.710	-	-	-	-	-	-		
	Gaji dan Tunjangan	-	Orang	-	-	24	2.373.511.710	24	2.215.747.198	100,00	93,35	-	2.215.747.198		
	Belanja Tambah Penghasilan	-	Orang	-	-	6		-	-	-	-	-	-		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA															
PREDIKAT KINERJA															
	BELANJA LANGSUNG														
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
	BIDANG URUSAN SOSIAL														
1	Program Penanggulan Kemiskinan berbasis pemberdayaa n masyarakat	Jumlah KK masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan	KK	120	1.901.400.00 0	20	45.000.000	20	44.808.000	100,00	99,57	-	219.857.000	-	11,56
1.1	Pembinaan Kelompok ekonomi masyarakat perikanan	Sarana dan prasarana Perikanan bagi nelayan, Pembudidaya dan Pengolah ikan	KK	120	1.901.400.00 0	20	45.000.000	20	44.808.000	100,00	99,57	-	219.857.000	-	11,56
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										100,00	99,57			-	11,56
PREDIKAT KINERJA															

	URUSAN PILIHAN														
	BIDANG URUSAN KEALUATAN DAN PERIKANAN														
2	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Kebutuhan administrasi yang terpenuhi	%	100	3.397.355.833	100	351.184.000	100	333.905.440	100,00	95,08	-	1.330.048.718	-	39,15
2,1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	-	bulan	60	359.273.459	12	46.311.000	12	45.858.500	100,00	99,02	-	226.197.840	-	62,96
2,2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya a pembayaran rekening telepon,air dan listrik	Bulan	60	144.690.870	12	12.000.000	12	8.777.250	100,00	73,14	-	74.814.810	-	51,71
2,3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya a pembayaran jasa kebersihan kantor	Bulan	1	77.968.800	36	4.800.000	12	4.400.000	33,33	91,67	-	35.600.000	-	45,66
2,4	Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan kerja	terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan peralatan kerja	Jenis	8	40.598.915	5	7.250.000	7	7.246.140	140,00	99,95	-	32.387.640	-	79,77
2.5	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Terlaksananya a pembayaran komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis	20	4.047.681	3	700.000	4	698.300	133,33	99,76	-	2.998.400	-	74,08
2.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	30	15.234.361	19	3.132.000	7	3.091.249	36,84	98,70	-	13.799.949	-	90,58

2.7	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggara nya rakor luar daerah	kali	482	1.506.470.056	246	225.916.000	25	213.879.855	10,16	94,67	-	1.028.412.587	-	68,27
2.8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggara nya rakor dalam daerah	kali	3.170	344.907.625	327	51.075.000	308	49.954.146	94,19	97,81	-	166.751.296	-	48,35
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										49,84	107,82			-	40,11
PREDIKAT KINERJA															
3	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana	Perse n	100	243.654.160	100	82.300.000		77.754.300	-	94,48	-	323.668.149	-	132,84
3.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Unit	7	86.341.960	5	27.340.000	2	27.060.000	40,00	-	-	67.752.000	-	78,47
3.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya a pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	1	12.210.200	1	3.220.000	4	3.208.300	400,00	99,64	-	43.969.300	-	360,10
3.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya a pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	62	122.102.000	41	51.740.000	31	47.486.000	75,61	91,78	-	163.672.784	-	134,05
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										128,90	#DIV/0!			-	143,15
PREDIKAT KINERJA															
4	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pengetahuan aparatur	Persen	100	360.200.000	100	23.955.750	72	22.930.500	72,00	95,72	-	99.994.400	-	27,76

4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	30	360.200.000	3	23.955.750	8	22.930.500	266,67	95,72	-	71.886.000	-	19,96
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										266,67	95,72			-	19,96
PREDIKAT KINERJA															
5	Program Pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya Produksi udang, ikan Bandeng, Rumput laut dan ikan air tawar	Ton	8.394	5.806.901.000	6.196	477.610.000	1.214	455.170.050	19,58	95,30	-	1.856.889.050	-	31,98
5.1	Pengembangan Bibit ikan unggul	Jumlah kelompok yang mendapatkan bibit ikan unggul	Klp	23	1.471.371.000	6	59.051.000	-	57.791.750	-	97,87	-	996.098.750	-	67,70
0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya	Jumlah Kelompok yang Mendapatkan sarana dan prasarana budidaya perikanan	Klp	10	-	-	77.970.000	-	73.075.000		93,72	-	73.075.000	-	#DIV/0!
6.5	Pengembangan komoditas unggulan	Jumlah kelompok yang menerapkan kegiatan budidaya komoditi unggulan perikanan	klp	30	1.392.300.000	-	303.249.000	-	297.268.300		98,03	-	1.116.241.300	-	80,17
0	Penerapan Teknologi budidayaUdang	Jumlah lokasi uji penerapan teknologi budidaya	Lokasi	5	565.100.000	1	37.340.000	-	27.035.000	-	72,40	-	85.434.000	-	15,12
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA															

										12,14	28,65			-	52,29
PREDIKAT KINERJA															
6	Program Pengembangan perikanan tangkap	Meningkatnya Produksi Hasil Tangkapan ikan Nelayan	TON	#### ##	##### ####	19.7 49	2.075.760.500	3.07 7	1.305.158.600		62,88	-	5.978.647.986	-	4,47
6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok yang mendapatkan sarana dan Prasarana perikanan tangkap	klp	78	5.520.270.00 0	15	1.229.148.000	-	526.278.100		42,82	-	4.847.580.800	-	87,81
0		Jumlah kelompok yang mendapatkan armada perikanan tangkap	klp	28	3.194.748.00 0	5	640.428.000	-		-		-	2.539.824.700	-	79,50
0	-	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	klp	50	2.325.522.00 0	15	588.720.000	-	-	-	-	-	1.781.478.000	-	76,61
6.3	Pengembangan dan Pemanfaatan Sitem Informasi dan Statistik Perikanan Tangkap	Jumlah dokumen data informasi statistik perikanan tangkap dan pengolahan	Dok	10	382.219.000	2	29.128.500	-	27.788.500		95,40	-	82.968.500	-	21,71

0	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan Mesin Armada Perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	klp	8	-	8	817.484.000	-	751.092.000		91,88		751.092.000	### ##	#DIV/0!
6.4	Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap	Jumlah Kawasan Perikanan Tangkap yang terkelola	Kawasan	1	382.219.000	1	199.970.000	-	-	-	-	-	193.350.476	-	50,59
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										-	46,02			#REF!	#REF!
PREDIKAT KINERJA															
7.10	Program Pengelolaan TPI dan Pencatatan Usaha Perikanan	Persentase TPI dalam Kondisi Baik	perairan	50	600.000.000	1	16.989.000	-	15.245.000		89,73	-	15.245.000	-	2,54
7.12	Pengelolaan Database Perizinan Perikanan	Jumlah rekomendasi Izin Perikanan yang terlaksana	Surat	250	65.000.000	1	16.989.000	3	15.245.000		89,73	-	15.245.000	-	23,45
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										-	#DIV/0!			-	70,59
PREDIKAT KINERJA															
7	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Cakupan Kelompok pengolah dan pemasar yang mandiri	Klp	24	1.189.991.000	2	45.610.000	-	45.418.000		99,58	-	933.976.000		

7.1	Pengembangan Kelompok Pengolahan Ikan	Jumlah kelompok pengolahan ikan yang dikembangkan	Klp	-	-	2	45.610.000	-	45.418.000		99,58	-	45.418.000		
7.2	Pengembangan Kelompok Pemasaran Ikan	Jumlah kelompok pemasaran ikan yang dikembangkan	Klp	-	-	2		-	-	-		-	-		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										-	49,79			-	-
PREDIKAT KINERJA															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							3.118.409.250		2.300.389.890		73,77				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 8)										79,65	#DIV/0!			-	48,24
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 8)															
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan															
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Terjadinya pengurangan anggaran melalui refocusing anggaran dalam rangka penanganan wabah virus covid 19 sehingga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan															

N o	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2020 (%)		Unit PD Penanggung jawab
1	3	4		5		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14= 6+12		15= 14/5 x 100%		16
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Urusan Pilihan															
	Bidang Urusan Pariwisata															

	Belanja Tidak Langsung															
	Belanja Gaji dan Tunjangan	Jumlah gaji dan tunjangan PNS	Bulan	-	-	12	2.298.044.314	6	1.042.736.813	50	45	30	3.998.362.697	-	-	
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Jumlah tambahan penghasilan PNS	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	1.346.156.000	100	337.794.950	100	335.963.519	100	99	100	946.722.207	100	70	
1.1	Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama satu tahun	Surat	2.500	673.739.437	500	64.239.750	479	64.239.750	96	100	488	613.981.657	20	91	
1.2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening Listrik, Telepon dan air	Rek	28	132.400.000	7	44.640.000	7	44.258.634	100	99	10	125.156.922	36	95	
1.3	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	30	9.900.000	10	4.400.000	7	2.950.170	70	67	24	8.116.860	80	82	
1.4	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jenis	14	40.400.000	1	3.000.000	2	3.000.000	200	100	2	19.000.000	14	47	
1.5	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis peralatan listrik / penerangan bangunan kantor yang disiapkan	Jenis	30	3.760.000	5	1.420.200	5	1.420.000	100	100	5	4.130.000	17	110	
1.6	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis	63	3.105.000	15	1.020.000	15	1.020.000	100	100	6	3.020.000	10	97	
1.7	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disiapkan	Bacaan	4	18.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali	477	864.647.000	53	194.170.000	97	194.169.965	183	100	400	492.899.965	84	57	
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan	Kali	768	273.564.0	104	24.905.000	140	24.905.00	135	100	667	82.795.51	87	30	

9	konsultasi ke dalam daerah	konsultasi kedalam daerah			00				0				0			
Rata-rata capaian kinerja (%)										120	96			50	75	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang layak dipakai untuk pelayanan, mobilitas/oprasional	Unit	223	657.737.000	21	64.897.600	16	64.897.600	76	100	142	282.381.500	64	43	
2.1	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	73	63.000.000	1	9.300.000	1	9.300.000	100	100	26	28.885.000	36	46	
2.2	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	Unit	24	264.800.000	4	4.061.800	4	4.061.800	100	100	25	104.302.700	104	39	
2.3	Kegiatan Pengadaan meubeleur	Jumlah Pengadaan meubeleur	Unit	46	40.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	100	100	31	43.458.000	67	109	
2.4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Unit	1	225.237.000	1	16.075.800	1	16.075.800	100	100	3	47.875.800	100	21	
2.5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	9	51.500.000	7	21.360.000	2	21.360.000	29	100	7	50.160.000	1	97	
2.6	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Unit	13	8.000.000	7	2.100.000	7	2.100.000	100	100	21	7.700.000	162	96	
2.7	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	Jumlah mobilieur yang telah diperbaiki	Unit	21	5.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi sedang / berat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										76	88			67	56	
Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi			Sedang	Sedang	

3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase kualitas SDM aparatur dispar	persen	100	76.000.000	100	51.201.000	100	51.201.000	100	100	100	128.562.202	100	169	
3.1	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	13	76.000.000	3	51.201.000	5	51.201.000	167	100	14	128.562.202	108	169	
3.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3	Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti BinteK implementasi perundang-undangan	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										21	13			13	21	
										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Pariwisata secara tepat waktu	Dokumen	99	21.544.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP SKPD	Dokumen	11	3.947.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan keuangan semesteran	Dokumen	11	3.125.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3	Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen/ laporan keuangan Akhir tahun	Dokumen	11	3.125.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi	Laporan	44	8.220.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan DPA	Dokumen	22	3.125.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0			0	0	

Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5	Program Pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Orang	207.400	3.171.366.920	33.000	567.574.600	65.519	406.265.140	199	72	266.986	1.992.911.640	129	63	
5.1	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah promosi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi informasi	Media	2	131.706.647	1	100.000.000	1	99.998.000	100	100	1	99.998.000	50	76	
5.1	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi wisata melalui pameran yang diikuti	kali	22	3.171.366.920	4	467.574.600	2	306.267.140	50	66	17	1.892.913.640	77	60	
Rata-rata capaian kinerja (%)										50	66			77	60	
Predikat Kinerja										Tinggi	Sedang			Tinggi	Sedang	
6	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola dan berkembang	objek	6	2.117.391.850	1	1.466.782.300	1	1.358.673.694	100	93	5	7.691.021.880	83	363	
6.1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah Sarana Prasarana Obyek Wisata yang dikembangkan	Unit	124	329.243.250	3	1.117.616.000	3	1.027.029.044	100	92	112	4.960.102.794	90	1.507	
6.2	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah daerah tujuan wisata yang berkembang	objek	6	1.688.148.600	4	349.166.300	4	331.644.650	100	95	113	4.264.718.400	1.883	253	
6.2	Pengembangan pelaku industri pariwisata	Jumlah pelaku industri pariwisata	Orang	80	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										100	93			987	880	
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
7	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga yang bermitra dalam pengembangan destinasi	Lemba ga	4	175.533.000	1	570.142.700	1	570.142.700	100	100	4	1.030.359.500	100	587	

7.1	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pariwisata	Orang	381	134.000.000	120	570.142.700	120	570.142.700	100	100	448	1.012.629.600	118	756	
7.2	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Jumlah wadah / lembaga pariwisata dan budaya yang terbentuk	Lemba ga	2	41.533.000	-	-	-	-	-	-	1	17.729.900	50	43	
Rata-rata capaian kinerja (%)										50	50			84	399	
Predikat Kinerja										Sang at Rend ah	Sang at Rend ah			Tingg i	Sangat Tinggi	
8	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Potensi Ekonomi Kreatif yang berkembang	Sub sektor	5	157.000.000	1	93.907.300	1	93.907.300	100	100	3	224.559.000	60	143	
8.1	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang di latih	Orang	290	268.498.200	40	93.907.300	40	93.907.300	100	100	180	224.559.000	62	84	
8.1	Peningkatan daya saing produk dan usaha ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang di latih	Lokasi	10	249.843.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)										50	50			31	42	
Predikat Kinerja										Sang at Rend ah	Sang at Rend ah			Sang at Rend ah	Sangat Rendah	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							3.152.300.450		2.881.050.953							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)										83	83			307	359	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)										Sang at Tingg i	Sang at Tingg i			Sang at Tingg i	Sangat Tinggi	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2020) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II +TAHUN 2020 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN 2020 (%)		UNIT PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
(1)	(4)	(5)		(6)		(8)		(13) = 9 + 10		(14) = 13 / 8 * 100		(15) = 7 + 13		(16) = 15 / 6 * 100		(17)
		URAIAN	SAT UAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	%	100	1.615.75 6.153	100	334.247. 100	100	306.917.1 81	100	91,823 43871	200	627.840. 123	200	38,857 35616	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar	Sura t	8.456	414.438.4 60	1.000	67.862.10 0	1.845	63.760.10 0	184,5	93,9553 8894	3627	131.755.8 00	42,892 6206	31,7914 0276	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Bula n	60	158.478.4 18	12	35.100.00 0	12	15.677.68 9	100	44,6657 8063	24	31.628.86 7	40	19,9578 3868	
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasi onal yang diperpanjang perizinannya	Lem bar	51	31.500.00 0	17	8.000.000	16	4.258.760	94,117 6471	53,2345	28	7.111.890	54,901 9608	22,5774 2857	
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibavarkan	Org	3	76.800.00 0	3	14.400.00 0	3	14.400.00 0	100	100	6	28.800.00 0	200	37,5	

1.5	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	OK	80	786.325.000	13	188.645.000	13	188.640.632	100	99,99768454	33	376.551.066	41,25	47,88745951	
1.6	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	OH	737	135.695.000	120	20.240.000	110	20.180.000	91,6666667	99,70355731	221	51.992.500	29,9864315	38,31570802	
RATA-RATA CAPAIAN KINE RJA (%)								1.999,00	306.917.181,00	111,714052	81,9261519	656,5	104640020,5	68,1718355	57,62	
PREDIKAT KINE RJA																
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana	%	600	684.367.251	100	42.285.800	100	40.735.800	100	96,33446689	200	162.268.200	33,3333333	23,71069039	Dinas Pertanian
2.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	24	84.382.000	5	9.062.800	5	9.062.800	100	100	10	31.562.800	41,6666667	37,40465976	
2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Unit	22	181.492.000	5	0	0	0	0	0	7	47.248.400	31,8181818	26,03332378	
2.3	Pengadaan Meubeleur	Jumlah pengadaan meubeleur	Unit	35	87.250.000	5	0	0	0	0	0	10	20.160.000	28,5714286	23,10601719	
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pengecatan gedung dan pagar, penataan taman, perbaikan instalasi air,	Unit	1	38.409.041	1	10.613.000	1	10.613.000	100	100	2	17.043.000	200	44,37236535	

		telepon dan listrik														
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	Unit	55	184.109.210	12	19.360.000	12	19.360.000	100	100	37	44.554.000	67,2727273	24,19976708	
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	9	9.000.000	5	3.250.000	5	1.700.000	100	0	5	1.700.000	55,5555556	18,8888889	
RATA-RATA CAPAIAN KINE RJA (%)								188,67	40.735.800,00	142,50	50,00	11,83	27.044.700,00	70,81	29,00	
PREDIKAT KINE RJA																
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur	%	100	48.701.290	100	24.224.850	100	22.405.000	100	92,48767278	200	33985000	200	69,7825458	
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Org	7	48.701.290	2	24.224.850	2	22.405.000	100	92,48767278	4	33.985.000	57,1428571	69,7825458	
RATA-RATA CAPAIAN KINE RJA (%)								219,33	22.405.000,00	136,32	92,49	4,00	33.985.000,00	57,14	69,78	
PREDIKAT KINE																

RJA																
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok tani yang mampu menerapkan pola agribisnis	Klp	205	1.878.238.900	40	133.842.800	40	133.122.790	100	99,462 04801	80	427961790	39,024 3902	22,785 26922	Dinas Pertanian
4.1	Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis	Jumlah peserta pelatihan usaha agribisnis	Org	540	279.172.900	90	873.300	90	853.300	100	97,7098 3625	150	23.896.300	27,777 7778	8,55967 7533	
4.2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah kelompok tani berprestasi	Pokt an	66	401.803.800	11	35.225.000	11	35.224.990	100	99,9999 7161	22	134.586.490	33,333 3333	33,4955 7421	
		Jumlah Dokumen Rembug KTNA	Dok	48	0	8	-	0	0	0	0	8	0	16,666 6667	0	
4.3	Pengembangan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K)	Jumlah dokumen program penyuluhan	Dok	378	1.197.226.200	63	97.744.500	57	97.044.500	90,476 1905	99,2838 4717	60	269.479.000	15,873 0159	22,5086 1199	
		Supervisi, monitoring, kunjungan lapangan	Kali	1.152	0	192		192	0	100	0	362	0	31,423 6111	0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								249.154,41	133.122.790,00	78,10	59,40	120,40	85.592.358,00	25,01	12,91	
PREDIKSI KINERJA																
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Statistik	Persentase ketersediaan data statistik pertanian	%	100	341.567.500	100	41.504.500	100	39.894.500	100	0	100	39894500	100	11,679 82902	Dinas Pertanian

		sesuai standar baku dan tepat waktu														
5.1	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	Tersedia Data Statistik Pertanian	Bulan	24	300.000.000	12	41.504.500	12	39.894.500	100	96,12090255	24	82.196.000	100	27,39866667	
RATA-RATA CAPAIAN KINE RJA (%)								12,00	39.894.500,00	100,00	96,12	24,00	82.196.000,00	100,00	27,40	
PREDIKAT KINE RJA																
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Produksi Sektor Pertanian	Ton	140.623	32.812.951.074	140.623	2.332.707.577	37.033,00	1.959.569.422	26,3349523	84,00407498	37179,24	4.577.698.402	26,4389467	13,95088906	Dinas Pertanian
				48	257.497.500											
6.1	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	Jumlah luas areal tanam padi dan palawija	Ha	31.639	550.000.000	31.183	283.233.500	28.461	283.233.500	91,2708848	100	28461	283.233.500	89,9554347	51,497	
6.2	Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan	Jumlah benih padi bersertifikat	Ton	659	2.452.877.845	161	203.429.250	20,475	179.238.500	12,7173913	88,1085193	70,275	553.703.000	10,6638847	22,5736068	
6.3	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian	Jumlah kawasan Agro Tekno Park yang terbentuk	Kawasan	1	1.661.049.000	1	343.928.000	1	342.190.442	100	99,49479019	2	575.520.442	200	34,64801111	

6.4	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Jumlah Embung yang dibangun	Unit	41	26.748.895.548	5	907.000.000	1	884.840.000	20	97,5567806	3	2.640.968.000	7,31707317	9,873185213	
		Jumlah Dam Parit yang dibangun	Unit	60		10		1	0	10	0	1	0	1,66666667	0	
		Jumlah Irigasi Air Tanah Dangkal yang dibangun	Unit	60		10		3	0	30	0	8	0	13,3333333	0	
		Jumlah Irigasi Air Tanah Dalam yang dibangun	Unit	31		5		0	0	0	0	4	0	12,9032258	0	
		Panjang jalan usaha tani/jalan produksi yang dibangun	Meter	9.895		1.000		0	0	0	0	1000	0	10,1061142	0	
		Jumlah long storage yang dibangun	Unit	10		3		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian (Lanjutan)						221.944.567	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.5	Peningkatan Perlindungan Tanaman Pangan	Jumlah gerakan pengendalian OPT tanaman pangan	Kali	42	659.230.000	7	307.921.260	0	204.815.980	0	66,5156995	7	297105980	16,6666667	45,06863765	
6.6.	Perluasan Areal Tanaman Pangan dan	Luas tambah tanam	Ha	4.165	975.473.400	1.000	65.251.000	1.000	65.251.000	100	100	2000	151840980	48,0192077	15,56587601	

	Hortikultura															
RATA-RATA CAPAIAN KINE RJA (%)								2.457,29	1.959.569.422,00	30,33	45,97	2.629,69	375.197.658,50	34,22	14,94	
PREDIKAT KINE RJA																
7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase prnanganan pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran hasil	%	100	701.093.070	100	14.546.000	50	14.546.000	50	100	125	121827380	125	17,37677709	Dinas Pertanian
71	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	Jumlah pameran/pentas/ekspo yang diikuti	Kali	10	371.888.970	3	562.000	0	562.000	0	100	3	93.022.380	30	25,01348185	
7.2	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat	Pencatatan harga komoditi pertanian tanaman pangan	Bulan	60	329.204.100	12	13.984.000	12	13.984.000	100	100	24	28.805.000	40	8,749891025	
RATA-RATA CAPAIAN KINE RJA (%)								6,00	14.546.000,00	50,00	100,00	13,50	60.913.690,00	35,00	16,88	
PREDIKAT KINE																

RJA																
8	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Jumlah penyuluh yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pendampingan terhadap kelompok tani	Org	69	985.498.404	11	74.547.700	11	67.739.200	100	90,866 92145	22	1209642 00	31,884 058	12,274 41866	Dinas Pertanian
8.1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan	Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan ketenagaan	Org	310	985.498.404	60	74.547.700	60	74.273.200	100	99,6317 7938	120	127.498.200	38,709 6774	12,9374 3343	
RATA-RATA CAPAIAN KINE RJA (%)								60,00	74.273.200,00	100,00	99,63	120,00	127.498.200,00	38,71	12,94	
PREDIKSI KINE RJA																
9	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah kasus kejadian penyakit yang tertangani	Kasus	2.313	4.676.514.201	2.892	297.683.595	1.277	297.257.005	44,156 2932	99,856 69684	6444	1177788 025	278,59 9222	25,185 16943	Dinas Pertanian
9.1	Pendataan masalah peternakan	Jumlah dokumen pendataan masalah peternakan	Dok	6	353.407.900	1	6.608.000	1	6.503.000	100	98,4110 1695	2	43.163.000	33,333 3333	12,2133 6592	
9.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Tersedianya vaksin Antraks dan SE	Dosis	172.500	1.442.998.800	30.000	71.098.500	30.000	70.864.810	100	99,6713 1515	5000 0	248.466.810	28,985 5072	17,2187 8147	

9.3	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Jumlah ternak yang dimusnahkan	Ekor	8.304	346.307.120	1.000	16.103.420	0	16.083.420	0	99,87580278	1000	104.003.540	12,0423892	30,03216913	
9.4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah lokasi pengawasan Ternak antar Daerah	Kec	7	137.915.800	7	28.192.500	7	28.192.500	100	100	14	56.192.500	200	40,74406268	
9.5	Pemberdayaan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) dan Petugas Paramedik Veteriner	Jumlah Pusat Kesehatan Hewan yang diberdayakan	Unit	1	900.733.580	1	55.638.375	1	55.617.475	100	99,962436	2	152.803.975	200	16,96439196	
		Jumlah petugas paramedik veteriner yang diberdayakan	Org	100		20	0	20	0	100	0	20	0	20	0	
9.6	Penanganan Gangguan Reproduksi	Jumlah ternak yang ditangani mengalami gangguan reproduksi	Ekor	1.750	169.473.700	350	13.537.500	350	13.537.500	100	100	700	46.515.000	40	27,44673657	
9.7	Pengawasan Obat Hewan dan Residu	Monitoring dan evaluasi jenis obat hewan dan residu	Kali	140	55.886.300	28	4.965.500	28	4.965.500	100	100	56	15.221.600	40	27,23672886	
9.8	Penanganan penyakit hewan yg menular ke manusia (Zoonosis)	Jumlah penyakit zoonosis yang ditangani	Penyakit	4	1.039.233.200	4	101.017.000	4	100.970.000	100	99,95347318	8	481.978.000	200	46,37823349	
9.9	KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Hewan Menular	Pertemuan KIE Rabirs, Antraks, AI, Brucellosis	Kali	20	70.359.000	4	522.800	0	522.800	0	100	4	16.471.100	20	23,41008258	
RATA-RATA								30.41	297.257.0	88,89	99,76	5.756	129.423.	88,26	26,85	

CAPAIAN KINE RJA (%)								1,00	05,00			,22	947,22			
PREDIKSI KINE RJA																
10	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	3.516.677	3.864.811.309	3.288.582	806.032.300	4.144.373	790.345.300	126,023101	98,05380008	8451255	1237174500	240,319341	32,01125232	Dinas Pertanian
		Jumlah Produksi Daging	Ton	646		620,95		580,90	0	93,5508495	#DIV/0!	1271,065	0	196,640573	#DIV/0!	
		Jumlah Produksi Telur	Kg	2.939		2.939,07		3.355.935	0	114.183,57	#DIV/0!	8094826	0	275421,341	#DIV/0!	
10.1	Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah ternak yang mendapatkan Inseminasi Buatan (IB)	Ekor	5.450	2.087.896.500	700	103.036.000	1.311	103.036.000	187,285714	100	3255	324.020.500	59,7247706	15,51899244	
10.2	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak	Jumlah peserta penyuluhan	Org	80	43.744.400	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3	Pengembangan Makanan Ternak	Luas penanaman Hijauan Makanan Ternak	Ha	28	221.544.909	2	18.189.000	2	18.189.000	100	100	4	47.707.000	14,2857143	21,53378302	
10.4	Pengolahan Informasi Produksi Peternakan	Jumlah dokumen informasi produksi Peternakan	Dok	5	65.266.000	1	5.400.000	1	5.400.000	100	100	2	15.374.000	40	23,55590966	
10.5	Pengembangan Ternak Ruminansia	Jumlah kelompok penerima ternak ruminansia	Klp	4	377.493.500	1	545.404.000	1	529.838.000	100	97,14596886	1	529.838.000	25	140,3568538	
10.6	Pengembangan Ternak Non Ruminansia	Jumlah kelompok penerima ternak non ruminansia	Klp	10	307.197.000	3	126.195.000	3	126.074.000	100	99,90411664	6	190.775.500	60	62,1020062	

10.7	Penguatan Kelembagaan Peternak	Jumlah peserta bimtek pengolahan limbah ternak	Org	410	141.350.800	60	7.808.300	60	7.808.300	100	100	60	7.808.300	14,634 1463	5,52405 7876	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak (Lanjutan)						2.932.200	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								1.378,00	790.345.300,00	98,18	85,29	475,43	159.360.471,43	30,52	38,37	
PREDIKSI KINERJA																
11	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah produk hasil peternakan yang berdaya saing	Produk	12	573.459.000	2	10.006.800	2	10.006.800	100	0	17	10006800	141,66 6667	1,7449 89616	Dinas Pertanian
11.1	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah laporan promosi atas hasil produksi peternakan produk unggulan daerah	Laporan	14	83.360.200	3	642.000	3	642.000	100	0	3	642.000	21,428 5714	0,77015 1703	
11.2	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Pencatatan harga komoditi peternakan	Bulan	60	55.877.500	12	6.410.300	12	6.410.300	100	0	12	6.410.300	20	11,4720 5942	

11.3	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	Pelatihan teknis pengemasan produk peternakan	Klp	11	50.215.300	2	2.954.500	2	2.954.500	100	0	2	2.954.500	18,181 8182	5,88366 4939	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								17,00	10.006.800,00	100,00	-	5,67	3.335.600,00	19,87	6,04	
PREDIKAT KINERJA																
12	Program Pembinaan dan Produksi Pertanian	Jumlah produksi hortikultura	Ton	15.515	2.292.326.534	15.286	157.347.550	19.929	150.764.250	130,374199	95,81607721	43146	519.031.250	278,092169	22,64211674	Dinas Pertanian
		Jumlah Produksi Perkebunan	Ton	3.815		3.759		3.122	0	83,0540037			0	0	0	
12.1	Pembinaan dan Operasional Sentra Pembibitan Hortikultura	Tersedianya Bibit/Benih Unggul Hortikultura	Pohon	18.718	977.269.500	4140	20.881.050	2.300	20.851.050	55,5555556	99,85632906	2950	163.941.050	15,7602308	16,77541865	
						60 Sasset		60 Bks		100						
								1,5		100						
12.2	Peningkatan Perlindungan Tanaman Hortikultura	Jumlah gerakan pengendalian OPT hortikultura	Kali	50	225.993.500	10	8.932.000	0	7.832.000	0	87,68472906	10	39.955.500	20	17,67993327	
12.3	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Tersedianya bibit unggul perkebunan	Pohon	76.638	660.207.474	15.621	97.839.000	2.300	95.647.800	14,7237693	97,76040229	8300	160.065.300	10,8301365	24,24469675	
			Kg			1.500										
12.4	Peningkatan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah gerakan pengendalian OPT perkebunan	Kali	26	428.856.060	7	29.695.500	0	26.431.900	0	89,00978263	7	155.067.900	26,9230769	36,1584957	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																

								161.6 40,18	150.762.7 50,00	60,46	93,58	2.816 ,75	129.757. 437,50	18,38	23,71	
PREDIKAT KINERJA																
13	Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Persentase masyarakat miskin rawan pangan yang tertangani	KK	1.200	1.338.34 5.000	200	127.310. 000	200	127.168.9 94	100	99,889 24201	400	7710889 94	33,333 3333	57,615 11374	Dinas Pertanian
13.1	Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat	Jumlah KK miskin yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya	KK	1.200	1.338.345 .000	200	127.310.0 00	200	127.168.9 94	100	99,8892 4201	400	771.088.9 94	33,333 3333	57,6151 1374	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								117.0 18,52	127.168.9 94,00	100,00	99,89	400,0 0	771.088. 994,00	33,33	57,62	
PREDIKAT KINERJA																
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :							4.399.218 .772,00		3.967.004 .742,00							
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2020) YANG DIEVALUASI	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020 (%)	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(4)	(5)	(6)	(8)	(13) = 9+10+11+12	(14) = 13 / 8 * 100	(15) = 7 + 13	(16) = 15 / 6 * 100	(17)

		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Urusan : Sosial															
	Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan	Cakupan OPD yang terkoordinasi dalam penanggulangan kemiskinan	persen	100	283.675.560	100	21.228.500	100	13.103.000	100,00	61,72	100	178.083.560	100,00	62,78	
	Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan	OPD terkait penanggulangan kemiskinan yang terkoordinasi	OPD	10	283.675.560	10	21.228.500	10	13.103.000	100,00	61,72	10	178.083.560	100,00	62,78	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											100,00	61,72		100,00	62,78	
PREDIKAT KINERJA											sangat tinggi	Rendah		sangat tinggi	Rendah	
	Urusan : Perencanaan															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	persen	100	3.500.557.602	100	504.714.662	100	441.832.056	100,00	87,54	100	2.790.740.848	100,00	79,72	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat yang dikelola selama satu tahun	surat	27.000	617.717.110	4500	71.642.000	4.500	65.923.000	100,00	92,02	22500	423.236.360	83,33	68,52	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening pembayaran, telepon, air dan listrik	rekening	3	363.335.305	3	54.600.000	3	34.845.564	100,00	63,82	3	142.996.627	100,00	39,36	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang perizinannya	unit roda 2 ; unit roda 4	4	119.687.000	3	33.560.000	3	30.491.368	100,00	90,86	4	91.911.243	100,00	76,79	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	4	14.645.880	2	1.196.000	2	1.189.200	100,00	99,43	4	10.835.080	100,00	73,98	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	jenis	20	21.511.055	2	12.744.662	2	9.830.400	100,00	77,13	20	28.151.455	100,00	130,87	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	OK	718	2.115.788.252	62	285.890.000	60	270.462.524	96,77	94,60	680	1.903.892.083	94,71	89,99	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	OH	839	247.873.000	316	45.082.000	196	29.090.000	62,03	64,53	779	189.718.000	92,85	76,54	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										94,11	83,20			95,84	79,43	
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	tinggi			sangat tinggi	tinggi	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	persen	100	303.879.000	100	118.465.000	100	107.191.254	100,00	90,48	100	158.214.254	100,00	52,06	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	unit	29	181.611.000	5	100.765.000	5	30.298.800	100,00	30,07	5	30.298.800	17,24	16,68	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dipelihara	unit	1	55.968.000	1	6.200.000	1	70.039.454	100,00	1.129,67	2	82.812.454	200,00	147,96	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor yang dipelihara	unit	45	22.500.000	10	5.000.000	10	1.733.000	100,00	34,66	35	14.233.000	77,78	63,26	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kantor yang dipelihara	unit	147	43.800.000	18	6.500.000	18	5.120.000	100,00	78,77	104	30.870.000	70,75	70,48	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	318,29			91,44	74,60	
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	sedang	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan sub urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	persen	100	280.196.340	100	64.000.000	100	63.122.000	100,00	98,63	100	250.762.092	100,00	89,50	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur yang mengikuti diklat formal	orang	24	280.196.340	4	64.000.000	15	63.122.000	375,00	98,63	37	250.762.092	154,17	89,50	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										375,00	98,63			154,17	89,50	
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	tinggi	
	Program Pengembangan data / informasi	Cakupan penyusunan dan/informasi pembangunan	persen	100	852.845.515	100	17.091.500	100	16.847.500	100,00	98,57	100	257.915.310	100,00	30,24	
	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah	dokumen	11	852.845.515	2	17.091.500	2	16.847.500	100,00	98,57	9	257.915.310	81,82	30,24	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	98,57			81,82	30,24	
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			tinggi	sangat rendah	

	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan	dokumen	16	1.818.895.100	2	160.829.700	2	153.370.100	100,00	95,36	13	1.251.333.816	81,25	68,80	
	Penyusunan rancangan RPJMD	Dokumen rancangan awal RPJMD	dokumen	2	432.131.200	1	89.641.500	1	86.954.500	100,00	97,00	1	86.954.500	50,00	20,12	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyusunan rancangan RKPD	Dokumen rancangan awal RKPD	dokumen	6	610.031.100	1	53.818.200	1	49.045.600	100,00	91,13	5	589.417.316	83,33	96,62	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah peserta dan dokumen berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD	orang	1.500	313.123.900	250	5.700.000	250	5.700.000	100,00	100,00	1250	246.313.900	83,33	78,66	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			dokumen	6		1		1	0	100,00		5				
	Penetapan RKPD	Dokumen Rancangan Akhir RKPD	dokumen	6	252.060.400	1	6.300.000	1	6.300.000	100,00	100,00	5	170.279.600	83,33	67,56	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyusunan RKPD Perubahan	Dokumen rancangan akhir RKPD Perubahan	dokumen	6	211.548.500	1	5.370.000	1	5.370.000	100,00	100,00	5	158.368.500	83,33	74,86	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	97,63			76,67	67,56	
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			tinggi	sedang	
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Cakupan OPD bidang ekonomi yang dikoordinasikan dan	persen	100	180.000.000	100	9.808.000	100	6.211.000	100,00	63,33	100	6.211.000	100,00	3,45	

		difasilitasi														
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi	OPD yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	OPD	1	60.000.000	1	1.594.000	1	1.154.000	100,00	72,40	1	1.154.000	100,00	1,92	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang keuangan penanaman modal dan pariwisata	OPD yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	OPD	4	60.000.000	4	5.097.000	4	2.127.000	100,00	41,73	4	2.127.000	100,00	3,55	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pertanian dan lingkungan hidup	OPD yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	OPD	4	60.000.000	4	3.117.000	4	2.930.000	100,00	94,00	4	2.930.000	100,00	4,88	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	69,38			100,00	3,45	
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sedang			sangat tinggi	sangat rendah	
	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan OPD bidang sosial budaya yang dikoordinasikan dan difasilitasi	persen	100	180.000.000	100	68.603.500	100	40.915.100	100,00	59,64	100	40.915.100	100,00	22,73	
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia	OPD yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	OPD	5	60.000.000	5	46.831.500	5	23.043.500	100,00	49,21	5	23.043.500	100,00	38,41	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan kelembagaan dan kependudukan	OPD yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	OPD	6	60.000.000	6	7.586.500	6	5.771.500	100,00	76,08	6	5.771.500	100,00	9,62	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan pemberdayaan masyarakat	OPD yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	OPD	2	60.000.000	2	14.185.500	2	12.100.100	100,00	85,30	2	12.100.100	100,00	20,17	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	70,19			100,00	22,73	
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sedang			sangat tinggi	sangat rendah	
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Cakupan OPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dikoordinasikan dan difasilitasi	persen	100	180.000.000	100	42.334.500	100	41.136.500	100,00	97,17	100	41.136.500	100,00	22,85	
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang infrastruktur wilayah	OPD yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	OPD	3	60.000.000	3	3.110.000	3	3.099.000	100,00	99,65	3	3.099.000	100,00	5,17	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang perhubungan dan perumahan	OPD yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	OPD	3	60.000.000	3	32.449.000	3	31.266.000	100,00	96,35	3	31.266.000	100,00	52,11	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan wilayah	OPD yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaan wilayah	OPD	8	60.000.000	8	6.775.500	8	6.771.500	100,00	99,94	8	6.771.500	100,00	11,29	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	98,65			100,00	22,85	
										sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	sangat rendah	
	Program monitoring, evaluasi dan pengendalian	Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah	dokumen	65	506.171.800	12	15.702.500	12	15.702.000	100,00	100,00	51	349.073.300	78,46	68,96	
	Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Dokumen LKIP dan PK Kabupaten	dokumen	10	123.676.200	2	4.435.000	2	4.435.000	100,00	100,00	8	63.853.200	80,00	51,63	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	dokumen	55	382.495.600	10	11.267.500	10	11.267.000	100,00	100,00	43	285.220.100	78,18	74,57	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	100,00			79,09	63,10	
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			tinggi	sedang	
	Program penyelenggaraan penelitian dan pengembagaan	Cakupan penyelenggaraan program kelitbangan	persen	100	400.953.000	100	152.205.000	100	98.828.000	100,00	64,93	100	119.149.300	100,00	29,72	

	Koordinasi kegiatan kelitbangan lingkup pemerintah daerah	Dokumen rekomendasi kajian	dokumen	4	400.953.000	2	152.205.000	2	98.828.000	100,00	64,93	4	119.149.300	100,00	29,72	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	64,93			100,00	29,72	
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sedang			sangat tinggi	sangat rendah	
	Program Penguatan sistem inovasi daerah	Cakupan inovasi yang diterapkan	persen	100	122.519.300	100	3.130.000	100	3.130.000	100,00	100,00	100	82.830.675	100,00	67,61	
	Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Penguatan SIDA	Dokumen koordinasi inovasi yang dilaksanakan berdasarkan pada Roadmap	dokumen	4	122.519.300	1	3.130.000	1	3.130.000	100,00	100,00	3	82.830.675	75,00	67,61	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	100,00			75,00	67,61	
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			tinggi	sedang	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)										100,00	84,78			96,64	49,87	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)										sangat tinggi	tinggi			sangat tinggi	sangat rendah	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : KONSISTENSI PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA DENGAN RKPD, DAN RENSTRA DENGAN RPJMD																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *)																
:																

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II + Triwulan III + Triwulan IV 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 S/D Triwulan I + Triwulan II + Triwulan III + Triwulan IV (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II + Triwulan III + Triwulan IV Tahun 2020 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + Triwulan II + Triwulan III + Triwulan IV Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung jawab
1	4	5		6		8		13 = 9 +10+11+12		14 = 13/8 x 100		15= 7 + 13		16= 15/6 x 100		16
			satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

BELANJA LANGSUNG																
1	Program Pelayanan Administratif Perkantoran	Cakupan Kebutuhan administrasi yang terpenuhi	%	100	2.739.746.022	100	2.692.261.050	100	2.308.169.932	100	86	100	3.939.888.428	100	143,80	BPKAD
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		%	100	399.937.400	100	309.932.600	100	254.828.800	100	82	100	638.816.200	100	159,7290476	BPKAD
		Persentase Ketersediaan alat tulis kantor	%	100	161.587.400	100		0		0		100	-	100	0	BPKAD
		Honor Pegawai tidak tetap	%	100	192.000.000	40		0		0		100	-	100	0	BPKAD
		Persentase ketersediaan perangko, materai, dan benda Pos Lainnya	%	100	1.530.000	100		0	-	0		100	-	100	0	BPKAD
		Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	%	100	6.000.000	100		0	-	0		100	-	100	0	BPKAD
		Pembayaran makanan dan minuman harian	%	100	22.500.000	100		0	-	0		100	-	100	0	BPKAD
		Perjalanan Dinas	%	100	15.600.000	100		0	-	0		100	-	100	0	BPKAD
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Infra-red/ TV Kabel/ TV. Satelit			720.000				-				-		0	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening telepon	%	100	76.451.556	0	-	0	-	0		100	-	100	0	BPKAD
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	28	10.000.000	28	10.000.000	28	5.263.250	100	53	28	14.063.250	100	140,6325	BPKAD

1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor	%	100	4.800.000	100	4.800.000	100	4.800.000	100	100	100	9.600.000	100	200	BPKAD
1.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	%	100	5.030.000	100	3.930.000	100	2.790.000	100	71	100	7.820.000	100	155,46 71968	BPKAD
1.6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	%	100		0	0	0	-	0		0	-	0		BPKAD
1.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran rekening surat kabar	%	100		100	0	0	-	0		100	-	100		BPKAD
1.8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan Dinas dalam dan luar propinsi	%	100	138.604.000	100	145.464.000	100	143.369.220	100	99	100	373.068.220	100	269,16 12219	BPKAD
1.9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Perjalanan Dinas dalam Kabupaten	%	100	45.150.000	100	50.028.000	100	37.711.000	100	75	100	113.630.000	100	251,67 22038	BPKAD
1.10	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	%	100	2.207.943.022	100	2.168.106.450	100	1.859.407.662	100	86	100	4.141.840.851	100	187,58 82126	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	80,79			100,00	194,89	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran	%	100	1.838.778.063	1	229.184.000	100	211.225.000	10.000	92	100	563.982.068	100	30,67	BPKAD

2.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	%	100	167.237.778	100	8.474.000	100	8.474.000	100	100	100	58.224.000	100	34,815 10021	BPKAD
2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	%	100	461.363.902	100	111.000.000	100	111.000.000	100	100	100	468.500.000	100	101,54 67396	BPKAD
2.3	Pengadaan Mebeuler	Jumlah Pengadaan Mebeuler	%	100	95.564.445	100		100	-	100		100	-	100		BPKAD
2.4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung	1	53.091.358	1	30.000.000	1	23.150.000	100	77	1	38.150.000	100	71,857 26912	BPKAD
2.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	%	100	369.781.309	1	44.210.000	100	33.466.000	100	76	100	99.966.000	100	27,033 81636	BPKAD
2.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	%	100	134.321.136	1	35.500.000	100	35.135.000	100	99	100	75.635.000	100	56,309 08303	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	75,31			100,00	48,59	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
3	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur	%	100	654.560.000	100	69.514.500	100	67.394.000	100	97	100	176.706.000	100	27,00	BPKAD

3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Non Formal	%	100	654.560.000	100	69.514.500	100	67.394.000	100	97	100	176.706.000	100	27,00	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)										100	97			100	27	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Cakupan Kebutuhan Laporan Kinerja dan Keuangan yang terealisasi sesuai standar dan tepat waktu	%	100	875.258.821	100	19.901.200	100	5.660.000	100	28	100	113.865.273	100	13,01	BPKAD
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP dan PK SKPD	Dokumen	6	3.849.123	1		100	-	10.000		100	-	1.666,67	-	BPKAD
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Dokumen	12	511.721.055	2	19.901.200	100	5.660.000	5.000	28	100	62.440.000	833,33	12,20	BPKAD
4.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen data keuangan seluruh SKPD pada akhir tahun	Dokumen	6	45.459.475	1		100	-	10.000		100	-	1.666,67	-	BPKAD
4.4	Penyusunan RKA dan DPA	Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan DPA	Dokumen	12	5.301.172	2		100	-	5.000		100	-	833,33	-	BPKAD
4.5	Monitoring dan Evaluasi	Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD	Dokumen	24	308.927.995	4		100	-	2.500		100	-	416,67	-	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)										6.500	6			1.083,33	2,44	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

										gi				h		
5	Program Peningkatan dan Pengembangan n dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	20.854.974.868	100	1.535.892.000	100	1.399.621.788	100	91	100	7.314.290.717	100	35,07	BPKAD
5.1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang tersusun	Dokumen	6	4.151.563.693	1	255.361.100	100	237.820.150	10.000	93	100	1.050.341.700	1.666,67	25,30	BPKAD
5.2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang tersusun	Dokumen	6	1.397.199.962	1	92.338.000	100	82.702.800	10.000	90	100	642.821.800	1.666,67	46,01	BPKAD
5.3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang tersusun	Dokumen	6	2.071.871.668	1	146.043.000	100	144.221.950	10.000	99	100	451.602.450	1.666,67	21,80	BPKAD
5.4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang perubahan Perubahan APBD Yang tersusun	Dokumen	6	952.445.691	1	98.865.000	100	95.007.400	10.000	96	100	330.262.400	1.666,67	34,68	BPKAD
5.5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Analisis standar Belanja	Rancangan Peraturan KDH tentang Analisis standar Belanja yang tersusun	Dokumen	5	1.045.906.750	1		100	-	10.000		100	39.748.000	2.000,00	3,80	BPKAD

5.6	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tata Naskah Akademik	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tata Naskah Akademik yang tersusun	Dokumen	5	836.725.400	1		100	-	10.000		100	-	2.000,00	-	BPKAD
5.7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang standar biaya perjalanan Dinas	Rancangan Peraturan KDH tentang standar biaya perjalanan Dinas yang tersusun	Dokumen	5	1.045.906.750	1		100	-	10.000		100	-	2.000,00	-	BPKAD
5.8	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penetapan uang persediaan SKPD	Rancangan Peraturan KDH tentang penetapan uang persediaan SKPD yang tersusun	Dokumen	5	836.725.400	1		100	-	10.000	#DIV/0!	100	-	2.000,00	-	BPKAD
5.9	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	Dokumen	5	1.045.906.750	1	223.903.600	100	222.899.058	10.000	100	100	579.800.258	2.000,00	55,44	BPKAD
5.10	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	Dokumen	5	2.091.813.500	1	146.987.300	100	128.097.000	10.000	87	100	401.555.800	2.000,00	19,20	BPKAD
5.11	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Aplikasi	1	3.105.288.051	1	378.038.000	100	300.452.930	10.000	79	100	355.157.930	10.000,00	11,44	BPKAD

5.12	Pengelolaan Gaji PNS Daerah	Daftar gaji PNS yang terbit tepat waktu, Laporan IWP Pegawai BPJS dan Taspen selama 1 Tahun	Daftar dan Laporan	14, dan 12	2.191.740.805	1	136.120.000	100	131.993.500	10.000	97	100	366.253.400		16,71	BPKAD
5.13	Penyelenggaraan SP2D	Jumlah SKPD yang terbit SP2Dnya Laporan Realisasi SP2D	SKPD dan Laporan	37 dan 12	1.474.373.560	37 dan 12	58.236.000	100	56.427.000		97	100	102.134.400		6,93	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)										9000	83,76			2266,67	24,13	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
									-							
									-							
6	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Milik Daerah	Prosentase Pengelolaan Aset Daerah sesuai Prosedur	%	100	3.151.784.082	100	403.357.600	100	225.916.620	100	56	100	858.239.040	100,00	27,23	BPKAD
6.1	Inventarisasi Aset Daerah	Jumlah SKPD yang memiliki ketersediaan data yang optimal	SKPD	37	548.055.137	37	207.459.600	100	85.249.320	270	41	100	215.461.720	270,27	39,31	BPKAD
6.2	Penyusunan, pengumpulan dan pengelolaan Data Aset Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan aset Daerah	Dokumen dan Aplikasi	5 dan 1	1.333.029.071	0	195.781.000	100	140.667.300		72	100	419.162.400		31,44	BPKAD
6.3	Penyusunan dan Pengumpulan Data Aset	Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data Aset Daerah seluruh SKPD	Dokumen dan Aplikasi	25 dan 1	1.333.029.071	5 dan 1		100	-			100	-		-	BPKAD
6.4	Pengelolaan dan analisis Data	Terlaksananya Penyusunan Pengelolaan dan analisis Data Aset Daerah	Dokumen	1	303.097.300	0	-	100	-			100	-	10.000,00	-	BPKAD

6.5	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH terkait Pengelolaan BMD	Jumlah Regulasi Pengelolaan Aset dan BMD yang tersusun dan tersosialisaikan	Perda dan Perbu p	2	306.280.000	1 dan 1	117.000	100	-		-	100	110.210.600	5.000,00	35,98	BPKAD
6.6	Bintek Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Bintek Pengelolaan Aset Daerah dilaksanakan	Kali	20	255.117.574	4		100	-	2.500	#DIV/0!	100	156.973.800	500,00	61,53	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)										692,57	#DIV/0!			1442,57	34,21	
Predikat Kinerja										Re ndah	Tinggi			Renda h	Sangat Renda h	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							4.950.110.350		4.217.987.340							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)										2748,76	#DIV/0!			848,76	55,21	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)										San gat Ting gi	Tinggi			Sedan g	Sangat Renda h	

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Peroide Renstra Perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Semester II Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Semester II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Semester II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Semester II Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggun g jawab
1	4	5		6		8		13 = 9 + 10		14 = 13/8*100		15 = 7 +13		16 = 15/6*100		17
		URAIAN	SATU AN	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	GAJI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN															
	Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang bulan yang dibayarkan Gaji	OB			29	Rp 1.833.200. 240	28	1.735.561. 773	97	95	28	7.848.711.7 09			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Kebutuhan administrasi yang terpenuhi	%	100	3.265.27 1.680	100	428.903.5 98	98	419.008.22 3	98	98	198	2.066.761. 510	198	63,2952 39	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Surat	2.000	1.081.17 1.800	400	199.833.50 0	295	199.833.50 0	74	100	1.254	728.814.50 0	62,7	67,4096 85	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	Reke ning	9	153.000. 000	2	63.000.000	2	61.152.925	100	97	6	153.452.23 1	66,666666 67	100,295 58	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasion al	Unit	86	45.400.0 00	19	10.800.000	5	2.857.450	26	26	23	14.215.370	26,744186 05	31,3113 88	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Pegawai Kebersihan Kantor	Oran g	5	23.600.0 00	1	4.800.000	1	4.800.000	100	100	3	18.400.000	60	77,9661 02	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerang an bangunan kantor	Jenis	16	12.697.0 00	3	1.064.000	3	1.064.000	100	100	16	9.249.000	100	72,8439 79	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Jenis	74	74.582.7 95	17	4.913.098	17	4.913.098	100	100	59	70.560.673	79,729729 73	94,6071 72	

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali	470	1.580.150.585	63	109.201.000	72	109.110.250	114	100	438	877.392.436	93,19148936	55,525875	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Kali	1.950	294.669.500	209	35.292.000	124	35.277.000	59	100	1.366	194.677.300	70,05128205	66,066322	
Total Rata-rata capaian kinerja (%)														69,89	70,75	
Predikat Kinerja														R	R	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana	%	100	1.366.505.909	100	44.335.400	98	43.405.839	98	98	198	854.196.968	198	62,50957	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis	1	5.850.000	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	5.850.000	100	100	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis	40	682.441.480	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	21	406.620.000	52,5	59,583131	
	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Jenis	35	362.565.000	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	16	271.988.000	45,71428571	75,017721	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung	3	30.000.000	1	6.125.400	1	6.125.400	100	100	1	6.125.400	33,33333333	20,418	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	90	214.299.429	19	28.210.000	15	28.195.439	79	100	58	128.788.568	64,44444444	60,097485	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis	15	71.350.000	3	10.000.000	3	9.085.000	100	91	15	34.825.000	100	48,80869	
Total Rata-rata capaian kinerja (%)														66,00	60,65	
Predikat Kinerja														R	R	
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur	%	100	263.443.000	100	41.988.750	100	41.960.449	100	100	200	162.400.385	200	61,64536	

	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	Orang	55	263.443.000	6	41.988.750	6	41.960.449	100	100	32	162.400.385	58,181818	61,64536	
Total Rata-rata capaian kinerja (%)														58,18	61,65	
Predikat Kinerja														R	R	
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Kebutuhan Laporan Kinerja Keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	%	8	2.861.400	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	8	2.861.400	100	100	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan	Dok	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Penyusunan laporan keuangan semester	Jumlah laporan keuangan semester	Dok	1	315.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	315.000	100	100	
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dok	1	510.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	510.000	100	100	
	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Dok	4	1.545.400	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4	1.545.400	100	100	
	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah laporan RKA dan DPA	Dok	2	491.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	491.000	100	100	
Total Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100,00	
Predikat Kinerja														ST	ST	
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Penerimaan PAD	%	100	15.488.839.112	100	168.839.850	90	152.329.450	90	90	190	11.894.318.186	190	76,792832	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah	Jenis	20	15.488.839.112	4	90.668.000	4	90.642.600	100	100	16	11.726.458.202	80	75,709084	

	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah (lanjutan)	Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah	Kegiatan	0	-	1	35.661.850	1	19.661.850	100	55	3	125.834.984	0	0	
	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi pajak perundang-undangan yang diikuti	kali	14	209.946.000	7	10.180.000	7	9.730.000	100	96	7	9.730.000	50	4,6345251	
	Pengendalian dan Evaluasi PAD	Jumlah Evaluasi dan Pengendalian yang dilaksanakan	kali	22	149.304.000	11	32.330.000	11	32.295.000	100	100	11	32.295.000	50	21,630365	
Total Rata-rata capaian kinerja (%)														60,00	33,99	
Predikat Kinerja														R	SR	
6	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan pajak Daerah dan pendapatan lainnya	Persentase Pengelolaan data Pajak	%	100	1.146.114.000	100	257.555.000	95	244.698.000	95	95	95	244.698.000	95	21,350232	
	Pendataan Data Obyek Pajak	Jumlah Dokumen Pendataan Obyek Pajak	Dokumen	1	88.746.000	1	6.490.000	1	6.390.000	100	98	1	6.390.000	100	7,2003245	
	Pengelolaan dan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Obyek Pajak	Dokumen	1	220.856.000	1	32.930.000	1	32.860.000	100	100	1	32.860.000	100	14,878473	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Aplikasi yang dibuat	Aplikasi	3	660.000.000	1	180.000.000	1	176.869.000	100	98	1	176.869.000	33,3333333	26,798333	
	Pengelolaan Data pajak	Jumlah Jenis data pajak	Jenis	5	100.000.000	5	38.135.000	5	28.579.000	100	75	5	28.579.000	100	28,579	
	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan	Jumlah sistem jaringan yang terpelihara	sistem	1	76.512.000	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0	0	
Total Rata-rata capaian kinerja (%)														66,67	15,49	
Predikat Kinerja														R	SR	

7	Program Pengembangan Sistem Penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah	Persentase Pelaporan Evaluasi Penerimaan PAD	%	100	1.538.708.000	100	579.820.000	86	501.139.000	86	86	86	501.139.000	86	32,568817	
	Monitoring, Rekonsiliasi, dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah	Jumlah pelaporan monitoring PAD	Laporan	4	98.834.000	4	27.090.000	4	26.838.000	100	99	4	26.838.000	100	27,154623	
	Penagihan dan penindakan pajak/retribusi daerah	Jumlah penagihan dan penindakan	kali	19	992.874.000	19	378.330.000	19	308.330.000	100	81	19	308.330.000	100	31,054293	
	Pengelolaan dan penatausahaan benda berharga	Jenis pemungutan pajak dan retribusi	jenis	9	447.000.000	6	174.400.000	6	165.971.000	100	95	6	165.971.000	66,66666667	37,129978	
Total Rata-rata capaian kinerja (%)														88,89	31,78	
Predikat Kinerja														T	SR	
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan (lanjutan)	Persentase terpenuhinya tempat pengelolaan produksi pertanian/perkebunan	%	100	91.374.000	100	45.083.100	-	-	-	-	-	-	0	0	
	Pembangunan Sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produk hasil pertanian/perkebunan (lanjutan)	Jumlah pasar kecamatan yang terbangun	Unit	1	50.374.000	1	26.610.450	-	-	-	-	-	-	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan (lanjutan)	Jumlah pasar kecamatan yang terpelihara	Unit	1	41.000.000	1	18.472.650	-	-	-	-	-	-	0	0	
Total Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-	
Predikat Kinerja																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								89,53								

BAB II Gambaran Umum - 373

1.1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama setahun	eks	20.941	507.023.700	3780	97.222.300	2.857	96.864.800	75,58 %	99,63 %	16.060	377.991.550	76,69 %	74,55 %	
1.2	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik	rekening	15	10.915.000	0	-	-	-	0,00 %	0,00 %	13	10.515.000	86,67 %	96,34 %	
1.3	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang masa berlakunya	unit	56	19.956.430	10	2.670.000	10	2.045.250	100,00 %	76,60 %	45	11.142.935	80,36 %	55,84 %	
1.4	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan	orang	6	28.800.000	0	-	-	-	0,00 %	0,00 %	4	19.200.000	66,67 %	66,67 %	
1.5	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga	jenis	108	12.766.200	7	7.069.564	2	5.915.000	28,57 %	83,67 %	82	14.351.000	75,93 %	112,41 %	
1.6	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	jenis	3	3.360.000	0	-	-	-	0,00 %	0,00 %	3	3.360.000	100,00 %	100,00 %	
1.7	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	OK	609	1.169.200.769	41	100.090.000	63	94.530.100	153,66 %	94,45 %	545	795.108.365	89,49 %	68,00 %	
1.8	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	OH	353	85.806.350	41	9.632.000	38	7.090.800	92,68 %	73,62 %	222	51.574.800	62,89 %	60,11 %	
Rata-rata capaian kinerja (%)										90,10 %	85,59 %			79,84 %	79,24 %	
Predikat Kinerja										tinggi	tinggi			tinggi	tinggi	

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	%	100	603.738.950	100	140.350.597	111,76	140.029.893	111,76%	99,77%	74,35	471.996.343	74,35%	78,18%	
2.1	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	18	99.224.100	0	-	-	-	0,00%	0,00%	17	97.272.100	94,44%	98,03%	
2.2	Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	unit	52	239.387.800	12	116.379.397	12	116.339.393	100,00%	99,97%	36	222.281.893	69,23%	92,85%	
2.3	Pengadaan meubeleu	Jumlah pengadaan meubeleu	unit	42	73.981.050	0	-	-	-	0,00%	0,00%	32	57.971.750	76,19%	78,36%	
2.4	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	unit	53	116.954.000	10	18.721.200	10	18.590.500	100,00%	99,30%	39	71.944.000	73,58%	61,51%	
2.5	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	unit	41	18.928.000	0	-	-	-	0,00%	0,00%	17	3.443.000	41,46%	18,19%	
2.6	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	134	49.607.000	12	5.250.000	16	5.100.000	133,33%	97,14%	54	13.776.600	40,30%	27,77%	
2.7	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubeleu	Jumlah meubeleu yang dipelihara	unit	63	5.657.000	0	-	-	-	0,00%	0,00%	63	5.307.000	100,00%	93,81%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										111,11%	98,80%			70,74%	67,22%	

Predikat Kinerja										sangat tinggi	sangat tinggi			sedang	sedang	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang menaati peraturan disiplin PNS	%	99,54	53.674.400	99,44	8.814.000	99,82	7.513.000	100,38%	85,24%	99,82	38.843.000	100,28%	72,37%	
3.1	Kegiatan Pembinaan disiplin pegawai	Persentase keterpenuhan jam kerja aparatur	%	97,2	53.674.400	97,00	8.814.000	93,08	7.513.000	95,96%	85,24%	93,08	38.843.000	95,76%	72,37%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										95,96%	85,24%			95,76%	72,37%	
Predikat Kinerja										sangat tinggi	tinggi			sangat tinggi	sedang	
4.	Program fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang diisi	jabatan	2004	2.675.786.665	306	268.995.400	289	265.125.702	94,44%	98,56%	1.567	1.201.679.600	78,19%	44,909%	
4.1	Kegiatan Pemindahan tugas PNS	Jumlah aparatur yang diangkat dalam jabatan	orang	2004	2.675.786.665	306	268.995.400	289	265.125.702	94,44%	98,56%	1567	1.201.679.600	78,19%	44,91%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										94,44%	98,56%			78,19%	44,91%	
Predikat Kinerja										sangat tinggi	sangat tinggi			tinggi	sangat rendah	
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	%	100	550.801.500	100	109.087.000	78,95	37.227.200	78,95%	34,13%	69,57	201.574.200	69,57%	36,597%	
5.1	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur /PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	118	550.801.500	19	109.087.000	15	37.227.200	78,95%	34,13%	64	201.574.200	54,24%	36,60%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										78,95%	34,13%			54,24%	36,60%	

Predikat Kinerja										tinggi	sangat rendah			rendah	sangat rendah	
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan penyebarluasan informasi dan peraturan perundang-undangan	%	100	141.981.800	100	-	-	-	0,00%	0,00%	78,77	61.058.300	78,77%	43,004%	
6.1	Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	571	141.981.800	0	-	-	-	0,00%	0,00%	371	61.058.300	64,97%	43,00%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00%	0,00%			64,97%	43,00%	
Predikat Kinerja										sangat rendah	sangat rendah			rendah	sangat rendah	
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	%	100	2.005.200	100	-	100	-	100,00%	0,00%	100	2.005.200	100,00%	100,00%	
7.1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah	dokumen	6	660.000	1	-	1	-	100,00%	0,00%	5	660.000	83,33%	100,00%	
7.2	Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	dokumen	6	480.200	1	-	1	-	100,00%	0,00%	5	480.200	83,33%	100,00%	
7.3	Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	dokumen	6	226.000	1	-	1	-	100,00%	0,00%	5	226.000	83,33%	100,00%	
7.4	Kegiatan monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	dokumen	24	285.000	4	-	4	-	100,00%	0,00%	20	285.000	83,33%	100,00%	

7.5	Kegiatan penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen RKA dan DPA	dokumen	12	354.000	2	-	2	-	100,00%	0,00%	10	354.000	83,33%	100,00%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00%	0,00%			83,33%	100,00%	
Predikat Kinerja										sangat tinggi	sangat rendah			tinggi	sangat tinggi	
8.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang lulus pendidikan dan pelatihan	orang	960	7.282.478.599	83	831.989.000	83	792.633.000	100,00%	95,27%	593	4.952.104.750	61,77%	68,00%	
8.1	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	orang	160	1.512.358.174	82	797.990.000	82	760.622.000	100,00%	95,32%	135	1.103.398.000	84,38%	72,96%	
8.2	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNSD	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural	orang	350	5.428.733.225	1	33.999.000	1	32.011.000	100,00%	94,15%	258	3.761.843.350	73,71%	69,30%	
8.3	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi bagi PNSD	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	orang	450	341.387.200	0	-	-	-	0,00%	0,00%	200	86.863.400	44,44%	25,44%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00%	94,74%			67,51%	55,90%	
Predikat Kinerja										sangat tinggi	sangat tinggi			sedang	rendah	
9.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	%	100	2.180.765.318	100	298.766.240	121,59	285.757.420	121,59%	95,65%	119,42	1.052.000.648	119,42%	48,24%	
9.1	Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS	Jumlah peserta yang lulus seleksi CPNS dan PPPK	orang	280	1.083.184.500	168	214.946.400	168	208.694.000	100,00%	97,09%	280	433.292.110	100%	40,00%	
9.2	Kegiatan Pemberhentian PNS	Jumlah aparatur yang menerima SK Pensiun	orang	849	503.005.518	140	42.055.120	168	39.370.500	120,00%	93,62%	671	279.026.518	79%	55,47%	

9.3	Kegiatan Pengembangan dan penataan data PNS	Jumlah data PNS yang direkam, ditata dan disusun dalam bundel perorangan	orang	10006	246.205.700	1500	12.913.900	1.786	10.686.900	119,07%	82,76%	10675	124.211.100	107%	50,45%	
9.4	Kegiatan Pelayanan administrasi kepegawaian bidang pengembangan	Jumlah aparatur yang dilayani dalam pengurusan administrasi kepegawaian bidang pengembangan (cuti, Karpeg, Taspen, Karis Karsu, Karip, Persemayaman, Izin cerai, Pertimbangan/Telaahan Staf)	orang	4884	47.082.000	804	7.400.500	1.079	5.870.500	134,20%	79,33%	4985	25.015.000	102%	53,13%	
9.5	Kegiatan Fasilitas pengangkatan ASN	Jumlah ASN yang diangkat dan ditempatkan sesuai ketentuan	orang	215	55.246.400	112	5.582.120	112	5.466.120	100,00%	97,92%	270	23.089.820	126%	41,79%	
9.6	Kegiatan Penyusunan rencana kebutuhan PNS	Jumlah dokumen rencana kebutuhan PNS	dokumen	11	203.899.400	2	10.952.500	2	10.933.700	100,00%	99,83%	9	134.377.600	82%	65,90%	
9.7	Kegiatan Penyusunan data/statistik kepegawaian daerah	Jumlah dokumentasi data/statistik kepegawaian daerah	dokumen	10	30.739.300	2	4.915.700	2	4.735.700	100,00%	96,34%	8	21.586.000	80%	70,22%	
9.8	Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah dokumen informasi kepegawaian	dokumen	16	11.402.500	0	-	-	-	0,00%	0,00%	16	11.402.500	100%	100,00%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										110,47%	92,41%			96,90%	59,62%	
Predikat Kinerja										sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	rendah	

10.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi	%	100	1.201.001.067	100	94.949.740	100,86	85.011.840	100,86%	89,53%	95,58	535.620.540	95,58%	44,60%	
10.1	Kegiatan Penempatan PNS	Jumlah PNS yang dilayani (persetujuan pindah kerja PNS, penempatan kembali setelah Tubel)	orang	294	14.785.600	40	1.531.200	49	1.448.700	122,50%	94,61%	360	12.081.800	122%	81,71%	
10.2	Kegiatan Mutasi kenaikan pangkat PNS	Jumlah PNS yang memasukkan berkas usul kenaikan pangkat	berkas	5948	1.112.715.467	652	79.224.540	652	77.544.540	100,00%	97,88%	4677	517.520.140	78,63%	46,51%	
10.3	Kegiatan Manajemen Karier PNS	Jumlah dokumen penyelenggaraan manajemen karir PNS	dokumen	6	73.500.000	3	14.194.000	-	6.018.600	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										74,17%	64,16%			100,54%	64,11%	
Predikat Kinerja										sedang	rendah			sangat tinggi	rendah	
11.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Diklat, Penilaian kinerja dan penghargaan	%	100	811.570.350	100	162.922.500	92,86	147.417.500	92,86%	90,48%	117,46	414.786.372	117,46%	51,11%	
11.1	Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah aparatur yang menerima penghargaan satya lancana karya satya	orang	1614	176.320.000	300	45.617.000	312	35.145.400	104,00%	77,04%	1997	133.399.922	124%	75,66%	
11.2	Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah aparatur yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	orang	17	514.321.550	2	90.145.000	2	88.320.000	100,00%	97,98%	7	242.079.550	41,18%	47,07%	
11.3	Pemberian ijin belajar dan tugas belajar PNS	Jumlah aparatur yang menerima SK ijin belajar/tugas belajar, dan surat keterangan tidak	orang	310	11.542.800	51	1.907.500	92	1.851.500	180,39%	97,06%	333	9.062.300	107,42%	78,51%	

		sedang Tubel														
11.4	Kegiatan Penilaian dan evaluasi kinerja	Jumlah PNS yang telah diinput data Penilaian Kinerja nya dalam aplikasi E-Lapkin	orang	6000	50.000.000	3500	25.253.000	3.172	22.100.600	90,63 %	87,52 %	0	-	0,00%	0,00%	
11.5	Kegiatan Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)	Jumlah dokumen pengembangan diklat	dokumen	4	59.386.000	0	-	-	-	0,00%	0,00 %	1	8.144.000	25%	13,71 %	
Rata-rata capaian kinerja (%)										118,76%	89,90%			59,47 %	42,99 %	
Predikat Kinerja										sangat tinggi	tinggi			rendah	sangat rendah	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							2.132.558.341		1.967.161.505							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)										88,54 %	67,59%			77,41 %	60,54 %	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)										tinggi	sedang			tinggi	rendah	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :	1. Komitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan															
	2. Adanya uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas, sehingga aparaturnya memahami tugas pokok dan fungsinya															
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2020) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TRIWULAN I + II + III + IV 2020)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + II+III+IV TAHUN 2020 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + II+III+IV TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + II + III + IV TAHUN 2020 (%)			UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)		(12) = 8 + 9+10+11			(13) = 12 / 7 * 100%		(14) = 6 + 12		(15) = 13 / 5 * 100%			(16)
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.		
		Persentase Pelaksanaan rapat-rapat Alat kelengkapan DPRD	100%													
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat Alat kelengkapan DPRD	75 kali	49.759.906.100	15 kali	10.910.587.600,0	15 Kali	10.533.463.112,0	100%	97%	67 Kali	39.050.717.861,0	89%	78%	Bagian Risalah dan Perundang2a n	
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah rapat Pembahasan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	75 kali	3.770.075.000,00	15 kali	771.120.000,00	15 Kali	770.955.000,00	100%	100%	75 Kali	2.639.579.500,00	100%	70%	Subag risalah dan peraturan perundang2a n	
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/toko h agama	Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masvarakat /toko	399 kali	486.787.500,00	72 kali	57.948.000,00	72 Kali	57.915.600,00	100%	100%	282 Kali	327.952.600,00	71%	67%	subag rapat dan persidangan	

		h agama yang difasilitasi													
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi	450 kali	1.069.937.500,00	70 kali	80.850.000,00	70 Kali	80.796.000,00	100%	100%	300 Kali	971.883.500,00	67%	91%	subag rapat dan persidangan
	Rapat-rapat paripurna	Jumlah Rapat-rapat paripurna yang difasilitasi	188 kali	723.512.500,00	20 Kali	69.890.000,00	18 Kali	52.954.000,00	90%	76%	166 Kali	441.116.500,00	88%	61%	subag rapat dan persidangan
	Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses anggota DPRD yang difasilitasi	18 kali	8.924.485.000,00	3 kali	1.285.199.600,00	3 kali	1.267.590.000,00	100%	99%	14 kali	5.347.722.000,00	78%	60%	subag rapat dan persidangan
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	4540 OH	714.725.000,00	755 OK	222.750.000,00	625 OK	157.880.100,00	89%	71%	3320 OK	383.159.600,00	73%	54%	Subag Humas, Umum dan Kepegawaian
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti whorkshop dalam Peningkatan kapasitas	150 Orang	10.562.319.400,00	25 Orang	2.413.910.000,00	25 Orang	2.162.571.110,00	100%	90%	337 Ok	8.853.578.659,00	83%	84%	Subag Humas, Umum dan Kepegawaian

	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi peraturan perundang-undangan	450 Ok	124.895.000,00	75 kali	-	10.450.000,00	47%	38%		25.845.000,00	0%	21%	Subag Humas, Umum dan Kepegawaian
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah	Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah	2809 OK	20.939.169.200,00	356 OK	354 OK	5.312.351.302,00	99%	100%	2475 OK	18.444.880.502,00	88%	88%	Subag Humas, Umum dan Kepegawaian
	Kegiatan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD	Jumlah belanja rumah tangga Pimpinan DPRD yang disediakan	156 OB	2.444.000.000,00	36 OB	36 OB	660.000.000,00	100%	100%	120 OB	1.615.000.000,00	77%	66%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan
								93%	87%			72%	66%	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		7.096.692.202,00		1.541.788.300,00	10 kegiatan	1.501.406.502,00		97%	10 kegiatan	5.490.382.427,00	77%	Bagian Umum
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama satu tahun	2408 eks	1.229.264.000,00	398 eks	369 eks	212.958.200,00	93%	96%	2297 eks	940.120.350,00	95%	76%	Subag Humas, Umum dan Kepegawaian

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik	4 rekening	1.151.339.379,00	4 Rekening	160.800.000,00	4 Rekening	142.295.642,00	100%	88%	4 Rekening	581.266.231,00	100%	50%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya	18 unit (9 Unit roda 4 & 9 Unit roda 2)	89.390.270,00	18 unit (9 Unit roda 4 & 9 Unit roda 2)	17.250.000,00	11 Unit	10.671.180,00	61%	62%	18 unit	35.175.930,00	61%	39%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan	7 org/bln	197.200.000,00	1 paket	195.074.000,00	1 Paket	195.034.000,00	100%	100%	1 Paket	286.234.000,00	100%	145%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja yang di perbaiki	5 jenis	42.930.000,00	5 jenis	12.750.000,00	5 jenis	12.739.000,00	100%	100%	5 jenis	34.305.000,00	100%	80%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis	44.191.000,00	5 jenis	21.310.000,00	5 jenis	21.310.000,00	100%	100%	5 jenis	44.121.000,00	100%	100%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan

	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan	2 jenis	64.166.250,00	2 jenis	8.318.400,00	2 jenis	7.628.400,00	2 jenis	92%	2 jenis	34.624.900,00	100%	54%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis	851.454.000,00	2 jenis	195.400.000,00	2 jenis	195.360.000,00	100%	100%	2 jenis	656.794.000,00	100%	77%	Subag Humas, Umum dan Kepegawaian
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas keluar daerah	651 OK	2.884.269.773,00	129 OK	584.630.500,00	129 OK	584.589.880,00	100%	100%	522 OK	2.340.542.416,00	80%	81%	Subag Humas, Umum dan Kepegawaian
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	2147 OH	542.487.530,00	340 OH	124.144.000,00	326 OH	118.820.200,00	96%	96%	1793 OK	537.198.600,00	84%	99%	Subag Humas, Umum dan Kepegawaian
									94%	93%			92%	80%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana		7.908.782.011,00		961.998.605,00	-	920.281.181,00		96%	9 kegiatan	5.122.593.845,00		65%	Bagian Umum
	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	2 unit	900.000.000	-	-	-	-			2 unit	888.054.500,00	100%	99%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan

	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan dinas/operasional	4 unit	69.300.000,00	-		-			2 unit	32.500.000,00	50%	47%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	3 paket	884.357.560,00	3 paket	227.000.000,00	223.901.150,00	100%	99%	3 paket	986.990.710,00	100%	112%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	27 unit	2.728.515.793,00	4 unit	428.118.000,00	410.078.290,00	100%	96%	23 unit	1.458.838.190,00	85%	53%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan
	Pengadaan mebeleur		10 unit				-				-	0%		Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara	3 unit	642.535.704,00	3 unit	85.000.000,00	84.755.900,00	100%	100%	3 unit	493.095.808,00	100%	77%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 unit	2.129.179.914,00	4 unit	100.546.425,00	100.017.550,00	100%	99%	4 unit	913.835.351,00	100%	43%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara	3 unit	318.568.860,00	3 unit	60.750.000,00	45.536.691,00	100%	75%	3 unit	213.786.235,00	100%	67%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional 1 roda empat dan roda dua yang dipelihara	13 unit(9 roda 2 dan 4 roda 4)	219.500.000,00	13 unit(9 roda 2 dan 4 roda 4)	56.710.000,00	13 unit	55.991.600,00	100%	99%	13 unit(9 roda 2 dan 4 roda 4)	122.543.051,00	100%	56%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan (Lanjutan)			16.824.180,00		3.874.180,00	-	-		-	2 paket	12.950.000,00			Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan
									100%	95%			82%	69%	
	Program peningkatan disiplin aparatur		425 org/psg	1.423.218.000,00	150 psg	256.900.000,00	100 psg	240.125.000,00	67%	93%	250 pasang	772.675.000,00	59%	54%	Bagian Umum
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya yang disediakan	425 org/psg	1.423.218.000,00	150 psg	256.900.000,00	135 psg	240.125.000,00	90%	93%	285 pasang	772.675.000,00	67%	54%	Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan
									90%	93%			67%	54%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		484.924.510,00		89.101.750,00		82.699.700,00	100%			436.854.038,00		90%	Bagian Keuangan

	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30 OK	428.124.510,00	5 OK	76.766.000,00	5 OK	71.524.700,00	100%	93%	27 OK	401.029.038,00	90%	94%	Subag Perencanaan dan Anggaran
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30 OK	56.800.000,00	5 OK	12.335.750,00	5 OK	11.175.000,00	100%	91%	25 OK	35.825.000,00	83%	63%	Subag Perencanaan dan Anggaran
									100%	92%			87%	78%	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													Bagian Keuangan
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun													Subag Perencanaan dan Anggaran

	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang disusun													Subag Perencanaan dan Anggaran
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun													Subag Perencanaan dan Anggaran
	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi yang disusun													Subag Perencanaan dan Anggaran
	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah RKA dan DPA yang disusun													Subag Perencanaan dan Anggaran
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								95%	92%			80%	70%		
PREDIKAT KINERJA								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Tinggi		
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :															
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :															
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :															
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :															

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2020)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (Triwulan II TAHUN ANGGARAN 2020)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTR PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTR PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN	Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab

										ANGGARAN 2020 (%)				ANGGARAN 2020 (%)		
1	4	5		6		8		(13) = 9 + 10		(14) = 13 / 8 * 100		(15) = 7 + 13		(16) = 15 / 6 * 100		16
		URAIAN	SATU AN	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Gaji dan Tunjangan	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan PNS	bulan	60 bulan	35.064.068. 640	12 bulan	9.740.303. 290	6 bulan	4.199.810. 065	50	43	30 bulan	5.467.298. 189	100	100	Bagian Umum
	Tambahan Penghasilan (iuran asuransi kesehatan)	Persentase pembayaran tambahan penghasilan PNS	bulan	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	100	90	0 bulan	-	100	100	Bagian Umum
1	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan SDM perencana yang berkualitas	Persen	100	669.023.77 2	100%	194.773.00 0	100%	143.003.15 0	100	90	100%	446.906.73 1	1	67	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur	Orang	112	108.002.00 0	0 Orang	-	0 Orang	-	-	-	2 Orang	51.472.200	2	48	Bagian Umum
	Pendidikan dan pelatihan formal	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur	Orang	16	48.280.472	2 Orang	14.099.000	2 Orang	10.079.000	100	71	5 Orang	20.979.000	31	43	Bagian Perekon omian & SDA
	Sosialisasi peraturan perundang- undangan	Peserta sosialisasi peraturan perundang- undangan	Orang	0	-	375 Orang	5.940.000	200 Orang	3.995.000	53	67	558 Orang	7.855.000	100	100	Bagian Pengada an Barang dan Jasa

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peserta Bimbingan Teknis implementasi i peraturan perundang-undangan	Orang	36	144.000.000	5 Orang	65.426.000	0 Orang	62.204.550	-	95	0	69.286.550	0	48,115 6597	Bagian Umum
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peserta Bimbingan Teknis implementasi i peraturan perundang-undangan	Orang	42	141.744.400	8 Orang	34.412.000	2 Orang	15.958.000	25	46	10 Orang	67.687.450	24	48	Bagian Hukum
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peserta Bimbingan Teknis implementasi i peraturan perundang-undangan	Orang	2	11.000.000	0 Orang	-	0 Orang	-	-	-	2 Orang	11.000.000	100	100	Bagian Organisasi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peserta Bimbingan Teknis implementasi i peraturan perundang-undangan	Orang	14	85.717.500	3 Orang	37.588.000	0 Orang	24.304.800	-	65	2 Orang	72.426.324	14	84	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peserta Bimbingan Teknis implementasi i peraturan perundang-undangan	Orang	16	101.651.400	5 Orang	12.050.000	2 Orang	5.500.000	40	46	18 Orang	30.369.500	113	30	Bagian Adm. Pembangunan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peserta Bimbingan Teknis implementasi i peraturan perundang-undangan	Orang	3	28.628.000	0 Orang	-	0 Orang	-	-	-	3 Orang	28.628.000	100	100	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peserta Bimbingan Teknis implementasi i peraturan perundang-undangan	Orang	0	-	17 Orang	25.258.000	12 Orang	20.961.800	71	83	29 Orang	87.202.707	100	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

CAPAIAN KINERJA										28,89	47,35			58,36	70,14	
Predikat Kinerja										sangat rendah	rendah			rendah	sedang	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	45.370.829.258	100%	9.412.904.925	74%	5.320.645.664	100	90	100%	16.156.934.002	1	36	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim berdasarkan nomor surat, Belanja Cetak, Penggandaan, ATK, Makan Minum Harian dan Honor PTT	Jenis	20400	2.912.307.120	2.600 buah	414.935.300	1.082 buah	170.416.700	42	41	1.082 buah	570721387	5	20	Bagian Umum
	Penyediaan jasa surat menyurat		Persen	100	79.336.000	10 surat	7.421.225	3 surat	2.779.700	30	37	400%	22.419.100	4	28	Bagian Pemerintahan
	Penyediaan jasa surat menyurat		Jenis	45 Jenis	6.051.100	9 Jenis	16.884.700	3 Jenis	5.968.600	33	35	12 Jenis	47.135.300	27	779	Bagian Organisasi
	Penyediaan jasa surat menyurat		Jenis	20	69.615.400	50 Jenis	12.037.600	0 Jenis	5.150.000	0	43	17 Jenis	17.635.100	85	25	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
	Penyediaan jasa surat menyurat		Jenis	40 Jenis	48.836.000	200 Jenis	12.341.100	104 Jenis	6.018.500	52	49	112 Jenis	22.391.400	280	46	Bagian Adm. Pembangunan
	Penyediaan jasa surat menyurat		Surat	90 surat	45.887.660	50 surat	6.518.600	0 surat	1.364.100	0	21	58 Jenis	12.346.900	64	27	Bagian Perencanaan & SDA
	Penyediaan jasa surat menyurat		Jenis	20 Jenis	33.032.526	4 Jenis	13.659.260	2 Jenis	13.659.260	50	100	6 Jenis	56.224.580	30	170	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Penyediaan jasa surat menyurat		Jenis	0 Jenis	-	8 Jenis	14.102.600	2 Jenis	5.052.700	25	36	2.602 Jenis	24.431.080	100	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening Listrik, Telepon dan Air	Bulan	72	30.233.460.793	12 bulan	4.797.600.000	3 bulan	2.893.365.773	25	60	3 bulan	7.974.849.820	4	26	Bagian Umum
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sewa Sarana dan prasaran kantor	Jenis	3	391.500.000	3	623.388.800	0 jenis	560.195.000	0	90	0 jenis	997.199.500	0	255	Bagian Umum
	Penyediaan Jasa Jaminan barang milik Daerah	Jumlah Aset daerah yang diasuransikan	Jenis	12	564.100.000	1	150.000.000	0 jenis	150.000.000	0	100	2 jenis	225.000.000	17	40	Bagian Umum
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas	Unit	137 Mobil, 208 Motor	369.400.000	30 Unit	45.300.000	7 Unit	15.740.835	23	35	43 Mobil, 55 Motor	55.904.270	245	15	Bagian Umum
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cleaning Servis taman, Kantor dan Rujab Bupati/Wakil Bupati	Orang	172	1.453.915.000	36 orang	992.051.800	9 orang	435.819.000	25	44	45 orang	927.728.500	26	64	Bagian Umum
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Perbaikan peralatan kerja	Janis	30	130.849.410	6 jenis	21.700.000	2 jenis	3.450.000	33	16	8 jenis	24.896.900	27	19	Bagian Umum
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jenis	35	143.145.107	8 jenis	62.589.120	4 jenis	20.614.900	50	33	12 jenis	49.150.600	34	34	Bagian Umum

	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga	Jenis	20	27.500.000	20 jenis	27.204.020	0 jenis	12.345.091	0	45	20 jenis	50.322.391	100	183	Bagian Umum
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	14	88.092.400	5 jenis	1.500.000	0 jenis	-	0	0	2 jenis	3.750.000	14	4	Bagian Hukum
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	3	2.301.675.376	0 jenis	-	0 jenis	-	0	0	3 jenis	401.435.000	100	17	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi	OK	3112009	4.779.381.668	24 OK	660.451.000	6 OK	291.209.964	25	44	45 OK	1.850.689.219	0	39	Bagian Umum
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi	OK	42	68.641.000	24 OK	53.135.000	3 OK	26.597.379	13	50	27 OK	153.170.784	64	223	Bagian Pemerintahan
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi	OK	876	383.742.019	16 OK	42.007.000	0 OK	12.351.400	0	29	16 OK	77.161.577	2	20	Bagian Organisasi
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi	OK	2	14.038.000	8 OK	28.758.000	0 OK	-	0	0	2 OK	4.660.000	100	33	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi	OK	362	366.396.912	4 OK	24.828.000	2 OK	16.378.000	50	66	38 OK	47.253.815	10	13	Bagian Adm. Pembangunan

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi	OK	83	296.455.456	24 OK	34.498.000	0 OK	5.290.000	0	15	24 OK	102.482.444	29	35	Bagian Perekon omian & SDA
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi	OK	0	-	31 OK	41.127.000	17 OK	40.651.000	55	99	17 OK	130.366.521	100	100	Bagian Kesejaht eraan Rakyat
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi	OK	0	-	28 OK	32.027.000,00	5 OK	18.144.000	18	57	33 OK	160.828.465	100	100	Bagian Pengada an Barang dan Jasa
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	OK	775	250.990.000	194	1.215.575.000	34 OK	577.088.562	18	47	228 OK	2.036.565.149	29	811	Bagian Umum
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	OK	285	37.000.000	108	11.600.000	20 OK	11.320.000	19	98	128 OK	22.150.000	45	60	Bagian Pemerint ahan
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	OK	1272	22.404.160	28	3.932.000	0 OK	-	0	0	28 OK	3.760.000	2	17	Bagian Organis asi
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	OK	4690	74.243.000	14	7.140.000	0 OK	-	0	0	6 OK	1.760.000	0	2	Bagian Protokol & Komuni kasi Pimpina n
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten, makan minum rap dan makan minum Tamu	OK	888	99.943.791	25	13.646.000	10 OK	9.544.000	40	70	79 OK	23.188.000	9	23	Bagian Adm. Pembana gunan

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten, makan minum rap dan makan minum Tamu	OK	2006	57.643.360	82	11.520.000	0 OK	2.000.000	0	17	82 OK	17.944.000	4	31	Bagian Perekonomian & SDA
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten, makan minum rap dan makan minum Tamu	OK	154	12.320.000	6	8.450.000	4 OK	7.920.000	67	94	4 OK	25.630.000	3	208	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten, makan minum rap dan makan minum Tamu	OK	22	8.926.000	2	4.976.800	0 OK	211.200	0	4	2 OK	15.782.200	9	177	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
CAPAIAN KINERJA										20,34	43,41			49,10	110,16	
Predikat Kinerja										sangat rendah	rendah			rendah	sangat tinggi	
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	24.806.991.072	100	5.064.555.332	100%	2.624.224.335	1	52	100%	11.332.451.915	1	46	
	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang di beli	Unit	8	1.502.000.000	1	679.275.000,00	1 OK	678.000.000	100	100	1 OK	1.778.285.000	13	118	Bagian Umum
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang di beli	Unit	50	5.081.023.000	0	0,00	0 unit	-	0	0	3 unit	2.734.287.500	6	54	Bagian Umum

	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis	60	1.134.636.900	0	-	0 jenis	-	0	0	12 jenis	312.650.000	20	28	Bagian Umum
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Jenis	60	496.553.000	12	459.904.400	0 jenis	447.793.000	0	97	12 jenis	978.993.000	20	197	Bagian Umum
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Jenis	12	46.704.015	0	0,00	0 jenis	-	0	0	0 jenis	-	0	0	Bagian Perekonomian & SDA
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Jenis	9	18.200.000	0	0,00	0 jenis	-	0	0	0 jenis	11.334.000	0	62	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Jenis	1	1.500.000	0	0,00	0 jenis	-	0	0	1 jenis	1.496.000	100	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis	21	1.579.614.200	16	35.000.000	0 jenis	-	0	0	8 jenis	113.550.000	38	7	Bagian Umum
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jenis	25	627.888.309	5	75.378.500	0 jenis	72.214.500	0	96	2 jenis	164.710.200	8	26	Bagian Umum
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jenis	18	48.840.800	0	0,00	0 jenis	-	0	0	1 jenis	17.645.840	6	36	Bagian Organisasi
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jenis	5	16.707.600	0	-	0 jenis	-	0	0	1 jenis	6.989.600	20	42	Bagian Perekonomian & SDA
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jenis	7 jenis	22.200.000	0	0,00	0 jenis	-	0	0	4 jenis	25.754.000	57	116	Bagian Kesejahteraan Rakyat

	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jenis	0	-	2	16.000.000,00	2 jenis	15.889.400	100	99	5 jenis	89.866.400	0	0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	Jenis	5	25.047.000	1	729.160.000,00	0 jenis	71.941.000	0	0	0 jenis	71.941.000	0	287	Bagian Umum
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	Jenis	5	25.047.000	0	0,00	0 jenis	-	0	0	0 jenis	20.700.000	0	83	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan	Unit	18	2.264.000.000	3	822.015.432	3 unit	97.028.200	100	12	6 jenis	821.427.680	33	36	Bagian Umum
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	Unit	33	1.635.939.061	3	1.024.572.000	0 unit	611.145.400	0	60	0 jenis	2.250.475.743	0	138	Bagian Umum
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan	Unit	30	619.027.185	7	270.540.000	2 unit	157.226.254	29	58	7 jenis	417.871.253	23	68	Bagian Umum
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Unit	116	1.184.099.600	28	444.300.000	8 unit	189.621.974	29	43	37 jenis	580.030.567	32	49	Bagian Umum
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	Unit	7	19.500.000	1	5.050.000	0 unit	-	0	0	1 jenis	7.035.000	14	36	Bagian Hukum
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	Unit			1	3.250.000	1 unit	1.400.000	100	43	2 jenis	6.900.000	100	100	Bagian Organisasi

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	Unit	7	40.735.700	1	13.000.000	0 unit	8.047.500	0	62	2 jenis	16.744.500	29	41	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	Unit	1	39.683.150	2	8.550.000	1 unit	1.665.000	50	19	3 jenis	7.966.000	300	20	Bagian Adm. Pembangunan
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	Unit	1	24.623.925	2	3.120.000	1 unit	1.375.000	50	44	4 jenis	4.291.000	400	17	Bagian Perencanaan & SDA
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	Unit			3	5.500.000	3 unit	3.565.250	100	65	5 jenis	18.532.910	100	100	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	Unit			1	8.710.000	0 unit	500.000	0	6	2 jenis	3.930.000	0	0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Rumah jabatan/dinas	Unit	18	575.970.052	3	144.880.000,00	0 unit	114.490.957	0	79	3 unit	259.020.276	17	45	Bagian Umum
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Service dan Penggantian Suku Cadang perlengkapan gedung kantor	Unit	6	666.515.125	3	159.000.000,00	0 unit	68.354.900	0	43	3 unit	426.282.721	50	64	Bagian Umum
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan	Service dan Penggantian Suku	0 unit	12	23.205.000	0	0,00	0 unit	-	0	0	1 unit	1.300.000	8	6	Bagian Adm. Pemban

	gedung kantor	Cadang perlengkapan gedung kantor														gunan
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Service dan Penggantian Suku Cadang perlengkapan gedung kantor	0 unit	27	11.438.075	0	0,00	0 unit	-	0	0	0 unit	-	0	0	Bagian Perekon omian & SDA
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Rumah jabatan/dinas	Jenis	15	250.127.000	3	32.000.000,00	1 jenis	16.797.000	33	52	4 jenis	44.103.300	27	18	Bagian Umum
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Service dan Penggantian Suku Cadang peralatan gedung kantor	Unit	3	232.079.000	3	113.900.000,00	0 unit	64.519.000	0	57	11 unit	115.383.425	367	50	Bagian Umum
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Service dan Penggantian Suku Cadang peralatan gedung kantor	Unit	40	13.050.000	6	2.800.000,00	2 unit	1.000.000	33	36	8 unit	2.900.000	20	22	Bagian Pemerint ahan
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Service dan Penggantian Suku Cadang peralatan gedung kantor	Unit	64	43.040.955	4	2.950.000,00	0 unit	-	0	0	5 unit	5.205.000	8	12	Bagian Adm. Pembangun
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Service dan Penggantian Suku Cadang peralatan gedung kantor	Unit	28	14.511.120	3	2.600.000,00	0 unit	-	0	0	9 unit	3.100.000	32	21	Bagian Perekon omian & SDA

	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Service dan Penggantian Suku Cadang peralatan gedung kantor	Unit	9	3.901.300	4	1.650.000,00	4 unit	1.650.000	100	100	6 unit	9.550.000	67	245	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Service dan Penggantian Suku Cadang peralatan gedung kantor	Unit	0	-	2	1.450.000,00	0 unit	-	0	0	2 unit	2.200.000	100	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang di beli	Unit	50	6.519.583.000	0	0,00	0 unit	-	0	0	0 unit	-	100	100	Bagian Umum
CAPAIAN KINERJA										21,15	31,34			54,22	63,83	
Predikat Kinerja										Sangat rendah	Sangat rendah			Rendah	Rendah	
4	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	1.294.370.500	100%	315.500.000	100%	254.090.000	100	81	10100%	1.008.204.000	101	78	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas untuk Bupati/Wakil Bupati dan Aparatur Pemda	Unit	33	1.042.559.000	5	140.000.000,00	5 Unit	114.975.000	100	82	13 Unit	247.630.000	39	24	Bagian Umum
	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI untuk Bupati/Wakil Bupati dan Aparatur	Jenis	7 jenis	10.082.000	1 jenis	3.000.000,00	1 jenis	1.500.000	100	50	2 jenis	4.500.000	29	45	Bagian Umum

		Pemda														
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu untuk Bupati/Wakil Bupati dan Aparatur Pemda	Jenis	18 jenis	241.729.500	3 jenis	172.500.000,00	0	137.615.000	0	80	4	756.074.000	22	313	Bagian Umum
CAPAIAN KINERJA										75,00	73,11			47,80	114,76	
Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi			rendah	sangat tinggi	
5	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Persentase Organisasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Persen	100	969.843.500	10	53.492.550	10%	12.465.250	100	23	5010%	382.168.995	50	39	
	Penataan, Pemetaan dan Penetapan Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pilar	120	969.843.500	10	53.492.550	0 Pilar	12.465.250	0	23	10 Pilar	85.073.118	8	9	Bagian Pemerintahan
CAPAIAN KINERJA										50,00	23,30			29,22	24,09	
Predikat Kinerja										sangat rendah	sedang			sangat rendah	sangat rendah	

6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terjalannya Koordinasi dan komunikasi dan harmonis dengan stake holder	Kali	2231	10.859.193.026	382	4.425.519.500	140 kali	1.923.991.129	37	43	851 kali	8.357.664.655	38	77	Bagian Umum
	Dialog/audie nsi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah Dialog/audiensi dengan stake holder kemasyarakan	Kali	476	5.511.222.000	55	1.413.250.000	10 kali	910.204.132	18	64	65 kali	2.357.187.585	14	43	Bagian Umum
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah Dialog/ Audiensi dengan Pejabat Negara/ Non Departemen	Kali	660	5.585.850.000	80	1.249.700.000	15 kali	388.999.300	19	31	95 kali	1.848.967.832	14	33	Bagian Umum
	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Jumlah Rapat koordinasi dengan unsur MUSPIDA	Kali	65	315.057.500	5	83.824.000,00	2 kali	67.215.000	40	80	7 kali	147.732.516	11	47	Bagian Umum
	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Jumlah Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Kali	132	358.337.600	6	68.017.500,00	1 kali	21.653.000	17	32	7 kali	86.359.000	5	24	Bagian Umum
	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Kali	7	5.025.010.000	150	823.094.000,00	30 kali	279.776.856	20	34	180 kali	958.429.802	2571	19	Bagian Umum

	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Kali	765	5.342.490.000	80	537.634.000,00	20 kali	164.149.641	25	31	100 kali	764.651.359	13	14	Bagian Umum
	Perawatan dan Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perawatan dan Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kali	126	676.920.000	6	250.000.000,00	2 kali	91.993.200	33	37	5 kali	215.149.700	4	32	Bagian Umum
CAPAIAN KINERJA										24,56	44,12			376,08	30,29	
Predikat Kinerja										sangat rendah	rendah			Sangat Tinggi	sangat rendah	
7	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kontrol Administrasi Keuangan	Persen	100%	512.627.978	17%	41.050.200	100%	-	588	0	28%	68.380.400	28	13	Bagian Umum
	Penyusunan standar satuan harga	Buku acuan penetapan harga barang dan jasa serta besaran biaya perjalanan dinas	Buku	10	512.627.978	2	41.050.200,00	1	-	50	0	1	68.380.400	52	13,34	Bagian Umum
CAPAIAN KINERJA										50,00	-			52,00	13,34	
Predikat Kinerja										rendah	Sangat rendah			rendah	Sangat rendah	

8	Program Penerapan Kepemerintahan yang baik	Transparansi dan akuntabilitas penyediaan Barang dan Jasa Pemda	Paket	900	5.320.440.191	150	204.756.500	50	42.393.507	33	21	455 Paket	333.705.262	51	6	Bagian Pengadaan Barang dan jasa
	Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Paket di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Paket	900	5.320.440.191	150	173.629.500,00	50	42.393.507	33	24	455 Paket	333705262	183 Paket	100	Bagian Pengadaan Barang dan jasa
	Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)			0	-	1	31.127.000,00	0	1.050.000	0	3	0 Paket	1.050.000	1 Paket	100	Bagian Pengadaan Barang dan jasa
CAPAIAN KINERJA										16,67	13,89			92,17	100,00	
Predikat Kinerja										Sangat rendah	Sangat rendah			sangat tinggi	sangat tinggi	
9	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Pelayanan Publik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Persen	70%	434.393.577	0%	-	0%	-	0	0	200%	47.617.650	286	11	Bagian Pemerintahan
	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	Jumlah penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Kali	14	434.393.577	0	-	0 kali	-	0	0	4 kali	47.617.650	29	11	Bagian Pemerintahan
CAPAIAN KINERJA										-	-			28,57	10,96	
Predikat Kinerja										Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	

10	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang kompeten	Persen	10%	130.180.000	0%	-	0%	-	0	0	10%	121.715.000	100	93	Bagian Pemerintahan
	Pelatihan aparatur pemerintah desa, kel dan kecamatan dalam manajemen pemerintahan	Jumlah aparat desa, kelurahan, kecamatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan manajemen pemerintahan	Orang	117	130.180.000	0	-	0 kali	-	0	0	44 kali	121.715.000	38	93	Bagian Pemerintahan
CAPAIAN KINERJA										-	-			37,61	93,50	
Predikat Kinerja										Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat tinggi	
11	Program pemberdayaan Potensi Keamanan	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum	Persen	100	381.876.686	100	89.328.000	100%	7.418.250	100	8	4200 %	107.407.438	42	28	
	Pembinaan Hukum dan Kamtibmas	Jumlah Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Umum	Orang	150	381.876.686	41	89.328.000,00	20 orang	7.418.250	49	8	61 orang	107.407.438	41	28	Bagian Pemerintahan
CAPAIAN KINERJA										48,78	8,30			40,67	28,13	
Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

12	Program peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Persentase Kerjasama antar Pemerintah daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Persen	100	365.090.900	2	88.709.450	100%	19.309.500	50	22	300%	129.543.341	3	35	
	Fasilitasi/pe mbentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Jumlah Kerjasama antar Daerah dalam penyediaan Pelayanan Publik	Kerjasama	9	365.090.900	2	88.709.450	2 kerjasama	19.309.500	100	22	4 kerjasama	129.543.341	44	35	Bagian Pemerint ahan
CAPAIAN KINERJA										100,00	21,77			44,44	35,48	
Predikat Kinerja										Sangat tinggi	Sangat Rendah			rendah	Sangat Rendah	
13	Program Penerapan Kepemerintahan yang baik	Jumlah Kebutuhan data sebagai bahan evaluasi kinerja Pemkab. Kepada Pemerintah Pusat	Dokumen	42	2.153.095.359	4	169.450.125	8 Dokumen	129.916.442	200	77	16 Dokumen	447.936.245	38	21	
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah LPPD, LKPj, IKK, EKPOD dan Laporan Akhir Masa Jabatan	Dokumen	21	2.064.112.250	4	169.450.125,00	4 Dokumen	129.916.442	100	77	8 Dokumen	431.264.495	38	21	Bagian Pemerint ahan
	Penyusunan Laporan Reguler (Evaluasi dan Implementasi Otoda)	Jumlah Laporan Reguler	Dokumen	21	88.983.109	0	0,00	0 Dokumen	-	0	0	4 Dokumen	16.671.750	19	19	Bagian Pemerint ahan

CAPAIAN KINERJA										50,00	38,33			28,57	19,81	
Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
14	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Persentase sarana prasarana peribadatan yang dibina pemerintah daerah	Persen	100	34.918.764.597	100	10.789.975.160	100%	3.987.611.710	100	37	12600 %	19.312.315.405	126	55	
	Pembinaan Kehidupan Umat Beragama	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kehidupan umat beragama	Kegiatan	33	7.888.512.571	1	1.159.914.560,00	1 Kegiatan	695.135.710	100	60	2 Kegiatan	4.534.728.410	6	57	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Pembinaan Lembaga Pendidikan Formal, Informal, Pengajian Dasar dan Majelis Taklim	Jumlah kegiatan Pembinaan Lembaga Pendidikan Formal, Informal, Pengajian Dasar dan Majelis Taklim yang dibina oleh Pemda Barru	Kegiatan	36	13.063.880.187	1105	4.780.969.600,00	1.105 Kegiatan	1.312.636.000	100	27	2.205 Kegiatan	5.486.610.000	6125	42	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan	Jumlah Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan	Kegiatan	47	13.805.269.000	1	4.832.290.000,00	1 Kegiatan	1.979.840.000	100	41	2 Kegiatan	6.277.100.000	4	45	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Pembinaan dan fasilitasi kehidupan beragama aparatur	Jumlah Kegiatan pembinaank ehidupan beragama aparatur	Kegiatan	8	35.855.451	1	4.312.000,00	0 Kegiatan	-	0	0	1 Kegiatan	8.435.000	13	24	Bagian Kesejahteraan Rakyat

	Penyusunan kerangka regulasi keagamaan	Jumlah regulasi keagamaan	Doku men	126	125.247.388	18	12.489.000 ,00	18 Dokume n	-	100	0	19 Doku men	30.558.000	15	24	Bagian Kesejaht eraan Rakyat
CAPAIAN KINERJA										80,00	25,67			1.232 ,58	38,58	
Predikat Kinerja										Tinggi	San gat Ren dah			Sang at Tingg i	sangat rendah	
15	Program Pengembang an Lingkungan Sehat	Persentase Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Ma drasah (UKS/M)	Persen	100	307.706.100	100	13.948.000	100%	1.280.000	100	9	100%	1.280.000	1	0	
	Pembinaan Tim Pembina UKS/Madrasa h Kecamatan dan Sekolah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan UKS/M	Kali	12	15.000.000	4	13.948.000 ,00	0 Kegiatan	1.280.000	0	9	0 Kegiat an	31.964.500	0	213	Bagian Kesejaht eraan Rakyat
		Jumlah Rapat Koordinasi Tim Pembina UKS/M	Kali	12	75.000.000											
CAPAIAN KINERJA										-	9,18			-	213,10	
Predikat Kinerja										Sanga t Renda h	San gat Ren dah			Sang at renda h	Sangat tinggi	

16	Program Penanggulangan kemiskinan Berbasis Keluarga	Jumlah Fakir Miskin Yang difasilitasi mendapatkan dana dari BAZ Kabupaten Barru	Orang	28190	217.706.100	5.638	14.998.000	-	-	0	0	0%	-	0	0	
	Optimalisasi BAZ	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan dana dari BAZ Kabupaten Barru	Orang	28190	217.706.100	5638	14.998.000,00	-	-	0	0	0 Kegiatan	51.098.000	0	23	Bagian Kesejahteraan Rakyat
CAPAIAN KINERJA										-	-			-	23,47	
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat rendah	sangat rendah	
17	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100%	100%	1.049.579.310	100%	64.557.000	100%	-	100	0	600%	122.403.134	600	12	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
	Pelaksanaan Dokumentasi Kegiatan	Pendokumentasian kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru	Eksplan	450	1.049.579.310	0	0,00	3 Eks	-	0	0	8 Eks	122.403.134	2	12	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
	Pelaksanaan Kegiatan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan	Jenis	0	-	3	64.557.000,00	3 Eks	15.632.000	100	24	3 Eks	15.632.000	0	0	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
CAPAIAN KINERJA										-	-			0,89	5,83	

Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16	Program Kerjasama Informasi dan media massa	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4.046.375.836	0%	-	0%	-	0	0	800%	894.093.544	800	22	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kali	590	3.487.970.836	0	0,00	3 kali	-	0	0	7 kali	867.086.544	1	25	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Pelaksanaan Safari Ramadhan (Bakohumas)	Kali	4	558.405.000	0	0,00	0 kali	-	0	0	4 kali	27.007.000	100	5	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
CAPAIAN KINERJA										-	-			50,59	14,85	
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			rendah	Sangat Rendah	
17	Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Dipertahankan Persentase Pelaksanaan Tugas-tugas keprotokoleran sesuai Pedoman Protokoler Negara	100%	100%	1.123.574.900	100%	237.928.800	100%	39.694.600	100	17	9 Kegiatan	585.297.032	900	52	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
	Pengembangan Operasional Kehumasan Daerah	Pelaksanaan operasional Kehumasan Daerah	Jenis	12	1.123.574.900	0 jenis	0,00	2 jenis	-	0	0	5 jenis	256.340.346	42	23	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan

																n
	Pengembangan Operasional Keprotokolera n Daerah	Pelaksanaan Tugas Operasional Tim Satgas Protokolera, ADC Bupati, Wakil Bupati, dan ADC Sekretaris Daerah	Jenis	22 jenis	2.319.270.680	2 jenis	237.928.800,00	2 jenis	39.694.600	100	17	7 jenis	328.956.686	32	14	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
CAPAIAN KINERJA										50,00	8,34			36,74	18,50	
Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase paket di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang terlaksana	Persen	100%	423.418.300	0%	-	100%	-	0	0	3 Kegiatan	121.528.832	100	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan yang dilaksanakan	Paket	185	423.418.300	0	0,00	2 jenis	-	0	0	4 jenis	121.528.832	2	29	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
CAPAIAN KINERJA										-	-			51,08	64,35	
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	rendah	

19	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH	100%	100%	3.932.558.864	100%	274.812.000	100%	67.623.200	100	25	100%	1.421.397.850	100	36	Bagian Adm. Pembangunan
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Rapat-rapat koordinasi PAU, pembinaan Jasa Konstruksi, pengawasan realisasi anggaran dan pengendalian kegiatan pembangunan	Kali	142 kali	3.932.558.864	2 kali	267.532.000,00	1 kali	67.623.200	50	25	7 kali	427.178.110	5	11	Bagian Adm. Pembangunan
	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian kegiatan pembangunan	Jumlah monitoring kegiatan pembangunan	Kali	200 kali	36.840.000	100 kali	7.280.000,00	0 kali	-	0	0	0 kali	-	0	0	Bagian Adm. Pembangunan
CAPAIAN KINERJA										50,00	25,28			4,93	10,86	
Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	Cakupan Rekomendasi yang difasilitasi tim tindak lanjut	100%	100%	1.503.997.970	100%	111.689.200	100%	31.969.800	100	29	300%	584.501.000	300	39	

	kebijakan KDH															
	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	konsultasi hukum dan HAM serta fasilitasi bantuan hukum dan HAM	Kasus	108	763.543.400	1	35.377.500,00	1 OK	5.685.000	100	16	2 OK	42.242.500	2	6	Bagian Hukum
	inventarisasi temuan pengawas	Jumlah inventarisasi temuan pengawas	LHP	280	533.403.300	5	48.790.000,00	5 data	20.864.800	100	43	10 data	128.159.720	4	24	Bagian Hukum
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Koordinasi pengawasan Internal	Laporan	16	59.550.800	5	11.030.000,00	5 pertemuan	2.085.000	100	19	10 pertemuan	20.953.500	63	35	Bagian Hukum
	evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data	Jenis	16	147.500.470	5	16.491.700,00	5 pertemuan	3.335.000	100	20	10 pertemuan	37.991.042	63	26	Bagian Hukum
CAPAIAN KINERJA										100,00	24,49			32,61	22,63	
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
21	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah Daerah	Jumlah Produk Hukum yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi Hukum	Perda	40	257.716.340	10	10.377.000	10 Perda	-	100	0	11 Perda	66.144.600	28	26	
	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum	Terfasilitasinya kegiatan antar daerah di bidang hukum	Pertemuan	16	257.716.340	1	10.377.000,00	1 pertemuan	-	100	0	2 pertemuan	66.144.600	13	26	Bagian Hukum
CAPAIAN KINERJA										100,00	-			12,50	25,67	

Predikat Kinerja										Sangat tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
22	Program penataan peraturan perundang-undangan	Cakupan produk hukum daerah yang ditetapkan tepat waktu	Perda	40	2.331.087.415	10	215.763.000	4 Perda	55.144.850	40	26	41 Perda	733.647.626	103	31	
	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tesedianya Progam legalisasi daerah Kabupaten	Promperda	4	192.252.350	1	25.409.000,00	1 dokumen	15.028.650	100	59	2 dokumen	59.222.750	50	31	Bagian Hukum
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen legalisasi penyusunan dan perumusan ranperda rancangan peraturan kepala daerah, konsultasi, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi	Perda	4	838.758.650	10	110.019.000,00	10 dokumen	22.564.200	100	21	20 dokumen	312.097.006	500	37	Bagian Hukum
	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi ranperda dan produk hukum lainnya	Kecamatan	28	355.904.900	0	0,00	7 Kecamatan	-	0	0	14 Kecamatan	60.469.500	50	17	Bagian Hukum
	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Perda yang di publikasikan	Perda	40	200.008.200	0	0,00	0 Perda	-	0	0	10 Perda	67.322.500	25	34	Bagian Hukum

	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-undangan	Jumlah Kajian dan penelitian produk hukum daerah	Kajian	72	605.679.970	4	68.922.000,00	1 kali	12.635.000	25	18	5 kali	181.580.020	7	30	Bagian Hukum
	Orientasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)	Jumlah Pelaksanaan orientasi dan sosialisasi RANHAM	Dokumen	120	138.483.345	5	11.413.000,00	0 dokumen	4.917.000	0	43	5 orang	52.955.850	4	38	Bagian Hukum
CAPAIAN KINERJA										37,50	23,51			106,02	31,15	
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
23	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Dokumen	180	163.197.900	142	32.487.500	142 dokumen	15.262.601	100	47	187 dokumen	44.647.601	104	27	
	Pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Cakupan Rekomendasi yang difasilitasi tim tindak lanjut	WL	180	163.197.900	142	32.487.500,00	142 dokumen	15.262.601	100	47	284 dokumen	44.647.601	158	27	Bagian Hukum
CAPAIAN KINERJA										100,00	46,98			157,78	27,36	

Predikat Kinerja										Sangat tinggi	Rendah			Sangat tinggi	Sangat Rendah	
24	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Pembentukan Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Aturan dan Tujuan Penyusunannya serta Implementasi Ketatalaksanaan	Persen	38%	659.331.700	100%	50.950.950	100%	26.945.000	100	53	400%	119.899.500	1040	18	Bagian Organisasi
	Evaluasi Struktur Kelembagaan	Hasil Evaluasi Struktur Kelembagaan Perangkat Daerah	Kegiatan	4	313.905.600	1	29.010.650,00	1 kegiatan	12.640.000	100	44	0 kegiatan	-	0	0	Bagian Organisasi
	Penyusunan (Reorganisasi) Perangkat Daerah dan Penyusunan Naskah Akademik	Penyusunan Prarancangan regulasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Naskah Akademik	Dokumen	1	207.712.100	2	8.356.300,00	1	4.200.000	50	50	3	39.683.700	300	19	Bagian Organisasi
	Sosialisasi tata naskah dinas manual dan elektronik	Jumlah tata naskah dinas	Dokumen	5	137.714.000	1	13.584.000,00	1	10.105.000	100	74	2	33.533.600	40	24	Bagian Organisasi
CAPAIAN KINERJA										83,33	56,07			113,33	14,49	
Predikat Kinerja										Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Ketersediaan SOPP dan Standar	100%	100%	229.659.068	100%	15.656.800	100%	4.995.000	100	32	200%	29.326.472	200	13	Bagian Organisasi

		Pelayanan Publik														
	Penilaian Citra Pelayanan Publik (CPP) tingkat Unit Pelayanan	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional	OPD	4	229.659.068	1	15.656.800,00	0	4.995.000	0	32	1	29.326.472	25	13	Bagian Organisasi
CAPAIAN KINERJA										-	31,90			25,00	12,77	
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
26	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kerja	Persentase SKPD yang Memiliki/menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	100%	177.968.427	0%	-	0%	-	0	0	100%	4.399.000	100	2	Bagian Organisasi
	Fasilitasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SKPD yang dikoordinasikan	Dokumen	148 dokumen	177.968.427	0 dokumen	0,00	0 dokumen	-	0	0	37	4.399.000	25	2	Bagian Organisasi
CAPAIAN KINERJA										-	-			25,00	2,47	
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
27	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Analisis Jabatan yang tersusun sesuai Beban Kerja	2 Dokumen	8 Dokumen	1.409.456.200	2 Dokumen	57.940.400	1 orang	28.756.000	50	50	0 orang	-	0	0	Bagian Organisasi

	Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dokumen	8 dokumen	1.309.856.200	2 dokumen	42.823.500,00	1 dokumen	19.909.500	50	46	0 dokumen	-	0	0	Bagian Organisasi
	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dokumen	7 dokumen	99.600.000	1 dokumen	15.116.900,00	1 dokumen	8.846.500	100	59	0 dokumen	-	0	0	Bagian Organisasi
CAPAIAN KINERJA										50,00	48,06			-	-	
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
28	Program Pengembangan Perekonomian Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Perekonomian Daerah	100%	100%	569.694.353	100%	49.843.000	200%	10.072.420	200	20	700%	523.584.198	700	92	Bagian Perekonomian & SDA
	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Intensitas koordinasi dan Laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan	Laporan	4 Laporan	110.244.635	1 Laporan	14.330.000,00	1 Laporan	10.072.420	100	70	2 Laporan	31.483.120	50	29	Bagian Perekonomian & SDA
	Fasilitasi Pengembangan Perekonomian Daerah	Jumlah fasilitasi	dokumen	5 dokumen	459.449.718	1 dokumen	13.753.500,00	0 dokumen	-	0	0	1 dokumen	444.288.878	20 dokumen	97	Bagian Perekonomian & SDA
	Koordinasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)	Jumlah koordinasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)	dokumen	5 dokumen	240.111.417	1 dokumen	21.759.500,00	0 dokumen	1.650.000	0	8	1 dokumen	49.462.200	20 dokumen	21	Bagian Perekonomian & SDA
CAPAIAN KINERJA										33,33	25,96			30,00	48,62	
Predikat Kinerja										Sangat	Sangat			Sangat	rendah	

										Renda h	Ren dah				Rend ah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					146.064.33 6.998,97		41.712.323 .682,00		14.745.532 .408,00				63.503.821 .428,00				
					28.886.486. 996,00	26.527.853 .048,00	15.184.470 .634,00	26.354.3 37.593	11.608.805 .185,00								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)									491.517.74 6,93								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)									35,35%								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pimpinan yang kooperatif																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan, dan terjadi perubahan skedule pelaksanaan kegiatan																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : *)																	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2020) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI TA. 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TA. 2020 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TA. 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TA. 2020 (%)		UNIT PERAN GKAT DAER AH PENAN GGUN G JAWA B
		Uraian	Satuan													
1	4	5		6		8		(13) = 9 + 10 + 11 + 12		(14) = 13 / 8 * 100		(15) = 7 + 13		(16) = 15 / 6 * 100		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya ketersediaan unsur-unsur yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Inspektorat Daerah															
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	%	100	1.784.177.589	100	180.955.400	176	318.797.797	176,170	176,175	255,740	1.023.248.452	003	57,351	

	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran dalam pengiriman surat dan Laporan	Surat/ LHP	75000	287.422.2 08	150 0	29.926.50 0	192,53 000	57.612.6 88	12,8353333 3	192,5 14	281,9 97	171.038.0 28	000	59,508	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, listrik dan air yang dibayarkan	bulan	13	141.000.0 00	2	1.800.000	156,88 000	2.824.00 0	7.844,000	156,8 89	223,5 47	41.570.80 0	017	29,483	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operas ional	Jumlah jasa perizinan Kendaraan Dinas/opera sional	unit	29	41.900.00 0	6	6.450.000	31,380 00	2.024.20 0	523,000	31,38 3	131,3 80	12.058.19 0	005	28,778	
	Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhiny a jasa kebersihan kantor sehari-hari	orang	5	30.000.00 0	1	4.800.000	216,68 000	10.400.0 00	21.668,000	216,6 67	316,6 80	24.800.00 0	063	82,667	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	unit	51	29.614.00 0	14	4.200.000	9,5200 0	400.000	68,000	9,524	69,52 0	20.061.00 0	001	67,742	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor	Jenis	30	68.851.55 2	5	-	-	0	-		,000	5.000.000	0,00	7,262	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Jenis	13	13.022.80 0	6	10.821.40 0	45,070 00	4.877.17 1	751,166666 67	45,07 0	53,07 0	8.722.371	4,08	66,978	
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan	Jumlah rapat koordinasi keluar	kali	113	729.234.0 00	24	114.673.5 00	200,72 000	230.172. 074	836,333333 33	200,7 19	272,7 20	697.176.1 99	2,41	95,604	

	Konsultasi ke Luar Daerah	daerah yang dilaksanakan														
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan	kali	72	60.332.000	15	8.284.000	126,68000	10.487.664	844,533333	126,601	181,680	42.821.864	2,52	70,977	
Rata-rata capaian kinerja (%)										4068,48	122,42			11,93	63,62	
Predikat Kinerja																
	Meningkatnya ketersediaan unsur-unsur yang mendukung operasional pelaksanaan tupoksi pada Inspektorat Daerah															
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	%	100	227.750.000	100	41.356.900	81,03000	23.253.000	81,03000	56,23	181,03	146.061.219	2,51	64,132	
	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor	unit	32	30.000.000	3	0	-	-	-		-	5.811.520	-	19,372	
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	unit	26	44.649.600	4	8.238.000	-	-	-		6,000	42.152.500	0,05	94,407	
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	unit	15	38.649.600	-	-	77,92000	11.473.000			78,920	24.973.000	0,70	64,614	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah/luas an gedung kantor yang dipelihara	unit/m2	1	37.208.000	1	14.723.900	37,62000	-	3.762,000		37,620	15.375.700	0,33	41,324	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	25	115.716.880	5	10.695.000	129,6000	8.683.000	2.592,000	81,187	134,600	53.236.499	1,19	46,006	

	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkap an gedung kantor yang dipelihara	unit	35	18.604.00 0	15	3.200.000	-	-	-	,0	,000	0	0,00	,0	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkal a Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	33	27.900.00 0	5	4.500.000	68,820 00	3.097.00 0	1.376,4000	68,82	68,82 0	4.512.000	0,61	16,172	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor yang dipelihara	unit	100	14.000.00 0	15		-	-	-	-	,000	0	0,00	,0	
Rata-rata capaian kinerja (%)										1288,40	25,00			0,48	46,98	
Predikat Kinerja																
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pada Inspektorat Daerah															
3.	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	%	100		-	92,380 00	-				192,3 80	2.000.000	1,70		
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersampaika n tepat waktu	Laporan	5	2.500.000	1	-	16,400 0	-	1.640,000		17,40 0	500.000	0,15	20,0	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran yang tersampaika n tepat waktu	Laporan	5	2.500.000	1	-	28,410 00	-	2.841,000		29,41 0	500.000	0,26	20,0	

	Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang tersampaika n tepat waktu	Laporan	5	2.500.000	1	-	6,9100 0	-	691,000		7,910	500.000	0,07	20,0	
	Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah RKA dan DPA yang tersampaika n tepat waktu	dokumen	10	2.500.000	2	-	-	-	-		2,000	500.000	0,02	20,0	
Rata-rata capaian kinerja (%)										75%	25%			40%	20%	
Predikat Kinerja																
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumber daya aparaturnya	%	100% dari 3 undan gan bimtek	86.222.00 0	3	3.000.000	369,52 000	2.771.30 1	12.317,333 33333	92,38	436,1 87	20.601.30 1	3,86	23,893	
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang- undangan	Jumlah staf/aparat yang mengikuti Bimbingan Teknis	orang	25	86.222.00 0	3	3.000.000	369,52 000	2.771.30 1	12.317,333 33333	0,00	375,5 20	20.601.30 1	3,32	23,89	
Rata-rata capaian kinerja (%)										12317,33	0,00			0,00	23,89	
Predikat Kinerja														0,00		
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan melalui pemenuhan tugas-tugas mandatory audit													0,00		
5.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap obyek pemeriksaan	%	100	11.039.12 1.532	100 %	1.895.228 .700	180,55 000	1.522.27 2.650	18.055,000	80,32	184,3 50	5.926.737 .002	1,63	53,688	Inspekt orat

	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	1. Jumlah obyek pemeriksaan yang diaudit secara komprehensi f/ reguler	obyek pemeriks aan/ LHP	186	3.749.954. 789	148	985.711.0 00	244,85 000	984.486. 000	165,439189 19	99,88	276,8 50	4.158.759 .600	2,45	110,902	Inspekt orat
	- Audit Reguler - Audit Kinerja - Audit TT - Audit rekomendasi fisik - Stock/Cash Opname	2. Jumlah pemeriksaan tujuan tertentu yang dilaksanaka n	obyek pemeriks aan/ LHP	422	388.800.0 00			-				174,0 00		1,54	,0	
		2. Jumlah pemeriksaan rekomendasi fisik	LHP		845.600.0 00			-	-			,000		0,00	,0	
		4. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang di Stock Opname dan Kas Opname	SKPD/un it Kerja	233 obrik	235.000.0 00	37		-	-			85,00 0		0,75	,0	
	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeriksaan Khusus Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Kasus/L HP	105	344.900.0 00	24	71.650.00 0	158,89 000			0,00	175,8 90	161.200.0 00	1,56	46,738	Inspekt orat
	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH						223.925.0 00	153,79 000	223.840. 000		99,96	153,7 90		1,36	#DIV/0!	
	- Reviu LKPD - Reviu LAKIP Pemda - Reviu	1. Jumlah entitas pelaporan yang direviu	LHR	5	85.650.00 0	1		2,000				3,000		0,03	,0	Inspekt orat

	RKA/RKAP - Reviu RKPD/RKPD- P - Reviu Renja/Renja- P - Evaluasi SAKIP SKPD - Reviu DAK	Reviu LAKIP Pemda yang dilakukan	LHR	5	254.700.0 00	1		-				1,000		0,01	,0	Inspekt orat
		Jumlah SKPD yang dievaluasi LAKIPnya	LHE	119	235.000.0 00	22		-	-			14,00 0	-	0,12	,0	Inspekt orat
		Jumlah SKPD/Unit Kerja yang direviu RKA	SKPD/un it Kerja	171	260.000.0 00	30		-	-			30,00 0		0,27	,0	Inspekt orat
		Jumlah Pendamping an yang dilakukan	Desa	242	467.500.0 00	40		-				40,00 0		0,35	,0	Inspekt orat
		Insidensi Kasus Pungli	kasus	-	-	-		-	-			,000		0,00		
	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Terlaksanan ya Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan	kali	15	73.500.00 0	3	-	-	-			2,000	-	0,02	0,00	Inspekt orat
	Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanj uti	temuan	94	157.500.0 00	2	35.405.00 0	-	-			0,00 ,000		0,00		Inspekt orat
	Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensi f	Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan yang dilaksana n	Kali	45	383.042.8 92	10	164.975.0 00	8,772	6.835.65 0			4,14	#NAME E?	#NAME ?	,0	Inspekt orat
	Kegiatan Aksi Pencegahan Korupsi			-	115.790.0 00	-	413.562.7 00	100,22 0	235.711. 000			57,00	100,2 20	0,89	,0	Inspekt orat
		Terlaksanan ya Operasional	%	-	295.000.0 00			-	-			,000	-	0,00	,0	

		Satgas Saber Pungli														
		Terlaksananya Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP PEMDA	level 3	-	14.700.000	-	-	-	-			,000		0,00	,0	
		Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	level 3	-	50.000.000	-	-	-				,000		0,00	,0	
		Pelaksanaan SPI	-	-	115.790.000	-	-	-	-			,000		0,00	,0	
		Renaksi Pencegahan Korupsi	> 70 %	-	15.000.000	76 %	-	-	-			,650	-	0,01	,0	
Rata-rata capaian kinerja (%)										27,57	43,50				34,10	
Predikat Kinerja																
	meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui pemenuhan tugas-tugas mandatory audit															
6.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki kompetensi pengawasan	%	100	2.246.449.622	55	155.452.700	146,360	75.426.100		48,52	146,360	694.843.869	1,30	30,931	
	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS	orang	100	322.000.000	25	-	-	-		0,00	20,000		0,18	,0	-
	Kegiatan Pelatihan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas	Jumlah APIP/Aparat Inspektorat mengikuti Diklat	orang	125	1.924.449.622	30	155.452.700	114,270	75.426.100		0,00	144,270		1,28	,0	

	Kinerja	Fungsional dan substantif															
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00			1	24,00		
Predikat Kinerja																	
	meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui pemenuhan tugas-tugas mandatory audit																
7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kebijakan dan Sisdur yang tertata baik		-	52.202.500	-	21.600.000	-	-	0,00	0,00	,000	-	0,00	0,00		
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	1. Jumlah dokumen perencanaan pengawasan yang disusun	dokumen	12	47.202.500	3	21.600.000	-	-		-	,000		0,00	-		
		2. Jumlah dokumen hasil pemeriksaan yang didokumentasikan	dok/KKA	260	5.000.000	65	-	-	-		-	,000		0,00	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0			-	0,00		
Predikat Kinerja																	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							Rp 2.297.593.700		Rp 1.942.520.848								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 5)										2950,298352	31,82						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 5)																	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Kebutuhan tenaga auditor yang handal dan memadai tidak berbanding lurus dengan beban kerja pemeriksaan.																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2020) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 ANGGARAN (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(4)	(5)		(6)		(8)		(13) = 9 + 10+11+12		(14) = 13 / 8 * 100		(15) = 7 + 13		(16) = 15 / 6 * 100		(17)
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Otoda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian															
	PROGRAM ADMINISTRASI PELAYANAN PERKANTORAN	<i>Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi</i>	<i>Persen</i>	100	<i>Rp 5.413.825.000</i>	<i>2.843</i>	<i>Rp 1.060.910.350</i>	<i>2.584</i>	<i>Rp 1.015.020.092</i>	90,89	95,67	100	Rp 4.506.335.020	100,00	83,24	SEKRETRAIS
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pembayaran honor dan makan minum harian pegawai	Persen	100	Rp 3.280.300.000	100	Rp 644.771.350	100	Rp 626.392.100	100,00	97,15	100	Rp 3.706.000.110	100,00	112,98	
		Honorarium PNS	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Honorarium Non PNS	orang	120	Rp 2.851.500.000	104	Rp 581.400.000	104	Rp 563.025.000	100,00	96,84	104	Rp 1.144.425.000	86,67	40,13	
		ATK	jenis	50	Rp 222.000.000	22	Rp 36.382.350	22	Rp 36.378.100	100,00	99,99	50	Rp 71.989.300	100,00	32,43	
		Jumlah penggandaan yang dilakukan	rangkap	600.000	Rp 76.000.000	43.800	Rp 14.050.000	43.800	Rp 14.050.000	100,00	100,00	75.620	Rp 37.487.000	12,60	49,33	

		Jumlah pegawai yang disediakan makan dan minum harian pegawai	orang	660	Rp 130.800.000	88	Rp 12.939.000	88	Rp 12.939.000	100,00	100,00	176	Rp 70.846.000	26,67	54,16	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan sarana telekomunikasi, jaringan listrik dan air		13	Rp 249.300.000	12	Rp 36.540.000	12	Rp 29.664.302	100,00	81,18	16	Rp 56.291.241	123,08	22,58	
		Belanja telepon/spe dy	unit/r ek	6	Rp 124.000.000	5	16.800.000	5	Rp 16.793.629	100,00	99,96	9	Rp 29.625.579	150,00	23,89	
		Belanja air	unit	1	Rp 9.500.000	1	600.000	1	Rp 564.000	100,00	94,00	1	Rp 1.160.000	100,00	12,21	
		Belanja listrik	unit/r ek	6	Rp 115.800.000	6	19.140.000	6	Rp 12.306.673	100,00	64,30	6	Rp 25.505.662	100,00	22,03	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	unit	18	Rp 52.800.000	18	Rp 7.200.000	18	Rp 6.883.740	100,00	95,61	31	Rp 11.206.910	172,22	21,23	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan jasanya	orang	36	Rp 156.000.000	6	Rp 28.800.000	6	Rp 28.800.000	100,00	100,00	12	Rp 57.600.000	33,33	36,92	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	jenis	30	Rp 75.400.000	0	Rp -	0	Rp -	-	-	4	Rp 3.995.000	13,33	5,30	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Jumlah instalasi listrik/penerangan yang disediakan	jenis	30	Rp 28.600.000	0	Rp -	0	Rp -	0,00	0,00	7	Rp 2.078.000	23,33	7,27	

	Kantor															
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	90	Rp 32.800.000	0	Rp -	0	Rp -	0	0	-	Rp -	0,00	0,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan yang disediakan	jenis	30	Rp 76.700.000	4	Rp 14.880.000	4	Rp 13.500.000	100	90,73	15	Rp 25.700.000	50,00	33,5072	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar provinsi dan luar kabupaten yang dilaksanakan	kali	594	Rp 734.925.000	55	Rp 249.341.000	54	Rp 233.666.450	98,18	93,71	74	Rp 490.696.759	12,46	66,7683	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	kali	39.300	Rp 727.000.000	2.648	Rp 79.378.000	2.390	Rp 76.113.500	90,26	95,89	5.740	Rp 152.767.000	14,61	21,01	
		jumlah bbm	liter	18.000	Rp 163.000.000	0	Rp -	-	Rp -	0,00	0,00	600	Rp 4.800.000	3,33	2,94	
		Jumlah peserta yang menghadiri rapat	orang	15.120	Rp 182.100.000	1473	Rp 41.382.000	1.267	Rp 38.127.500	86,01	92,14	2.742	Rp 73.283.500	18,13	40,24	
		Jumlah tamu yang datang	orang	5.040	Rp 114.000.000	1175	Rp 24.596.000	1.105	Rp 24.596.000	94,04	100,00	2.280	Rp 47.893.500	45,24	42,01	

		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	kali	1.140	Rp 267.900.000	18	Rp 13.400.000	18	Rp 13.390.000	100,00	99,9254	118	Rp 26.790.000	10,35	10,00	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								2.344,73	Rp 125.555.004	79,97	77,14	4.380	Rp 116.707.023	58,88	33,64	
PREDIKAT KINERJA										Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	persen	100	Rp 3.471.940.000	33	112.337.000	28	Rp 101.491.253	84,85	90,35	127	Rp 269.714.595	127,00	7,77	SEKRETRAIS
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	jenis	21	Rp 220.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	0	-	Rp -	0	0	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	jenis	120	Rp 1.234.000.000	4	Rp 6.372.000	4	Rp 6.372.000	100,00	100,00	77	Rp 105.297.000	64,17	8,53	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	36	Rp 1.736.500.000	6	Rp 18.000.000	6	Rp 16.758.500	100,00	93,10	12	Rp 37.539.500	33,33	2,16	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	unit	108	Rp 266.440.000	18	Rp 84.960.000	14	Rp 77.105.753	77,78	90,76	28	Rp 124.623.095	25,93	46,77	

	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diperbaiki	jenis	30	Rp 9.000.000	5	Rp 3.005.000	4	Rp 1.255.000	80,00	41,76	7	1.755.000	23,33	19,50	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Jumlah jenis meubeler yang diperbaiki	jenis	24	Rp 6.000.000	0	Rp -	-	Rp -	0,00	0,00	3	500.000	12,50	8,33	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								8,00	Rp 28.997.501	63,23	59,42	36,29	77.061.312,86	40,89	13,30	
PREDIKAT KINERJA										Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	persen	100	Rp 45.475.000	15	Rp 25.902.000	15	Rp 20.403.000	100,00	78,77	17	28.788.000	17,00	63,31	SEKRETRAI
	Bimtek Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	ornag	16	Rp 45.475.000	15	Rp 25.902.000	15	Rp 20.403.000	100,00	78,77	17	28.788.000	106,25	63,31	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								15,00	Rp 20.403.000	100,00	78,77	17	Rp 28.788.000	61,63	63,31	
PREDIKAT KINERJA										Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah	

	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	<i>Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaik an sesuai standar dan tepat waktu</i>	<i>perse n</i>	100	Rp 26.800.0 00	0	Rp -	0	Rp -	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	SEKRE TRAIS
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD yang dilaporkan	doku men	6	Rp 3.000.00 0	0	Rp -	0	Rp -	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang dilaporkan	doku men	12	Rp 3.000.00 0	0	Rp -	0	Rp -	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
	Penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dilaporkan	doku men	6	Rp 3.000.00 0	0	Rp -	0	Rp -	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanak an	kali	24	Rp 14.800.0 00	0	Rp -	0	Rp -	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang dilaporkan	doku men	12	Rp 3.000.00 0	0	Rp -	0	Rp -	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									Rp -	-	-	-	Rp -	-	-	

PREDIKAT KINERJA										-	-			-	-	
	URUSAN WAJIB															
	Pemuda dan Olahraga															
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Pelaksana an Peran serta pemuda dalam pembangun an	orang	330	207.958.000	0	Rp -	0	Rp -	0,00	0,00	30	9.958.000	9,09	4,79	Mulai Tahun 2019 kegiatan pada Progra m Peran Serta Kepemu daan dialihk an Ke Dispora
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah anggota organisasi kepemudaa n yang dibina	orang	180	Rp 33.658.000	0	Rp -	-	Rp -	0,00	0,00	30	9.958.000	16,67	29,59	
	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpi nan	orang	150	Rp 174.300.000	0	Rp -	0	Rp -	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								-	Rp -	-	-	20	Rp 6.638.667	8,59	11,46	
PREDIKAT KINERJA										-	-			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM MENGINTENSIF IKASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Cakupan kepuasan masyaraka t terhadap pelayanan publik	aduan	88	167.335.600	24	21.740.000	24	Rp 21.740.000	100,00	100,00	32	43.540.000	36,36	26,02	SEKSI PEMERI NTAHAN

	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani oleh unit khusus pengaduan masyarakat	aduan	88	Rp 167.335.600	24	Rp 21.740.000	24	Rp 21.740.000	100,00	100,00	32	43.540.000	36,36	26,02	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								24,00	21.740.000,00	100,00	100,00	32,00	43.540.000,00	36,36	26,02	
PREDIKAT KINERJA										Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat rendah	Sangat rendah	
	PRORAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Cakupan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan keKecamatan anan pada bidang perencanaan, pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	kegiatan	133	Rp 1.316.015.000	4	Rp 72.516.500	4	Rp 62.426.500	100,00	86,09	36	Rp 1.120.814.000	27,07	85,17	SEKSI PEREKONOMIA N
	Peningkatan pengkoordinasian bidang perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pengkoordinasian bidang perencanaan dan pemerintahan yang terlaksana	kegiatan	133	Rp 5.530.396.000	4	Rp 72.516.500	4	Rp 62.426.500	100,00	86,09	8	Rp 143.543.000	6,02	2,60	

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								4,00	Rp 62.426.500	100,00	86,09	22,00	632.178.500,00	16,54	43,88	
PREDIKAT KINERJA										Sangat tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	<i>Cakupan pelaksanaan pengembangan kewilayah an</i>	<i>kegiatan</i>	2.021	9.591.745.990	306	1.961.690.900	579	Rp 1.950.250.000	189,22	99,42	885	Rp 4.031.146.500	43,79	42,03	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Pembangunan infrastruktur desa/kelurahan	Jumlah infrastruktur dasar yang dibangun atau dipelihara di kelurahan	kegiatan	117	Rp 5.691.745.990	17	Rp 1.435.350.300	17	Rp 1.435.350.300	100,00	100,00	34	Rp 2.974.427.300	29,06	52,26	
	Pembangunan infrastruktur desa/kelurahan (lanjutan)	Jumlah infrastruktur dasar yang dibangun atau dipelihara di kelurahan	kegiatan	10		6	Rp 10.740.900	-	Rp -	0,00	0,00	6	16.731.000	60,00	0,00	
	Pemberdayaan masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	kelompok	1.180	Rp 1.500.000.000	190	Rp 313.999.700	190	Rp 313.299.700	100,00	99,78	380	Rp 587.592.200	32,20	39,17	
	Pembinaan kelembagaan masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan/adat yang dibina	kelompok	714	Rp 2.400.000.000	93	Rp 201.600.000	93	Rp 201.600.000	100,00	100,00	186	Rp 452.396.000	26,05	18,85	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								175,80	780.100.000,00	97,84	79,84	298,20	1.612.458.600,00	38,22	30,46	
PREDIKAT KINERJA										Sangat tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA/KELURAHAN	<i>Cakupan pelaksanaan pengembangan kewilayah an</i>	<i>kegiatan</i>	20	30.000.000	10	4.620.000	10	Rp 4.610.000	100,00	99,78	10	Rp 4.610.000	50,00	15,37	SEKSI PEMBEKDAYAAN MASYARAKAT
	Pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibangun	Desa/Kel.	10	Rp 15.000.000	10	Rp 3.300.000	10	Rp 3.290.000	100,00	99,70	10	Rp 3.290.000	100,00	21,93	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pemerintahan Desa/Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi	Desa/Kel.	10	Rp 15.000.000	10	Rp 1.320.000	10	Rp 1.320.000	100,00	100,00	10	1.320.000	100,00	0,00	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								10,00	3.073.333,33	100,00	99,83	10,00	3.073.333,33	83,33	12,43	
PREDIKAT KINERJA										Sangat tinggi	Sangat tinggi			Tinggi	Sangat rendah	
	PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN	<i>Cakupan pelayanan perizinan UMKM yang diterbitkan</i>	<i>lemba r</i>	7.500	Rp 17.400.000	1.300	Rp -	596	Rp -	45,85	0,00	3.280	-	43,73	0,00	Kegiatan ini tetap dilaksanakan sebagai bagian dari pelayanan kecamatan walaupun tidak dianggarkan pada tahun 2018
	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil dan menengah	Jumlah surat izin UMKM yang diterbitkan	lemba r	7.500	Rp 17.400.000	1.300	Rp -	596	Rp -	45,85	0,00	3.280	-	43,73	0,00	

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)							596,00	-	45,85	-	3.280,00	-	43,73	-		
PREDIKAT KINERJA									Sangat rendah				Sangat rendah			
FAKTOR PENGDORONG KEBERHASILAN KINERJA : KOORDINASI DAN KERJASAMA YANG BAIK DARI SELURUH STAKE HOLDER DAN PARATUR DIKECAMATAN																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG MASIH KURANG, SERTA SARANA DAN PRASARAN YANG BELUM MEMADAI																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) : JUMLAH PEGAWAI DAN ANGGARAN DITAMBAH																

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)		Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi(Semester II Tahun Anggaran 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD S/D Semester II Tahun Anggaran 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Semester II Tahun Anggaran 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Semester II Tahun Anggaran 2020 (%)		Unit PD Penanggung jawab
1	4	5	6	8	(13)=9+10+11+12	(14)=13/8*100	(15)=7+13	(16)=15/6*100								16
		Uraian	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		WAJIB														
		BELANJA TIDAK LANGSUNG														
1	Gaji dan Tunjangan		%			100	2.049.296.564	100	1.770.991.338	100%	86,42%	100	1.770.991.338			Kecamatan Balusu
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		OB			0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,0%						
Predikat Kinerja																
	BELANJA LANGSUNG															
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN															

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	%	100	1.420.738.020	100	267.317.788		264.985.340	100	99,62	100	1.195.024.150	100	84,12 %	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah honor, ATK, Materai, cetak dan penggandaan serta makan minum harian pegawai	OB	66	701.285.600	10	107.970.700	10	107.970.700	100	100	30	559.875.700	45,45%	79,84%	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Rekening	24	83.263.200	4	20.951.748	4	20.360.650	97,18	97,18	12	72.286.920	50	86,82%	
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran STNK Kendaraan Roda 4 dan 2	Unit	88	15.464.500	9	3.450.000	9	3.120.000	90,43	90,43	27	11.641.350	30,68	75,27%	
1.4	Penyediaan jasa kebersihan	Jumlah tenaga kebersihan	OB	10	48.000.000	2	9.600.000	2	9.600.000	100	100	6	38.400.000	60	80	
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	unit	12	9.510.000	6	4.400.000	6	4.400.000	100	100	18	11.510.000	150	121%	
1.6	Penyediaan komponen instalasi listrik / bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	67	14.685.200	1	903.840	1	903.840	100	100	3	11.105.440	4,47	75,62%	

1.8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga	Jenis	42	6.051.540	1	1.202.500	1	1.202.500	100	100	3	5.654.040	7,14	93,43%	
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembayaran rekening surat kabar	Rek. Koran	6	15.825.000	2	1.320.000	2	1.320.000	100	100	24	11.865.000	40	74,97%	
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	OK	270	282.288.750	8	60.725.000	8	60.633.650	100	100	6	254.833.200	2,22	90,27%	
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu dan jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jenis	15	244.364.230	300	56.794.000	300	56.794.000	100	100	900	229.717.500	60	94%	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	88,76%	88,76%					
									Predikat Kinerja		tinggi					
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	%	100	291.630.950		55.775.262		55.775.262	100	100		82.104.870	0	36,27%	
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	unit	44	43.880.750		-		-	-	-			0	0	
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor	Jenis	5	64.288.550	3	15.220.262	100%	15.220.262	100	100	3	59.508.812	60	92,56%	
2.3	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair kantor	Jenis	27	36.520.000	140	13.300.000	140	13.300.000	100	100	420	36.093.000	15,56	98,83%	

2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan Gedung dan Pagar dan penataan halaman	jenis	15	85.333.650	1	4.508.000	1	4.508.000	100	100	2	74.784.230	13,33	87,63%	
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service, penggantian suku cadang dan BBM	unit	54	55.808.000	4	22.218.000	4	22.218.000	100	100	12	63.236.000	22,22	113%	
2.9	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah meubelair yang dipelihara	unit	102	5.800.000	2	529.000	2	529.000	100	100	6	4.629.000	5,88	79,81%	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	83,33%	85,33%					
									Predikat Kinerja		tinggi					
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	%	100	32.210.000		31.607.000		31.579.000	99,91	99,91		43.139.000	0	170%	
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta diklat formal	orang	18	18.480.000		31.607.000		31.579.000	99,91	99,91	2	43.139.000	11,11	233%	
3.2	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta BimtekInplemen tasi peraturan perundang-undangan	Orang	15	13.730.000		-		-	-	-	-	13.730.000	0	100	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	49,95%	49,95%			5,55%	16,65%	
									Predikat Kinerja		sedang					

4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	%	100	6.573.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKIP dan PK SKPD	Dokumen	12	1.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	6	1.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	6	1.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Monitoring dan evaluasi	Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD	Dokumen	24	2.573.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Penyusunan RKA dan DPA	Dokumen RKA dan DPA	Dokumen	12	1.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	-
								Predikat Kinerja		-	-	-	-	-	-	-
5	Program Pengintesisifan pengaduan masyarakat	Cakupan Penanganan pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	95.283.000	12	14.752.000	14.752.000	100	100		330.312.000	0	34,66%		

5,1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah unit khusus yang menangani pengaduan masyarakat	unit	6	95.283.000	12	14.752.000	12	14.752.000	100	100	36	84.115.000	60	88,27%	
6	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Cakupan pemuda yang terlatih		100	123.098.500	-	-		-	-	-	-	123.098.500	0	100	
6,1	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah siswa/siswi yang terpilih untuk dilatih paskibraka	Siswa/Siswsi	155	123.098.500	-	-		-	-	-	-	123.098.500	0	100	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		33	33				
									Predikat Kinerja			sangat rendah				
7	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan	%	100	926.922.780	3	53.069.000		53.069.000	100	100		795.841.400	0		
7,1	Peningkatan Pengkoordinasian Bidang Perencanaan, Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kegiatan	45	926.922.780	3	53.069.000	3	53.069.000	100	100	9	795.841.400	20	85,85%	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100	100	900%	79,58%		
									Predikat Kinerja			sangat tinggi				
8	Program Pengembangan kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan Pengembangan Kewilayahan	%	100	1.826.692.085		386.630.000		385.444.749,5	100	100		1.853.776.359,5	0	126%	

8,1	Pembangunan infrastruktur desa / kelurahan	jumlah infrastruktur yang dibangun	Paket	11	1.238.568.500	5	275.154.400	5	273.969.149,5	100	100	10	1.374.068.150	90,9	110 %	
8,2	Pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	jumlah masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan	jenis	25	342.032.300	2	74.845.600	2	74.845.600	100	100	4	279.470.300	16	81,7 1%	
8,3	Pembinaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	jenis	30	246.091.285	5	36.630.000	5	36.630.000	100	100	15	200.237.910	50	81,3 7%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100	100	1900 %	71,5%			
Predikat Kinerja											sangat tinggi					
9	Program Pembinaan dan pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase Pemerintahan Desa/kelurahan yang dibangun dan diawasi	%	100	30.000.000	-	2.420.000		Rp2.420.000	100	100		2.420.000	0		
9,1	Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibangun	Desa/Kel	6	22.200.000	4	1.540.000	4	1.540.000	100	100	12	1.540.000	200	6,94 %	
9,1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan dimonitoring dan dievaluasi	Desa/Kel	6	7.800.000	4	880.000	4	880.000	100	100	12	880.000	200	11,2 8%	

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100	100	12%				
Predikat Kinerja											sangat tinggi					
10	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Perizinan	%		1.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
10,1	Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah SOP yang Tersusun	10		1.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
11	Program Pelayanan Perizinan UMKM	Cakupan Pelayanan Perizinan	%	100	1.500.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
11,1	Penerbitan Surat Izin Usaha UMKM	Jumlah Surat Izin Usaha yang diterbitkan	Lembar	1252	1.500.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,0%	0,0%	0,0%		
										Predikat Kinerja		0,0%	0,0%	0,0%		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM (BELANJA LANGSUNG)					4.755.648.335		811.571.050		808.025.351,53					4.302.617.779,53		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												99,6%		90,5%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										TINGGI						

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2020) Yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi (Semester II Tahun Anggaran 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Sampai Dengan Semester II Tahun Anggaran 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Semester II Tahun Anggaran 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Semester II Tahun Anggaran 2020 (%)		Unit PD Penanggung jawab
(1)	(3)	(4)		(5)		(7)		(10=8+9)		(11=10/7x100%)		(12=6+10)		(13= 12/5 x 100%)		(14)
		Uraian	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	WAJIB															
BELANJA TIDAK LANGSUNG																
1	Gaji dan Tunjangan		%			100	2.478.150.830	100	2.345.266.060	100%	94,64%	100	2.345.266.060			Kantor Kec.

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,0%	94,6%	100	95				Tanete Riaja
Predikat Kinerja																	
	BELANJA LANGSUNG																
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Cakupan pemuda yang terlatih		100	127.117.000	0	-	0	-	0,0%	0,0%	60	127.117.000	60%	100,0%		Kantor Kec. Tanete Riaja
	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah siswa/siswi yang terpilih untuk dilatih paskibraka	Siswa/Siswi	200	127.117.000	0	-	0	-	0,0%	0,0%	120	127.117.000	60%	100,0%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,0%	0,0%	60	127.117.000	60%	100,0%		
Predikat Kinerja																	
1	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan		100	1.000.000	20	170.000	4	170.000	20,0%	100,0%	4	170.000	4%	17,0%		Kantor Kec. Tanete Riaja
	Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah SOP yang Tersusun	SOP	16	1.000.000	4	170.000	4	170.000	100,0%	100,0%	4	170.000	25%	17,0%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										20,0%	100,0%	4	170.000	4%	17,0%		
Predikat Kinerja																	
(1)	(3)	(4)		(5)		(7)		(10=8+9)		(11=10/7x100%)		(12=6+10)		(13= 12/5 x 100%)		(14)	
		Uraian	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	Program Pelayanan Perizinan UMKM	Cakupan UMKM yang dilayani Perizinannya		100	10.500.000	0	-	0	-	0,0%	0,0%	0	-	0%	0,0%		Kantor Kec. Tanete Riaja
	Penerbitan surat izin usaha UMKM	Jumlah surat izin usaha yang diterbitkan	lembar	1252	10.500.000	0	-	0	-	0,0%	0,0%	0	-	0%	0,0%		

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,0%	0,0%	0	-	0%	0,0%	
Predikat Kinerja																
2	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan	%	100	1.114.104.800	9	99.572.500	9	70.344.500	100,0%	70,6%	51,6	975.713.900	52%	87,6%	Kantor Kec. Tanete Riaja
2.1	Peningkatan Pengkoordinasian Bidang Perencanaan, Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kegiatan	60	1.114.104.800	9	99.572.500	9	70.344.500	100,0%	70,6%	39	975.713.900	65%	87,6%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,0%	70,6%	51,6	975.713.900	52%	87,6%	
Predikat Kinerja																
3	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	112.144.000	1	22.740.500	1	12.840.500	100,0%	56,5%	74,3	76.015.500	74%	67,8%	Kantor Kec. Tanete Riaja
3.1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah unit khusus yang menangani pengaduan masyarakat	Unit	6	112.144.000	1	22.740.500	1	12.840.500	100,0%	56,5%	5	76.015.500	83%	67,8%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,0%	56,5%	74,3	76.015.500	83%	67,8%	
Predikat Kinerja																
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	%	100	34.727.000	3	31.760.000	3	31.605.000	100,0%	0,0%	10,27	56.477.000	10%	162,6%	Kantor Kec. Tanete Riaja

4.3	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta BimtekImplementasi peraturan perundang-undangan	Orang	25	34.727.000	3	31.760.000	3	31.605.000	100,0%	0,0%	5	56.477.000	20%	162,6%	Kantor Kec. Tanete Riaja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,0%	0,0%	5	56.477.000	20%	162,6%	
Predikat Kinerja																
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	%	100	1.592.128.577	332	343.487.700	#VALUE!	287.663.700	#VALUE!	83,7%	#VALUE!	1.301.910.887	#VALUE!	81,8%	Kantor Kec. Tanete Riaja
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah honor, ATK, Materai, cetak dan penggandaan serta makan minum harian pegawai	Paket	30	781.397.900	6	139.744.900	#VALUE!	136.469.700	97,7%	97,7%	#VALUE!	668.410.100	#VALUE!	85,5%	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Rekening	24	126.958.937	6	27.900.000	6	21.563.865	100,0%	77,3%	18	85.930.682	75%	67,7%	
5.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran STNK Kendaraan Roda 4 dan 2	Unit	6	9.000.000	6	2.800.000	6	2.610.635	100,0%	93,2%	22	7.218.855	367%	80,2%	
5.4	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah Tenaga kebersihan	OB	5	9.600.000	0	-	0	-	0,0%	0,0%	0	-	0%	0,0%	
5.5	Penyediaan komponen instalasi listrik / bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	30	7.820.140	5	1.811.000	5	1.811.000	100,0%	100,0%	9	4.958.100	30%	63,4%	
5.6	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga	Jenis	10	20.545.100	3	23.668.400	3	23.498.400	100,0%	99,3%	9	38.523.500	90%	187,5%	

57	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jembayaran rekening surat kabar	Rek. Koran	29	32.330.000	7	5.040.000	7	5.040.000	100,0%	100,0%	22	24.890.000	76%	77,0%	
5.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	OK	214	298.292.500	41	69.749.000	33	25.070.500	80,5%	35,9%	82	191.527.050	38%	64,2%	Kantor Kec. Tanete Riaja
5.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu dan jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jenis	15	315.784.000	258	72.774.400	256	71.599.600	99,2%	98,4%	265	280.452.600	1767%	88,8%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97,2%	87,7%	#VALUE!	162.738.861	#VALUE!	89,3%	
Predikat Kinerja																
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	%	100	9.025.200	0	-	0	-	0,0%	0,0%	20	9.025.200	20%	100,0%	Kantor Kec. Tanete Riaja
6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKIP dan PK SKPD	Dokumen	12	1.008.000	0	-	0	-	0,0%	0,0%	4	1.008.000	33%	100,0%	
6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	5	1.008.000	0	-	0	-	0,0%	0,0%	2	1.008.000	40%	100,0%	
6.3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	6	1.008.000	0	-	0	-	0,0%	0,0%	2	1.008.000	33%	100,0%	

6.4	Monitoring dan evaluasi	Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD	Dokumen	24	4.993.200	0	-	0	-	0,0%	0,0%	8	4.993.200	33%	100,0%	
6.5	Penyusunan RKA dan DPA	Dokumen RKA dan DPA	Dokumen	12	1.008.000	0	-	0	-	0,0%	0,0%	4	1.008.000	33%	100,0%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,0%	0,0%	4	1.805.040	35%	100,0%	
Predikat Kinerja																
7	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	%	100	495.367.400	50	49.556.000	32	47.446.000	64,0%	95,7%	72	313.157.400	72%	63,2%	Kantor Kec. Tanete Riaja
7.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Jenis	30	52.713.000	9	9.350.000	9	9.350.000	0,0%	100,0%		41.132.000	0%	78,0%	
7.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor	Jenis	5	155.169.000	3	6.867.000	3	6.867.000	100,0%	100,0%	12	105.537.000	240%	68,0%	
7.3	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair kantor	Jenis	27	70.864.000	2	4.700.000	2	4.700.000	0,0%	100,0%	7	36.564.000	26%	51,6%	
	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Pengecatan Rumah dan perbaikan plafon dan pintu	paket	1	10.000.000	0	-	0	-	0,0%	0,0%	0	-	0%	0,0%	
7.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan Gedung dan Pagar dan penataan halaman	Paket	10	58.086.400	1	2.579.000	1	2.579.000	100,0%	100,0%	7	20.547.400	70%	35,4%	
7.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service, penggantian suku cadang dan BBM	unit	36	112.600.000	5	21.010.000	5	20.310.000	100,0%	96,7%	23	84.806.000	64%	75,3%	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Jenis	8	4.000.000	0	-	0	-	0,0%	0,0%	0	-	0%	0,0%	

7.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	Jenis	24	34.135.000	15	5.050.000	12	3.640.000	80,0%	72,1%	24	21.771.000	100%	63,8%	
7.7	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah meubelair yang dipelihara	Paket	5	11.800.000	15	-	0	-	0,0%	0,0%	0	2.800.000	0%	23,7%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										54,3%	81,2%	10,43	44.736.771	71%	56,5%	
Predikat Kinerja																
8	Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan disiplin aparatur	%	100%	11.400.000	50%	-	0	-	0,0%	0,0%	50%	10.950.000	50,0%	96,1%	Kantor Kec. Tanete Riaja
8.1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	jumlah mesin / kartu absensi	Unit	2	5.900.000	0	-	0	-	0,0%	0,0%	2	5.450.000	100%	92,4%	
8.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	stel	40	5.500.000	0	-	0	-	0,0%	0,0%	0	5.500.000	0%	0,0%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,0%	0,0%	0,25	5.475.000	50%	46,2%	
Predikat Kinerja										s. tinggi						
9	Program Pengembangan kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan Pengembangan Kewilayahan	%	100	1.632.541.475	7	369.970.000	#VALUE!	353.867.000	#VALUE!	95,6%	#VALUE!	1.619.584.100	#VALUE!	99,2%	Kantor Kec. Tanete Riaja
9.1	Pembangunan infrastruktur desa / kelurahan	jumlah infrastruktur yang dibangun	Paket	14	841.734.975	2	263.920.500	2	260.979.500	100,0%	98,9%	8	1.055.875.500	57%	125,4%	
9.2	Pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	jumlah masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan	jenis	83	615.742.000	3	89.020.500	3	89.020.500	100,0%	100,0%	15	480.918.000	18%	78,1%	
9.3	Pembinaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	jenis	12	175.064.500	2	17.029.000	#VALUE!	3.867.000	#VALUE!	22,7%	#VALUE!	82.790.600	#VALUE!	47,3%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										#VALUE!	206,5%	#VALUE!	539.861.367	#VALUE!	83,6%	
Predikat Kinerja																

9	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentasr pemerintahan desa/kelurahan yang dibangun dan diawasi	%	100	10.000.000	7	4.608.700	7	4.608.700	100,0%	100,0%	7	4.608.700	7%	46,1%	Kantor Kec. Tanete Riaja
9.3	Pembinaan pemerintahan desa/kel.	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dibangun		7	20.000.000	7	4.608.700	7	4.608.700	100,0%	100,0%	7	4.608.700	100%	23,0%	
9.3	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dimonitoring Evaluasi		7	10.000.000	0	-	0	-	0,0%	0,0%	0	-	0%	0,0%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										#VALUE!	22,7%	7,5	240.459.000	50%	0,0%	
Predikat Kinerja																
10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	100	25.677.000	25	-	0	-	0,0%	0,0%	50	22.932.000	50%	89,3%	Kantor Kec. Tanete Riaja
10.1	Pelaksanaan musyawara pembangunan desa / kelurahan	Jumlah musyawara yang dilaksanakan	kali	3	11.037.000	1	-	0	-	0,0%	0,0%	2	11.037.000	67%	100,0%	
10.2	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah kegiatan bulan bakti gotong royong yang dilaksanakan	Kali	6	14.640.000	2	-	0	-	0,0%	0,0%	4	11.895.000	67%	81,3%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,0%	0,0%	3,00	11.466.000	67%	90,6%	
Predikat Kinerja																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM (BELANJA LANGSUNG)						447	921.865.400	#VALUE!	808.545.400	#VALUE!	87,7%	#VALUE!	4.390.544.687	#VALUE!	801,3%	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										#VALUE!	8,8%	#VALUE!	439.054.469	#VALUE!	80,13%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2020) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020 (%)		UNIT PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
(1)	(4)	(5)		(6)		(8)		(13) = 9+10+11+12		(14) = 13 / 8 * 100		(15) = 7 + 13		(16) = 15 / 6 * 100		(17)
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	persen	100	3.948.786.444	100	581.898.716	47,47	293.577.551	47,47	50,45	47,47	2.236.967.718	47,47	56,6495	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jenis	30	2.104.620.400	6	329.903.300	6	329.903.300	100,00	100,00	30	1.333.955.600	100	63,38224	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	rek	5	224.412.769	5	40.916.416	5	36.061.330	100,00	88,13	19	136.307.244	380	60,73952	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	unit	14	32.077.775	5	6.110.000	5	5.425.650	100,00	88,80	47	15.808.453	335,7143	49,28164	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan	orang	5	24.000.000	5	24.000.000	5	24.000.000	100,00	100,00	5	24.000.000	100	100	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang dibayarkan	unit	23	48.700.000	18	8.200.000		8.200.000	0,00	100,00	15	33.650.000	65,21739	69,09651	

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran rekening surat kabar	jenis	5	62.735.000	5	9.720.000	5	9.700.000	100,00	99,79	53,14	39.900.000	1062,8	63,60086	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Luar Provinsi	ok	4	738.552.500	67	39.713.000	5	39.713.000	7,46	100,00	60,11	446.743.650	1502,75	60,48909	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah makan Minum Tamu, Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas dalam Kabupaten yang terbayarkan	ok	5500	713.688.000	2159	123.336.000	450	115.550.000	20,84	93,69	750	481.578.500	13,63636	67,47746	
									-							
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana Aparatur yang terlaksana	persen	100	806.151.940	100	57.370.000	100	57.362.500	100,00	99,99	144,7	417.348.320	144,65	51,77043	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung Kantor Camat Mallusetasi	Jenis	5	337.645.450	8	14.995.000	5	14.995.000	62,50	100,00	10	174.499.700	200	51,68134	
	Pengadaan meubeleu	Tersedianya meubeleu Kantor Camat Mallusetasi	Jenis	17	162.448.900	6	-	0	-	0,00	#DIV/0!		58.567.000		36,05257	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya Pemeliharaan rumah dinas Camat Mallusetasi	unit	1	13.507.370	1	-	0	-	0,00	#DIV/0!		4.407.370		32,62937	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor Camat Mallusetasi	unit	4	109.018.800	4	2.725.000	4	2.725.000	100,00	100,00		31.298.600		28,70936	

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kantor Camat Mallusetasi	unit	36	183.531.420	14	39.650.000	4	39.642.500	28,57	99,98		148.575.650		80,9538	
									-							
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Aparatur	Persen	100	24.500.000	6	25.612.000	3	25.440.000	50,00	99,33	3	25.440.000	3	103,8367	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	orang	1	4.500.000	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	2	9.000.000	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan untuk mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan	orang	2	11.000.000	6	25.612.000	3	25.440.000	50,00	99,33	3	25.440.000	150	231,2727	
									-							
	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan pengaduan masyarakat yang tertangani	Persen	100	113.860.000	100	18.462.000	100	18.462.000	100,00	100,00	149,3	74.580.000	149,29	65,50149	
	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Unit Pengaduan yang terbentuk	unit	6	113.860.000	1	18.462.000	1	18.462.000	100,00	100,00	5	74.580.000	83,33333	65,50149	

									-							
	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kecamatan bidang Perencanaan, Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan	persen	100	609.567.900	100	48.290.000	18,99	45.211.000	18,99	93,62	32,43	242.872.900	32,43	39,84345	
	Peningkatan pengkoordinasian bidang perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di kecamatan	Terlaksananya pengkoordinasian bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan perencanaan	bidang	20	609.567.900	4	48.290.000	4	45.211.000	100,00	93,62	16	242.872.900	80	39,84345	
									-							
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dok SOP Pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	persen	100	1.000.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0	
	Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah dok. SOP yang tersusun	jenis	20	1.000.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0	
									-							
	Program Pengembangan Kewilayahan	Cakupan wilayah yang dikembangkan	persen	100	4.726.470.156	100	1.181.136.100	34,5	606.424.492	34,52	51,34	113,5	4.337.047.733	113,45	91,76082	
	Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan	Jumlah Infrastruktur kelurahan yang dibangun	Unit	15	2.359.150.609	6	#####	3	314.545.000	50,00	37,99	16	2.731.028.241	106,6667	115,7632	
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan	Kelompok	83	1.290.833.147	30	222.045.100	30	225.911.692	100,00	101,74	35	1.061.926.592	42,16867	82,26676	
	Pembinaan Lembaga Masyarakat Kemasyarakata	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	lembaga	12	1.076.486.400	5	131.136.100	5	120.901.100	100,00	92,20	15	599.026.200	125	55,64643	

	n															
								-								
	Program pembinaan dan pengawasan Desa/ Kelurahan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	Persen	100	30.000.000	100	-		-	0,00	#DIV/0!	0	-	0	0	
	Pembinaan pemerintahan desa/ kelurahan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dibina	Desa/Kel.	8	15.000.000	8	-		-	0,00	#DIV/0!	0	-	0	0	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi	Desa/Kel.	8	15.000.000	8	-		-	0,00	#DIV/0!	0	-	0	0	
								-								
	Program Pelayanan Perizinan UMKM	Cakupan UMKM yang dilayani perizinannya	persen	100	1.500.000	0	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0	
	Penerbitan surat izin usaha UMKM	Jumlah Surat Izin Usaha yang diterbitkan	lbr	200	1.500.000	0	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										#DIV/0!	#DIV/0!			165,18	51,73	
PREDIKAT KINERJA										#DIV/0!	#DIV/0!	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)										3,96	4,20			3,96	4,72	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)																
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																

2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kondisi riil yang terkait dengan adanya ketimpangan antara pencapaian pembangunan daerah dengan target yang diperoleh. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum di dayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi dan permasalahan pembangunan daerah merupakan informasi penting untuk menyusun perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

2.4.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 yaitu:

1. Pembangunan manusia melalui peningkatan penyediaan pelayanan dasar
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
4. Peningkatan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban
5. Peningkatan investasi melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis aplikasi dengan peningkatan sdm birokrasi yang inovatif

Berdasarkan prioritas tersebut, dirumuskan permasalahan pembangunan Kabupaten Barru secara makro sebagai berikut.

1) Belum optimalnya kualitas manusia

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Sumber daya manusia dalam pembangunan daerah haruslah memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi dibidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap pencapaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan terutama pada aspek pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Barru dibuktikan dari capaian IPM Kabupaten Barru pada tahun 2018 yang masih berada pada peringkat ke-8 Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara capaian komponen IPM yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup (AHH) sebesar 68,60 tahun, dimensi pendidikan

yang diwakili oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah sebesar 13,56 dan 7,86 tahun, serta dimensi pendapatan (standar hidup layak) yang diwakili oleh paritas daya beli atau

Purchasing Power Parity (PPP) sebesar Rp. 10.622.000. Hal ini berhubungan dengan permasalahan pokok pada dimensi kesehatan antara lain angka kematian bayi (AKB) dan angka Kematian Ibu (AKI) yang disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pelayanan dasar kesehatan, sementara permasalahan pokok pada dimensi pendidikan adalah belum optimalnya akses dan mutu pendidikan yang terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan berdampak pada belum meratanya sebaran jumlah sekolah pada daerah-daerah tertentu menyebabkan akses dan mutu pendidikan juga belum mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan permasalahan pokok pada dimensi pendapatan dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja dan masih tingginya tingkat pengangguran mengakibatkan belum optimalnya pendapatan perkapita masyarakat.

2) Masih tingginya ketimpangan ekonomi

Ketimpangan ekonomi disebabkan karena adanya ketidakstabilan capaian indikator perekonomian yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, dan pendapatan perkapita serta nilai investasi. Meskipun indikator makro ekonomi menunjukkan kemajuan yang berarti, namun belum menjamin adanya distribusi pendapatan yang proporsional terlihat dari indeks Gini pada tahun 2018 masih berada pada kisaran angka 0,38. Sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok berpendapatan rendah dan menengah, sedangkan kelompok berpendapatan tinggi masih dinikmati sebagian kecil penduduk. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan bergeraknya sektor riil terutama sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti di sektor pertanian dan UMKM.

3) Masih rendahnya daya saing daerah

Komponen daya saing daerah meliputi ketersediaan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan pengembangan inovasi daerah. Permasalahan pokok pada peningkatan daya saing yaitu ketersediaan infrastruktur dasar yang belum memadai yang terwakili oleh proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,608 pada tahun 2018, hal ini berarti masih ada sekitar 0,392 dalam kondisi rusak. Sementara permasalahan pokok kualitas lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh kegiatan usaha manusia dan dampak pemanasan global dan pada tahun 2018 indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Barru masih sebesar 69,17. Sedangkan permasalahan

pokok pada pengembangan inovasi daerah dalam berbagai sector terutama pada sektor pengembangan industri menjadi salah satu permasalahan dalam peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu dukungan ketersediaan infrastruktur yang lebih merata, adil, proporsional, dan berkualitas tetap harus dimaksimalkan agar ekonomi diseluruh wilayah Kabupaten Barru bergerak sehingga investasi dan daya saing pun kian meningkat.

4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penerapan sistem keamanan dan ketertiban.

Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu variabel dalam mewujudkan kondusifitas suatu wilayah. Permasalahan pokok pada aspek ini adalah partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam penerapan sistem keamanan dan ketertiban yang ditunjukkan oleh angka kriminalitas Kabupaten Barru masih pada kisaran 7,7, angka ini lebih rendah dari pada angka kriminalitas Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 16,6 dan Nasional sebesar 14. Situasi tersebut perlu didukung dengan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Disamping itu pembangunan wilayah merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah sekaligus tangguh terhadap potensi bencana yang ada.

5) Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan

Kapasitas kelembagaan pemerintahan Kabupaten Barru perlu dimaksimalkan. Kinerja Perangkat Daerah belum optimal karena masih terkendala pada penataan ketatalaksanaan, penggunaan teknologi informasi, penerapan sistem informasi dan manajemen serta *e-government*. Selain itu, upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik masih perlu menjadi perhatian. Perangkat daerah dalam melayani masyarakat seharusnya menerapkan pemerintahan yang efisien, efektif, produktif, bersih, transparan dan akuntabel. Sedangkan ASN perlu didorong untuk lebih taat asas, tertib administrasi, disiplin, beretika organisasi dan profesi, serta lebih inovatif dan menjaga integritas diri selaku aparat sipil negara. Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggung jawaban). Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara ramping namun mampu mencakup keseluruhan urusan/kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik.

3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan urusan diuraikan sebagai berikut.

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

- Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan terbatas terutama pada daerah-daerah pegunungan dan terpencil dengan akses jalan dan transportasi publik yang belum memadai.

- Penerapan manajemen berbasis sekolah belum sesuai dengan target sebagai akibat dari rendahnya kemampuan manajerial kepala sekolah dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
- Penyebaran lembaga dan prasarana pendidikan menengah masih banyak terfokus di ibu kota Kecamatan.
- Rasio guru dan murid menunjukkan trend negatif dan tidak berimbang, termasuk rasio antara jumlah lulusan pendidikan dasar dengan ketersediaan dan daya tampung gedung sekolah pada jenjang pendidikan menengah.
- Perkembangan lembaga pendidikan non formal, tidak dibarengi dengan ketersediaan tenaga pendidik yang sesuai dengan standard kompetensi.
- Penerapan standar nasional dan standar pelayanan minima lbidang pendidikan belum optimal.
- Penyebaran tenaga pendidik belum merata dan lebih banyak terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di kota, termasuk penyebaran tenaga pendidikan yang bersertifikasi.
- Penerapan metode pendidikan berkarakter belum melembaga dan tidak merata pada semua satuan pendidikan.
- Pembinaan terhadap kelompok belajar masyarakat belum optimal.
- Peran komite sekolah, dewan pendidikan dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan belum optimal.
- Penerapan kurikulum 2013 yang belum tuntas pada semua satuan pendidikan menimbulkan kesulitan dalam penilaian dan pelaksanaan proses belajar mengajar.
- Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket yang tidak sesuai usia sekolah (13-15) tahun.
- Banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya tidak pada usia ideal sekolah
- Masihkurangnya pemahaman orang tua siswa terhadap pentingnya pendidikan.
- Masih adanya siswa yang putus sekolah dengan berbagai penyebab salah satunya adalah mengikuti orang tua merantau.

b. Urusan Kesehatan

- Cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional masih belum optimal, sebagai akibat dari tidak sinkronnya data penduduk miskin.
- Belum sinkronnya standard operasional prosedur pelayanan kesehatan (*Home Care*) dari level desa, kecamatan dan kabupaten, termasuk dengan rumah sakit umum daerah.
- Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada daerah terpencil, dan pegunungan yang belum memadai dan tidak merata.
- Jumlah dankualitas pelayanan tingkat rujukan (Rumah Sakit) belum memadai,

- Penyebaran dan distribusi keberadaan puskesmas terakreditasi, ketersediaan ruang rawat inap, ketersediaan obat dan peralatan esensial, termasuk perbaikan sarana dan prasarana faskes tingkat pertama lebih banyak terpusat di sekitar kota. Demikian halnya dengan pelayanan kesehatan dan keselamatan anak dan balita termasuk ibu hamil dan melahirkan serta bagi lansia.
- Koordinasi dengan OPD lain belum optimal terkait pembukaan dan peningkatan kualitas jalan dari beberapa pemukiman masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan.
- Upaya penanggulangan penyakit menular dan penciptaan lingkungan yang sehat, perbaikan gizi, dan promosi kesehatan lainnya belum optimal,
- Standar dan cara pelayanan tenaga kesehatan masih sering dikeluhkan pasien di RSUD,
- Penyediaan dan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana di RSUD diperhadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
- Masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, serta meningkatnya penyakit degenerative (Kanker, Jantung, etc),
- Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang, Pembinaan perbaikan Gizi anak atau perbaikan Gizi 1000 hari pertama kehidupan.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Tingkat kerusakan jalan sangat tinggi, berbanding terbalik dengan kemampuan peningkatan dan pemeliharaan jalan sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dan rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pemeliharaan jalan.
- Pembangunan rel kereta api berdampak pada tingginya kerusakan jalan terutama pada daerah pengambilan material "quarry".
- Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di kawasan pegunungan belum memadai dan belum merata.
- Koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait yang membutuhkan penanganan akses jalan dan jembatan, belum terjalin dengan baik seperti akses jalan jembatan ke fasilitas kesehatan, pendidikan, sentra produksi/budidaya.
- Rendahnya kemampuan dan kedisiplinan aparat teknis dalam melakukan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan.
- Koordinasi perencanaan dan pemanfaatan serta pengelolaan tata ruang dan perencanaan infrastruktur jaringan belum memadai.
- Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai serta tanggul pantai belum memadai,
- Pembangunan prasarana pengaman pantai belum memadai.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan pengsertifikatan tanah
- Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih besarnya kesenjangan pemenuhan rumah layak huni
- Masih besarnya kesenjangan pemenuhan rumah layak huni
- Pengembangan perumahan dan lingkungan sehat perumahan belum optimal
- Pemberdayaan komunitas perumahan belum memadai
- Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran belum memadai
- Pengelolaan areal pemakaman belum optimal
- Road map (peta jalan) pembangunan kawasan kumuh belum tersedia
- Ketersediaan aparat di bidang perumahan dan permukiman terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Masih seringnya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- Upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal kurang bersinergi dengan stakeholder lain,
- Pengembangan wawasan kebangsaan melalui peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat masih lemah,
- Upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban, termasuk pelibatangannya dalam pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan menjaga keamanan belum memadai,
- Upaya pendidikan politik masyarakat masih kurang,
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan,
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun kualitas politik dan berdemokrasi,
- Cenderung menurunnya jiwa nasionalisme dan patriotisme segenap lapisan masyarakat.

f. Urusan Sosial

- Masih cukup tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Tingginya konflik sosial di masyarakat dan kejadian bencana alam,
- Penyediaan tunjangan kematian dan ta'ziah
- Masih kurang diberdayakannya panti-panti sosial
- Penyediaan beras miskin bagi penduduk miskin yang tersebar di desa/kelurahan

- Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS, upaya rehabilitasi dan pembinaan anak terlantar belum optimal,
- Pembinaan para penyandang cacat, panti asuhan, panti jompo dan eks penyandang masalah social masih sektoral, belum berkelanjutan dan kurang terstruktur,
- Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal,
- Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan penyandang masalah sosial masih terbatas.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga kerja

- Masih terbatasnya lapangan kerja produktif,
- Kualitas, kompetensi dan produktifitas tenaga kerja belum memadai,
- Peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja,
- Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan belum memadai,
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai,
- Sarana dan prasarana pembinaan keterampilan ketenagakerjaan belum memenuhi standard nasional, baik dari segi manajerial maupun dengan sarana pendukung.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan trend yang terus meningkat,
- Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak belum optimal,
- Perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidupnya belum memadai,
- Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender belum menguat,
- Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah.

c. Urusan Pangan

- Koordinasi dan penanganan daerah rawan dengan stake holder lain yang terkait belum sinergi,
- Pemantauan dan analisis akses pangan, harga pangan, cadangan pangan dan pengembangan model distribusi, pemasaran hasil, dan sistem informasi pangan yang efisien belum memadai,
- Diversifikasi pemanfaatan pangan masyarakat belum optimal,
- Sinergi dan koordinasi dengan stake holder terkait dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal.

d. Urusan Pertanahan

- Pembangunan system pendaftaran tanah belum memadai,
- Penataan penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah belum tertata termasuk masih adanya lahan pemerintah yang belum bersertifikat,
- Penyelesaian konflik pertanahan belum optimal termasuk beberapa lahan pemerintah yang disengketakan,
- Pengembangan sistem informasi pertanahan belum memadai,
- Pengembangan komunikasi dan informasi dengan bersinergi dengan SKPD lain belum optimal.

e. Urusan Lingkungan Hidup

- Menurunnya daya tampung lingkungan akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan,
- Volume produksi sampah semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan luas permukiman masyarakat,
- Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan belum maksimal,
- Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan belum berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk,
- Jenis dan ragam sampah yang dihasilkan memerlukan penanganan dan pengelolaan yang berbeda,
- Kapasitas penampungan akhir sampah dari waktu ke waktu terus terbatas,
- Tuntutan pengelolaan sampah yang berbasis standar pengelolaan tertentu,
- Luas permukiman semakin bertambah sehingga ekspektasi masyarakat akan pelayanan penerangan jalan umum juga terus meningkat,
- Biaya pemeliharaan penerangan jalan umum diperhadapkan pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerangan jalan umum,
- Pembakaran lahan pertanian pada wilayah hutan seringkali menimbulkan kebakaran hutan,
- Luas lahan kritis dan tingkat kerusakan hutan terus bertambah seiring dengan semakin menurunnya daya tampung lingkungan, kapasitas dan kualitas air baku, akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan,
- Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang,
- Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup masih belum memadai,
- Koordinasi dan sinergi penyusunan regulasi lingkungan hidup masih lemah,
- Kualitas dan ketersediaan penyusunan dokumen sektoral lingkungan belum diterapkan dengan ketat.

- f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Penataan administrasi kependudukan belum memadai,
 - Masih cukup banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan yang memadai.
- g. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
 - Penerapan keluarga berencana belum massivedan menyeluruh,
 - Pelayanankontrasepsibelummenjangkausecaramasssivedan menyeluruh.
 - Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri belum memadai,
 - Upaya promosi kesehatan ibu dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat masih minim,
 - Pengembangan pusat pelayanan informasidankonselingKKR belum optimal,
 - Upaya penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS kurang terkoordinasi dengan stake holder terkait lainnya yakni Dinas Kesehatan,
 - Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga masih belum memadai,
 - Pengkajian dan pengembangan model operasional BKB-Posyandu- PADU belum terkoordinasi.
- h. Urusan Perhubungan
 - Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan belum optimal Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ kurang optimal,
 - Pengendlian dan pengamanan lalu lintas belum memadai,
 - Pengawasankelaikanjalankendaraanangkutananumumbelum memadai,
 - Pendapatan Asli daerah dari sektor perhubungan belum tergali dengan baik.
- i. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - Belum tersedianya gedung kantor yang refresentatif serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas,
 - Ketersediaan infrastruktur pendukung teknologi informasi yang masih belum tersebar secara menyeluruh pada lapisan masyarakat,
 - Masih kurangnya sumber daya manusia pada bidang teknologi informasi yang memiliki kompetensi yang memadai, baik pada lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika, lingkup OPD dan lingkup Masyarakat,
 - Belum tersedianya regulasi (Perdadan peraturan teknis dibidang tata kelola TIK (e-government),
 - Belum optimalnya pengembangan dan integrasi aplikasi yang berbasis e-government.

j. Urusan Penanaman Modal

- Upaya promosi dan kerjasama investasi yang masih minim,
- Peningkatan nilai investasi yang masuk belum banyak membantu membuka lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran,
- Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah masih terbatas,
- Pengembangan data dan informasi statistic daerah terkait investasi perlu disinergikan dengan OPD lain.

k. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- Peran serta kepemudaan masih minim,
- Jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda belum memadai,
- Pencegahan penyalahgunaan narkoba belum menjadi prioritas pertama dibandingkan upaya represif dalam penanganan kasus narkoba,
- Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga belum memadai,
- Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga masih seremonial dan belum menjadi event tetap,
- Sarana dan prasarana olahraga sangat terbatas

l. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Skala dan diversifikasi usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah masih terbatas,
- Lembaga koperasi yang berjalan dengan status sehat dan kredibel masih terbatas,
- Keanggotaan koperasi lebih didominasi kepada pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan sesaat (konsumtif) dibanding sebagai penembangan usaha,
- Peningkatan kompetensi manajemen pengelolaan koperasi dan usaha kecil menengah belum optimal,
- Pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah belum terintegrasi dengan lembaga keuangan formal dan industri menengah dan besar.

m. Urusan Persandian dan Statistik

- Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran belum cukup tersedia,
- Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dinas,
- Pola hubungan kerja dan komunikasi dalam menyelenggarakan urusan statistik sektoral dan urusan persandian belum melembaga,
- Kapasitas anggaran sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana,
- Belum menggunakan system informasi berbasis aplikasi dalam pengelolaan statistik dan penyelenggaraan persandian,

- Tingginya kebutuhan akan layanan data terupdate baik untuk kepentingan analisis data pemerintahan dan pembangunan maupun untuk swasta.
- n. Urusan Kebudayaan
- Belum tersedianya data dan sistem informasi kebudayaan dan seni,
 - Belum seluruhnya lingkungan seni dan komunitas budaya yang memenuhi syarat terlegalisasi,
 - Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, lingkungan seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kebudayaan dan kesenian serta pembangunan Kabupaten Barru,
 - Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap lingkungan seni, pelaku seni dan komunitas-komunitas seni budaya,
 - Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah,
 - Belum optimalnya perhatian Pemerintah pada pembangunan Budaya.
- o. Urusan Perpustakaan
- Budaya baca dan pembinaan perpustakaan di sejumlah lembaga pendidikan belum memadai, dan belum merata,
 - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan minat baca masyarakat masih sangat kurang.
- p. Urusan Kearsipan
- Perbaikan sistem kearsipan, penyelamatan dokumen daerah dan pemeliharaan sarana prasana kearsipan belum memadai,
 - Pemanfaatan teknologi informasi digital dalam pengelolaan kearsipan belum memadai.
- q. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tatakelola pemerintahan desa.
 - Ketidak berdayaan masyarakat disebabkan Faktor ekonomi, rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya Akses informasi, sarana, modal, pasardan pelayanan Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, pemprov, Pemkab/pemkot dan desa.
 - Perlunya diantisipasi akan berakhirnya program PNPM
 - Belum fokus dan belum bersinerginya program-program pemberdayaan masyarakat dari pusat/provinsi dengan program pemerintah kabupaten

3. Urusan Pilihan

a. Urusan Perikanan

- Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air serta fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan,
- Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya
- Keterbatasan infrastruktur/sarpras dari perikanan budidaya, tangkap dan pengelolaan hasil kelautan dan perikanan
- Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan
- Masih maraknya pelaku illegal fishing
- Masih kurangnya kajian terhadap pengelolaan sumberdaya kemaritiman,
- Pengelolaan perikanan tangkap belum optimal,
- Sarana dan prasarana perikanan tangkap belum memadai,
- Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dan penyediaan Sarana & Prasarana Perikanan masih minim,
- Belum adanya pola kerjasama atau kemitraan antara pemodal “pongawa bonto” dengan nelayan “sawi” yang saling menguntungkan dan saling menumbuhkan.

b. Urusan Pariwisata

- Keterpaduandan sinergiantar pelakuwisata dalam pengembangan pariwisatamasih rendah.
- Belum optimalnya pengelolaan pariwisata baik destinasi, atraksi budaya dan manajemen kelembagaannya
- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata
- Masih kurangnya kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
- Belum optimalnya promosi wisata,
- Pengembangan pemasaran dan jaringan kemitraan kepariwisataan masih belum memadai,
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dalam pembangunan dan promosi kepariwisataan masih sangat minim,
- Penerimaan dan Kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD dan PDRB masih minim,
- Pengintegrasian dan sinergitas ekonomi kreatif sebagai salah satu fokus komoditas penunjang kepariwisataanbelum berjalan,
- Pendayagunaan lingkungan hidup dan obyek wisata alam sebagai salah satu potensi wisata juga belum optimal.

c. UrusanPertanian

- Belum optimalnya diversifikasi produk pangan local
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
- Ketersediaan dan kedaulatan panganbelum menjadi focus daerah,

- Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun.
 - Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, peternakan, perikanan serta teknologi untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas;
 - Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi;
 - Biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, serta belum optimalnya manajemen agribisnis.
 - Pengembangan penyediaan sarana prasarana, teknologi dan kelembagaan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil perkebunan.
 - Penerapan teknologi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan masih terbatas.
 - Eksistensi lahan pertanian produktif terus terancam akibat pengembangan pembangunan sektor lain.
 - Pengelolaan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan belum optimal.
 - Jaringan dan kemitraan usaha baik produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perkebunan belum memadai.
 - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sektor pertanian secara luas masih minim.
- d. Urusan Perindustrian
- Simpul distribusi dan sentra ekonomi masyarakat/publik lainnya masih jauh dari kondisi nyaman,
 - Kelembagaan dan kemitraan perdagangan belum optimal,
 - Pengawasan mutu dan peredaran barang dan jasa yang beredar belum memadai dan terkoordinasi baik dengan OPD lainnya,
 - Perlindungan atas konsumen belum optimal
 - Pembinaan terhadap personal dan kelembagaan pedagang kaki lima dan asongan belum optimal.
- e. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
- Terbatasnya pasokan listrik untuk industri dan rumah tangga
 - Masih banyak penambangan yang tidak ramah lingkungan.
 - Potensi energi terbarukan seperti energi matahari dan mikrohidro belum dimanfaatkan secara optimal
- f. Urusan Perindustrian
- Masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM,
 - Industri berbasis sumber daya lokal belum berkembang secara merata
 - Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar, dan belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha,
 - Pengembangan industri kecil dan menengah belum memadai,
 - Penataan sektor dan kluster industri belum optimal,

- Sinergi antara beberapa unit kerja dalam pengembangan perindustrian masih kurang,
 - Pemanfaatan teknologi informasi belum memadai.
- g. Urusan Perdagangan
- Rendahnya daya saing produk di pasar nasional maupun global, belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis,
 - Belum optimalnya kesiapan menghadapi perdagangan bebas, MEA, dan lainnya
 - Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perdagangan seperti pasar
 - Penyediaan biaya untuk menyanggah harga komoditas andalan
 - Urusan Transmigrasi
 - Masih kurangnya perhatian dan kemauan masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi
 - Sulitnya menyediakan lokasi transmigrasi

4. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

- a. Urusan Penelitian dan Pengembangan
- Fungsi kelitbangan belum optimal,
 - Rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan,
 - Belum adanya sinergitas kebijakan yang mendukung kelitbangan.
 - Kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang menjadi penting, untuk menunjang aktivitas kinerja dalam penyusunan dokumen hasil-hasil penelitian yang lebih terarah dan terukur.
 - Penganggaran yang cukup juga merupakan factor yang dapat mendorong terciptanya hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang baik dan berkualitas.
 - Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kelitbangan oleh perangkat daerah sangat dibutuhkan pemahaman yang baik dalam tata cara penyusunan program dan anggaran.
 - Pemetaan urgensi, peran dan potensi stakeholder kelitbangan penting untuk segera dilaksanakan untuk mendukung berjalannya sistem inovasi di daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan semakin baik.
- a. Urusan Perencanaan
- Masih kurangnya data pendukung perencanaan pembangunan
 - Belum optimalnya dan belum meratanya kesadaran masyarakat pentingnya perencanaan dari bawah,
 - Sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran SKPD belum optimal,
 - Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi belum sinergis, *massive* dan sistematis,
 - Koordinasi dalam upaya Penataan Peraturan terkadang masih kurang sinergis dengan OPD utama.

b. Urusan Keuangan

- Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah
- Masih adanya permasalahan terkait aset pemerintah pada tiap Perangkat Daerah,
- Upaya meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah belum massive di semua Perangkat Daerah dan aparatur,
- Upaya menggali dan memetakan potensi PAD dari sektor sektor potensial lain belum optimal.

c. Urusan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

- Masih ada pejabat struktural yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan,
- Jumlah dan rasio pejabat fungsional dengan kompetensi teknis masih sangat kurang terhadap kebutuhan pada sejumlah perangkat daerah,
- Masih perlunya penataan struktur dan budaya organisasi/ kelembagaan instansi pemerintah dalam mendukung pemerintahan yang responsive
- Masih kurangnya reward and punishment dalam rangka peningkatan motivasi aparatur
- Belum sesuai kompetensi pegawai dengan kebutuhan riil

d. Urusan Pengawasan

- Upaya meningkatkan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH belum massive oleh semua OPD dan aparatur,
- Upaya meningkatkan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan belum berkelanjutan dan sistematis,
- Upaya Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan masih belum optimal,
- Masih lemahnya pelaksanaan dan penegakan hukum dan perundang- undangan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah masih akan tetap diwarnai berbagai ketidakpastian global. Meski demikian, pemerintah cukup optimistis geliat perekonomian nasional tak akan terganggu.

Pada 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada di rentang 5,5%-6,2%. Kemudian pada 2021 dan 2022, akselerasi ekonomi nasional masing-masing berada di kisaran 5,5%-6,4% dan 5,8%-6,5%.

Dengan target tersebut, Indonesia dibidik masih menyandang predikat Upper-Middle Income Countries. Sehingga kedepan pemerintah menyiapkan lima langkah untuk meningkatkan investasi, yakni finalisasi Rancangan Undang-Undang terkait Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, pemberian fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan, pemberian fasilitas investasi seperti percepatan perizinan berusaha di kementerian, lembaga, dan daerah melalui sistem Online Single Submission terintegrasi, pemberian kemudahan untuk investasi berorientasi ekspor, hingga kemudahan dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor.

Target peningkatan ekspor barang dan jasa diprediksi akan terus meningkat dengan didorong naiknya permintaan ekspor Indonesia akibat pulihnya aktivitas ekonomi dunia.

Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha mengandalkan sektor industri, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara sektor terdampak negatif diharapkan pulih, seiring dengan normalnya kondisi global dan domestik yang berujung pada semakin bergeraknya roda industri dan memicu kedatangan wisatawan.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didukung peningkatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang didorong pulihnya permintaan domestik dan global serta meningkatnya produktivitas lahan dan penguatan nilai tambah produk.

Pemerintah pun optimistis dalam melakukan perbaikan (pemulihan ekonomi)berlanjut hingga 2022, meski tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 masih akan mewarnai tahun depan dan proses pengendalian Covid-19 sangat bergantung pada penemuan dan distribusi vaksin hingga mencapai herd immunity.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Arah Kebijakan Ekonomi tahun 2022 tentunya diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Dalam kondisi tekanan akibat pandemic, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mengalami perbaikan di level yang lebih tinggi dibandingkan kinerja nasional, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Sulawesi selatan mampu

mempertahankan kinerja lebih baik dibandingkan nasional, terlihat pada capaian tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan terkontraksi minus pada posisi -0,70%, namun masih diatas angka Pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi minus pada posisi -2,07%.

Dengan langkah kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut, tahun 2022 akan memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang. Upaya redesain transformasi ekonomi sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-panjang.

Beberapa skenario disusun untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui infrastruktur, Infrastruktur menjadi salah satu program padat karya, sehingga yang tadinya kena dampak PHK bisa kerja kembali. Sektor infrastruktur tidak hanya berpotensi meningkatkan perekonomian, tapi juga diberbagai sektor seperti kesehatan. Apalagi, pada kuartal kedua infrastruktur menjadi salah satu penyumbang atau pendongkrak investasi yang ada di Sulawesi Selatan.

Untuk saat ini terdapat sejumlah kegiatan konstruksi yang akan didorong Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yakni pembangunan Stadion Mattoanging, pembangunan Twin Tower di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), dan yang terbaru pembangunan jalan Tol Makassar-Takalar. Tentunya hal ini dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di sulawesi selatan.

Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2022 yaitu: Pertumbuhan ekonomi 4,62 – 5,98 persen; Tingkat Kemiskinan 9,19 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 6,95 persen; Gini Rasio 0,398; PDRB Perkapita (adhb) Rp. 62,43 Juta dan Tingkat Inflasi 3,0-1,0 persen;

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2022, diarahkan pada “Inovasi Pemanfaatan Potensi & Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi”, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut : Pemantapan Reformasi Birokrasi, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk Akselerasi Pertumbuhan, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial, Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berbudaya, dan Pengelolaan Komoditas Unggulan berbasis Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Barru

Arah Kebijakan ekonomi Kabupaten Barru tahun 2022 berdasarkan Arah kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Sulawesi selatan serta berdasarkan Visi Misi Bupati Periode 2021-2026 Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dimana arah kebijakan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Meningkatkan akses rumah layak huni
 - b. Mewujudkan Pengembangan Infrastruktur dan pengelolaan air minum layak dan layanan sanitasi layak

- c. Meningkatkan kualitas konstruksi jaringan drainase
 - d. Meningkatkan kualitas bangunan gedung
 - e. Meningkatkan kualitas penataan ruang daerah
 - f. Meningkatkan efisiensi dan kinerja system irigasi
 - g. Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
 - h. Meningkatkan kualitas konstruksi jaringan jalan dan jembatan
 - i. Meningkatkan ketersediaan moda transportasi
 - j. Mewujudkan penyediaan layanan telekomunikasi dan layanan internet yang dapat dijangkau masyarakat.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan
- a. Peningkatan pengelolaan dan ketersediaan sarana dan prasarana sumberdaya pertanian
 - b. Penguatan keberlanjutan produktifitas sumberdaya pertanian yang adaptif terhadap penyakit dan perubahan iklim
 - c. Peningkatan produksi, produktifitas, standarisasi, jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan
 - d. Pengembangan aksesibilitas, atraksi dan amenitas di destinasi pariwisata prioritas
 - e. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital
 - f. Pengembangan industrialisasi yang berbasis investasi disinergikan dengan pengembangan kawasan industri
 - g. Perluasan kerjasama dan kapasitas pemasaran dan perdagangan
 - h. Peningkatan pengelolaan sumberdaya ekonomi dalm pemenuhan kebutuhan pangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan mepertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional, maka ditetapkan indikator makro pembangunan provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Target Indikator Makro Kabupaten Barru Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Kinerja Tahun 2022		
			Rancangan RPJMD	RKPD Provinsi SulSel	RKPD Kab Barru
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47	5,98-7,6	4,47
2.	Angka Kemiskinan	%	8,89	8,38-9,19	8,89
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,88	6,16- 6,95	5,88
4.	Rasio Gini	Angka/ Poin	0,35	0,398	0,35
5.	PDRB Perkapita	Rp. Juta	51,94	62,37	51,94
6.	IPM	Angka	71,79	72,68	71,79

Penetapan indikator makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian

kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

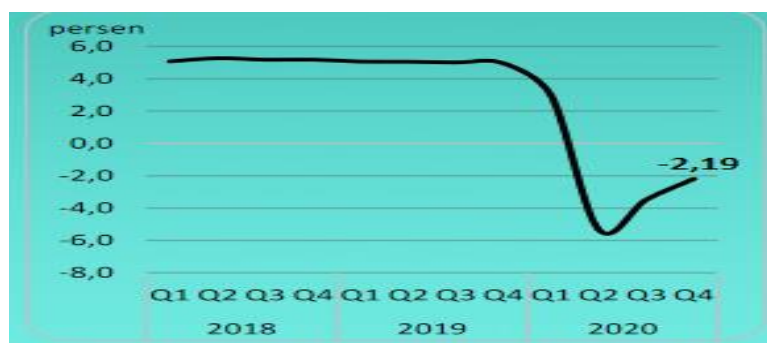
3.2. GAMBARAN KONDISI EKONOMI

3.2.1 Kondisi Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV tahun 2020 kembali berkontraksi sebesar 2,19 persen (YoY). Meskipun masih berkontraksi, namun realisasi tersebut membaik sejak pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020. Pada triwulan II dan III tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masing-masing berkontraksi 5,3 dan 3,5 persen (YoY). Mengecilnya kontraksi menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi pada triwulan IV tahun 2020. Sementara itu, dibandingkan negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia relatif lebih kecil.

Grafik 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik

Perbaikan kondisi perekonomian Indonesia didorong oleh pemulihan sektor-sektor ekonomi meskipun dengan kecepatan yang berbeda. Sektor yang dianggap esensial selama pandemic masih tumbuh tinggi. Sementara sektor yang berhubungan dengan pariwisata masih terpuruk.

- **Sektor pertanian tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya**

Sektor pertanian tumbuh 2,6 persen (YoY), didorong oleh pertumbuhan positif pada subsector pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian serta subsector perikanan. Sementara itu, subsector kehutanan dan penebangan kayu berkontraksi semakin dalam menjadi 5,4 persen (YoY) disebabkan oleh turunnya realisasi pemenuhan bahan baku industri pengolahan kayu.

Tanaman pangan tumbuh hingga 10,5 persen (YoY), didorong oleh peningkatan luas panen dan meningkatnya produksi padi, jagung, dan ubi kayu. Tanaman hortikultura juga meningkat 7,8 persen (YoY) yang didorong oleh peningkatan permintaan buah-buahan dan sayuran selama seiring dengan pandemi yang belum usai. Sementara itu, peternakan mengalami kontraksi 1,9 persen (YoY) sejalan dengan penurunan permintaan terutama dari segmen pasar hotel dan restoran.

• **Industri pengolahan masih terkontraksi**

Industri pengolahan terkontraksi 3,1persen (YoY), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Subsektor industri logam dasar meningkat 11,5 persen (YoY) didorong oleh peningkatan permintaan dari luar negeri atas beberapa komoditas seperti feronikel. Subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional juga tumbuh 8,4persen (YoY) terutama disebabkan oleh permintaan domestik pada alat-alat kesehatan.

Industri makanan dan minuman tumbuh 1,7 persen (YoY) didorong oleh kenaikan permintaan Crude Palm Oil (CPO). Indudstri karet, barang dari karet, dan plastik juga mampu tumbuh sebesar 0,2 persen (YoY). Beberapa industri pengolahan mengalami kontraksi yang cukup dalam, seperti industri alat angkutan yang turun 19,0 persen (YoY). Kinerja tersebutdisebabkan oleh turunnya permintaan pasar pada mobil dan motor. Selain itu, industry barang galian bukan logam juga terkontraksi sebesar 12,5 persen (YoY) sejalan dengan menurunnya aktivitas konstruksi pada masa pandemi.

• **Sektor perdagangan tunjukkan perbaikan dengan kontraksi yang mengecil.**

Tabel 3.2

Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Uraian	Growth (%)		Share thd Total PDB (%)
	QtQ	YoY	
PDB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,9	-3,6	12,9
Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya	10,1	-9,7	2,5
Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Motor	-3,0	-2,2	10,4
Produk Domestik Bruto	-0,4	-2,2	100,0

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada triwulan IV tahun 2020, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda yang memiliki peran sebesar 12,9 persen terhadap perekonomian turun 3,6 persen (YoY). Turunnya kinerja sektor perdagangan disebabkan oleh penurunan pada subsector. perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya sebesar 9,7 persen (YoY) dan penurunan pada subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor sebesar 2,2 persen (YoY).

• **Sektor konstruksi terkontraksi semakin dalam.**

Pertumbuhan sektor konstruksi terkontraksi sebesar 5,7 persen (YoY), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 4,5 persen (YoY). Realisasi pengadaan semen di Indonesia pada triwulan IV tahun 2020 turun 13,8 persen (YoY). Selain itu, impor bahan bangunan untuk kebutuhan konstruksi juga menurun.

• **Pariwisata belum pulih, sektor transportasi dan sektor akomodasi masih terkontraksi.**

Sektor transportasi pada triwulan IV tahun 2020 terkontraksi 13,4 persen (YoY). Meskipun masih terkontraksi cukup dalam, namun kinerja pada triwulan IV tahun 2020 lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang

terkontraksi 16,7 persen (YoY). Perbaikan tersebut didorong oleh pergerakan wisatawan nusantara sejalan dengan banyaknya hari libur pada akhir tahun. Hari libur dan PSBB memberi dampak yang besar kepada angkutan rel yang terkontraksi hingga 45,6 persen (YoY). Penyebab utama terpukulnya transportasi kereta adalah turunnya penumpang Kereta Rel Listrik (KRL). Hal serupa juga terjadi pada angkutan udara yang terkontraksi 53,8 persen (YoY) sejalan dengan pemberlakuan restriksi perjalanan di berbagai negara. Sektor akomodasi dan makan minum terkontraksi 8,9 persen (YoY), tidak sedalam triwulan sebelumnya. Kontraksi pada triwulan IV tahun 2020 merupakan dampak rendahnya aktivitas pariwisata sehingga tingkat kunjungan hotel dan restoran masih rendah.

• **Sektor jasa kesehatan dan infokom, masih tumbuh tinggi.**

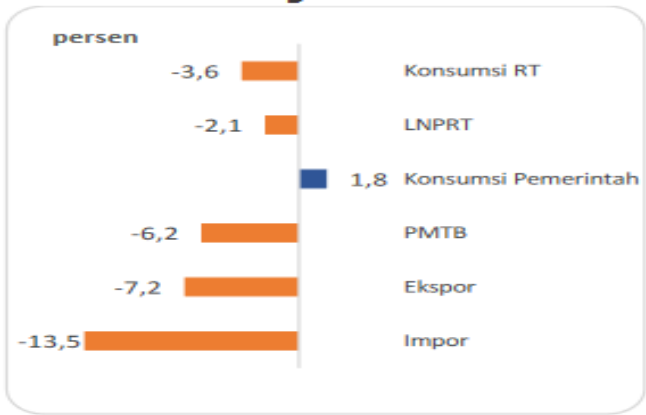
Meskipun masih banyak lapangan usaha yang mengalami kontraksi, sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan yang tinggi setelah sektor jasa kesehatan. Sektor infokom terus menunjukkan pertumbuhan yang baik dan menjadi sumber pertumbuhan terbesar pada triwulan IV tahun 2020 yakni sebesar 0,57 persen. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi meningkat hingga 10,9 persen (YoY), lebih tinggi baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (9,8 persen, YoY) maupun triwulan III tahun 2020 (10,7 persen, YoY). Kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan di luar rumah untuk mengurangi penyebaran Covid-19, dan penggantian sistem kerja seperti work from home serta kegiatan belajar mengajar secara daring mendorong permintaan masyarakat akan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.

Selain sektor infokom, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga tumbuh tinggi di tengah pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi, terutama permintaan obat-obatan, alat kesehatan, serta layanan kesehatan. Sektor yang esensial dalam penanganan pandemic Covid-19 ini menjadi sumber pertumbuhan terbesar ketiga yakni sebesar 0,14 persen. Pertumbuhan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 16,5 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (7,8 persen, YoY).

• **Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen masih terkontraksi kecuali konsumsi pemerintah.**

Grafik 3.2

Pertumbuhan PDB sisi Pengeluaran

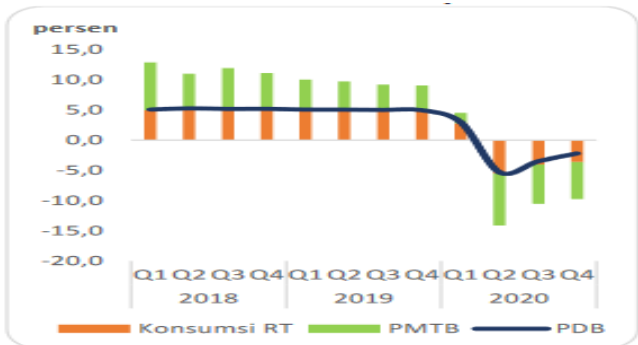


Sumber : Badan Pusat Statistik

Konsumsi rumah tangga berkontraksi 3,6 persen (YoY), lebih baik dibandingkan triwulan III tahun 2020 yang berkontraksi 4,1 persen (YoY). Penjualan eceran berkontraksi cukup dalam yakni sebesar 17,4 persen (YoY), yang terjadi pada seluruh kelompok penjualan. Kontraksi yang paling dalam terjadi pada subkomponen transportasi dan komunikasi yang sebesar -9,5 persen (YoY). Kemudian diikuti oleh subkomponen restoran dan hotel yang berkontraksi 7,3 persen (YoY). Subkomponen kesehatan dan pendidikan serta perumahan dan perlengkapan rumah tangga tumbuh melambat masing-masing sebesar 0,6 dan 0,7 persen (YoY). Pertumbuhan subkomponen kesehatan dan pendidikan didorong oleh kebutuhan masyarakat akan obat-obatan, vitamin, serta peralatan kesehatan selama pandemi.

Grafik 3.3

Perkembangan Konsumsi RT dan Investasi terhadap PDB



Sumber : Badan Pusat Statistik

- **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berkontraksi 6,2 persen (YoY).**

Tabel 3.3

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Uraian	Nilai* Q4 2020	Growth (%)		Share thd Total PDB (%)
		QtQ	YoY	
Pembentukan Modal Tetap Bruto	894,1	4,2	-6,2	33,0
Bangunan	666,9	4,0	-6,6	24,6
Mesin dan Perlengkapan	94,6	14,0	-7,6	3,5
Kendaraan	46,9	12,5	-6,5	1,7
Peralatan lainnya	14,6	13,4	-3,8	0,5
Cultivated Biological Resources	54,4	-6,5	4,4	2,0
Produk Kekayaan Intelektual	16,8	-20,7	-10,4	0,6
Produk Domestik Bruto	2.709,0	-0,4	-2,2	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik
*dalam triliun Rp (ADHK)

Pada triwulan IV tahun 2020, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih mengalami kontraksi sebesar 6,2 persen (YoY), relative sama dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 6,5 persen (YoY). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya investasi mesin dan perlengkapan sebesar -7,6 persen (YoY) akibat produksi domestik yang belum pulih. Komponen lainnya juga berkontraksi seperti bangunan (6,6 persen, YoY), kendaraan (6,5 persen, YoY), peralatan lainnya (3,8 persen, YoY) dan produk kekayaan intelektual (10,4 persen, YoY).

Cultivated Biological Resources(CBR) menjadi satu-satunya subkomponen investasi yang masih tumbuh positif sebesar 4,4 persen (YoY). Meski tetap tumbuh, namun pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (23,1 persen, YoY) maupun triwulan IV tahun 2019 (8,6 persen, YoY). Pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 9,8persen (YoY), didorong oleh peningkatan realisasi pemberian bantuan sosial untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi belanja barang dan jasa juga meningkat terutama pada barang non-operasional, khususnya untuk penanganan dampak pandemi. Selain itu, pencairan insentif bagi tenaga kesehatan dan pergeseran pembayaran tunjangan profesi guru mendorong kenaikan belanja pegawai. Ekspor barang dan jasa berkontraksi 10,8 persen (YoY), sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya (-11,7 persen, YoY). Ekspor barang migas berkontraksi 12,5 persen (YoY), lebih dalam dari periode yang sama tahun 2019 (-9,0 persen, YoY). Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya permintaan dan turunnya harga. Sementara ekspor nonmigas berkontraksi 4,9 persen (YoY), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 7,5 persen (YoY). Ekspor jasa berkontraksi dalam mencapai 51,8 persen (YoY), seiring dengan penurunan jumlah wisatawan mancanegara.

3.2.2. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Selatan

Kinerja ekonomi Sulawesi Selatan triwulan IV 2020 melanjutkan tren perbaikan. Ekonomi berkontraksi -0,62% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -1,10% (yoy) dan masih lebih baik dibandingkan dengan kinerja nasional. Dengan realisasi tersebut pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan untuk keseluruhan tahun 2020 berkontraksi -0,70% (yoy).

Perbaikan kinerja ekonomi pada triwulan IV terutama ditopang oleh investasi yang tumbuh kuat disertai dengan ekspor luar negeri yang membaik meski terbatas. Perbaikan confidence level investor sejalan dengan tekanan ekonomi akibat COVID-19 di tingkat global maupun lokal yang cenderung turun memberikan harapan bagi kinerja investasi. Namun, pemberlakuan kembali pembatasan aktivitas masyarakat untuk menekan penyebaran COVID-19 menjelang libur akhir tahun menahan perbaikan kinerja ekonomi untuk dapat tumbuh positif. Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan ekonomi dari sisi Lapangan Usaha (LU) ditopang oleh peningkatan kinerja LU Pertanian dan Konstruksi. Perbaikan terjadi ditengah LU Perdagangan dan Industri Pengolahan yang kembali berkontraksi lebih dalam dipengaruhi oleh terbatasnya konsumsi masyarakat.

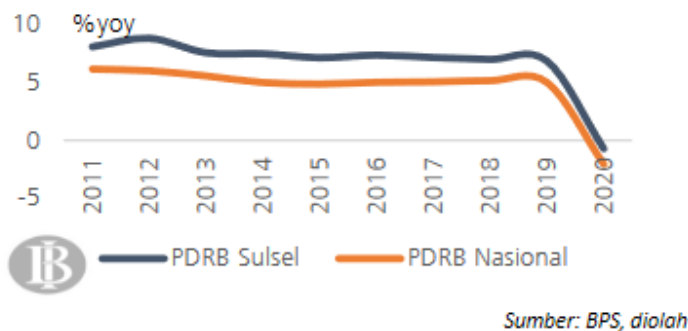
Dengan prasyarat terkendalinya penyebaran COVID-19 serta perkembangan positif vaksinasi, ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I 2021 diperkirakan melanjutkan perbaikan secara bertahap.

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan signifikan terhadap kinerja perekonomian Sulawesi Selatan. Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, ekonomi Sulawesi Selatan pada 2020 tercatat berkontraksi namun tak sedalam kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional (Grafik 1.1). Meskipun masih berkontraksi, ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2020 tercatat -0,62% (yoy) atau tidak sedalam kontraksi pada 2 (dua) triwulan sebelumnya (Grafik 1.2). Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan tahun 2020

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tercatat kontraksi 0,70% (yoy). Angka pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah bagi Sulawesi Selatan.

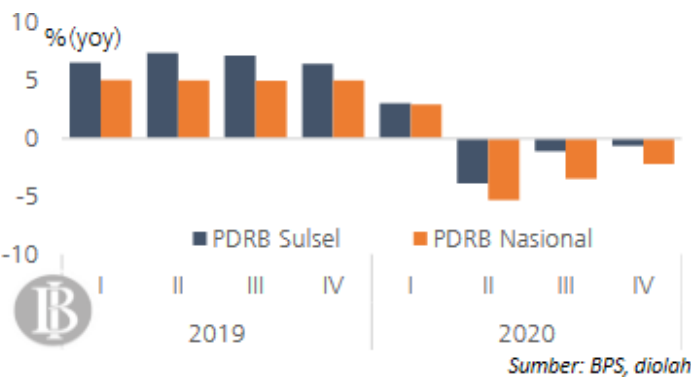
Grafik 3.4

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Keseluruhan Tahun



Grafik 3.5

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan



Perlambatan realisasi ekonomi untuk keseluruhan tahun 2020 mulai terasa semenjak awal tahun dan mencapai puncak pada triwulan II, tercermin dari penurunan incomeserta rendahnya penyerapan tenaga kerja.Pada triwulan II 2020,ekonomi Sulawesi Selatan tercatat terkontraksi 3,87% (yoy). Pertumbuhan ekonomi triwulan III dan IV menunjukkan perbaikan meskipun masih dalam level kontraksi. Tingginya stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah turut membantu menahan kontraksi ekonomi lebih dalam, khususnya pada komponen pengeluaran konsumsi. Hingga triwulan IV, pertumbuhan ekonomi telah mendekati angka positif, didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menekan tingkat penyebaran COVID-19 sekaligus memperbaiki kinerja perekonomian (Tabel 1.4).

Perbaikan ekonomi diperkirakan berlanjut pada triwulan I 2021,sejalan dengan sentimen positif dari perkembangan vaksin. Dari sisi permintaan, berlanjutnya stimulusPemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diperkirakan menopang konsumsi masyarakat. Keyakinan konsumen dan confidence level investor diperkirakan meningkat, ditengah proyek pemerintah yang berlanjut dan ruang belanja fiskal yang diperkirakan lebih besar. Sementara, kondisi sektor eksternal diperkirakan lebih baik sejalan dengan meredanya tekanan ekonomi global akibat COVID-19. Dari sisi lapangan usaha, LU Utama Sulsel diperkirakan mengalami perbaikan seiring tekanan ekonomi akibat COVID-

19 yang mulai mereda. Namun demikian, terdapat downside risk akibat peningkatan risiko penyebaran COVID-19 di awal tahun yang disertai dengan pembatasan fisik di Kota Makassar.

3.2.3. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Barru

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau yang dikenal dengan PDRB riil disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur laju pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi), angka yang ditunjukkan oleh PDRB merupakan penjumlahan seluruh pendapatan yang diperoleh perekonomian suatu daerah yang dikelompokkan dalam 17 sektor rincian kategori lapangan usaha yaitu sektor Pertanian, sektor Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sektor Jasa Lainnya.

Untuk mengetahui nilai dan distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan dan harga berlaku dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.4

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.436,85	1.501,20	1.581,31	1.652,72	1.662,67
2	Pertambangan dan Penggalian	119,72	125,04	130,68	138,15	139,11
3	Industri Pengolahan	212,67	222,58	232,09	253,70	247,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,34	5,70	6,10	6,39	6,80
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,05	4,28	4,62	5,10	5,79
6	Konstruksi	580,17	648,67	714,30	785	792,83
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	389,85	422,90	460,26	505,36	497,56
8	Transportasi dan Pergudangan	91,69	98,83	111,50	126,16	112,19
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36,61	39,17	43,32	48,28	48,24
10	Informasi dan Komunikasi	211,94	232,78	255,89	281,43	313,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	115,17	117,76	120,72	124,64	127,94
12	Real Estate	135,71	145,36	153,34	155,82	160,00
13	Jasa Perusahaan	0,96	1,04	1,14	1,25	1,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	293,58	309,79	338,93	375,96	371,71
15	Jasa Pendidikan	158,64	165,05	173,78	186,48	195,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98,15	102,55	108,28	117,30	125,65
17	Jasa Lainnya	25,17	27,29	30,29	33,68	31,60
Jumlah PDRB		3.916,34	4.169,98	4.420,93	4.797,43	4.839,12

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Tabel 3.5

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), 2016-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun (Miliar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.028,42	2.162,34	2.333,00	2.458,99	2.528,15
2	Pertambangan dan Penggalan	179,96	192,71	206,58	219,09	225,39
3	Industri Pengolahan	275,20	298,48	319,94	355,33	348,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,83	5,66	6,20	6,44	6,84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,14	5,66	6,16	6,96	7,93
6	Konstruksi	927,52	1.042,34	1.221,39	1.411,25	1.428,09
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	468,54	532,23	605,96	686,75	688,31
8	Transportasi dan Pergudangan	138,67	152,01	173,04	197,96	181,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	51,37	56,88	63,73	73,22	75,78
10	Informasi dan Komunikasi	227,09	257,98	289,39	322,33	359,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	168,88	184,43	197,73	211,34	217,16
12	Real Estate	191,05	207,96	226,44	233,45	241,06
13	Jasa Perusahaan	1,28	1,36	1,51	1,74	1,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	430,70	467,86	533,93	612	616,47
15	Jasa Pendidikan	203,12	219,08	235,93	257,93	273,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,00	133,32	145,43	162,04	180,57
17	Jasa Lainnya	36,97	41,64	47,76	54,37	51,94
Jumlah PDRB		5.458,75	5.961,95	6.614,10	7.271,22	7.432,30

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Tabel 3.6

Distribusi Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
dan Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Barru (Persen), 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,16	36,48	36,27	35,78	35,27	35,40	33,82	34,45	34,02	34,45
2	Pertambangan dan Penggalian	3,30	3,06	3,23	3,00	3,12	3,02	3,01	2,88	3,03	2,88
3	Industri Pengolahan	5,04	5,44	5,01	5,35	4,84	5,29	4,89	5,29	4,69	5,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,14	0,09	0,14	0,09	0,14	0,09	0,13	0,09	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
6	Konstruksi	16,99	14,81	17,48	15,54	18,47	15,58	19,41	16,36	19,21	16,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,58	10,09	8,93	10,30	9,16	10,67	9,44	10,53	9,26	10,53
8	Transportasi dan Pergudangan	2,54	2,35	2,55	2,38	2,62	2,42	2,72	2,63	2,44	2,63
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,94	0,94	0,95	0,94	0,96	0,95	1,01	1,01	1,02	1,01
10	Informasi dan Komunikasi	4,16	5,42	4,33	5,59	4,38	5,70	4,43	5,87	4,84	5,87
11	Jasa Keruangan dan Asuransi	3,09	2,96	3,09	2,83	2,99	2,89	2,91	2,60	2,92	2,60
12	Real Estate	3,50	3,47	3,49	3,49	3,42	3,52	3,21	3,25	3,24	3,25
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,89	7,51	7,85	7,44	8,07	7,24	8,42	7,84	8,29	7,84
15	Jasa Pendidikan	3,72	4,06	3,67	3,97	3,57	3,96	3,55	3,89	3,68	3,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,20	2,51	2,24	2,46	2,20	2,42	2,23	2,45	2,43	2,45
17	Jasa Lainnya	0,68	0,64	0,70	0,66	0,72	0,67	0,75	0,70	0,70	0,70
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai produk domestik regional bruto (PDRB) baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sedangkan distribusi masing-masing kategori lapangan usaha terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) berfluktuatif dari tahun tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat peranan masing-masing sektor lapangan usaha terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Sedangkan laju pertumbuhan PDRB menurut sektor/kategori lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,02	4,48	5,34	4,52	0,60
2	Pertambangan dan Penggalian	3,68	4,44	4,51	5,72	0,69
3	Industri Pengolahan	6,11	4,66	4,27	9,31	-2,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,37	5,71	7,01	4,66	6,49
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,65	5,68	7,79	10,47	13,63
6	Konstruksi	7,87	11,81	10,12	9,90	1,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,03	8,48	8,84	9,80	-1,54
8	Transportasi dan Pergudangan	7,61	7,79	12,83	13,14	-11,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,63	6,99	10,59	11,45	-0,08
10	Informasi dan Komunikasi	9,78	9,83	9,93	9,98	11,25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,56	2,25	2,51	3,25	2,65
12	Real Estate	8,04	7,10	5,49	1,62	2,68
13	Jasa Perusahaan	3,21	7,63	9,67	10,27	-5,80
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,18	5,52	9,41	10,93	-1,13
15	Jasa Pendidikan	4,15	4,04	5,29	7,31	4,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,47	4,48	5,58	8,33	7,12
17	Jasa Lainnya	3,24	8,42	11,01	11,19	-6,18
Produk Domestik Regional Bruto		6,01	6,48	7,11	7,41	0,87

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

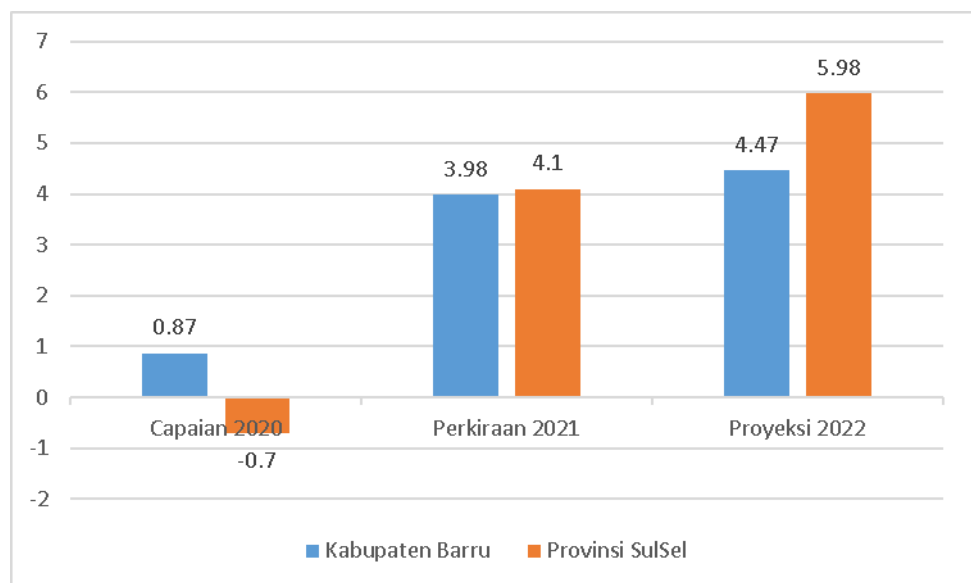
Berdasarkan tabel diatas laju pertumbuhan masing-masing sektor lapangan usaha pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuatif namun cenderung meningkat.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan

dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB (pdr) Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.6

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian 2020, Perkiraan Capain 2021 dan Proyeksi 2022 (Persen)



Sumber : BPS, RKPD Prov. SulSel 2022, Rancangan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026

Dengan melihat kondisi Kabupaten Barru yang saat ini masih bergelut dengan wabah covid-19, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami perkembangan yang fluktuasi, maka ditahun 2021 Kabupaten Barru memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 3.98 persen dan Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,10 – 5.55 persen. Sementara untuk ditahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru diproyeksikan sebesar sebesar 4,47 persen.

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu, hal ini bila berlebihan dapat berdampak penurunan daya beli masyarakat.

Data laju inflasi Kabupaten Barru sampai hari ini tidak tersedia (tidak dihitung) oleh Kabupaten Barru Dalam Angka (BPS) hanya ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan laju inflasi yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota Parepare, dan kota Palopo. Kabupaten/kota paling dekat dengan Kabupaten Barru adalah Kota Parepare. Laju inflasi Kabupaten/Kota yang menjadi sampel Kabupaten Barru Dalam Angka di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8

Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 -2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Bulukumba	1.48	4.66	3,85	2,25	2,30
2	Kab. Bone	1.5	5.54	4,69	1,64	1,89
3	Kota Makassar	3.18	2.11	3,48	2,43	2,13
4	Kota Pare-pare	2.11	3.43	1,96	2,45	1,61
5	Kota Palopo	2.74	3.95	4,19	1,91	1,21

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018 dihapir seluruh kota di Sulawesi Selatan. Tertinggi terjadi di Kabupaten Bone dan Bulukumba. Namun pada tahun 2019 rata – rata inflasi berada pada kisaran 2,45 –1,65.

Perkembangan inflasi year of year dipengaruhi oleh inflasi bulanan yang terjadi yang dijelaskan sebagai berikut : Kabupaten Bulukumba sepanjang tahun 2020 adalah sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan inflasi tertinggi pada bulan Januari dan bulan Mei sebesar 0,90 persen. Sedangkan deflasi yang terjadi tercatat sebanyak 5 (lima) kali, dengan deflasi tertinggi sebesar 0,22 persen pada bulan Februari. Sepanjang tahun 2019, kelompok pengeluaran yang memberikan dorongan inflasi terbesar adalah kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan andil sebesar 0,94 persen diikuti oleh kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau dengan andil sebesar 0,90 persen. Sedangkan Pada tahun 2020. Kota Watampone telah mengalami inflasi sebanyak 8 (delapan) kali dan deflasi sebanyak 4 (empat) kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 0,73 persen, sedangkan deflasi tertinggi berada pada bulan Februaris ebesar 0,60 persen.

Sama halnya dengan dua kota sebelumnya, laju inflasi dan deflasi di Kota Makassar juga cukup fluktuatif. Selama tahun 2020 tercatat bahwa Kota Makassar mengalami 10 (sepuluh) kali inflasi dan 2 (dua) kali deflasi. Inflasi di bulan Mei tahun 2019 merupakan inflasi tertinggi yang dialami oleh Kota Makassar sepanjang tahun tersebut, yaitu sebesar 0,73 persen. Sementara itu, deflasi tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 0,12 persen. Andil terbesar dalam inflasi tahunan Kota Makassar pada tahun 2019 berasal dari kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,84 persen, dilanjutkan dengan kelompok bahan makanan dengan andil sebesar 0,64 persen. Adapun kelompok pengeluaran dengan andil terkecil terhadap inflasi tahunan kota Makassar adalah kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen. Pada 2019 inflasi tahunan Kota Makassar berada di atas inflasi tahunan Sulawesi Selatan namun masih di bawah inflasi tahunan nasional.

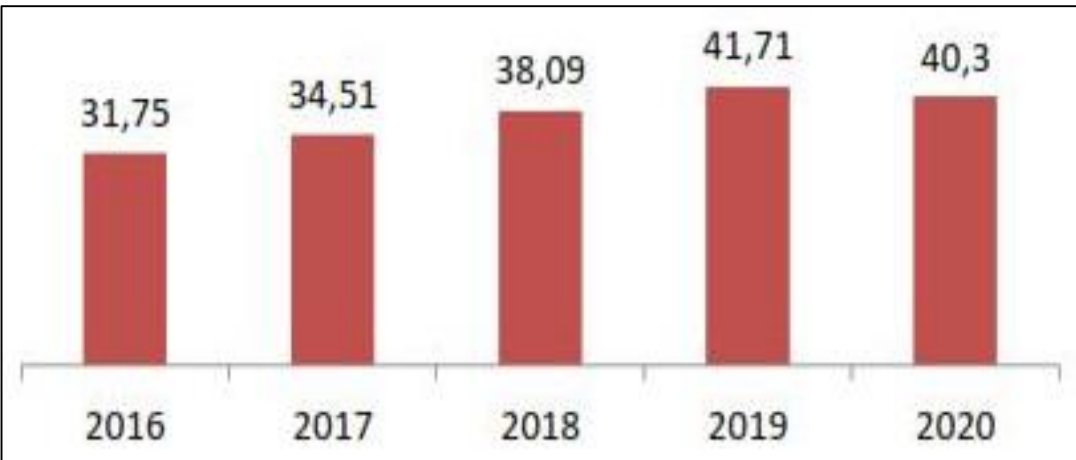
Kota Parepare mengalami 8 (delapan) kali inflasi dan 4 (empat) kali deflasi selama tahun 2019. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 1,36 persen sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 0,85 persen. Andil terbesar terhadap inflasi tahunan di Kota Parepare pada tahun 2019 berasal dari kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 1,25 persen, diikuti kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau

dengan andil sebesar 0,60 persen. Dalam periode tahun 2016 - 2018, inflasi tahunan Kota Parepare berada di bawah inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Namun pada tahun 2019 inflasi tahunan Kota Parepare berada di atas inflasi Sulawesi Selatan. Sepanjang tahun 2019 Kota Palopo telah mengalami 8 (delapan) kali inflasi dan 4 kali deflasi. Inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan Juni yang mencapai 0,86 persen, sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 0,14 persen. Sepanjang tahun 2019, andil terbesar terhadap inflasi tahunan di Kota Palopo berasal dari kelompok pengeluaran sandang sebesar 0,45 persen, diikuti kelompok pengeluaran perumahan, listrik, air, gas, dan bahan bakar dengan andil sebesar 0,44 persen. Adapun kelompok pengeluaran dengan andil terkecil yaitu kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 0,05 persen.

Nilai PDRB per kapita sering digunakan sebagai alat ukur atau indikator tingkat kemakmuran suatu daerah, angka ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku lebih banyak digunakan oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi untuk melihat perkiraan pendapatan masyarakat pada waktu terkini, sedangkan atas dasar harga konstan biasanya dipergunakan untuk data perbandingan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (Hb) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut

Grafik 3.7

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB) Dan Harga Konstan
Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020



Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

PDRB Perkapita (terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Perkembangan PDRB perkapita mengalami peningkatan dari Rp. 31.754.273 pada tahun 2016 menjadi Rp. 42.472.955 pada tahun 2020. Peningkatan tersebut menunjukkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barru semakin meningkat.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan

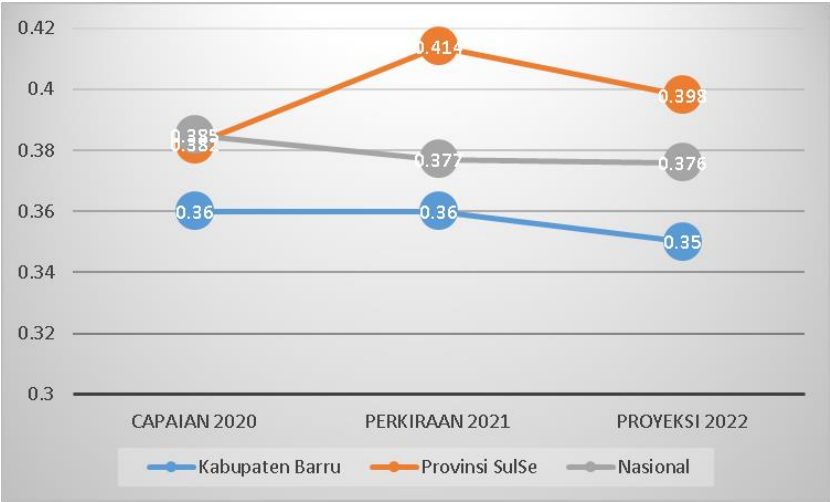
menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator- Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) :

- 1. $GR < 0.4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- 2. $0.4 < GR < 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- 3. $GR > 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Gini ratio di Kabupaten Barru pada tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.8

Gini Ratio Kabupaten Barru, Provinsi SulSel dan Nasional capaian 2020, Perkiraan Capaian 2021 dan Proyeksi 2022.



Sumber : BPS, RKPD Prov. SulSel 2022,
Rancangan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026

Gini Ratio Kabupaten Barru pada tahun 2020 mencapai sebesar 0,36, atau berada dibawah capaian angka Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yaitu 0,382 dan 0,385. Untuk tahun 2021, Gini Ratio di Kabupaten Barru di prediksi akan mencapai angka stagnan di angka 0,36, dan di tahun yang sama Provinsi dan Nasional memprediksi angka Gini Rasio Sul-Sel sebesar 0,414 sementara Indonesia sebesar 0,377–0,379, atau berada diatas angka Kabupaten Barru dan dibawah angka Sulawesi Selatan. Sementara pada tahun 2022, angka Gini Rasio Kabupaten Barru di targetkan sebesar 0,35, atau menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan target Provinsi dan Nasional masing-masing sebesar 0,398 dan 0,376–0,378 atau diatas angka Kabupaten Barru. Hal Ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Barru mendekati angka yang stagnan dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan 2022, hal ini menunjukkan semakin meratanya pendapatan masyarakat yang berarti semakin inklusif nya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru.

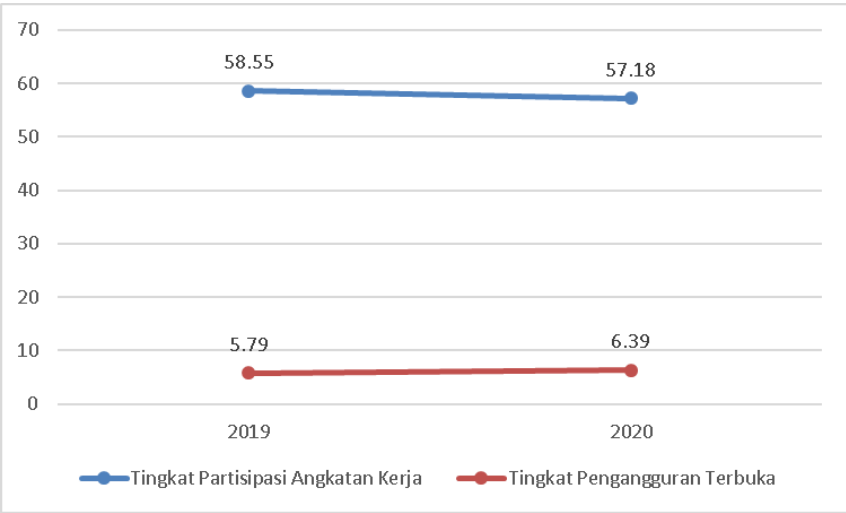
Tingkat partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap di dunia kerja. TPAK dan TPT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.9
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Barru Tahun 2019 – 2020

Kabupaten	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka			
	TPAK		TPT	
	2019	2020	2019	2020
BARRU	58,55	57,18	5,79	6,39

Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2021

Grafik 3.9
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Barru Tahun 2019 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2021

3.3. PROSPEK DAN TANTANGAN PREKONOMIAN DAERAH

3.3.1. Prospek Prekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Barru pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Penerapan adaptasi Kebiasaan Baru disertai dengan upaya pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi.

Letak Kabupaten Barru yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki yang secara struktural Kabupaten Barru berada di wilayah selat makassar yang sangat potensial menjadi penyangga Ibukota Negara Baru (IKN). Sarana dan prasarana pendukung akses transportasi seperti pelabuhan, jalur kereta api dan jalur lintas trans Sulawesi menjadi modal besar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru kedepan.

3.3.2. Tantangan Prekonomian Daerah

Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan merupakan tantangan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas

emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Penyebaran COVID-19 yang terjadi secara masif membuat pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan penerapan social dan physical distancing berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Work From Home (WFH) yang membatasi mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut kemudian menciptakan efek penutupan tempat hiburan/rekreasi, pusat perbelanjaan dan toko ritel.

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol Kesehatan diharapkan dapat mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Pemanfaatan bantuan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 secara optimal diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui kolaborasi dan gotong royong antar daerah dalam mengembangkan ekonomi regional.

3.4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka menjawab kebijakan pembangunan daerah perlu didukung oleh kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah merupakan instrument fiskal daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2024. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Peningkatan kasus Covid-19 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di daerah, penurunan pendapatan daerah, serta peningkatan belanja dan pembiayaan daerah. Dampak pandemic Covid-19 mengharuskan pemerintah Pusat, provinsi, sampai ke Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian. Salah satu Upaya pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pada perppu tersebut, pemerintah menetapkan batasan defisit anggaran negara dapat melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestic Bruto (PDB), paling lama sampai Tahun Anggaran 2022 yang tentu saja berpengaruh terhadap dana transfer pusat ke daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan di daerah di masa pandemi covid19, pemerintah daerah diberikan beberapa wewenang, diantaranya adalah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dana, dan

penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di masa pandemic covid19, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada aspek pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat merupakan salah satu indikasi keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Namun demikian, komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Barru belum sebanding dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD yang berarti meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tahun 2021 akan diarahkan pada sejumlah hal berikut:

- 1) Meningkatkan penerimaan PAD melalui pengendalian dan optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah termasuk pendayagunaan aset daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan BLUD
- 2) Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana transfer umum dan Dana transfer khusus
- 3) Pengembangan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten lain dalam rangka peningkatan pendapatan
- 4) Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
- 5) Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab
- 6) Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah
- 7) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

Kebijakan penetapan target pendapatan daerah pada tahun 2022 menjadi pertimbangan perencanaan pendapatan daerah dalam penyusunan RKPD sebagai berikut:

- a. PAD diperkirakan menurun sebesar 2,01% dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama dua tahun terakhir serta perkiraan potensi masing-masing jenis pendapatan daerah mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku serta kondisi bencana covid 19,
- b. Pendapatan transfer diasumsikan sama dari pagu definitif Tahun Anggaran 2020,
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan menurun sebesar 7,26 % dengan mempertimbangkan potensi riil.

Berdasarkan sejumlah asumsi tersebut, postur realisasi dan proyeksi pendapatan Daerah pada Tahun 2021-2026 disajikan pada table 3.8 berikut:

Tabel. 3.10
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019-2023

URAIAN (Sesuai PP 58/2005)	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	URAIAN (Sesuai PP 58/2005)	2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
Pendapatan	940,707,735,216.33	914.860.358.822,21	Pendapatan	957.284.303.545	975.987.247.071	996.598.717.425
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	103,870,138,497.26	101.324.046.920,50	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	106.995.777.751	748.279.824.505	111.344.324.647
Pendapatan Pajak Daerah	20,392,597,333.00	17.444.416.351,30	Pendapatan Pajak Daerah	10.670.000.000	15.993.756.977	19.909.394.926
Pendapatan Retribusi Daerah	8,794,733,327.00	5.537.188.953,00	Pendapatan Retribusi Daerah	8.451.215.380	8.586.677.399	8.745.709.341
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,434,009,603.00	8.942.135.943,00	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.942.135.942	9.056.180.538	9.256.907.092
Lain-lain PAD yang Sah	65,248,798,234.26	168.347.156.907,71	Lain-lain PAD yang Sah	70.932.423.445	72.170.070.674	73.429.312.000
Dana Perimbangan	876.963.798.203	645.189.154.994,00	Pendapatan Transfer	773.633.384.794	789.131.939.705	804.900.917.399
Dana Bagi Hasil Pajak /Bukan Pajak	43,901,994,559.07	14.708.050.870,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	725.938.731.000	740.505.097.265	735.527.360.112
Dana Alokasi Umum	703,290,448,389.00	491.478.886.000,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	47.094.653.794	48.526.542.420	49.373.501.257
Dana Alokasi Khusus	61,600,653,000.00	139.002.218.124,00	Lain-lain Pendapatan Daerah	76.655.141.000	77.992.639.678	80.353.475.379
			Pendapatan Hibah	23.377.000.000	23.705.701.000	24.200.720.950
			Pendapatan Lainnya	53.277.341.000	54.206.937.792	56.132.754.429

Sumber : BPKAD Kabupaten Barru Tahun 2020, Proyeksi dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026

3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Tahun 2022 diharapkan menjadi momentum transisi menuju new normal pasca Pandemic COVID 19 serta secara bertahap dapat menyelesaikan permasalahan fundamental yang dihadapi Kabupaten Barru. Belanja Pemerintah Daerah sebagai salah satu instrument utama kebijakan fiskal, didorong agar lebih optimal dengan mulai menggunakan spending better yang focus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis hasil (result based), efisiensi kebutuhan dasar serta antisipatif.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

3.4.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai, Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan

- atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah
- 3) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 4) Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan;

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.4.2.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.4.2.4 Belanja Transfer

1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten Barru kepada pemerintah Desa dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2022, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2021 yang belum direalisasikan kepada pemerintah Desa atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak

daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2. Bantuan Keuangan, diarahkan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah. Pendanaan pembangunan dimaksud berbentuk bantuan umum (block grant) dan bantuan khusus (specific grant), antara lain Alokasi Dana Desa (ADD).

Struktur belanja langsung pada RKPD tahun 2020 dibandingkan dengan APBD yang telah ditetapkan terdapat selisih yang cukup besar yang disebabkan kapasitas rill daerah yang tidak bisa memenuhi seluruh usulan program kegiatan perangkat daerah. Perencanaan belanja daerah pada tahun 2022 dihitung dengan berdasar asumsi sebagai berikut :

- 1) Proyeksi belanja Operasi diasumsikan menurun sebesar 2,24% dibandingkan pagu definitif Tahun Anggaran 2020.
- 2) Proyeksi belanja untuk SPM diasumsikan meningkat sebesar 14,12 % dibanding dengan pagu definitif tahun anggaran 2020
- 3) Belanja Modal diperkirakan menurun sebesar 1,04% dibandingkan dengan pagu definitive tahun 2020
- 4) Belanja tak terduga dan belanja transfer diasumsikan tidak mengalami perubahan.

Data realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026

URAIAN (Sesuai PP 58/2005)	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	URAIAN (Sesuai PP 58/2005)	Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
Belanja		923.948.418.306,20	Belanja		980.053.488.967	1.000.000.965.279
Belanja Tidak Langsung		556.108.127.437,84	Belanja Operasi	744.872.067.846	748.279.824.505	762.409.291.112
Belanja Pegawai	396,800,964,785.00	382.370.058.168,00	Belanja Pegawai	438.205.082.654	430.097.519.920	446.566.883.095
Belanja Bunga	2,769,185,859.24	2.454.813.533,84	Belanja Barang dan Jasa	274.522.061.005	293.437.472.774	297.545.597.394
Belanja Hibah	38,962,601,417.00	44.718.712.110,00	Belanja Bunga	3.191.298.036	3.156.590.521	3.122.260.474
Belanja Tidak Terduga		22.551.942.073,00	Belanja Subsidi			
Belanja Bantuan Keuangan	96,250,275,619.00	104.012.601.553,00	Belanja Hibah	27.153.626.151	14.900.241.264	15.174.549.346
Belanja Langsung		367.840.290.868,36	Belanja Bantuan Sosial	1.800.000.000		
Belanja Barang dan Jasa	199,499,540,045.00	203.298.235.141,00	Belanja Modal	102.545.144.794	110.073.649.634	113.586.006.423
Belanja Modal	260,726,828,092.55	127.312.791.931,36	Belanja Tidak Terduga	4.792.958.862	12.204.638.460	12.326.684.844
Belanja Pegawai		37.229.263.796,00	Belanja Transfer	107.273.106.000	109.495.376.358	112.268.962.508
Pembiayaan Daerah			Belanja Bantuan Keuangan	107.273.106.000	109.495.376.366	112.266.962.900
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		84.505.156.967,35	Pembiayaan	4.129.968.736	4.066.241.895	4.002.247.054
Pengeluaran Pembiayaan Daerah		4.053.031.264,26	Penerimaan Pembiayaan	10.183.000.000	9.589.257.972	9.003.908.319
			Pengeluaran Pembiayaan	6.053.031.264	5.023.016.076	5.601.741.465

Sumber : BPKAD Kabupaten Barru Tahun 2020, Proyeksi dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas proporsi realisasi dan proyeksi belanja di Kabupaten Barru cenderung masih lebih besar pada belanja tidak langsung. Untuk kondisi ideal porsi anggaran belanja diharapkan lebih besar pada belanja langsung, karena belanja langsung lebih mengarahkan pada program kegiatan yang telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Belanja langsung diharapkan dapat mendorong efektivitas kinerja pemerintah daerah dan percepatan pembangunan.

Berdasarkan pada data realisasi belanja baik belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga maupun belanja Transfer, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan fasilitas sosial yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM) di tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 110.662.430.355 atau 11,3 persen dari total Belanja Daerah sebesar Rp. 979,220,750,520.00 dengan rincian alokasi sebagai berikut :

Tabel 3.12

Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2022

No	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	47.526.789.226	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56.838.190.208	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.532.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	100.388.400	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	955.702.158	Dinas Satpol PP & Damkar
		Program Penanggulangan Bencana	607.005.315	BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelematan non kebakaran	1.639.526.937	Dinas Satpol PP & Damkar
		Program Penanganan Bencana	178.695.330	BPBD

No	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
6	Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	284.132.781	Dinas Sosial
Total			110.662.430.355	

Kebijakan Belanja Daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

4. Alokasi belanja daerah terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender.
5. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
6. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
7. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Kerangka pendanaan yang merupakan perspektif rencana penganggaran untuk tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Hal ini diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah. Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran telah menentukan porsi besaran anggaran terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2022 yang rinciannya telah tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF	OPD
Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar;	Program Pengelolaan Pendidikan	Presentase Capaian SPM Pendidikan	100	47.526.789.226	Dinas Pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik SD/SMP/TK yang memiliki sertifikat pendidik	89,34	1,695,350,412	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Ketersediaan Kurikulum Pendidikan	100	700,412,051	Dinas Pendidikan
	Program Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Capaian SPM Kesehatan	100	56,838,190,208	Dinas kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang telah bersertifikasi	100	200,787,881	Dinas kesehatan
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	13,95	137,163,276	Dinas PMDPPKBPPPA
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20,14	312,486,180	Dinas PMDPPKBPPPA
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan provinsi	3	267,716,266	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Keterpenuhan kriteria Kabupaten Layak Anak	100	64.606.290	Dinas PMDPPKBPPPA
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	2,40%	4,473,210	Dinas PMDPPKBPPPA
	Program Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	koefisien variasi harga antar waktu	10	53,287,860	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan	13,91	1,000,505,556	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan yang tertangani	21,05	104,027,760	Dinas Ketahanan Pangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF	OPD
Penguatan lingkungan yang kondusif dan seni budaya lokal;	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban	Presentase Capaian SPM pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100	955,702,158	Satpol PP dan Damkar
	Program Penanggulangan Bencana	Presentase Capaian SPM Pelayanan Kebencanaan	32	607,005,315	BPBD
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Presentase Capaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100	1,639,526,937	Satpol PP dan Damkar
	Program penanganan bencana	Presentase Capaian SPM perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	178,695,330	Dinas Sosial
	Program pengembangan kebudayaan	Persentase cagar budaya Kesenian tradisonal Lembaga adat yang dilestarikan	100	940,383,084	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisonal yang dilestarikan	100	356,002,440	Dinas Pendidikan
Peningkatan Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;	Program Pengembangan Perumahan	Presentase Capaian SPM bidang Perumahan rakyat	100	100,388,400	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seuruh kabupaten/kota	76,18	2,532,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF	OPD
Peningkatan Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas pengolahan air limbah sendiri	93,24	1,729,433,970	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten	100	636,478,282	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase ruang yang diawasi dan dikendalikan pemanfaatannya	100	12,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Bangunan/gedung Negara yang dibangun dan terkelola serta patuh terhadap IMB	100	190,598,684	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi dalam kondisi baik	56,93	1,273,169,564	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan yang terbangun dan dipelihara berdasarkan SK Jalan Kewenangan Kab	79,52	17,925,137,708	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Jembatan yang di bangun/direkonstruksi yang merupakan kewenangan kab.	100	5,972,590,093	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase lintas penyeberangan yang beroperasi	37,5	2,063,883,300	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkuatliat yang disediakan Dinas Kominfo	100	1,580,157,480	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF	OPD
Peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah;	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	79,60	1,267,404,570	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	73,3	5,729,554,471	Dinas Pertanian
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	20161,5	1,730,191,197	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	6454,53	1,074,221,998	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase prodak olahan perikanan yang dipasarkan	254,45	255,992,460	Dinas Perikanan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan entitas pengelolaan dan kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum serta fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata unggulan	82,367	2,527,959,515	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Ekonomi Kreatif yang berkembang dan mendapatkan perlindungan Hak kekayaan intelektual	9,62	756,000,000	Dinas Pariwisata
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIK	100	465,977,820	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	425,836,230	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF	OPD
Peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah;	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan pro investasi yang tersusun dan dilaksanakan	33,33	57,409,170	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan Sesuai SOP	97,48	522,443,796	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	25,32	96,900,000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	90	1,256,267,599	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	50	450,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan Kualitas Lngkungan dan usaha/kegiatan usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan	81,22	172,190,790	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan sampah di wayah kabupaten	80,7	4,087,091,549	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Pemerataan Pendapatan dan penanggulangan kemiskinan;	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	57,03	536,830,590	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	57,5	191,870,854	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Sang Kepemudaan	ngkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,32	953,722,080	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	93	59,378,178	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF	OPD
Peningkatan Pemerataan Pendapatan dan penanggulangan kemiskinan;	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	61	267,546,000	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10,08	197,312,880	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
	Program Pengembangan UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	49,59	315,528,330	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial yang terlaksana	100	180,523,680	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	284,132,781	Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan Jamnan Sosial	Persentase Anak terlantar dan Fakir miskin yang tertangani	100	636,242,279	Dinas Sosial
Mewujudkan good and clean governance yang berbasis teknologi informasi.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk ber KTP elektronik	100	783,639,480	Dinas Dukcapil
	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	90,83	234,317,460	Dinas Dukcapil
		Persentase penduduk usia 0 - 17 tahun yang memiliki KIA	40,16		
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	% ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Yang Ditetapkan	100	799,262,106	BAPPEDA
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA Tepat Waktu	100	119,508,950,656	BPKAD
		Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	94,24		
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	100		

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF	OPD
Mewujudkan good and clean governance yang berbasis teknologi informasi.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu	100		BPKAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan data aset yang akurat	55	65,675,075	BPKAD
		Persentase Aset (tanah) milik Pemerintah yang memiliki sertifikat	70		
		Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	70		
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-1	1,449,197,130	BAPENDA
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelaksanaan manajemen SDM aparatur	100	1,277,391,900	BKPSDM
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase SDM Aparatur yang Lulus diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Managerial	100	1,188,715,778	BKPSDM
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Prosentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Kelitbangan dan Pemanfaatan IPTEK Daerah	100	543,762,000	BAPPEDA
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	2,178,747,030	Inspektorat Daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	746,743,887	Inspektorat Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100	35,415,492	Kecamatan
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	% Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100	15,791,130,000	Bag. Kesra Setda
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Rumusan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi yang terpenuhi	100	118,760,844	Badan Kesbangpol

Disisi lain dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tersebut,telah ditetapkan proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang mana nomenkelatur perangkat daerah ini telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Tabel 3.14
Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2022

No	NAMA OPD/BAGIAN	Pagu RKPD 2022 (Rp.)
1	Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah	2,216,162,444
2	Badan pengelola keuangan dan aset daerah	4,699,016,216
3	Badan pendapatan daerah	1,593,579,412
4	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	3,718,351,926
5	Badan penanggulangan bencana daerah	817,220,211
6	Badan kesatuan bangsa dan politik	858,081,222
7	Inspektorat	3,473,185,899
8	Sekretariat DPRD	7,477,564,935
9	Dinas pendidikan	41,392,203,709
10	Dinas kesehatan	81,044,530,193
11	Rumah sakit umum daerah	8,376,507,167
12	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	125,598,898,227
13	Dinas perumahan dan kawasan pemukiman	10,623,862,749
14	Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran	2,369,938,613
15	Dinas sosial	1,348,413,349
16	Dinas komunikasi, informatika dan statistik	3,677,490,951
17	Dinas koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan	10,766,760,960
18	Dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja	2,920,467,497
19	Dinas kepemudaan dan olahraga	3,840,934,994
20	Dinas perpustakaan dan kearsipan	1,225,830,317
21	Dinas ketahanan pangan	1,144,108,296
22	Dinas lingkungan hidup	5,843,124,512
23	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	1,225,830,317

No	NAMA OPD/BAGIAN	Pagu RKPD 2022 (Rp.)
24	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan kb, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	3,800,073,983
25	Dinas perhubungan	9,879,606,486
26	Dinas perikanan	3,350,602,867
27	Dinas pariwisata	6,636,629,941
28	Dinas pertanian	7,903,321,269
29	Bagian umum	22,066,534,000
30	Bagian pemerintahan umum dan otoda	513,193,137
31	Bagian hukum	735,498,190
32	Bagian organisasi	286,027,074
33	Bagian protokol dan komunikasi pimpinan	490,332,127
34	Bagian administrasi pembangunan	408,610,106
35	Bagian perekonomian	286,027,074
36	Bagian kesejahteraan rakyat	14,032,472,854
37	Bagian pengadaan barang dan jasa	612,915,159
38	Kecamatan soppeng riaja	1,430,021,820
39	Kecamatan mallusetasi	2,582,024,911
40	Kecamatan barru	3,164,334,785
41	Kecamatan tanete rilau	1,499,622,865
42	Kecamatan tanete riaja	937,627,920
43	Kecamatan pujananting	898,126,121
44	Kecamatan balusu	844,438,915
	Jumlah	408,610,105,720

Sumber : Bappeda Kabupaten Barru 2021, diolah

Sejak berakhirnya agenda pembangunan milenium (MDGs) pada tahun 2015, Indonesia bersama-sama dengan 193 negara lainnya sepakat untuk mengadopsi agenda pembangunan global yang dinamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Belajar dari pengalaman MDGs lalu, kini Indonesia berusaha menghindari keterlambatan pengimplementasian SDGs. Indonesia tidak ingin kehilangan momentum dan euphoria implementasi SDGs masyarakat dunia.

Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian Target-target TPB/SDGs agar dapat sejalan dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tabel 3.15
Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program Pembangunan Daerah terhadap Tujuan TPB/SDGS Tahun 2022

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2022 (Rp.)
1	Tujuan 1	1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2 84.132.781
	Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5 6.838.190.208
		3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4 7.526.789.226
		4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1 5.791.130.000
		5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.200.000.000
		6	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	530.000.000
		7	PROGAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.920.800.000
		8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)	21.000.000
		9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.957.000.000
		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	59.638.901.100
		11	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	28.563.000
		12	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	171.597.963
		13	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.242.120.000
		14	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.973.850.000
		15	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	35.508.134.655
		16	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	111.856.000

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2022 (Rp.)
2	Tujuan 2	1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	51.988.000
	Tanpa Kelaparan : Mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.086.000.000
3	Tujuan 3	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Kehidupan Sehat dan Sejahtera : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia;			
4	Tujuan 4	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Pendidikan Berkualitas : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;			
5	Tujuan 5	1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	337.500.000
	Kesetaraan Gender : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;	2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	46.000.000
		3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	57.000.000
		4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		6	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	231.472.800
6	Tujuan 6	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Telah dianggarkan pada tujuan 1

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2022 (Rp.)
	Air Bersih dan Sanitasi Layak : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	190.026.668
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.000.000.000
7	Tujuan 7			
	Energi Bersih dan Terjangkau : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;			
8	Tujuan 8	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.384.000.000
	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	19.192.000
		3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.312.117.617
		4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Telah dianggarkan pada tujuan 2
9	Tujuan 9	1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	75.000.000
	Industri, Inovasi dan Infrastruktur : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri kreatif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.186.500.000

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2022 (Rp.)
		3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	40.376.980
		4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	860.000.000
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Telah dianggarkan pada tujuan 5
10	Tujuan 10	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Berkurangnya kesenjangan : Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara;	2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		5	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
11	Tujuan 11	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Telah dianggarkan pada tujuan 9
	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh berkelanjutan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	700.662.000
		4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Telah dianggarkan pada tujuan 6
12	Tujuan 12	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Telah dianggarkan pada tujuan 6
	Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;			

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2022 (Rp.)
13	Tujuan 13	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Telah dianggarkan pada tujuan 11
	Penanganan Perubahan Iklim : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Telah dianggarkan pada tujuan 9
		3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Telah dianggarkan pada tujuan 2
14	Tujuan 14	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	509.000.000
	Ekosistem Lautan : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.024.000.000
15	Tujuan 15	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Telah dianggarkan pada tujuan 6
	Ekosistem Daratan : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggunaan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati			
16	Tujuan 16	1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Telah dianggarkan pada tujuan 5
	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkat	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Telah dianggarkan pada tujuan 5

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2022 (Rp.)
		3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	419.829.000
17	Tujuan 17	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Telah dianggarkan pada tujuan 5
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan : Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Telah dianggarkan pada tujuan 2
		3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Telah dianggarkan pada tujuan 1

3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang deficit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Mekanisme pembiayaan diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah pemberian peningkatan jaminan sosial;
- 2) Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup deficit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Adapun kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2022 diarahkan :

- 1) Dari Sisi Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah Sumber penerimaan Pemerintah kabupaten Barru pada tahun 2022 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya.
 - b. Pengembangan pembiayaan inovatif untuk mendukung countercyclical dalam rangka pemulihan ekonomi antara lain penguatan KPBU
 - c. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan pemerintah daerah lain dalam pembiayaan pembangunan.
 - d. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
 - e. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan dari sumber *Corporate Social Responsibility* (CSR).

- f. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat seperti penerbitan obligasi daerah.
- 2) Dari Sisi Sumber Pengeluaran Pembiayaan daerah
Sumber pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barru pada tahun 2020 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barru.

Tabel 3.16
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2019 – 2023

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
Surplus/(Defisit)		(9.088.059.483,99)	(4.129.968.736)		
Penerimaan Pembiayaan					
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	83.734.357.547	84.505.156.967,35	10.183.000.000	9.889.357.972	9.603.968.319
Penyertaan Modal (investasi) Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	3.053.031.264,26	3.053.031.264,26	3.053.031.264,26	3.053.031.264,26	3.053.031.264,26
Pembayaran Pinjaman Daerah					
Jumlah Pembiayaan Netto	79.681.326.287,74	80.452.125.703,09	4.129.968.736	3.836.326.708	3.053.031.264
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)		71.364.066.219,10			

Sumber : BPKAD Kabupaten Barru Tahun 2020, Proyeksi dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026

3.5. PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Perhitungan kerangka pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja daerah.

Mendasarkan pada proyeksi pendapatan pada tabel sebelumnya, Kebijakan Kemampuan Keuangan Daerah di prioritaskan pada pemenuhan Belanja Operasi dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Operasi antara lain terdiri belanja pegawai, belanja bunga, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja barang/jasa dan belanja hibah sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari rencana penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok utang.

Tabel 3.17
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Barru, Tahun 2019-2023

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Sesuai PP 53 Tahun 2005 Realisasi (Rp.)		Sesuai PP 12 Tahun 2019 Proyeksi (Rp.)		
	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan	940.724.982.885	914.860.358.822,21	955.353.308.766	975.987.247.071	996.598.717.425
Penerimaan Pembiayaan					
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	83.734.357.547	84.505.156.967,35	10.183.000.000	9.889.357.972	9.603.968.319
Total Penerimaan	1.024459.340.459	999.365.515.789,56	965.536.308.766	985.876.605.043	1.006.202.685.744
Penyertaan Modal (investasi) Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	3.053.031.264,26	3.053.031.264,26	3.053.031.264,26	3.053.031.264,26	3.053.031.264,26
Pembayaran Pinjaman Daerah					
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.020.406.309.194,7	995.312.484.525,3	959.483.277.501,74	979.823.573.778,74	1.000.149.654.479,7

Sumber : BPKAD Kabupaten Barru Tahun 2020, Proyeksi dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026

Selanjutnya, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam kategori tiga prioritas. Mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, prioritas I dialokasikan untuk membiayai pemenuhan pelayanan dasar atau yang disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM). Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah yang termasuk dalam kategori SPM, maka dikelompokkan dalam prioritas I. Sedangkan prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan penunjang urusan.

Tabel 3.18
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Barru, Tahun 2021-2023

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)			Rata-rata Porsi Per tahun (%)
		2021	2022	2023	
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	959.483.277.501,74	979.823.573.778,74	1.000.149.654.479,7	
1	Belanja Wajib	557.747.629.211,76	569.571.443.437,58	581.386.994.149,05	58,13
2	Prioritas I	139.436.907.302,94	142.392.860.859,4	145.346.748.537,26	25
3	Prioritas II	334.648.577.527,06	341.742.866.062,55	348.832.196.489,34	60
4	Prioritas III	83.662.144.381,764	85.435.716.515.637	87.208.049.122,358	15

Sumber : BPKAD Kabupaten Barru, Bappeda Kabupaten Barru, Tahun 2020

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2022, mengacu pada Pasal 8 Permendagri 17/Tahun 2021, ayat (1): yang dijelaskan bahwa dalam hal daerah masih dalam proses penyusunan RPJMD sebagai tindak lanjut hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota, RPJMD Provinsi, dan program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota, evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2020 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2022 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2031, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kecamatan. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan selama 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMARTC.

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2021 - 2024. Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupate Barru Tahun 2022 merupakan Penjabaran Penggalan ke lima arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025, Penelaahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan memperhatikan Prioritas program-program pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Selain itu penyusunan prioritas pembangunan juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan antara lain: 1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya, (2) Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat dalam

hal ini pemenuhan Standar Pelayanan Maksimal (SPM), dan (3) Urgensi Penanganan Isu strategis dan isu global dalam hal ini Sustainable Development Goals (SDGs).

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021– 2026 yaitu: **“Kabupaten Barru yang Sejahtera, mandiri, berkeadilan, dan Bernafaskan Keagamaan”**. Visi ini mengandung empat pokok visi di dalamnya yakni sejahtera, mandiri, berkeadilan dan bernafaskan keagamaan, yang merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2026

Tabel 4.1

Penjelasan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan	Sejahtera	Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomi maupun sosial
	Mandiri	Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Barru
	Berkeadilan	Kondisi ideal dimana dampak pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal dibelakang
	Bernafaskan keagamaan	Kondisi ideal dimana seluruh aktifitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
2. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal
4. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan.

- 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi.
- 7. Mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Adapun penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

Perumusan Penjelasan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Periode 2021-2024

Pernyataan Visi : Kabupaten Barru yang Sejahtera, mandiri, berkeadilan, dan Bernafaskan Keagamaan			
No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya	Mencakup upaya umum dalam pelayanan untuk meningkatkan kualitas manusia yang terdiri dari pelayanan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan dasar lainnya yang difokuskan pada pengendalian harga dan ketersediaan pangan	Sejahtera
2	Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal	Mencakup upaya umum dalam mewujudkan kondisi tentram, tertib dan aman melalui pengembangan dan penguatan seni budaya lokal	Sejahtera
3	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal	Mencakup Upaya umum dalam membangun, memelihara dan mengembangkan infrastruktur yang menjamin pemerataan infrastruktur wilayah hingga mendorong pemanfaatan sumberdaya lokal dalam menunjang perekonomian daerah	Mandiri
4	Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Mencakup upaya umum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan meliputi peningkatan sektor-sektor strategis perekonomian daerah dengan memastikan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu	Mandiri
5	Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan	Mencakup upaya umum dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat perdesaan dan perkotaan meliputi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Berkeadilan
6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi.	Mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan pelayanan public yang memuaskan dengan didukung teknologi informasi	Berkeadilan
7	Mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama	Mencakup upaya umum dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama yang terdiri dari peningkatan kualitas pelayanan keagamaan	Bernafaskan keagamaan

Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2024 dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang telah ditetapkan;
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C

Target dari tujuan dan sasaran tahun 2022 menjadi landasan RKPD Tahun 2022, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.3. Berikut :

Tabel 4.3

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2022

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Rencana Capaian 2021	Target 2022
Visi : “Kabupaten Barru yang Sejahtera, mandiri, berkeadilan, Bernafaskan Keagamaan						
Misi 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya						
	Meningkatkan Kualitas SDM		Indeks Pembangunan Manusia	71,00	71,43	71,79
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	68,91	69,23	69,94
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	75,25	76,13	76,69
		Meningkatnya kualitas daya beli masyarakat	Paritas Daya Beli	10,91	10,93	11,12
Misi 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal						
	Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan masyarakat		Angka kriminalitas	7,6	7,3	6,1
		Terjaganya stabilitas keamanan dan ketentraman Daerah	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	0,02%	0,01	0,01

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Rencana Capain 2021	Target 2022
Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal						
	Meningkatnya Kualitas pemerataan infrastruktur daerah		Indeks daya saing pilar insfrastruktur	3,583	3,789	3,820
		Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks layanan infrastruktur	55,21	57,37	58,97
Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan						
	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	7,41%	3,98%	4,47%
		Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah	Presentase kontribusi sektor-sektor strategis terhadap PDRB	50,27	51,16	50,94
Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan						
	Menurunkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan		Indeks Gini	0,36	0,35	0,36
		Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,79 %	6,17	5,88
			Angka Kemiskinan	8,57 %	9,08 %	8,89 %

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Rencana Capain 2021	Target 2022
Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi						
	Meningkatkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih		Nilai Reformasi Birokrasi	C	CC	B
		Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik	Nilai Sakip	CC	B	B
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama						
	Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat yang belandaskan nilai-nilai agama		Indeks Kerukunan Umat Beragama	73	75	77
		Meningkatnya Kualitas Pengamalan nilai-nilai agama	Kasus konflik antar umar beragama	0	0	0

4.2 Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2022

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 dirumuskan dengan mengacu pada tahapan pembangunan nasional dan daerah yang disesuaikan dengan skala prioritas yang ada dalam Penggalan ke lima arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025, Penelaahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan prioritas program-program pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Adapun strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022 Kabupaten Barru

Visi :Kabupaten Barru yang Sejahtera, mandiri, berkeadilan, Bernafaskan Keagamaan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Mewujudkan aksebilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya			
Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat	Memaksimalkan penyediaan dan kualitas layanan dasar pendidikan	Perwujudan optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
			Peningkatan budaya literasi masyarakat
	Meningkatnya Usia Harapan Hidp Masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan	Penyediaan layanan dan optimalisasi kualitas layanan dasar kesehatan
			Optimalisasi kualitas hidup Perempuan dan Anak
			Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
			Peningkatan pembinaan dan pengembangan keolahragaan
			Peningkatkan kualitas pelayanan KB dan pendewasaan usia perkawinan pertama
			Mewujudkan pengembangan infrastruktur dan pengelolaan air minum layak
			Mewujudkan pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi layak
	Meningkatnya kualitas daya beli masyarakat	Menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat	peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana
			Peningkatan sarana dan prasarana penaggulangan bencana
	Meningkatnya kualitas daya beli masyarakat	Menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat	Peningkatan pengawasan terhadap harga bahan pangan
			Peningkatan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal			
Mewujudkan lingkungan yang nyaman dan berkebudayaan	Terwujudnya penguatan Seni Budaya Lokal	Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Pelaksanaan identifikasi, pencatatan dan pelestarian budaya lokal
Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal			
Meningkatnya Kualitas pemerataan infrastruktur	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan pengelolaan sumberdaya air	Meningkatkan akses rumah layak huni
			Meningkatkan kualitas konstruksi jaringan drainase
			Meningkatkan kualitas bangunan/gedung
			Meningkatkan kualitas penataan ruang daerah
			Meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem kerja irigasi
		Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
			Meningkatkan kualitas konstruksi jaringan jalan dan jembatan
			Meningkatkan ketersediaan moda transportasi
			Mewujudkan penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat
Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan			
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah	Meningkatkan daya dukung dan Kualitas Sumberdaya Ekonomi di sektor-sektor strategis	Peningkatan pengelolaan dan ketersediaan sarana prasarana sumberdaya pertanian
			Penguatan keberlanjutan produktivitas sumberdaya pertanian yang adaptif terhadap Penyakit dan Perubahan Iklim
			Peningkatkan produksi, produktivitas, standarisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan
			Pengembangan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas
			Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital
			Pengembangan industrialisasi yang berbasis investasi disinergikan dengan pengembangan kawasan industri
			Perluasan kerjasama dan kapasitas pemasaran dan perdagangan
			Peningkatan pengelolaan sumberdaya ekonomi dalam pemenuhan kecukupan pangan
		Mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon	Pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran/kerusakan sumberdaya alam dan LH serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan			
Menurunkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan	Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan kualitas pembangunan SDM yang inklusif dan Penyerapan tenaga kerja	Peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja
			Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi
		Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Miskin dan PMKS	Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi			
Meningkatkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik	Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik	Perwujudan modernisasi Manajemen Pemerintah melalui penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi
			Peningkatkan kualitas SDM Aparatur
			Pelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas
Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama			
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama	Meningkatnya penerapan Niai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan Ideologi kebangsaan pada masyarakat	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Agama	Peningkatkan peran lembaga dan organisasi keagamaan dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama
		Meningkatkan kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat	Peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat dan pemahaman terhadap ideologi bangsa dan negara, ketaatan terhadap peraturan dan hukum, serta kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2022 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2022 merupakan penjabaran dari prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2022 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan.

4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP

Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Pandemi Covid-19 merupakan unprecedented shock yang mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan social distancing dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era new normal, meskipun herd immunity diharapkan telah tercapai di tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (Build Forward Better). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Tabel 4.5
Tema Pembangunan Tahun 2022

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memperhatikan	Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2020
		Kondisi Pandemi Covid 19
		Keluar dari middle <i>Income Trap</i>
		Konsistensi dengan arahan RPJMN
		Isu-isu strategis
		Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang

mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, adapun sasaran pembangunan tahun 2022 adalah:

- 1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 ditunjukkan oleh Tabel berikut.

Tabel 4.6

Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Indikator Pembangunan	Target 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 6,0 %
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6.24 - 5.52 %
Rasio Gini (indeks)	0,376 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44 – 73,48
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)	26,8 – 27,1 %
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	5,8-6,5%
Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,3%

Sumber: Permendagri Nomor 17 Tahun 2021

4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

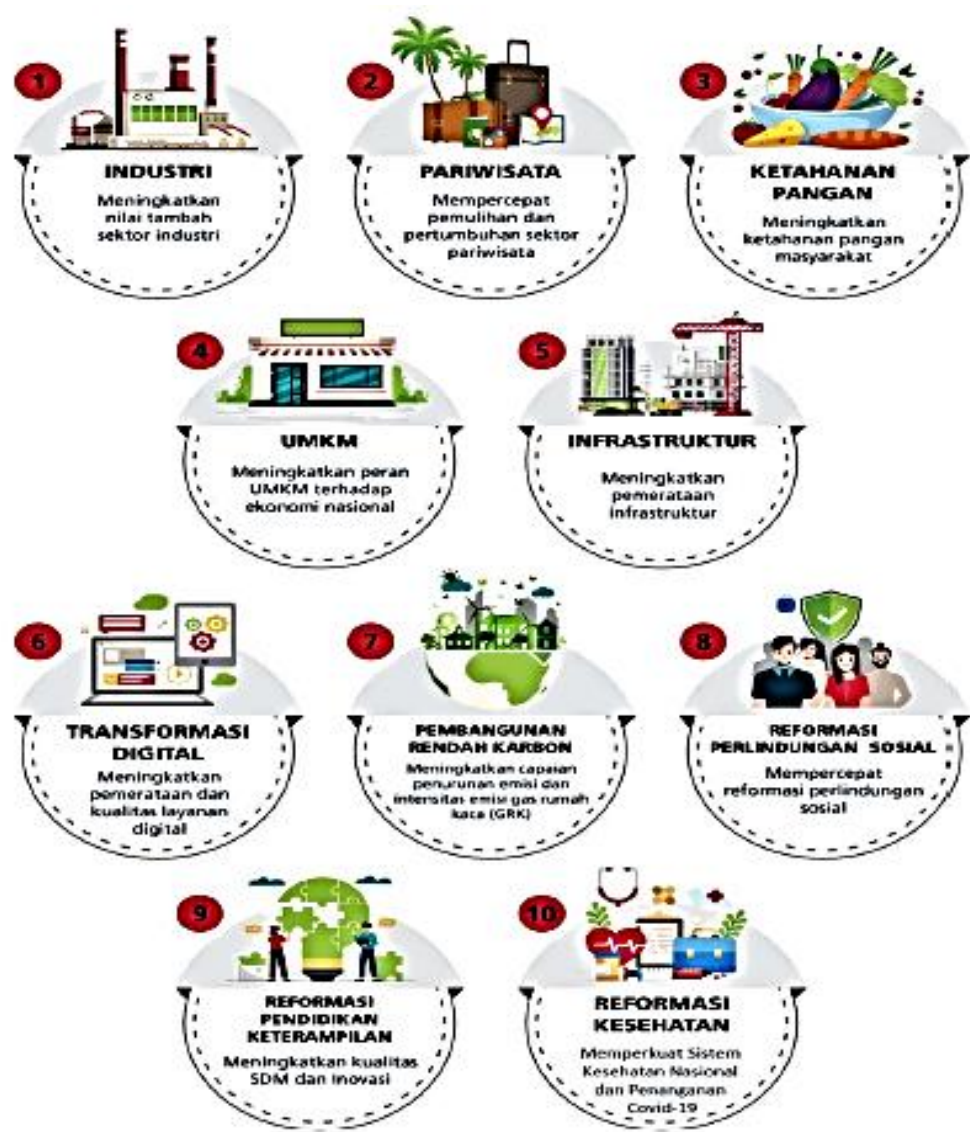
Gambar 4.1

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022



Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Gambar 4.2
Strategi pembangunan Nasional Tahun 2022



Sumber: Permen Bappenas Nomor 2 tahun 2021 tentang Rancangan RKP 2022

4.2.1.4 Prioritas Pembangunan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKP Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai

- ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
 4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar berikut.

Gambar 4.3

Prioritas Nasional Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Secara rinci penjelasan setiap prioritas nasional dapat diuraikan pada pembahasan berikut.

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: (1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan (2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: mPengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; Pengentasan kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada: Revolusi mental dalam sistem pendidikan; Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta Pembangunan Rendah Karbon.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil; Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Prioritas tahun 2022 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak

pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2022.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2022 yaitu ***Inovasi Pemanfaatan Potensi & Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi***, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemantapan reformasi birokrasi
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social
4. Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya
5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

4.2.3 Sustainable Development Goals/SDGs

Sustainable Development Goals/SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah salah satu arah prioritas pembangunan yang harus diperhatikan oleh Kabupaten Barru dalam perencanaan Pembangunan.

Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dan berkomitmen penuh dalam penentuan sasaran dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru juga ikut berkomitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 terdapat 220 indikator SDGs/ TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Kabupaten Barru diamanahi target pencapaian TPB sebanyak 220 indikator dengan 16 Tujuan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam merumuskan arah kebijakan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk indikator yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru namun belum mencapai target nasional yaitu sebanyak 16 tujuan dengan jumlah indikator sebanyak 55 indikator akan menjadi fokus dalam pencapaian target TPB di Periode RPJMD Tahun 2021-2026. 16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tersebut adalah :

- 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun;
- 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan;
- 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia;
- 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua;
- 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan;
- 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan;
- 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua;
- 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi;
- 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar negara;
- 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan;
- 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan;
- 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya;
- 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati;
- 16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Tabel 4.7

Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar;	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.
	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.
	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Penguatan lingkungan yang kondusif dan seni budaya lokal;	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.
	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.
	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.
Peningkatan Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan.
	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.
	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
Peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah;	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.
	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.
	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
Peningkatan Pemerataan Pendapatan dan penanggulangan kemiskinan;	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun.
	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara.
Mewujudkan good and clean governance yang berbasis teknologi informasi.	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua.

4.2.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 menguraikan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib, yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan Dasar tersebut adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dimana kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Sementara Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i)

pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Tabel 4.8

Prioritas Pembangunan yang mendukung atau terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	STANDAR PELAYANAN MILIMAL (SPM)
Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar;	Pendidikan Anak usia dini
	Pendidikan Dasar
	Pendidikan Kesenjangan
	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil
	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin
	Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir
	Pelayanan Kesehatan Bagi Balita
	Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar
	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif
	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
	Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus
	Pelayanan Kesehatan Bagi gangguan jiwa berat
	Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis
	Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Peningkatan Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air minum sehari-hari
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	STANDAR PELAYANAN MILIMAL (SPM)
Peningkatan Pemerataan Pendapatan dan penanggulangan kemiskinan;	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah Tanggap
Mewujudkan good and clean governance yang berbasis teknologi informasi	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum

4.2.5 Perencanaan Berbasis Spasial berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru

Pembangunan wilayah memberikan perhatian yang luas terhadap keunikan karakteristik wilayah (ruang). Pemahaman terhadap sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur dan kondisi kegiatan usaha dari masing-masing daerah di Indonesia serta interaksi antar daerah (termasuk diantara faktor-faktor produksi yang dimiliki) merupakan acuan dasar bagi perumusan upaya pembangunanyang berkelanjutan ke depannya. Selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan instrumen yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. Sistem perencanaan ruang wilayah secara substansial diselenggarakan dan dituangkan dalam RTRW Kabupaten Barru. RTRW Kab.Barru merupakan perencanaan makro strategis jangka , RTRW Kabupaten dan Kota merupakan perencanaan yang memuat arahan pengembangan wilayah Kabupaten Barru.

Kabupaten Barru merupakan kabupaten dengan dinamika yang sangat tinggi, terutama karena posisinya yang berada di jalur utama trans Sulawesi dan berada diantara dua kota besar yaitu kota Makassar dan Pare-pare. Dari sisi perkembangan ekonomi dan industri Kabupaten Barru sangat potensial antara lain tersedianya sumber daya wilayah pesisir, sumber daya pertanian dan sumber daya mineral yang relatif masih belum sepenuhnya dikelola secara optimal.

Sementara itu, hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Barru terkait pembangunan wilayah diantaranya adalah :

- 1. Ketimpangan Pembangunan antar wilayah;
- 2. Belum optimalnya pusat pertumbuhan wilayah, dalam hal ini Kabupaten Barru adalah sebagai Kawasan Perkotaan Pusat Pertumbuhan Nasional (RTRWN);
- 3. Pemanfaatan ruang kurang terkendali.

Untuk arahan pemanfaatan ruang yang akan termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 ini bersinergi dengan arahan pada RTRW untuk PKLp yakni :

1. PKLp Palanro di Kecamatan Mallusetasi yang merupakan kawasan agropolitan (pertanian, perikanan, dan peternakan sapi), kawasan minapolitan serta kawasan wisata alam;
2. PKLp Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja yang merupakan kawasan pendidikan dan kawasan agropolitan (pertanian, peternakan dan perikanan);
3. PKLp Ralla di Kecamatan Tanete Riaja yang merupakan kawasan agropolitan (pertanian, perikanan air tawar, perkebunan, hasil hutan dan peternakan sapi) dan wisata alam;
4. PKLp Takkalasi di Kecamatan Balusu yang merupakan kawasan agropolitan (pertanian, perkebunan dan peternakan sapi); dan
5. PKLp Pekkae di Kecamatan Tanete Rilau yang merupakan kawasan agropolitan (pertanian, peternakan dan perkebunan) dan kawasan minapolitan.
6. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan perkotaan Doi-Doi di Kecamatan Pujananting yang merupakan kawasan pertambangan dan kawasan agropolitan (pertanian, perkebunan dan kehutanan).

Dan untuk pengembangan kawasan yakni :

1. Kawasan minapolitan di Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Mallusetasi merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi;
2. Kawasan Agrowisata di Kecamatan Tanete Riaja;
3. Kawasan industri pertambangan kapur pertanian di Kecamatan Balusu;
4. Kawasan pertambangan kromit dan serpentinit di Kecamatan Barru;
5. Kawasan pertambangan marmer, kromit, batubara dan emas di Kecamatan Pujananting;
6. Kawasan pertambangan batu gamping, tanah liat, batubara dan pasir kuarsa di Kecamatan Tanete Riaja;
7. Kawasan pertambangan tras dan pasir besi di Kecamatan Mallusetasi;
8. Kawasan pertambangan pasir besi di Kecamatan Tanete Rilau;
9. Kawasan terpadu pelabuhan, industri, perdagangan, pergudangan, dan peti kemas Garongkong dan simpul transportasi darat, laut dan kereta api di kawasan potensial pengembangan ekonomi EMAS;
10. Kawasan Agropolitan pertanian, perkebunan hasil ternak dan hasil hutan di Kecamatan Barru;
11. Kawasan Agropolitan (pertanian, hasil ternak dan hasil hutan) di Kecamatan Pujananting.

4.2.6 Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Barru

Berdasarkan permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam penyusunan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barru.

Dalam rumusan pokok-pokok pikiran yang telah diserahkan DPRD kepada Kepala Daerah Kab.Barru terdapat beberapa pandangan dan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan Tahun 2022, yakni :

1. Pemerintah Daerah diharapkan berkomitmen dalam penyusunan RKPD dan APBD Tahun 2022 untuk tepat waktu;
1. Pengelolaan penganggaran belum maksimal;
2. Dalam bidang pendidikan;
 - a. Bantuan Pendidikan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan.
4. Dalam bidang kesehatan;
 - a. Mengantisipasi dampak virus Covid 19;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan;
 - c. Peningkatan Kapasitas pelayanan kesehatan.
5. Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - a. Revisi dokumen perencanaan tata ruang;
 - b. Perbaikan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - c. Akses dan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat;
 - d. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Peningkatan dan perbaikan drainase/gorong-gorong.
6. Dalam bidang Pemukiman dan perumahan rakyat;
 - a. Peningkatan kualitas dan pengadaan PSU terutama Penerangan Jalan;
7. Dalam bidang Sosial;
 - a. Perluasan Akses ke Jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. Penguatan data-data masyarakat miskin.
8. Dalam bidang Kependudukan;
 - a. Penguatan data-data kependudukan
9. Dalam Bidang Pertanian, Perikanan dan UKM;
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan;
 - b. Penguatan UMKM dengan bantuan modal
10. Dalam Bidang Pariwisata;
 - a. Pengembangan Destinasi Pariwisata.
11. Dalam bidang Keagamaan;
 - a. Peningkatan sarana prasarana keagamaan.

4.2.7 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun 2020, tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2022 serta untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat

dan daerah, maka dirumuskan Tema RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 adalah : **“Peningkatan Kualitas Sumber daya untuk Pertumbuhan Barru yang Mandiri dan Inklusif”**. Untuk mewujudkan tema tersebut maka ditetapkan prioritas Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar;
2. Penguatan lingkungan yang kondusif dan seni budaya lokal;
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
4. Peningkatan daya saing daerah menuju kemandirian ekonomi daerah;
5. Peningkatan pemerataan pendapatan dan penaggulangan kemiskinan;
6. Mewujudkan good and clean governance yang berbasis teknologi informasi.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2022 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada table 4.9 berikut:

Tabel 4.9

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF	OPD	
Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar;	Perwujudan optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD/SDLB, APK SMP/Paket B, Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs, Angka Lulusan SD/MI, Angka Lulusan SMP/MTs	100%	54,576,061,707	Dinas Pendidikan	
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	100%	221,185,000	Dinas Pendidikan	
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pendidik berkualifikasi S1	81%	70,000,000	Dinas Pendidikan	
	Peningkatan budaya literasi masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Program Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Stunting, Persentase FKTP melaksanakan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular sesuai standar	92/100000	84,662,078,667	Dinas kesehatan	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	100%	42,076,500	Dinas kesehatan	
	Optimalisasi kualitas hidup Perempuan dan Anak		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	13,25 %	157,000,000	Dinas PMDPPKBPPPA	
	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	100%	337,500,000	Dinas PMDPPKBPPPA	
	Peningkatan pembinaan dan pengembangan keolahragaan		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100%	1,085,100,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Peningkatkan kualitas pelayanan KB dan pendewasaan usia perkawinan pertama		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Indeks Kabupaten layak Anak	650	65,000,000	Dinas PMDPPKBPPPA	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangan instansi terkait kabupaten	0.017%	60,000,000	Dinas PMDPPKBPPPA	
	Peningkatan pengawasan terhadap harga bahan pangan		Program Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	≥13	240,000,000	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan	
	Peningkatan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan		Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skoring Pola Pangan Harapan	94	715,887,800	Dinas Ketahanan Pangan
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	3 Desa	51,988,000	Dinas Ketahanan Pangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF	OPD
Penguatan lingkungan yang kondusif dan seni budaya lokal;	Peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat dan pemahaman terhadap ideologi bangsa dan negara, ketaatan terhadap peraturan dan hukum, serta kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Terjaganya Stabilitas Keamanan dan Ketenteraman Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum,persentase penyelesaian pelanggaran k3,jumlah satlinmas yang terdapat dimasyarakat,jumlah perda yang ditegakkan	100%	978,327,500	Satpol PP dan Damkar
	peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana		Program Penanggulangan Bencana	persentase bencana daerah yang ditanggulangi	100%	700,662,000	BPBD
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	1,612,175,000	Satpol PP dan Damkar
	Peningkatan sarana dan prasarana penaggulangan bencana		Program penanganan bencana	Presentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100	327,746,750	Dinas Sosial
	Pelaksanaan identifikasi, pencatatan dan pelestarian budaya lokal		Program pengembangan kebudayaan	Persentase cagar budaya Kesenian tradisonal Lembaga adat yang dilestarikam	100%	910,239,300	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan	300 orang	404,322,000	Dinas Pendidikan
Peningkatan Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;	Meningkatkan akses rumah layak huni	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	Program Pengembangan Perumahan	Persentase capaian SPM bidang Perumahan Rakyat	100%	785,640,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Mewujudkan pengembangan infrastruktur dan pengelolaan air minum layak		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase Capaian SPM pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-har	100%	502,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF	OPD
Peningkatan Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;	Mewujudkan pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi layak	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Presentase Capaian SPM Pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	1,232,036,000	Dinas PUPR
	Meningkatkan kualitas konstruksi jaringan drainase		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase cakupan layanan drainase yang menjadi kewenangan Kabupaten	100%	7,617,857,000	Dinas PUPR
	Meningkatkan kualitas bangunan/gedung		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan pemerintah yang di tata	100%	18,300,000,000	Dinas PUPR
	Meningkatkan kualitas penataan ruang daerah		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ketaatan Pemanfaatan Ruang	100%	572,438,219	Dinas PUPR
	Meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem kerja irigasi		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang jaringan irigasi kondisi baik	100%	35,508,134,655	Dinas PUPR
	Meningkatkan kualitas konstruksi jaringan jalan dan jembatan		Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	79,52	59,638,901,100	Dinas PUPR
	Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dan ketersediaan moda transportasi		Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang dan barang melalui dermaga, 'Jumlah lintas pelayaran yang beroperasi	27.720/13065.418	75,000,000	Dinas Perhubungan
	Mewujudkan penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase Perangkat Daerah yang terhubung daya akses internet yang berkualitas yang di sediakan Kominfo	83,33 %	2,014,976,000	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF	OPD
Peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah;	Peningkatan pengelolaan dan ketersediaan sarana prasarana sumberdaya pertanian	Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	100%	2,920,800,000	Dinas Pertanian
	Penguatan keberlanjutan produktivitas sumberdaya pertanian yang adaptif terhadap Penyakit dan Perubahan Iklim		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	100%	6,957,000,000	Dinas Pertanian
	Peningkatkan produksi, produktivitas, standarisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	2016000%	509,000,000	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	6454,53 Ton	2,024,000,000	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil perikanan	1.352,37 Ton	322,000,000	Dinas Perikanan
	Pengembangan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah industri pariwisata yang berkembang	38	4,235,000,000	Dinas Pariwisata
	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah pelaku Ekfraf yang berkembang yang memiliki HAKI	100%	274,000,000	Dinas Pariwisata
	Pengembangan industrialisasi yang berbasis investasi disinergikan dengan pengembangan kawasan industri		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIK	100%	3,384,000,000	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izn Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	120,000,000	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF	OPD
Peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah;	Perluasan kerjasama dan kapasitas pemasaran dan perdagangan	Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan pro investasi yang tersusun dan dilaksanakan	70%	51,650,000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	245,652,800	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	25,32%	80,000,000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	Peningkatan pengelolaan sumberdaya ekonomi dalam pemenuhan kecukupan pangan		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	90%	1,723,000,000	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
	Pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran/kerusakan sumberdaya alam dan LH serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100%	600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan Kualitas Lingkungan dan usaha/kegiatan usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan	79,18%	190,026,668	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase sampah yang tertangani	80,70 %	399,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Pemerataan Pendapatan dan penanggulangan kemiskinan;	Peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	6,94 Milyar	1,312,117,617	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	50%	91,592,000	Dinas Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Sang Kepemudaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100%	1,085,100,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	93%	60,000,000	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF	OPD
Peningkatan Pemerataan Pendapatan dan penanggulangan kemiskinan;	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	61	70,000,000	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10,08	2,870,000,000	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
			Program Pengembangan UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	49,59	200,000,000	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
	Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Program Pemberdayaan Sosial	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	100%	171,597,963	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Capaian SPM bidang Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	100%	333,739,000	Dinas Sosial
			Program Perlindungan dan Jamnan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	100%	514,222,845	Dinas Sosial
Mewujudkan good and clean governance yang berbasis teknologi informasi.	Perwujudan modernisasi Manajemen Pemerintah melalui penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman e-KTP	99%	156,343,500	Dinas Dukcapil
			Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	96%	111,856,000	Dinas Dukcapil
				Persentase penduduk usia 0 - 17 tahun yang memiliki KIA	40,16		
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD	100%	524,000,000	BAPPEDA
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampakan RKA Tepat Waktu	100%	4,706,222,050	BPKAD
				Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	94,24		
				Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	100		

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF	OPD
Mewujudkan good and clean governance yang berbasis teknologi informasi.	Perwujudan modernisasi Manajemen Pemerintah melalui penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu	100		BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan ketersediaan data aset yang akurat	100%	899,408,300	BPKAD
				Persentase Aset (tanah) milik Pemerntah yang memiliki sertifikat	70		
				Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	70		
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-1	1,449,197,130	BAPENDA	
	Peningkatkan kualitas SDM Aparatur		Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	C	2,907,520,800	BKPSDM
	Pelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP pertahun	50%	1,313,671,250	BKPSDM
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	100%	860,000,000	BAPPEDA
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	Inspektorat Daerah
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Insidensi Penyimpangan/penyalahgunaan yang terjadi	3	676,294,000	Inspektorat Daerah
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan berbasis kepuasan masyarakat	100%	26,975,000	Kecamatan
	Meningkatkan peran lembaga dan organisasi keagamaan dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100%	22,209,472,854	Bag. Kesra Setda
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	100%	116,432,200	Badan Kesbangpol

Fokus prioritas perencanaan Tahun 2022 yang hendak diwujudkan telah dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah, dimana isu strategis daerah ini telah dirumuskan berdasarkan berbagai kebijakan dan hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Barru. Adapun keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan daerah tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.10

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, issue strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Kab.Barru Tahun 2022

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2022
Masih rendahnya kualitas pembangunan manusia dan pemenuhan pelayanan dasar	Perluasan dan peningkatan pemenuhan pelayanan dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar;
Belum optimalnya penciptaan lingkungan yang kondusif	Peningkatan keamanan, penciptaan stabilitas daerah dan pengembangan seni budaya lokal;	Penguatan lingkungan yang kondusif dan seni budaya lokal;
Belum maksimalnya ketersediaan infrastruktur yang merata	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang optimal	Peningkatan Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
masih rendahnya daya saing daerah	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan berkelanjutan;	Peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah;
Belum optimalnya pemerataan pendapatan	Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan Pemerataan Pendapatan dan penanggulangan kemiskinan;
Tata kelola pemerintahan daerah belum efektif dan efisien	Penguatan reformasi birokrasi danPenyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan good and clean governance yang berbasis teknologi informasi.

4.2.8 Sinkronisasi Prioritas kab/kota terhadap Prioritas Provinsi dan Nasional

Dalam rangka konsistensi antar rencana pembangunan mulai dari level nasional hingga Kabupaten kota, maka dibutuhkan sinergitas dan sinkronisasi Prioritas pembangunan. Adapun sinergitas dan sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11

Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN BARRU
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2022		
Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif	Pemulihan Ekonomi melalui penguatan inovasi daerah dan pemantapan hilirisasi pengolahan berbasis Sumber daya alam	Peningkatan Kualitas Sumber Daya untuk Pertumbuhan Barru yang Mandiri dan Inklusif
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022		
Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social	Peningkatan daya saing daerah menuju kemandirian ekonomi daerah
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Peningkatan pemerataan pendapatan dan penaggulangan kemiskinan
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		
Membangun lingkungan hidup, memperkuat ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	Penguatan lingkungan yang kondusif dan seni budaya lokal
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Pemantapan reformasi birokrasi	Mewujudkan good and clean governance yang berbasis teknologi informasi

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2022, maka arah kebijakan nasional yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam. Sehubungan dengan hal tersebut maka rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, maka hubungan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Keselarasan Sasaran pembangunan Daerah terhadap Prioritas pembangunan Nasional Tahun 2022

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional	PN
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PN 3
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PN 3
3	Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PN 2
4	Terjaganya Stabilitas Keamanan dan Ketenteraman Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PN 6
5	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN 5
6	Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PN 1
7	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PN 3
8	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PN 7
9	Meningkatnya kualitas pengamalan keagamaan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PN 4

Tabel 4.13

Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2022

PRIORITAS PEMBAGUNAN NASIONAL (RKP 2022)				PROGRAM DAERAH YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL (PN)
PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	KEGIATAN	
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Penyediaan air untuk pertanian;	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
			Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
			Pengembangan waduk multiguna.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
			Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
			Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	
			Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
			Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.	Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;	
			Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tam bah produk kelautan dan perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya;dan	

PRIORITAS PEMBAGUNAN NASIONAL (RKP 2022)			PROGRAM DAERAH YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL (PN)
PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi,	Peningkatan kemitraan usaha antar Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
			Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
			Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
			Peningkatan penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha.
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kerneritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
			Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
			Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
			Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
			Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
			Pengembangan industri halal.
		Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
			Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
			Pengelolaan Impor;
			Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
			Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
		Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi <i>Branding</i> , dan Produk Kreatif; dan
			Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan <i>Industry 4.0</i> ;
			Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
			Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan
			Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital

PRIORITAS PEMBAGUNAN NASIONAL (RKP 2022)				PROGRAM DAERAH YANG MENDUKUNG KEGIATAN
PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	KEGIATAN	PRIORITAS NASIONAL (PN)
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Sulawesi	Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
			Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,	Program Penyelenggaraan Jalan
			Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Memperkuat kemampuan SOM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta	Program pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.	Program Penyelenggaraan Pendidikan
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;	Program Pencatatan Sipil, Program pengelolaan profil kependudukan
			Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;	Rogram Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Pendampingan dan Lavanan Terpadu	Program pembinaan Kleuarga Berencana
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;	Program Peningkatan Kualitas Keluarga; program pemenuhan hak anak
			Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;	
			Peningkatan Pengendalian Penyakit;	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);	
			Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;	Program Pengelolaan Pendidikan
			Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;	
			Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidika	program pendidik dan tenaga kependidikan
			Penjaminan Mutu Pendidikan; dan	Program Pengelolaan Pendidikan
			Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	
		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
				Pengendalian Penduduk, & Keluarga Berencana
			Peningkatan Kesetaraan Gender Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Kualitas Pemuda	Program Peningkatan Kualitas Keluarga

PRIORITAS PEMBAGUNAN NASIONAL (RKP 2022)				PROGRAM DAERAH YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL (PN)	
PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	KEGIATAN		
		Pengentasan kemiskinan	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,Dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Reforma Agraria; dan		Program Pengelolaan Izin Lokasi
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
					Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong rovong, dan budi pekerti;	Program Kepegawaian Daerah	
			Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;	Program Penataan Organisasi	
			Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;	Program Pengelolaan Pendidikan	
			Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
			Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
		Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;	Program Pengembangan Kebudayaan	
			Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;		
			Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;		
			Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan		
			Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan		

PRIORITAS PEMBAGUNAN NASIONAL (RKP 2022)				PROGRAM DAERAH YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL (PN)
PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	KEGIATAN	
		Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;	Program Kesejahteraan Rakyat
			Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;	
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama;	
			Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	Rogram Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan,Dan Berkarakter	Peningkatan Budaya Literasi;	Program Pengelolaan Pendidikan
			Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;	Program Pengembangan Kurikulum Prioritas
			Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta:	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;	Program Kawasan Permukiman
			Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak danAman;	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi;	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
			Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan	Program Penanggulangan Bencana
			Waduk <i>Multipurpose</i> dan Modernisasi Irigasi.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		Infrastruktur Ekonomi	Konektivitas Jalan;	Program Penyelenggaraan Jalan
			Konektivitas Kereta Api;	
			Konektivitas Laut;	Program Pengelolaan Pelayaran
			Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJR)
		Transformasi Digital	Penuntasan Infrastruktur TIK;	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Program Pengelolaan aplikasi Informasi

PRIORITAS PEMBAGUNAN NASIONAL (RKP 2022)				PROGRAM DAERAH YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL (PN)
PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	KEGIATAN	
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (83) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah 83)
			Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan	
			Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Pembangunan Energi Serkelanjutan;	Program Penanggulangan Bencana
		Pembangunan Rendah Karban	Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Pengembangan Industri Hijau	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
			Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan;	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Penguatan Implementasi Manajemen ASN;	Program Kepegawaian Daerah
			Transformasi pelayanan publik;	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			Penataan kelembagaan dan proses bisnis	Program Penataan Organisasi
			Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.	Program pengelenggaraan pengawasan

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2022

Rencana pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tahun 2022 Kabupaten Barru. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program. Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah pada Bab III disajikan bahwa pendapatan daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.975.987.247.071,00. setelah dikurangi dengan Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat sebesar Rp.567.134.485.179,26, maka Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan sebesar Rp.408.852.761.891,74 yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2022. Belanja daerah tahun 2022 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2022, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Belanja daerah tahun 2022 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2022.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut:

Tabel 5.1
Rincian Rencana Pendanaan Tahun 2022

No	URAIAN	PROYEKSI 2022
2	BELANJA	980.053.488.967
2.1	Belanja Operasi	748.279.824.505
2.1.1	Belanja Pegawai	436.697.519.926
2.1.2	Belanja Barang dan jasa	293.437.472.774
2.1.3	Belanja Bunga	3.156.590.521
2.1.4	Belanja Subsidi	-

No	URAIAN	PROYEKSI 2022
2.1.5	Belanja Hibah	14.988.241.284
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-
2.2	Belanja Modal	110.073.649.634
2.3	Belanja tidak Terduga	12.204.638.460
2.4	Belanja Transfer	109.495.376.368
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	109.495.376.368

Sumber : LRA 2017-2020, Penjabaran APBD 2021 dan Proyeksi APBD

5.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

5.2.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan

sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2022, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 6 (Enam) prioritas pembangunan.

Prioritas pertama Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar dengan 3 sasaran dan dijabarkan dalam 13 (Tiga Belas) program prioritas, prioritas kedua Penguatan lingkungan yang kondusif dan seni budaya lokal dengan 1(satu) sasaran dijabarkan ke dalam 6 (Enam) Program, Prioritas pembangunan ke 3 Peningkatan Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan 1 (Satu) sasaran yang dijabarkan kedalam 10 (Sepuluh) program, prioritas pembangunan ke 4 (empat) Peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah dengan 1 (Satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 16 (Enam Belas) program, prioritas pembangunan ke 5 (lima) Peningkatan Pemerataan Pendapatan dan penanggulangan kemiskinan, dengan 1 (Satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 10 (Sepuluh) program prioritas, dan untuk prioritas pembangunan ke 6 (enam) Mewujudkan good and clean governance yang berbasis teknologi informasi dengan 2 (Dua) sasaran yang dijabarkan ke dalam 14 (Empat Belas) program prioritas.

Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2022 adalah sebanyak 6 (Lima) prioritas pembangunan dengan 10 (sepuluh) sasaran, dan 61 (Enam Puluh Satu) program prioritas sebagai mana di jabarkan pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH
				TARGET KINERJA	ANGGARAN	
Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar;	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD/SDLB, APK SMP/Paket B, Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs, Angka Lulusan SD/MI, Angka Lulusan SMP/MTs	100%	54,576,061,707	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	100%	221,185,000	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik berkualifikasi S1	81%	70,000,000	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Program Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Stunting, Persentase FKTP melaksanakan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular sesuai standar	92/100000	84,662,078,667	Dinas kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	100%	42,076,500	Dinas kesehatan
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	13,25 %	157,000,000	Dinas PMDPPKBPPPA
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	100%	337,500,000	Dinas PMDPPKBPPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Indeks Kabupaten layak Anak	650	65,000,000	Dinas PMDPPKBPPPA
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangan instansi terkait kabupaten	0.017%	60,000,000	Dinas PMDPPKBPPPA
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100%	1,085,100,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Program Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	≥13	240,000,000	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skoring Pola Pangan Harapan	94	715,887,800	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	3 Desa	51,988,000	Dinas Ketahanan Pangan
Penguatan lingkungan yang kondusif dan seni budaya lokal;	Terjaganya Stabilitas Keamanan dan Ketenteraman Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum,persentase penyelesaian pelanggaran k3,jumlah satlinmas yang terdapat dimasyarakat,jumlah perda yang ditekakkan	100%	978,327,500	Satpol PP dan Damkar
		Program pengembangan kebudayaan	Persentase cagar budaya Kesenian tradisonal Lembaga adat yang dilestarikam	100%	910,239,300	Dinas Pendidikan
Penguatan lingkungan yang kondusif dan seni budaya lokal;	Terjaganya Stabilitas Keamanan dan Ketenteraman Daerah	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan	300 orang	404,322,000	Dinas Pendidikan
		Program Penanggulangan Bencana	persentase bencana daerah yang ditanggulangi	100%	700,662,000	BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	1,612,175,000	Satpol PP dan Damkar

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH
				TARGET KINERJA	ANGGARAN	
Peningkatan Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	Program Pengembangan Perumahan	Persentase capaian SPM bidang Perumahan Rakyat	100%	785,640,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase Capaian SPM pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-har	100%	502,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Presentase Capaian SPM Pelayanan penyediaa n pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	1,232,036,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase cakupan layanan drainase yang menjadi kewenangan Kabupaten	100%	7,617,857,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan pemerintah yang di tata	100%	18,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ketaatan Pemanfaatan Ruang	100%	572,438,219	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang jaringan irigasi kondisi baik	100%	35,508,134,655	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	79,52	59,638,901,100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang dan barang melalui dermaga, 'Jumlah lintas pelayaran yang beroperasi	27.720/13065.418	75,000,000	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase Perangkat Daerah yang terhubung daya akses internet yang berkualitas yang di sediakan Kominfo	83,33 %	2,014,976,000	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
Peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah;	Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	100%	2,920,800,000	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	100%	6,957,000,000	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	2016000%	509,000,000	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	6454,53 Ton	2,024,000,000	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil perikanan	1.352,37 Ton	322,000,000	Dinas Perikanan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah industri pariwisata yang berkembang	38	4,235,000,000	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah pelaku Ekfraf yang berkembang yang memiliki HAKI	100%	274,000,000	Dinas Pariwisata
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIK	100%	3,384,000,000	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH
				TARGET KINERJA	ANGGARAN	
Peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah;	Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan pro investasi yang tersusun dan dilaksanakan	70%	51,650,000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	245,652,800	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	25,32%	80,000,000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	90%	1,723,000,000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100%	600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan Kualitas Lingkungan dan usaha/kegiatan usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan	79,18%	190,026,668	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Presentase sampah yang tertangani	80,70 %	399,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Pemerataan Pendapatan dan penanggulangan kemiskinan;	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	6,94 Milyar	1,312,117,617	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	50%	91,592,000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100%	1,085,100,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	93%	60,000,000	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	61	70,000,000	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10,08	2,870,000,000	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	49,59	200,000,000	Dinas Kop, UKM dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Sosial	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	100%	171,597,963	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Capaian SPM bidang Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	100%	333,739,000	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jamnan Sosal	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	100%	514,222,845	Dinas Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH
				TARGET KINERJA	ANGGARAN	
Mewujudkan good and clean governance yang berbasis teknologi informasi.	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman e-KTP	99%	156,343,500	Dinas Dukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	96%	111,856,000	Dinas Dukcapil
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD	100%	524,000,000	BAPPEDA
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA Tepat Waktu	100%	4,706,222,050	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan ketersediaan data aset yang akurat	100%	899,408,300	BPKAD
Mewujudkan good and clean governance yang berbasis teknologi informasi.	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-1	1,009,182,000	BAPENDA
		Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	C	2,907,520,800	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP pertahun	50%	1,313,671,250	BKPSDM
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	100%	860,000,000	BAPPEDA
		Program Penyelenggaraa n Pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	2,303,079,000	Inspektorat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Insidensi Penyimpangan/penyalahgunaan yang terjadi	3	676,294,000	Inspektorat Daerah
		Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan berbasis kepuasan masyarakat	100%	26,975,000	Kecamatan
	Meningkatnya kualitas pengamalan keagamaan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100%	22,209,472,854	Bag. Kesra Setda
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	100%	116,432,200	Badan Kesbangpol

5.2.2 Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Perumusan Rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis, tersusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam beberapa Urusan dan Unsur pemerintahan antara lain 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, dan urusan Bidang sosial. Untuk

urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ada 18 (delapan Belas) urusan antara lain Urusan Pemerintahan Bidang tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, pertanahan, lingkungan hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 8 (Delapan) urusan antara lain Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi, disamping urusan tersebut berdasarkan permendagri 90 Tahun 2019 ditambah dengan 5 (lima) unsur antara lain Unsur Pendukung urusan pemerintahan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 6 (Enam) unsur yaitu Perencanaan, keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengelolaan Perbatasan serta Pengelolaan Penghubung. Untuk unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan adalah Inspektorat Daerah, serta Unsur pemerintahan umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan dalam rangka memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal. Secara rinci rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barru, yang terdiri dari Indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Tahun 2016-2021 dapat dicapai.

6.1. Indikator Kinerja Daerah

6.1.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sector, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Kemiskinan
 - Tingkat kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Gini Ratio
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
 - Harapan Lama Sekolah (HLS)
 - Angka Harapan Hidup (AHH)
6. PDRB Perkapita

Adapun target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. VI.1
Target Indikator Makro Kabupaten Barru Tahun 2021-2022

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,0	71,27	71,62
2	angka harapan lama sekolah	Poin	13,58	13,6	13,61
3	Rata-rata lama sekolah	Poin	8,23	8,4	8,53
4	Angka harapan hidup	Poin	69,02	69,03	69,05
5	Persentase tingkat pengangguran terbuka	%	6,39	6,07	5,88
6	PDRB Perkapita	%	42,47	41,98	43,9
7	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,87	3,38	4,57

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
8	Indeks Gini	Poin	0,36	0,36	0,35
9	Persentase Penduduk Miskin	%	8,26	9,08	8,89

6.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU Kabupaten Barru memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barru tahun 2016-2021. Sedangkan IKK Kabupaten Barru memberikan gambaran tentang berbagai indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Penetapan Indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah disajikan dalam Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 sebagai berikut :

Tabel 6.1

Capaian Indikator Kinerja Utama 2020 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru Tahun 2021-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,0	71,27	71,62
2	Angka Kriminalitas	Poin	7,25	7,3	6,5
3	Indeks Daya Saing Pilar Infrastruktur (beda nilai)	Poin	3,58	3,78	3,82
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,87	3,38	4,57
5	Indeks Gini	Poin	0,36	0,36	0,35
6	Nilai Reformasi Birokrasi		CC	C	B
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama (tidak ada)	Poin	0	73	75

Tabel 6.2
Kondisi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020, 2021,
dan Target 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB	%	0,87	3,38	4,57
2	Laju inflasi (tidak ada)	Poin	1,61	3,0 - 1,0	3,0 - 1,0
3	PDRB per kapita (rp)	Rp.	42.47	41,98	43,9
4	Indeks Gini	Poin	0,36	0,36	0,35
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	%	8,26	9,08	8,89
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71	71,27	71,62
7	Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,58	13,6	13,61
8	Angka rata-rata lama sekolah	%	8,23	8,4	8,53
9	Angka usia harapan hidup	%	69,02	69,03	69,05
10	Persentase balita gizi buruk	%	0,04	0,02	0,02
11	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	57,18	57,49	57,92
12	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,39	6,07	5,88
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (tidak ada)		Baik	Baik	Baik
14	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	11,53	11,69	11,85
15	Opini BPK		WTP	WTP	WTP
16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (tidak ada)	%	91,2	91,37	92,72
17	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	13,33	14,37	14,54
18	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	7,15	7,15	7,29
19	Produksi sektor pertanian				
20	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	1,38	1,40	1,41
21	Produksi sektor perkebunan				
22	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB sektor Pertanian	%	97,37	98,11	98,24

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
23	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,34	0,36	0,37
24	Pertumbuhan Industri	%	11	11	11
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Angka kriminalitas yang tertangani	%	7,25	7,3	6,5
2	Rasio ketergantungan	%	49,15	53,41	51,79
C	ASPEK PELAYANAN UMUM				
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan				
1,1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	80,00	86,78	100
1. 2	Angka Partisipasi Kasar				
1.2.1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A	%	106,5	105	105,80
1.2.2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	107,82	107	107,81
1,3	Angka Partisipasi Murni				
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	94	94	100
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	90	90	100
1,4	Angka partisipasi sekolah				
1.4.1	Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A	%	94	94	100
1.4.2	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B	%	90	94	100
1,5	Angka Putus Sekolah:				
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,32	0,3	0
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%		0,5	0
1,6	AngkaKelulusan:				
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100
1,7	Angka Melanjutkan				
1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,95	99	100
1.7.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	NA	94	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
1,8	Fasilitas Pendidikan:				
1.8.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	94,23	94,95	95,67
1.8.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	55	55,42	55,84
1.8.3	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD	%	102,63	103,41	104,20
1.8.4	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SMP	%	55,9	56,32	56,75
1,9	Rasio guru/murid				
1.9.1	Rasio guru/murid Pendidikan Dasar (SD)	%	1065	1056,91	1048,87
1.9.2	Rasio guru/murid pendidikan dasar SMP (SMP)	%	730	724,45	718,95
1.10	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,15	99,2	99,25
1,11	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	88	88,67	89,34
2	Kesehatan				
2,1	Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	%	3	1,93	1,84
2,2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	%	99,7	99,88	100
2,3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	%	1	0,21	0,20
2,4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	%	2	1,70	1,45
2,5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	%	98	65,3	55,66
2,6	Rasio dokter per satuan penduduk	%	0,14	0,27	0,27
2,7	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	%	0,31	0,43	0,44
2,8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	87	100
2,9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	98	98	100
2,1	Persentase Balita Gizi buruk	%	0,04	0,05	0,04
2,11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100
2,12	Cakupan kunjungan bayi	%	95,51	100	100
2,13	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,24	93,8	100
2,14	Cakupan pelayanan nifas	%	95,87	98,8	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
2,15	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	52,8	100
2,16	Cakupan pelayanan anak balita		60,60	92	100
2,17	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	0	8,7	100
2,18	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	64	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3,1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,641	0,73	0,83
3,2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%		3,96	4,03
3,3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	71,72	83,04	84,50
3,4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (min 1,5 m	%	NA	1,67	1,70
3,5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	95,79	93,29	94,00
3,6	Presentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	99,9	100	100
3,7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	48,06	47,26	48,09
3,8	Rasio Jaringan Irigasi	%	27,73	22,23	22,62
3,9	Presentase penduduk berakses air minum	%	95,3	95,3	96,02
3,1	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,02	0,06	0,06
3,11	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	124,28	3,179	3,23
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman				
4,1	Rasio rumah layak huni	%	0,25	0,42	0,70
4,2	Rasio permukiman layak huni	%	0,99	1,66	2,79
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
5,1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	%	0,58	0,45	0,44
5,2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
5,3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100	100	100
5,4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100
5,3	Penegakan PERDA	%	100	100	100
6	Sosial				
6,1	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100
6,2	Presentase PMKS yang tertangani	%	100	100	100
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
1	Tenaga Kerja				
1,1	Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun	Kasus	0	2	0
1,2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	0	0	0
1,3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	52,8	52,8	52,8
1,4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	77,48	70	70,53
1,5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah	Kasus	0	0	0
1,6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	20	96	96,73
1,7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	0	50	52,38
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2,1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	18,55	19,06	19,59
2,2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	20,55	21,12
2,3	Rasio KDRT	%	0,02	0,02	0,02
2,4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
2,5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100
2,6	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100
2,7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100
2,8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100
2,9	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100
2,1	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100
3	Pangan				
3,1	Ketersediaan pangan utama	%	44,37	46,43	46,78
3,2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	53	65	65
5	Lingkungan Hidup				
5,1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Dokumen	Ada	Ada	Ada
5,2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Daerah	Dokumen	Ada	Ada	Ada
5,3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Dokumen	ADA	ADA	ADA
5,4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	50	57	59
5,5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	90,59	91	91

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
5,6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan Lahan	Poin	69,77	70	70
5,7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	5	5,44	6,24
5,8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di daerah	%	100	100	100
5,9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Penghargaan	ADA	ADA	ADA
5,1	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah, lokasi usaha dan dampak nya di daerah	%	100	100	100
5,11	Timbulan sampah yang ditangani	%	43	44,19	45,41
5,12	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	22.000	23.000 M3	
5,13	Presentase jumlah sampah yang tertangani		80,52	80,62	80,7
5,14	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	76	77	77
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
6,1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	0,999	0,98	100
6,2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	0,97	0,97	100
6,3	Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	100
6,4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Dokumen	Ada	ADA	ADA
6,5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah
6,6	Cakupan Penerbitan KTP	%	99,99	98	100
6,7	Cakupan Penerbitan akta kelahiran	%	97,01	95	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
7,1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100	100
7,2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1 Kelompok Binaan LPM (kel/desa)	1 Kelompok Binaan LPM	1 Kelompok Binaan LPM
7,3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	39,44	40,53	41,65
7,4	Presentase LSM Aktif	%	100	100	100
7,5	Presentase LPM Berprestasi	%	25,45	28,70	32,36
7,6	Presentase PKK aktif	%	100	100	100
7,7	Presentase Posyandu aktif	%	100	100	100
7,8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	30	30	30
7,9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	50	50	50
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
8,1	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,55	2,22	1,94
8,2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	80	100	100
8,3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	24,13	27,21	30,68
8,4	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	0	2	2
8,5	Rasio akseptor KB	%	66,63	68,47	70,36
8,6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	66,63	68,47	70,36

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
8,7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	1,51	1,32	1,15
8,8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	16,71	17,17	17,65
8,9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	13,9	14,28	14,68
8,1	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	50,09	51,47	52,89
8,11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	45,13	46,38	47,66
8,12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	30,1	30,93	31,78
8,13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	33,16	34,08	35,02
8,14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100	100	100
8,15	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	900	924,84	950,37
8,16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah di bid pengendalian penduduk	%	100	100	100
8,17	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	53,55	53,55	55,90
8,18	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100
8,19	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100
8,2	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
8,21	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100
8,22	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100
9	Perhubungan				
9,1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1.774.012	1738710	1909104
9,2	Jumlah uji kir angkutan umum	Sertifikat	2017	2038	2127
9,3	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	Unit	5/0/4	5/0/6	5/0/6
9,4	Presentase layanan Angkutan darat	%	0,076	0,087	0,099
9,5	Presentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	41,29	41,99	42,71
9,6	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	%	0,013	0,014	0,015
9,7	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/Ton	907.025 Orang, 10.884 Ton	918.071 Orang, 11.049 Ton	927.605 Orang, 12.709 Ton
9,8	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang/Ton	1.728.230 Orang, 9.694.239 Ton	1.867.908 Orang, 9.769.309 Ton	1.881.879 Orang, 9.785.137 Ton
10	Komunikasi dan Informasi				
10,1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	30	31,41	32,89
10,2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	85	100	100
10,3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	0,24	100	100
10,4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	40	46,68	54,48
10,5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	50	52,35	54,81
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
11,1	Persentase koperasi aktif	%	69,61	72,88	76,31
11,2	Persentase UKM non BPR/LKM UKM	%	93,88	94,54	95,20
11,3	Presentase BPR/LKM Aktif	%	71,43	72,64	73,88
11,4	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,8	99,81	99,84

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
12	Penanaman Modal				
12,1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	118	120	122
12,2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	855.316.867.042	861.304.085.111	867.333.213.707
12,3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	237	241,03	245,13
12,4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	17,06	17,18	17,30
13	Kepemudaan dan Olahraga				
13,1	Presentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100
13,2	Presentase wirausaha muda	%	13,33	13,56	13,79
13,3	Cakupan pembinaan olahraga	%	50	100	100
13,4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Orang	5	6	7
13,5	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	0	1	1
13,6	Cakupan pembinaan atlet muda	%	70,9	72,11	73,33
13,7	Jumlah Prestasi olahraga	Medali	0	1	1
14	Statistik				
14,2	Buku "kabupaten dalam angka"	Buku	Ada	Ada	Ada
14,3	Buku "PDRB kabupaten"	Buku	Ada	Ada	Ada
15	Persandian				
15,1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	2,7	2,7	2,7
16	Kebudayaan				
16,1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	9	9	9
16,2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Kawasan	80	81	83
16,3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	6	6	6
16,4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	28	30	30

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
17	Perpustakaan				
17,1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	121286	123348	125445
17,2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	58685	59683	60697
17,3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,3	0,3	0,3
17,4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	%	0,647	0,658	0,669
17,5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul Buku	11676	11874	12076
17,6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	3	1	2
18	Kearsipan				
18,1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	80%	100%	100%
18,2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	0	2	2
III	Urusan Pilihan				
1	Pariwisata				
1,1	Kunjungan wisata	Orang	61.519	62319	63129
1,2	Lama kunjungan Wisata	Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari
1,3	PAD Sektor Pariwisata	%	0,06	0,08	0,09
2	Pertanian				
2,1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	13,33	14,37	14,54
2,2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	7,15	7,15	7,29
2,3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	1,38	1,38	1,43
2,4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB sektor Pertanian	%	97,37	98,11	98,24
2,5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	53,42	53,83	54,24
2,6	Cakupan bina kelompok petani	%	11,93	12,02	12,11
5	Perdagangan				
5,1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	97.264.928	101.641.850	103.166.478
5,2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	23,04	25,35	28,82

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
6	Perindustrian				
6,1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	14,00%	14,28%	15
7	Transmigrasi				
7,1	Presentase Transmigran swakarsa	Orang	0	0	0
8	Kelautan dan Perikanan				
8,1	Produksi perikanan	Rupiah	25.733,90	25886,01	26222,52813
8,2	Konsumsi ikan	%	45,53	46	46,37
8,3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	70	73	79
8,4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	12.555,58	12800,6	12943,05
IV	Urusan Penunjang				
1	Perencanaan Pembangunan				
1,1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	ADA	ADA	ADA
1,2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	ADA	ADA	ADA
1,3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dokumen	ADA	ADA	ADA
1,4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	ADA	ADA	ADA
1,5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100
1,6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100
2	Kuangan				
2,1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
2,2	Persentase SILPA	%	3,68	5,00	5,00
2,3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	3,68	5,00	5,00
2,4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0,00	0,00
2,5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	28,95	20,00	20,00
2,6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	19,98	10,00	10,00

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
2,7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	BTL=80,84% --- BL=19,16%	BTL= 50% ---BL= 50%	BTL= 50% ---BL= 50%
2,8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%		8,94	9
2,9	Penetapan APBD	Per Tgl/Bln/Thn	17 Desember 2019	27 Desember 2020	30 November 2021
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan				
3,1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JPL	16,56 JPL	17 JPL	20 JPL
3,2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	7,25	10	15
3,3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	57,34	65,00	68,00
3,4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	30	34	34
3,5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	544	610	200
3,6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3345	3345	3345
4	Penelitian dan Pengembangan				
4,1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100
4,2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	87,50	100	100
4,3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (SIDA)	%	90,90	63,88	100
4,4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	64,93	63,88	100
5	Pengawasan				
5,1	Persentase tindak lanjut temuan	%	87,7	100	100
5,2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,10	0,16	0
5,3	Jumlah temuan BPK	Temuan	10	12	10
6	Sekretariat Dewan				
6,1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
6,2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	Ada	Ada	Ada
6,3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Dokumen	Ada	Ada	Ada

Tabel 6.3
Penetapan Capaian, Perkiraan dan Target Indikator SPM
Kabupaten Barru Tahun 2022 (Persen)

No	Uraian	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
I	PENDIDIKAN			
1	pendidikan anak usia dini	80,00	86,78	100
2	pendidikan dasar			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	106,5	105	105,80
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	107,82	107	107,81
3	pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C)	99,03	100	100
II	KESEHATAN			
1	pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100
2	pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100	100
3	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100
4	pelayanan kesehatan balita	100	100	100
5	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100
6	pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100	100
7	pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100
8	pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100
9	pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100	100	100
10	pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100
11	pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	100	100	100
12	pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100	100	100
III	PEKERJAAN UMUM			
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	96,63	100	100
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	5,86	100	100
IV	PERUMAHAN RAKYAT			
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	100	100
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	0	100	100
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100
2	pelayanan informasi rawan bencana	100	100	100
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100	100	100
VI	SOSIAL			
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100	100	100
2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100	100	100
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	100	100	100
4	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	100	100
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100

Tabel 6.4
Penetapan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDG) Kab. Barru Tahun 2022

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	SUMBER DATA/OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	8,89	Dinas Sosial
		1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jiwa	37205	Dinas Sosial
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	97,56	Dinas PUPR/Dinas PKP
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	100	Dinas PUPR/Dinas PKP
		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	98,99	Dinas Pendidikan
		1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	5	BPBD
		1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Jiwa	279	BPBD/Dinas Sosial
		1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Jiwa	0	BPBD/Dinas Sosial
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rupiah	453.981.700,00	BPBD
		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	ADA	BPBD
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	8,72	Dinas Kesehatan
		2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	39,64	Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	%	92,72	Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	SUMBER DATA/OPD PENANGGUNGJAWAB
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Kematian per 1000 kelahiran hidup	0,71	Dinas Kesehatan
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Kematian per 1000 kelahiran hidup	4,91	Dinas Kesehatan
		3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Per 1000 Orang	0,10	Dinas Kesehatan
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	16,38	DPMDP2KBP3 A
		3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	%	0,38	Dinas Kesehatan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	91,07	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	84,89	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	107,93	Dinas Pendidikan
		4.c.1*	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik. $((1/2) \times 100\%)$	%	73,87	Dinas Pendidikan
		4.c.1*	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik. $((1/2) \times 100\%)$	%	93,47	Dinas Pendidikan
		4.c.1*	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik. $((1/2) \times 100\%)$	%	92,37	Dinas Pendidikan
5	Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	%	6,06	DPMDP2KBP3 A
		5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	14,93	DPMDP2KBP3 A
		5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	%	75,82	DPMDP2KBP3 A
		5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Regulasi	6	DPMDP2KBP3 A

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	SUMBER DATA/OPD PENANGGUNG JAWAB
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	97,56	Dinas PUPR/Dinas PKP
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	97,56	Dinas PUPR/Dinas PKP
		6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	RT	2110	Dinas PUPR/Dinas PKP
		6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	%	76,19	Dinas LH/Dinas Kesehatan
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Rupiah	46.903.000	BPS
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	%	44,58	DPMPTSP & TENAGA KERJA
		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	%	42,19	DPMPTSP & TENAGA KERJA
		8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	%	41,14	DPMPTSP & TENAGA KERJA
		8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	5,48	DPMPTSP & TENAGA KERJA
		8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Jiwa	289	Dinas Pariwisata
		8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	%	27,50	Dinas Pariwisata
		8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	%	5,87	BPS

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	SUMBER DATA/OPD PENANGGUNGJAWAB
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Regulasi	Belum ada	Bagian Hukum Setda
		10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jiwa	37205	Bagian Adm Pembangunan Setda
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Lembaga	Belum Ada	
		11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Per 100.000 Orang	0,01	BPBD
		11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rupiah	453.981.700,00	BPBD
		11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	91,02	Dinas PKP/Dinas LH
		11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen	Belum Ada	BPBD
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Per 100.000 Orang	0,01	BPBD
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	1	Dinas LH

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	SUMBER DATA/OPD PENANGGUNGJAWAB
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	0,01	Dinas Satol PP & Damkar
		16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%	B	Inspektorat
		16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	%	93,19	Dukcapil
		16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Orang	2	Diskomista
		16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Regulasi	Belum Ada	Bagian Hukum Setda
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Rupah	1.049.366.634.082,00	Bapenda

BAB VII P E N U T U P

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2022 merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Barru pada Tahun 2022. RKPD ini akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022. Dalam penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022, pendekatan penyusunan dokumen perencanaan digunakan 5 (lima) pendekatan yaitu Pendekatan Teknokratis, Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, Pendekatan Top-Down, Pendekatan Politis, serta Pendekatan Inovatif, sehingga diharapkan akan dihasilkan dokumen perencanaan yang memenuhi asas akuntabilitas dan kemanfaatannya, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barru pada Tahun 2022.

Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022, diarahkan untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan secara terarah, efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 dengan tetap bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat.
2. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2022 yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022.
3. Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan berbasis pada *e-planning*.
4. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2022 dengan berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah

7. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 bila diperlukan.
8. RKPD Kabupaten barru Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2022.
9. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

7.2 Kesimpulan

1. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2022.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2022 yaitu : **“Peningkatan Kualitas Sumber daya untuk Pertumbuhan Barru yang Mandiri dan Inklusif”** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Barru, 28 Juni 2021

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH